



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

ROAD MAP

PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021-2026



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Ruang Lingkup	8
1.5. Keluaran (Output) yang Diharapkan	9
1.6. Sistematika Laporan Akhir	9
BAB II PROFIL DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	11
2.1 Aspek Geografi Dan Demografi	11
2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi.....	11
2.1.2 Kondisi Geologi dan Struktur Tanah	14
2.1.3 Letak dan Kondisi Geografis.....	17
2.1.4 Kondisi Topografi	19
2.1.5 Kondisi Klimatologi.....	20
2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah.....	21
2.1.7 Kawasan Rawan Bencana.....	28
2.1.8 Kondisi Demografis.....	35
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	39
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	39
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	57
BAB III KONDISI SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa) SAAT INI	68
3.1 Kebijakan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).....	68
3.1.1 Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).....	68
3.1.2 Kebijakan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam Kerangka Perencanaan Pembangunan Daerah.....	69
3.2 Unsur-Unsur Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	88
3.2.1 Kelembagaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	89
3.2.2 Jaringan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).....	107
3.2.3 Sumberdaya Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	107
3.2.4 Pilar Prakarsa Penguatan Sistem Inovasi Daerah.....	114
3.3 Kondisi Daerah Dilihat dari Skenario Penguatan SIDa	118
3.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan	118

3.3.2 Urusan Pertanian	121
3.3.3 Urusan Perindustrian	124
3.3.4 Urusan Pariwisata	126
3.3.5 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	132
3.3.6 Urusan Perhubungan.....	134
3.3.7 Urusan Tenaga Kerja.....	140
3.4 Analisis Strength, Opportunity, Aspiration and Result (SOAR).....	146
BAB IV PELUANG DAN TANTANGAN	148
BAB V KONDISI SIDA YANG AKAN DICAPAI	162
5.1 Tema Dan Sub Tema Pengembangan Dan Penguatan SIDA	162
5.2 Tujuan Pengembangan Dan Penguatan SIDA.....	162
5.3 Sasaran Pengembangan Dan Penguatan SIDA	163
5.4 Target Kinerja SIDA.....	163
5.5 Langkah-Langkah Pencapaian Target Kinerja SIDA.....	178
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	181
BAB VII FOKUS DAN PROGRAM PRIORITAS	183
BAB VIII RENCANA AKSI DAERAH.....	191
BAB IX SISTEM MONITORING DAN EVALUASI	202
9.1 Pengantar.....	202
9.2 Fungsi Dan Tujuan.....	203
9.3 Metode	203
9.4 Pelaksanaan	204
BAB X P E N U T U P	208

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Peta Provinsi Kepulauan Riau	12
Gambar 2. 2	Perbandingan Usai Produktif dan Tidak Produktif Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	38
Gambar 2. 3	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2015-2020.....	50
Gambar 2. 4	Grafik Perkembangan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2016-2020 di Provinsi Kepulauan Riau.....	51
Gambar 2. 5	Tingkat Inflasi Nasional dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020	52
Gambar 2. 6	Perkembangan PDRB Perkapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020 (Ribu Rupiah)	53
Gambar 2. 7	Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Per September Tahun 2016-2020	54
Gambar 2. 8	Perbandingan IPM Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional tahun 2016-2021	58
Gambar 2. 9	IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021.....	59
Gambar 2. 10	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2021.....	60
Gambar 2. 11	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	60
Gambar 2. 12	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2021.....	61
Gambar 2. 13	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	62
Gambar 2. 14	Perkembangan Angka Harapan Hidup Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2021.....	62
Gambar 2. 15	Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 ..	63
Gambar 2. 16	Perkembangan Pengeluaran Riil Perkapita (Daya Beli) Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2021.....	64
Gambar 2. 17	Pengeluaran Riil per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	64
Gambar 2. 18	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2021.....	66
Gambar 2. 19	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	66

Gambar 3. 1	Bagan Susunan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018	69
Gambar 3. 2	Kedudukan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	71
Gambar 3. 3	Skenario Pengembangan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2002-2030	73
Gambar 3. 4	Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025 Dalam RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025	77
Gambar 3. 5	Skenario Penguatan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	88
Gambar 3. 6	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau	108
Gambar 3. 7	Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau	109
Gambar 3. 8	Persebaran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau	109
Gambar 3. 9	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.....	110
Gambar 3. 10	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi dan Golongan Kepangkatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau	110
Gambar 3. 11	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Golongan I/Juru Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau	111
Gambar 3. 12	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Golongan II/Pengatur Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.....	112
Gambar 3. 13	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Golongan III/Penata Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau	113
Gambar 3. 14	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/Pembina Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2017	114
Gambar 3. 15	Perbandingan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap, Produksi Perikanan Budidaya, dan Produksi Olahan Hasil Perikanan (ton) Tahun 2017-2020	118
Gambar 3. 16	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (dalam USD).....	119
Gambar 3. 17	Jumlah Ekspor Ikan Segar Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019	120
Gambar 3. 18	Perbandingan Jumlah Produksi Padi, Palawija, Hortikultura, dan Perkebunan di Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020	123
Gambar 3. 19	Perbandingan Produksi Hasil Produk Peternakan (kg) Tahun 2020	123

Gambar 3. 20	Jumlah Produksi Padi Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020.....	124
Gambar 3. 21	Perbandingan Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara 2014-2020....	126
Gambar 3. 22	Mapping Jumlah Kunjungan Wisatawan Berdasarkan Empat Pintu Masuk 2017-2020	127
Gambar 3. 23	Jumlah Wisatawan Mancanegara melalui Empat Pintu 2015-2020.....	128
Gambar 3. 24	Rata-rata Lama Menginap (hari) Tahun 2016-2020	130
Gambar 3. 25	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020...	143
Gambar 3. 26	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kepulauan Riau, Februari 2018 - Februari 2020.....	144
Gambar 3. 27	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Umur Muda di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020	145
Gambar 5. 1	Fokus Penilaian Radar Inovasi Daerah (RIDa) 2020.....	167

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1	Luas Wilayah Daratan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Permendagri Nomor 56 Tahun 2015.....	12
Tabel II. 2	Luas Wilayah Lautan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Perhitungan	13
Tabel II. 3	Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 berdasarkan Hasil Verifikasi Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.....	14
Tabel II. 4	Persebaran Potensi Sumberdaya Air Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016	16
Tabel II. 5	Letak Astronomis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau	18
Tabel II. 6	Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Hasil Verifikasi Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi Tahun 2016.....	18
Tabel II. 7	Jumlah Pulau Kecil Terluar di Provinsi Kepulauan Riau.....	19
Tabel II. 8	Rata-rata Ketinggian Tempat Menurut Kabupaten/Kota	20
Tabel II. 9	Nama Gunung dan Ketinggiannya Menurut Kabupaten/Kota.....	20
Tabel II. 10	Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun Tahun 2020.....	21
Tabel II. 11	Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kepulauan Riau.....	29
Tabel II. 12	Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Kepulauan Riau.....	29
Tabel II. 13	Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kepulauan Riau	30
Tabel II. 14	Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Riau	31
Tabel II. 15	Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Kepulauan Riau	31
Tabel II. 16	Potensi Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Kepulauan Riau.....	32
Tabel II. 17	Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau	32
Tabel II. 18	Potensi Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Provinsi Kepulauan Riau.....	33
Tabel II. 19	Potensi Bahaya Cuaca Ekstrem di Provinsi Kepulauan Riau	34
Tabel II. 20	Potensi Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit.....	34
Tabel II. 21	Potensi Bahaya Pandemi Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau	35
Tabel II. 22	Indikator Kependudukan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020	36
Tabel II. 23	Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2020	36
Tabel II. 24	Komposisi Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Usia Tahun 2020.....	37
Tabel II. 25	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	38
Tabel II. 26	PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan 2020 dan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020 (Milyar rupiah).....	40

Tabel II. 27	Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Dibandingkan Nasional Tahun 2019-2020.....	41
Tabel II. 28	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2020 dan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau	43
Tabel II. 29	Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020	50
Tabel II. 30	Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau per Maret 2018-2020 ..	54
Tabel II. 31	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	55
Tabel II. 32	Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau September 2015-2021	56
Tabel II. 33	Jumlah Penduduk dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2020.....	57
Tabel II. 34	Jumlah dan Persentase Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, dan Pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020	65
Tabel II. 35	Jumlah dan Persentase Angkatan Kerja dan TPAK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020.....	67
Tabel III. 1	Daftar Perusahaan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Riau	91
Tabel III. 2	Daftar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Di Provinsi Kepulauan Riau.....	104
Tabel III. 3	Kondisi Umum Pilar Prakarsa Penguatan SIDA Provinsi Kepulauan Riau Saat Ini	115
Tabel III. 4	Kondisi Pilar Prakarsa Penguatan SIDA Berkembangnya Klaster Industri Unggulan Daerah (KIUD) Provinsi Kepulauan Riau Saat Ini.....	117
Tabel III. 5	Kondisi Pilar Prakarsa Penguatan SIDA Berkembangnya Jaringan IPTEKIN Provinsi Kepulauan Riau Saat Ini	119
Tabel III. 6	Kondisi Pilar Prakarsa Penguatan SIDA Berkembangnya Bisnis Inovatif Provinsi Kepulauan Riau Saat Ini	120
Tabel III. 7	Kondisi Pilar Prakarsa Penguatan SIDA Berkembangnya Bidang-Bidang IPTEKIN Strategis Daerah Provinsi Kepulauan Riau Saat Ini	122
Tabel III. 8	Nilai Tukar Nelayan Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020.....	120
Tabel III. 9	Kinerja Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	121
Tabel III. 10	Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor dan Subsektor Pertanian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019	122
Tabel III. 11	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020	125
Tabel III. 12	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kepulauan Riau terhadap PDRB.....	126
Tabel III. 13	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020	131

Tabel III. 14	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Jalan Berkondisi Baik Dari Tahun 2015 - 2020.....	133
Tabel III. 15	Realisasi Indikator Kinerja Konektivitas Tahun 2015 - 2020 per Kabupaten/Kota	134
Tabel III. 16	Data Lokasi dan Rencana Lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi Kepulauan Riau	135
Tabel III. 17	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2020	135
Tabel III. 18	Jumlah Ijin Trayek dikeluarkan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2020	136
Tabel III. 19	Jumlah Barang Terangkut oleh Angkutan Umum di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2020.....	137
Tabel III. 20	Jumlah Bandara dan Ketersediaan Prasarana Sisi Darat di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2020	137
Tabel III. 21	Kondisi Fasilitas Alat Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	138
Tabel III. 22	Jumlah Bandar Udara/Pelabuhan/Terminal Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020	139
Tabel III. 23	Jumlah Armada Angkutan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020	139
Tabel III. 24	Jumlah Trayek Angkutan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020..	139
Tabel III. 25	Jumlah Arus Barang Angkutan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020	140
Tabel III. 26	Jumlah Pendapatan Retribusi Bidang Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau.	140
Tabel III. 27	Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020	141
Tabel III. 28	Jumlah dan Persentase Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, dan Pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020	142
Tabel III. 29	Jumlah dan Persentase Angkatan Kerja dan TPAK Provinsi Kepulauan Riau..	142
Tabel III. 30	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	143
Tabel III. 31	Analisis SOAR Dalam Penguatan SIDA, Berdasarkan Hasil Desk	146
Tabel V. 1	Tujuan Pengembangan dan Penguatan SIDA Provinsi Kepulauan Riau.....	163
Tabel V. 2	Sasaran Pengembangan dan Penguatan SIDA Provinsi Kepulauan Riau	163
Tabel V. 3	Target Kinerja SIDA Yang Akan Dicapai Berdasarkan Sub Tema, Tujuan, dan Sasaran Pengembangan dan Penguatan SIDA Provinsi Kepulauan Riau	164
Tabel V. 4	Forum Inovasi Daerah Pengembangan dan Penguatan SIDA Provinsi Kepulauan Riau.....	178

Tabel V. 5	Jejaring Inovasi Daerah Pengembangan dan Penguatan SIDA Provinsi Kepulauan Riau.....	180
Tabel VII. 1	Fokus dan Program Prioritas menurut Strategi dan Arah Kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.....	184
Tabel VIII. 1	Rencana Aksi Daerah Penguatan SIDA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	192
Tabel IX. 1	Keterkaitan Unsur Dalam Sida Dengan Standar yang Harus Dilakukan Dalam Pelaksanaan SIDA	204

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan sistem inovasi nasional merupakan agenda nasional, hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Presiden Republik Indonesia Jokowi dalam beberapa kesempatan juga telah menyampaikan bahwa inovasi harus dijadikan sebagai suatu rutinitas/ budaya demi tercapainya target Negara. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 3 Tahun 2012 dan No 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) menyatakan bahwa Pemerintah menyikapi tuntutan peningkatan produktivitas daya saing nasional maupun daerah yang mensyaratkan inovatif melalui strategi dan program yang terarah dan dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi.

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Bersama tersebut yang dimaksud Sistem Inovasi Daerah atau disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Peraturan Bersama mengamanatkan bahwa setiap Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan SIDa, yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selain itu, SIDa juga berfungsi sebagai salah satu dokumen yang menjabarkan secara lebih detail arah pembangunan daerah dalam hal pengembangan potensi-potensi lokal dengan mengutamakan penumbuhkembangan inovasi oleh institusi-institusi pemerintah daerah baik secara sektoral maupun lintas sektor, oleh lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha serta masyarakat di daerah. Harapannya, potensi-potensi lokal dapat diidentifikasi untuk selanjutnya, dengan memperhatikan arah pembangunan yang telah direncanakan pada level pemerintahan yang lebih atas, potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan secara inovatif untuk memperoleh outcome yang optimal.

Pada dasarnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan agenda nasional sesuai dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017–2045, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2017 tentang Inovasi Daerah dalam melaksanakan inovasi daerah yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan para pemangku kepentingan berkomitmen dan bercita-cita untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang ada dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Hal ini digambarkan secara ringkas dalam visi dan misi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau untuk jangka panjang maupun menengah. Selanjutnya dengan visi dan misi tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya untuk meningkatkan berbagai aspek pembangunan secara seimbang dan berkelanjutan sehingga akan tercipta masyarakat yang sejahtera.

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau perodesasi Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode pematangan diantara tahun 2015-2025 dalam RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025, dimana Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025 yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 adalah “Kepulauan Riau Berbudaya, Maju dan Sejahtera”. Tema pembangunan RPJPD periode ini menjadi salah satu rujukan kepala daerah dalam menyusun Visi dan Misi Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2021-2026. Visi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 berdasarkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau terpilih adalah:

“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026, yaitu:

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.
2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Takwa.
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan.

Untuk mengidentifikasi pengembangan inovasi dan iptek baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun akan terjadi dibutuhkan suatu penyusunan kerangka kerja strategis yang dituangkan dalam bentuk Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang menjabarkan arah pembangunan daerah dalam mencapai Visi dan Misi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, dimana penyusunannya mengacu pada Peraturan

Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Substansi dokumen Road Map dikembangkan dari pemaknaan Visi dan Misi ke dalam tema prioritas yang memiliki daya ungkit terbesar dan mencerminkan keunggulan daerah saat ini dan masa depan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2018 telah menyusun Roadmap Pengembangan dan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2021, dimana relatif seluruh Kerangka Kerja Inovasi (KKI) Penguatan SIDa ditargetkan telah terimplementasikan. Selanjutnya, dalam rangka penjabaran pengembangan inovasi untuk pencapaian Visi dan Misi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 pada Tahun Anggaran 2021 sehingga disusun Roadmap Penguatan SIDa Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dengan melibatkan seluruh stakeholders terkait yang disinkronisasikan dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan Renstra OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan Road Map Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam

- Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
27. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
30. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Kawasan Sains Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 243);
31. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
33. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2012 dan Nomor 36 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
34. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1247);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
43. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7);
45. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);

46. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3);
47. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
48. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 781).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari kegiatan Penyusunan Dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah agar perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau dan para pemangku kepentingan dapat memahami arah, prioritas serta kerangka kebijakan dalam mengembangkan Sistem Inovasi Daerah dan daya saing Provinsi Kepulauan Riau dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

2. Tujuan

Tujuan kegiatan Penyusunan Dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau ini adalah untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan, dan program prioritas Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Kepulauan Riau.

1.4. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup wilayah

Ruang lingkup wilayah Penyusunan Dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau meliputi seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

2. Ruang lingkup materi

Ruang lingkup materi Penyusunan Dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau meliputi:

- 1) Identifikasi potensi dan permasalahan pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Kepulauan Riau.
- 2) Menyusun rancangan tema Road Map Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.
- 3) Analisis kondisi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Provinsi Kepulauan Riau saat ini.

- 4) Analisis tantangan dan peluang penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Kepulauan Riau.
- 5) Perumusan kondisi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Kepulauan Riau yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun yang akan datang.
- 6) Perumusan tujuan dan sasaran Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Kepulauan Riau.
- 7) Perumusan strategi dan arah kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Kepulauan Riau.
- 8) Perumusan fokus dan program prioritas Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Kepulauan Riau.
- 9) Perumusan indikator kinerja Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Kepulauan Riau.
- 10) Perumusan rancangan rencana aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Kepulauan Riau.

1.5. Keluaran (Output) yang Diharapkan

Keluaran/output Penyusunan Dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah:

1. Rumusan strategi dan arah kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Kepulauan Riau.
2. Rumusan program prioritas Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Kepulauan Riau.
3. Rumusan indikator kinerja Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Kepulauan Riau.
4. Rumusan rancangan rencana aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Kepulauan Riau.

1.6. Sistematika Laporan Akhir

Sistematika laporan akhir Penyusunan Dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah:

- BAB I PENDAHULUAN**, memuat tentang latar belakang, dasar hukum dan peraturan perundangan yang relevan, maksud dan tujuan penyusunan, sasaran, ruang lingkup, dan sistematika laporan.
- BAB II PROFIL DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**, memuat tentang aspek geografi dan demografi dan aspek kesejahteraan masyarakat,
- BAB III KONDISI SIDa SAAT INI**, memuat tentang kebijakan dan unsur-unsur SIDa saat ini, serta kondisi terkini indikator makro.

- BAB IV TANTANGAN DAN PELUANG**, memuat tentang tantangan dan peluang Penguatan SIDA.
- BAB V KONDISI SIDA YANG AKAN DICAPAI**, memuat tentang tema, sub tema, tujuan dan sasaran penguatan SIDA, target kinerja SIDA dan langkah-langkah pencapaian target kinerja SIDA.
- BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**, memuat tentang strategi dan arah kebijakan penguatan SIDA.
- BAB VII FOKUS DAN PROGRAM PRIORITAS**, memuat tentang fokus dan program prioritas penguatan SIDA.
- BAB VIII RENCANA AKSI DAERAH**, memuat tentang rencana program prioritas penguatan SIDA tahun 2021 hingga tahun 2026.
- BAB IX SISTEM MONITORING DAN EVALUASI**, memuat tentang sistem monitoring dan evaluasi penguatan SIDA.
- BAB X PENUTUP**, memuat tentang kaidah pelaksanaan penguatan SIDA.

BAB II

PROFIL DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2.1 Aspek Geografi Dan Demografi

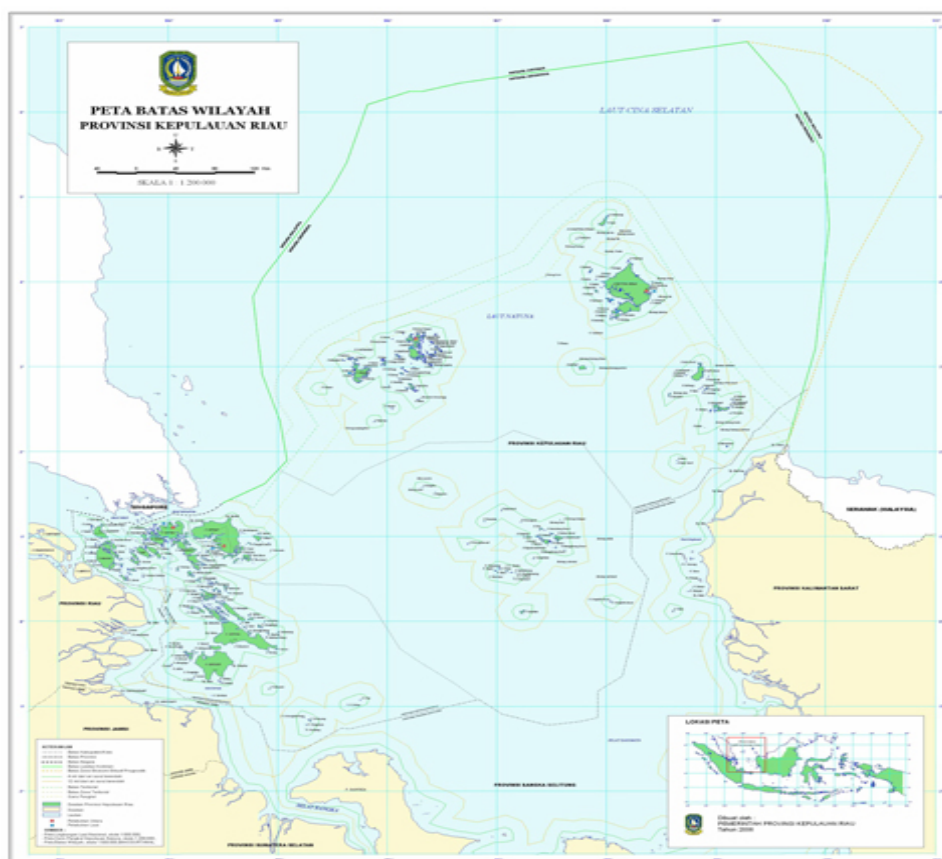
2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi ke 32 di Indonesia yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Cina Selatan
- Sebelah Timur : Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
- Sebelah Selatan : Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi
- Sebelah Barat : Negara Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau

Batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2037 adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Negara Vietnam dan Negara Kamboja
- Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
- Sebelah Selatan : Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi
- Sebelah Barat : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau



Gambar 2. 1
Peta Provinsi Kepulauan Riau

Secara administratif, Provinsi Kepulauan Riau memiliki dua kota yaitu Kota Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi dan Kota Batam, serta memiliki lima kabupaten, yaitu: Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan terakhir dengan perubahan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015, luas daratan Provinsi Kepulauan Riau seluas 8.201,72 km², dengan rincian pada Tabel II.1 :

Tabel II. 1
Luas Wilayah Daratan Provinsi Kepulauan Riau
Menurut Permendagri Nomor 56 Tahun 2015

No.	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km ²)	Dalam Persen
1.	Kabupaten Karimun	912,75	11,13
2.	Kabupaten Bintan	1.318,21	16,07
3.	Kabupaten Natuna	2.009,04	24,50
4.	Kabupaten Lingga	2.266,77	27,64
5.	Kabupaten Kepulauan Anambas	590,14	7,20
6.	Kota Batam	960,25	11,71
7.	Kota Tanjungpinang	144,56	1,76
	Total	8.201,72	100,00

Sumber: Permendagri Nomor 56 Tahun 2015

Terkait dengan luas wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hitungan teknis dari Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007 (dengan mengabaikan batas wilayah kewenangan pengelolaan sejauh 12 mil laut), luas laut Provinsi Kepulauan Riau sebesar 417.012,97 km². Sampai saat ini belum ada penetapan luas wilayah laut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Berikut ini disajikan rincian luas laut menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007.

Tabel II. 2
Luas Wilayah Lautan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Perhitungan
Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007

No.	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah Laut (km ²)	Dalam Persen
1	Kabupaten Karimun	4.698,09	1,13
2	Kabupaten Bintan	102.964,08	24,69
3	Kabupaten Natuna	216.113,42	51,82
4	Kabupaten Lingga	43.339,00	10,39
5	Kabupaten Kep. Anambas	46.074,00	11,05
6	Kota Batam	3.675,25	0,88
7	Kota Tanjungpinang	149,13	0,04
	Total	417.012,97	100,00

Sumber: Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007

Setelah terbitnya Undang-Undang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2002, Markas Besar TNI Angkatan Laut Dinas Hidro Oseanografi mengeluarkan rekapitulasi data jumlah pulau dimana Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2.408 buah pulau dengan jumlah yang bernama 1.350 pulau dan belum bernama sebanyak 1.058 pulau. Pada tahun 2007 dilakukan verifikasi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (Depdagri, Bakosurtanal, Departemen Kelautan dan Perikanan, Dishidros dan Pusat Bahasa) yang bertujuan untuk identifikasi data pulau-pulau yang belum bernama dan sudah bernama di masing-masing Provinsi Kepulauan Riau dengan dasar pengertian "Pulau" menurut UNCLOS 1982 adalah suatu area daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi air dan selalu berada di atas air pada saat air pasang. Adapun hasil Verifikasi Tim Nasional dimaksud terdapat 1.795 pulau yang sudah bernama. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala, maka pulau Provinsi Kepulauan Riau bertambah 1 (satu) buah menjadi 1.796 pulau, dengan perincian terlihat pada Tabel II.3.

Tabel II. 3
Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 berdasarkan Hasil Verifikasi Tim Nasional
Pembakuan Nama Rupabumi

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pulau	Berpenghuni
1	Kota Tanjungpinang	9	2
2	Kabupaten Bintan	241	48
3	Kota Batam	371	133
4	Kabupaten Karimun	251	73
5	Kabupaten Lingga	532	76
6	Kabupaten Natuna	392	62
Jumlah		1.796	394
Catatan: Data Pulau di Kabupaten Anambas masih bergabung dengan Natuna			

Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG), 2016

2.1.2 Kondisi Geologi dan Struktur Tanah

Berdasarkan kondisi geomorfologinya, Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian kontinental yang terkenal dengan nama "paparan sunda" atau bagian dari kerak Benua Asia. Batuan-batuan yang terdapat di Kepulauan Riau diantaranya adalah batuan ubahan seperti mika geneis, meta batulanau, batuan gunung api seperti tuf, tuf litik, batupasir tufan yang tersebar di bagian timur Kepulauan Riau, batuan terobosan seperti granit muskovit dapat dijumpai di Pulau Kundur bagian timur, batuan sedimen seperti serpih batu pasir, metagabro, yang tersebar di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Buru. Juga terdapat batuan aluvium tua terdiri dari lempung, pasir kerikil, dan batuan aluvium muda seperti lumpur, lanau dan kerakal.

Geomorfologi Pulau Kundur dan Pulau Karimun Besar terdiri dari perbukitan dan dataran, dengan pola aliran sungai radial hingga dendritik yang dikontrol oleh morfologi bukit granit yang homogen. Struktur geologi berupa sesar normal dengan arah barat-timur atau barat daya-timur laut. Geomorfologi Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang berupa perbukitan memanjang dengan arah barat laut-tenggara dan sebagian kecil dataran yang terletak di bagian kakinya. Geomorfologi Pulau Bintan berupa perbukitan granit yang terletak di bagian selatan pulau dan dataran yang terletak di bagian kaki. Struktur geologi sesar Pulau Bintan dominan berarah barat laut-tenggara dan barat daya-timur laut, beberapa ada yang berarah utara-selatan atau barat-timur.

Pulau-pulau kecil di sebelah timur dan tenggara Pulau Bintan juga disusun oleh granit berumur Trias (Trg) sebagai penghasil bauksit. Geomorfologi Pulau Lingga berupa perbukitan dengan puncak Gunung Lingga, membentang dengan arah barat laut-tenggara dan dataran yang menempati di bagian kaki, dengan pola aliran sungai trellis hingga sejajar. Demikian juga geomorfologi Pulau Selayar dan Pulau Sebangka berupa perbukitan yang membentang dengan arah barat laut-tenggara dan dataran di bagian kakinya, pola aliran sungai adalah trellis yang dikontrol oleh struktur geologi yang berupa perlipatan dengan sumbu memanjang barat laut-tenggara dan arah patahan utara-selatan. Stratigrafi keempat pulau ini tersusun oleh

Formasi Pancur (Ksp) yang terdiri dari serpih kemerahan dan urat kwarsa, sisipan batupasir kwarsa dan konglomerat polemik.

Geomorfologi Pulau Singkep selain terdiri dari Formasi Pancur dan Formasi Semarang juga terdapat granit (Trg) yang mendasari kedua formasi di atas dan menjadi penghasil timah atau bauksit. Geomorfologi Pulau Bunguran berupa perbukitan yang membujur dari tenggara barat laut dengan puncak Gunung Ranai dan dataran yang menempati bagian barat dari Pulau Bunguran. Pola aliran sungai adalah radial hingga dendritik di sekitar Gunung Ranai, sedangkan ke arah barat laut berubah menjadi pola aliran trellis.

Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tiga pulau yang relatif besar yaitu Pulau Matak, Pulau Siantan dan Pulau Jemala. Ketiga pulau tersebut disusun oleh granit Anambas (Kag) yang tersusun oleh granit, granodiorit dan syenit. Batuan granit Anambas (Kag) ini menerobos batuan mafik dan ultramafik (Jmu) yang terdiri dari diorit, andesit, gabro, gabro porfir, diabas dan basalt, bersisipan rijang-radiolaria. Pola struktur sesar dominan berarah barat laut-tenggara dan sedikit berarah utara-selatan hingga barat daya- timur laut seperti di Pulau Jemaja. Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai potensi tambang granit, sedangkan Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan cekungan tersier yang kaya minyak dan gas bumi yaitu Cekungan Natuna Barat yang masuk wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Cekungan Natuna Timur yang masuk wilayah Kabupaten Natuna.

Tekstur tanah di Provinsi Kepulauan Riau dibedakan menjadi tekstur halus (liat), tekstur sedang (lempung) dan tekstur kasar, sedangkan jenis tanahnya, sedikitnya memiliki 5 macam jenis tanah yang terdiri dari *organosol*, *glei* humus, *podsolik* merah kuning, *latosol* dan *aluvial*. Jenis tanah *Organosol* dan *glei* humus merupakan segolongan tanah yang tersusun dari bahan organik, atau campuran bahan mineral dan bahan organik dengan ketebalan minimum 50 cm dan mengandung paling sedikit 30% bahan organik bila liat atau 20% bila berpasir. Kepadatan atau *bulkdensity* kurang dari 0,6 dan selalu jenuh. Lapisan tanah *Organosol* tersebar di beberapa pulau Kecamatan Moro (Kabupaten Karimun), Kabupaten Natuna, Pulau Rempang dan Pulau Galang.

Jenis lainnya adalah tanah *Latosol*, dijumpai di Kabupaten Natuna, Pulau Karimun, Pulau Kundur dan beberapa pulau di Kecamatan Moro. Sementara tanah *Aluvial* yang belum mempunyai perkembangan, dangkal sampai yang berlapis dalam, berwarna kelabu, kekuningan, kecokelatan, mengandung glei dan bertotol kuning, merah dan cokelat. Tekstur bervariasi dari lempung hingga tanah tambahan yang banyak mengandung bahan-bahan organik. Tanah ini terdapat di Pulau Karimun, Pulau Kundur dan pulau-pulau lainnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Kondisi hidrologi di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari dua jenis, yaitu air permukaan dan air bawah tanah (hidrogeologi). Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih,

dapat diperoleh dari air permukaan berupa air sungai, mata air/air terjun, waduk, dan kolong, sedangkan air bawah tanah (hidrogeologi) didapat dengan menggali sumur dangkal. Kolong merupakan kolam bekas tambang bauksit, timah dan pasir yang terbentuk akibat eksploitasi yang dapat digunakan sebagai sumber air bersih, juga dimanfaatkan sebagai kawasan pariwisata.

Daerah Aliran Sungai mencakup sebanyak tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Lingga. Mata air sebagai sumber air permukaan terdapat di lima kabupaten/kota yaitu Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas, Bintan, Tanjungpinang dan Lingga. DAM/Waduk tersebar di seluruh kabupaten/kota. Beberapa DAM/Waduk/Embung yang direncanakan dibangun pada yaitu Sei Raya, Sei Galang Utara, Galang Timur, Sei Ta'tas dan Sei Curus di Kota Batam, dan DAM/Waduk/Embung Dompok di Kota Tanjungpinang. Sementara itu Kolong terdapat di tiga kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga. Secara rinci data mengenai potensi sumberdaya air di Kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel II.4.

Tabel II. 4
Persebaran Potensi Sumberdaya Air Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016

No	Kabupaten / Kota	Daerah Aliran Sungai	Mata Air	DAM/Waduk/ Embung	Kolong
1	Batam	Terong, Gading, Ladi, Pesung, Bukit Jodoh, Tiban Lama, Tiban Lama, Balo, Nongsa, Gata, Medang, Galang Baru, Galang, Kangka, Sembulang, Abang Besar	-	Duriangkang, Muka Kuning, Sei Ladi, Nongsa, Sei Harapan, Rempang, Sekanak I, Sekanak 2, Sei Tembesi, Rempang Utara, Sei Gong, Sei Raya, Sei Galang Utara, Galang Timur, Sei Ta'tas dan Sei Curus	-
2	Natuna	Midai, Kampung Hilir, Pajang, Serasan, Lagong, Batang, Tiga Sedanau, Selor, Segeram, Kelarik, Cinak, Cinak Besar, Kelarik Hulu, Hulu, Bunguran Timur, Binjai.	Nuraja, dan Gunung Datuk	Balau Sedanau, Ranai Darat, Selat Lampa, Kelarik, Tapau, Sebayar.	-
3	Kepulauan Anambas	Air Abu, Nyamuk, Telaga, Siantan, Batu Belah, Air Asuk, Wampu, Ladan, Mubur, Matak, Anambas, Panai	Tarempa, Temurun, Gunung Bini, dan Gunung Kesayana	Batu Tambun, Gunung Lintang, Batu Tabir, dan Gunung Samak	-
4	Bintan	Logo, Ekang, Bintan, Cikolek, Sumpai, Angus, Sopor, Mapor, Katubi, Pengibu, Tambelan, Benuwa, Tambang Besar.	Gunung Lengkuas	Waduk Tanjung Uban/Sei Jeram, Waduk Sei Jago, Waduk Lagoi, Waduk Gesek, Kolong Enam, Busung, Galang	Danau Kolong Gunung Kijang, Danau Belakang Mesjid Raya, Ex. Galian Pasir Galang

No	Kabupaten / Kota	Daerah Aliran Sungai	Mata Air	DAM/Waduk/ Embung	Kolong
				Batang, Kawal, Anculai, Kangboi, dan Sekuning	Batang, Ex. Galian Pasir Simpang Busung, Ex. Galian Pasir Pengujan, Bloreng, Katen, Nyirih, Tembeling dan Mantang
5	Karimun	Gemuruh, Urung, Ungar, Sawang, Teluk Radang, Bela, Rapit, Papan, Buru, Lebu, Pau, Durian, Tjitim, Sebesi, Karimun, Moro, Sugi, Combol, Alai, Sanglar, Durai, Terong	-	Waduk Sei Bati, Pongkar 1, Pongkar 2, Sentani, Paya Manggis, Sei Gunung Jantan (Pulau Karimun Besar), Waduk Tempan, Sawang (Pulau Kundur) dan Waduk Sidodadi, Sidomoro (Pulau Moro)	Ex. Galian Timah Perayon, Ex. Galian Pasir Kobel, Galian Pasir Tempan
6	Tanjungpinang	Dompok, Jang	Hutan Lindung (Pancur)	Waduk Sei Pulau, Sei Timun, Dompok	-
7	Lingga	Durslin, Selamak, Musal, Pengok, Sekarim, Buluh, Bidai, Posik, Mamut, Tjempah, Mentuda, Telok, Ketam, Canot, Selapan, Jelutung, Kredong, Awak, Duara, Resun, Tembok, Kerasing, Lieng, Dabo, Sergong, Kumbang, Langkap, Maroktua, Bajau, Ara, Temiang, Sebangka, Penuba, Air Merah	Gunung Daik, Gunung Muncung, Batu Ampar, Kampung Menserai, dan Kampung Tanjung Tinggi	Gemuruh	Ex. Galian Timah Singkep

Sumber: Kepmen PU No. 4/PRT/M/2015; BWSS IV Kepulauan Riau dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau, 2016

2.1.3 Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Klarifikasi Data Geografis Kabupaten/Kota, dengan mengambil data dari interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, letak astronomis kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau terlihat pada Tabel II.5.

Tabel II. 5
Letak Astronomis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

No.	Kabupaten/Kota	Lintang	Bujur
1.	Karimun	1°01'58,93" LU	103°22' 32,84" BT
2.	Bintan	1°05'03,94" LU	104°28' 56,23" BT
3.	Natuna	3°56'28,62" LU	108°22' 38,53" BT
4.	Lingga	0°12'36,24" LU	104°36' 18,79" BT
5.	Anambas	3°12'54,00" LU	106°13' 04,80" BT
6.	Batam	1°07'40,01" LU	104°03' 18,84" BT
7.	Tanjungpinang	0°57'56,48" LU	104°26' 27,62" BT

Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG), 2016

Setelah terbitnya Undang–Undang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2002, Markas Besar TNI Angkatan Laut Dinas Hidro Oseanografi mengeluarkan rekapitulasi data jumlah pulau dimana Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2.408 buah pulau dengan jumlah yang bernama 1.350 pulau dan belum bernama sebanyak 1.058 pulau. Pada tahun 2007 dilakukan verifikasi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (Depdagri, Bakosurtanal, Departemen Kelautan dan Perikanan, Dishidros dan Pusat Bahasa) yang bertujuan untuk identifikasi data pulau-pulau yang belum bernama dan sudah bernama di masing-masing Provinsi Kepulauan Riau dengan dasar pengertian “Pulau” menurut UNCLOS 1982 adalah suatu area daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi air dan selalu berada diatas air pada saat air pasang. Adapun hasil Verifikasi Tim Nasional dimaksud terdapat 1.795 pulau yang sudah bernama, kecuali satu pulau yaitu Pulau Berhala dimana saat itu masih dalam sengketa dengan Provinsi Jambi. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2014 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala, maka pulau Provinsi Kepulauan Riau bertambah 1 (satu) buah menjadi 1.796 pulau, dengan perincian terlihat pada Tabel II.6.

Tabel II. 6
Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Hasil Verifikasi Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi Tahun 2016

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pulau	Jumlah Pulau Berpenduduk
1	Kota Batam	371	133
2	Kota Tanjungpinang	9	2
3	Kabupaten Bintan	241	48
4	Kabupaten Karimun	251	73
5	Kabupaten Natuna	392	62
6	Kabupaten Lingga	532	76
	Jumlah	1.796	394

Catatan: Data Pulau di Kabupaten Anambas masih bergabung dengan Natuna

Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG), 2016

Di samping itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Provinsi Kepulauan Riau memiliki 22 pulau-pulau kecil terluar (lihat Tabel II.7).

Tabel II. 7
Jumlah Pulau Kecil Terluar di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pulau	Nama Pulau
1.	Kabupaten Bintan	4	Pulau Berakit, Pulau Sentut, Pulau Bintan, Pulau Malang Berdaun
2	Kota Batam	4	Pulau Nipah, Pulau Pelampung, Pulau Batu Berantai, Pulau Putri
3.	Kabupaten Karimun	2	Pulau Tokong Hiu Kecil, Pulau Karimun Anak,
4.	Kabupaten Natuna	7	Pulau Tokong Boro, Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senoa, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala,
5.	Kabupaten Kepulauan Anambas	5	Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, Pulau Tokong Belayar,

Sumber: Kepres Nomor 6 Tahun 2017

2.1.4 Kondisi Topografi

Topografi wilayah Provinsi Kepulauan Riau terbagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut.

1. Wilayah Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera

Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera tersebar di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kota Batam, ketinggiannya wilayah bervariasi antara 0 – 50 meter dpl, 50 – 200 m (paling dominan) dan di atas 200 meter, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Lingga (1.163 meter dpl). Kemiringan lereng yang dominan adalah 15 – 25% pada wilayah perbukitan, serta 25 – 40% dan di atas 40% pada wilayah pegunungan.

2. Wilayah Pulau-pulau di sebelah Timur Jauh

Pulau-pulau ini terletak di wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas pada perbatasan Laut Cina Selatan, seperti Pulau Anambas, Pulau Jemaja, Pulau Bunguran, Pulau Tambelan dan lain-lain. Kondisi morfologi, ketinggian dan kemiringan lereng wilayah secara umum menunjukkan kesamaan dengan pulau-pulau di Kabupaten Bintan, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Ranai (1.035 meter dpl).

3. Wilayah Pulau-pulau di Bagian Tenggara dari Kepulauan Lingga-Singkep

Pulau-pulau ini membentuk jajaran sesuai arah struktur utama geologi di Kepulauan Riau berarah Barat Laut Tenggara. Kelompok pulau ini merupakan relik morfologi tua dengan topografi berupa bukit dan gunung.

4. Kelompok Pulau Batam, Rempang dan Galang

Gugusan pulau ini ditandai oleh bentang alam bergelombang sebagai sisa morfologi tua paparan tepian Benua Sunda.

Mengenai Ketinggian wilayah menurut kabupaten/kota sesuai dengan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Klarifikasi Data Geografis Kabupaten/Kota, dengan mengambil data dari interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI)

skala 1 : 50.000 posisi depan kantor pemerintah daerah (surat terlampir), diperoleh hasil dengan rincian terlihat pada Tabel II.8.

Tabel II. 8
Rata-rata Ketinggian Tempat Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Tinggi (m DPL)
1	Karimun	5 m
2	Bintan	6 m
3	Natuna	14 m
4	Lingga	6 m
5	Kepulauan Anambas	6 m
6	Batam	8 m
7	Tanjungpinang	65 m

Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG), 2016

Di Provinsi Kepulauan Riau juga terdapat sebanyak 15 gunung dengan ketinggian bervariasi, tertinggi Gunung Daik di Kabupaten Lingga setinggi 1.272 m, selanjutnya Gunung Ranai setinggi 959 m di Kabupaten Natuna, kemudian Gunung Sepincan di Kabupaten Lingga setinggi 800 m. Secara rinci data nama gunung dan ketinggiannya dapat dilihat pada Tabel II.9.

Tabel II. 9
Nama Gunung dan Ketinggiannya Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Nama Gunung	Tinggi (m)
1	Karimun	Gunung Jantan	478
2	Bintan	Gunung Bintan	380
3	Natuna	Gunung Ranai	959
		Gunung Datuk	510
		Gunung Tukong	477
		Gunung Selasih	387
		Gunung Lintang	610
		Gunung Daik	1.272
4	Lingga	Gunung Sepincan	800
		Gunung Tanda	343
		Gunung Lanjut	519
		Gunung Muncung	415
		Gunung Punjang	443
5	Kepulauan Anambas	Gunung Kute	232
		Gunung Pelawan Condong	405

Sumber: Biro Administrasi Pemerintahan (Kepulauan Riau Dalam Angka 2017)

2.1.5 Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim di Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi angin sehingga secara umum wilayah ini beriklim laut tropis basah. Terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Suhu rata-rata tertinggi di Karimun sebesar 28,80C dan rata-rata terendah di Dabo (Lingga) 26,80C. Rata-rata Kelembaban

Udara tertinggi di Bintan, Dabo (Lingga) dan Ranai (Natuna) sebesar 86%, sedangkan rata-rata terendah di Hang Nadim (Batam) dan Karimun sebesar 82%. Jumlah hari hujan tertinggi di Batam sebanyak 233 hari sedangkan hari hujan terendah di Tarempa (Kepulauan Anambas) 182 hari. Tekanan udara tertinggi di Hang Nadim (Batam) sebesar 1.011,6 mb, sedangkan tekanan udara terendah di Karimun sebesar 1.009,3 mb. Kecepatan angin tertinggi di Hang Nadim (Batam) sebesar 3,0 knot, terendah di Kepulauan Anambas sebesar 1,0 knot. Penyinaran matahari tertinggi di Kepulauan Anambas sebesar 65%, terendah di Karimun sebesar 39%.

Secara rinci data kondisi cuaca yang tercatat di 7 stasiun BMKG di Provinsi Kepulauan Riau ditampilkan pada Tabel II.10.

Tabel II. 10
Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun Tahun 2020

No	Uraian	Karimun	Ranai (Natuna)	Dabo (Lingga)	Terempa (Kepulauan Anambas)	Hang Nadim (Batam)	Tanjung pinang	Bintan
1	Suhu (°C)							
	Maksimum	34,7	34,9	31,5	36,1	35,3	36,1	33,9
	Minimum	21,6	22,0	23,8	21,0	20,7	21,0	21,9
	Rata-Rata	28,8	27,9	26,8	28,28	28,08	28,28	27,1
2	Kelembaban Udara (persen)							
	Maksimum	100	98	93	100	100	100	98
	Minimum	44	58	75	45	46	45	75
	Rata-Rata	82	86	86	83	82	83	86
3	Tekanan Udara (mb)	1009,3	1010,4	1010,1	1009,9	1011,6	1009,9	1011,0
4	Kecepatan Angin (knot)	2,0	2,0	2,0	1,0	3,0	1,0	2,0
5	Curah Hujan (mm ³)	203	213	227	182	233	182	210
6	Penyinaran Matahari (persen)	39	65	51	52	42	52	50

Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BPS, Kepulauan Riau Dalam Angka 2021)

2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 76/MenLHK-II/2015 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 207.569 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 60.299 Hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 536 Hektar di Provinsi Kepulauan Riau, dengan Rincian Kawasan Hutan

Produksi terbagi menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) 79.259 hektar, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 120.490 Hektar, Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas 74.367 Hektar.

Namun di tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Kepmen Nomor: SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung di Pulau Batam Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 330 Hektar dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Kawasan Taman Buru Pulau Rempang Seluas \pm 7.560 Hektar menjadi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi.

Dengan diterbitkannya SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018 tersebut terdapat perubahan luasan Kawasan Hutan Produksi Konversi menjadi (HPK) seluas 81.927 ha. Selain itu kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis (DPCLS) seluas 16.012 hektar dengan perhitungan setelah diterbitkannya SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Rencana kawasan peruntukan pertanian di Provinsi Kepulauan Riau seluas 221.707 Ha. Kawasan pertanian ini terdiri dari kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Pengembangan Kawasan Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dialokasikan di Kabupaten Lingga sebagai sentra pengembangan sektor pertanian dan Kabupaten Bintan. Pemanfaatan kawasan pertanian ditujukan untuk pemanfaatan potensi dan berdasarkan kesesuaian lahan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan berorientasi agribisnis pertanian.

Sementara itu kawasan peternakan dibagi berdasarkan peruntukan skala agribisnis dan skala peternakan rakyat (*backyard farming*). Untuk kawasan agribisnis diprioritaskan pada Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan serta beberapa pulau yang memiliki potensi dan kesesuaian dari aspek daya dukung lahan dan agroklimat. Khusus untuk Kota Batam, kawasan peternakan dikembangkan pada daerah *hinterland*. Sedangkan pengembangan sub sistem hilir peternakan diarahkan di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

3. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas Kawasan Perikanan Tangkap dan Kawasan perikanan budidaya. Kawasan perikanan tangkap merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau

mengawetkannya. Potensi perikanan tangkap tersebar di seluruh wilayah laut dan perairan umum Provinsi Kepulauan Riau.

Rencana pengembangan perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau yaitu tersebar pada seluruh wilayah pesisir dan kelautan Provinsi Kepulauan Riau terutama pada kawasan perikanan tangkap yang potensial dan tidak melanggar batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang berada di wilayah perbatasan dengan negara lain.

Wilayah pengelolaan perikanan yang ada sudah termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan (WPP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Pemanfaatan potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau terkendala arah angin utara selama tiga bulan dalam setahun terjadi sehingga nelayan berhenti melaut.

Potensi perikanan berupa ikan kecil (pelagis) dengan potensi sekitar 513.000 ton namun pemanfaatannya baru sekitar 65%. Ikan demersal potensi 656.000 ton baru dimanfaatkan 75%. Lobster dan cumi-cumi dengan potensi masing-masing 400 ton dan 2.700 ton. Ikan karang dan ikan hias dengan potensi 27.600 ton dan 293.600 ton, dimana yang baru dimanfaatkan pada tahun 2008 tercatat 225.439 ton atau sebesar 97,23%.

Kawasan perikanan budidaya merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. Pengembangan perikanan budidaya yang meliputi usaha pembenihan sampai pemanfaatan teknologi budidaya sangat cocok di provinsi ini. Potensi perikanan budidaya yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau meliputi budidaya laut seluas lebih kurang 435.000 ha, rumput laut lebih kurang 38.520 ha, tambak seluas lebih kurang 4.948 ha.

4. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan, baik wilayah yang sedang/sudah/belum dikerjakan kegiatan pertambangan dan sudah ditetapkan dalam Perencanaan Wilayah Pertambangan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Rencana kawasan peruntukan pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau seluas 12.343 Ha. Potensi pertambangan yang ada di provinsi Kepulauan Riau berupa batu granit di wilayah Karimun, Bintan, Lingga dan Kepulauan Anambas; Pasir di wilayah Karimun, Bintan, Batam dan Lingga; Timah di wilayah Karimun dan Lingga; Bauksit di wilayah Karimun, Bintan, dan Lingga, Biji Besi di wilayah Karimun, Lingga dan Kepulauan Anambas, Minyak dan Gas di wilayah Natuna dan Kepulauan Anambas, serta potensi galian tambang lainnya.

5. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi pemusatan kegiatan industri. Kawasan ini berbasiskan potensi daerah dan tidak boleh mengganggu kelestarian dan fungsi lingkungan hidup. Arahana Pengembangan Kawasan Industri ditekankan pada pengembangan kawasan industri sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang, dengan berbasiskan potensi daerah yang berwawasan lingkungan. Rencana kawasan peruntukan industri di Provinsi Kepulauan Riau seluas 28.434,12 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Kawasan peruntukan industri di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari :

- a. Kawasan industri besar, merupakan kawasan industri yang memiliki luas lahan kawasan industri paling rendah 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan. Industri yang dikembangkan meliputi industri-industri unggulan yang terdiri dari industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika.
- b. Kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil dan menengah, merupakan kawasan industri yang memiliki luas lahan kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil dan menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan. Industri yang dikembangkan meliputi industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu.

Kawasan industri yang dikembangkan di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau tersebut sesuai dengan kompetensi inti daerah. Adapun peruntukan kawasan industri di Provinsi Kepulauan Riau tersebar di :

- a. Kota Tanjungpinang (kawasan industri Air Raja, Kawasan Industri Dompok Darat dan kawasan industri Dompok Seberang)
- b. Kabupaten Bintan (kawasan industri di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Gunung Kijang)
- c. Kota Batam (kawasan industri Kabil, Telaga Punggur, Pulau Tanjung Sauh, Pulau Ngenang dan Batu Besar di Kecamatan Nongsa, Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar, Sekupang di Kecamatan Sekupang, gugusan Pulau Janda Berhias di Kecamatan Sekupang, Tanjung Uncang di Kecamatan Batu Aji, Muka Kuning di Kecamatan Sungai Beduk, Sagulung dan Tanjung Gundap di Kecamatan Sagulung, Pulau Kepala Jeri di Kecamatan Belakang Padang, Sembulang di Kecamatan Galang, Batam Center di Kecamatan Batam Kota, Pelita di Kecamatan Lubuk Baja, Pulau Dangsi, Pulau Ladi, dan Pulau Belakang Sidi di Kecamatan Bulang)
- d. Kabupaten Karimun (kawasan industri di Parit Rempak, Tanjung Melolo, Tanjung Penggaru, Tanjung Jepun, Tanjung Sememal, Pasir Panjang dan Teluk Lekup)
- e. Kabupaten Lingga (kawasan industri di Sungai Tenam di Kecamatan Lingga dan kawasan industri Marok Tua di Kecamatan Singkep Barat)

- f. Kabupaten Natuna (Kawasan Industri Teluk Buton di Kecamatan Bunguran Utara dan Bunguran Timur Laut, Kawasan Industri Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara dan Kawasan Industri perikanan di Kecamatan Pulau Tiga).
- g. Kabupaten Kepulauan Anambas (kawasan industri di Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Jemaja).

6. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata. Rencana kawasan pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau seluas 37.929,83 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Adapun arahan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Riau diimplementasikan ke dalam 7 (tujuh) Koridor Pariwisata Daerah yang berdasarkan keunggulan kooperatif terdiri dari:

- 1) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Batam sebagai kawasan Wisata Kota, Wisata Bahari dan Wisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*), Wisata Minat Khusus, Wisata Terpadu, Eksklusif, Wisata Agro dan Wisata Alam;
- 2) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Bintan sebagai kawasan Wisata Terpadu, Eksklusif, Kawasan Wisata Terbuka Umum dan Wisata Minat Khusus;
- 3) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Karimun sebagai kawasan Wisata Alam, Wisata Minat Khusus dan Wisata Agro;
- 4) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Tanjungpinang sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya dan Wisata Kreatif;
- 5) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Natuna sebagai kawasan Wisata Bahari, Ekowisata dan Minat Khusus;
- 6) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Kepulauan Anambas sebagai kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata;
- 7) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Lingga sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya, Wisata Alam dan Wisata Bahari.

Geopark merupakan sebuah konsep manajemen pengembangan suatu kawasan (dengan luas tertentu) secara berkelanjutan yang memadu-serasikan tiga keanekaragaman alam, yaitu geologi (geodiversity), hayati (biodiversity) dan budaya (cultural diversity). Dalam pengembangannya, konsep ini berpijak pada aspek Konservasi, Edukasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penumbuhan Nilai Ekonomi Lokal melalui geowisata. Berdasarkan keputusan Komite Nasional Geopark Indonesia di Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, November 2018, Natuna resmi termasuk sebagai kawasan Geopark Nasional. Setidaknya, ada 9 geosite yang masuk dalam Geopark Natuna yaitu Pulau Akar, Batu Kasah, Gunung Ranai, Pantai Gua dan Bamak, Pulau Senua, Pulau Setanau, Senubing, Tanjung Datuk serta Taman Batu Alif.

Sebagai wujud keseriusannya, Kabupaten Natuna sedang menyusun Rencana Induk Pengembangan Geopark Natuna dan juga sudah diusulkan untuk masuk sebagai salah satu prioritas RPJMN 2020-2024. Seiring dengan hal tersebut, sebagaimana Program Kerja Badan Pengelola Geopark Natuna, pada saat ini dalam tahap persiapan menuju UNESCO Global Geopark dengan langkah yang telah dilakukan yaitu penelitian keragaman geologi Kabupaten Natuna dalam rangka perluasan geopark oleh Tim dari UNPAD Bandung.

Selain itu, pada tanggal 18 Desember 2019, Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Akhir Tahun dan Penyusunan Program Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) di Natuna. Pada rapat tersebut disepakati bahwa Geopark Natuna memiliki kekhususan dibandingkan dengan geopark lainnya karena mendukung Rencana Strategis Pertahanan dan Keamanan sebagai bagian dari beranda terdepan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus mendorong konservasi dan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan pariwisata.

7. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman merupakan kawasan yang diperuntukan bagi permukiman penduduk diluar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun rencana kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Riau seluas lebih kurang 84.208,26 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Masalah permukiman penduduk berkaitan erat dengan kebutuhan penduduk akan perumahan. Peningkatan jumlah penduduk yang terus bertambah akan memberikan konsekuensi dalam penyediaan perumahan. Perpindahan penduduk dari desa ke kota juga menambah permasalahan di dalam penyediaan rumah. Tingkat urbanisasi semakin pesat akibat terjadinya perubahan yang sangat pesat dari sektor pertanian ke sektor industri.

Lahan siap bangun bagi pengembangan rumah perorangan perlu dikendalikan dari waktu ke waktu, hal ini mengingat keterbatasan lahan yang tidak mencukupi jika semua kawasan dibangun untuk perumahan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Orientasi pengembangan perumahan khususnya di kawasan perkotaan dan cepat tumbuh diarahkan bagi “rumah tumbuh” atau vertikal. Dengan demikian akan mengurangi tekanan bagi penyempitan lahan untuk aktivitas masyarakat secara keseluruhan. Adapun rencana kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Riau seluas lebih kurang 85.605 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

8. Pemanfaatan Ruang Laut

Pola perencanaan pembangunan hendaknya memasukkan unsur lingkungan dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan sumberdaya yang ada bagi kemaslahatan hidup

manusia. Oleh karena itu perencanaan pembangunan dan penataan ruang wilayah haruslah didasarkan dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Jika dihubungkan dengan karakteristik negara kepulauan (yang dominan adalah perairan laut dan berfungsi sebagai jembatan dan jalan yang menyatukan wilayah kepulauan) maka tentunya beberapa perencanaan pembangunan yang disusun serta arahan penataan ruang wilayah yang dibuat haruslah berkarakteristik wilayah khususnya pada wilayah kepulauan, begitu juga dengan perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

Kondisi bentang wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan luas wilayah 425.214,676 Km² didominasi oleh perairan laut, terdiri dari 2.408 pulau, baik berpenghuni dan belum berpenghuni, bernama maupun belum bernama. Wilayah perairan laut Provinsi Kepulauan Riau menyimpan berbagai potensi dan permasalahan sumberdaya antara lain di Selat Malaka-Singapura-Phillip yang berada di ALKI I-A karena merupakan salah satu simpul jalur pelayaran internasional yang sangat ramai. Selat Malaka-Singapura-Phillip, ALKI I-A dan perairan di sekitarnya merupakan area yang memiliki comparative advantage yang tinggi karena posisi geografisnya. Selain itu perairan laut Provinsi Kepulauan Riau memiliki sumberdaya yang melimpah meliputi perikanan laut, pertambangan dan sumberdaya mineral. Berbagai aspek yang terdapat pada perairan ini harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang di laut, seperti terganggunya ekosistem yang sangat dilindungi oleh kegiatan pertambangan pasir timah maupun oleh limbah dari alur pelayaran. Hal ini ditambah lagi dengan banyaknya pulau-pulau kecil yang terletak di kawasan perbatasan wilayah negara, sehingga aspek pengelolaannya perlu mendapatkan perlakuan khusus mengingat potensi dan masalah yang dapat muncul di kawasan tersebut. Oleh sebab itu diperlukan perencanaan pengembangan kawasan laut, termasuk juga didalamnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Riau agar dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang yang berkelanjutan.

Rencana pengembangan kawasan laut Provinsi Kepulauan Riau merupakan arahan pemanfaatan sumberdaya laut melalui pembagian kawasan laut yang meliputi:

a. Kawasan pemanfaatan umum

merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan dan diperuntukkan sebagai kawasan pariwisata, permukiman yang telah ada, pelabuhan, pertanian, hutan, pertambangan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri, kawasan khusus parkir kapal (Anchorage Area), kawasan alih muat muatan kapal Ship to Ship (STS) Transfer), infrastruktur umum dan zona pemanfaatan terbatas sesuai dengan karakteristik biofisik lingkungannya

b. Kawasan konservasi

merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk zona konservasi perairan, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dan/atau sempadan pantai.

c. Kawasan strategis nasional

merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan sebagai zona pertahanan dan keamanan, situs warisan dunia, kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan, termasuk 22 pulau kecil terdepan yang berada di Provinsi Kepulauan Riau.

d. Alur laut

Meliputi alur pelayaran internasional, nasional dan regional, alur sarana umum, alur migrasi ikan, serta jaringan kabel dan pipa gas bawah laut.

Aspek wilayah perencanaan pengembangan kawasan laut meliputi seluruh wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau. Namun demikian, aspek pengelolaan wilayah laut tetap mengikuti aturan pembagian kewenangan daerah provinsi di laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Apabila wilayah laut antar dua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua Daerah provinsi tersebut. Sementara itu penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

2.1.7 Kawasan Rawan Bencana

Potensi bencana alam di Provinsi Kepulauan Riau diketahui berdasarkan data sejarah kejadian bencana dan data hasil kajian bencana serta kejadian bencana yang sedang berlangsung dan tidak tercatat dalam sejarah kejadian bencana sebelumnya, yaitu pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia sejak awal tahun 2020 hingga saat disusunnya dokumen ini, dan masih berpotensi besar terus berlangsung dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan.

Dari catatan kejadian bencana DIBI, diketahui bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi terjadi 5 (lima) jenis bencana, yang tidak tertutup kemungkinan untuk terjadi lagi. Sedangkan dari hasil analisis menggunakan pendekatan sistem informasi geografis (SIG) teridentifikasi adanya potensi jenis bencana lainnya.

Potensi bencana yang dapat terjadi di Provinsi Kepulauan Riau, dan yang membutuhkan penanganan untuk pengurangan risiko masing-masing bencana serta menjadi subjek kajian dalam Dokumen Peta Bahaya dan Kerentanan di Provinsi Kepulauan Riau ini meliputi 11 (sebelas) jenis bencana.

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi kerawanan bencana, meliputi sebagai berikut :

1. Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan kajian bahaya kebakaran hutan dan lahan. Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten terdampak kebakaran hutan dan lahan, sedangkan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/ kota di Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan. Potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan adalah sebesar 820.450,00 Ha dan berada pada kelas tinggi. (lihat Tabel II.11).

Tabel II. 11
Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Bahaya	
		Luas	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	15.050	Sedang
2	Kabupaten Bintan	131.177	Tinggi
3	Kota Batam	102.362	Sedang
4	Kabupaten Karimun	92.591	Tinggi
5	Kabupaten Lingga	219.949	Tinggi
6	Kabupaten Natuna	197.083	Tinggi
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	62.238	Tinggi
Provinsi Kepulauan Riau		820.450	Tinggi

Sumber: Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

2. Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi

Potensi bahaya kegagalan teknologi memaparkan jumlah luas wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kegagalan teknologi berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan total luas bahaya tiap kabupaten/kota. Kelas bahaya kegagalan teknologi di Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak kegagalan teknologi. Di Provinsi Kepulauan Riau diperoleh total luas bahaya kegagalan teknologi seluas 26.909,00 Ha dan berada pada kelas Rendah.

Tabel II. 12
Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Total Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	942	Rendah
2	Kabupaten Bintan	8.674	Rendah
3	Kota Batam	10.893	Rendah

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Total Luas (Ha)	Kelas
4	Kabupaten Karimun	4.014	Rendah
5	Kabupaten Lingga	378	Rendah
6	Kabupaten Natuna	1.485	Rendah
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	523	Rendah
Provinsi Kepulauan Riau		26.909	Rendah

Sumber: Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

3. Potensi Bahaya Tanah Longsor

Potensi luas bahaya tanah longsor merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana tanah longsor berdasarkan kajian bahaya tanah longsor. Total luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota yang terdampak bahaya tanah longsor, sedangkan kelas bahaya tanah longsor Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota yang terdampak bencana tanah longsor. Potensi luas bahaya tanah longsor adalah 122.325,00 Ha dan berada pada kelas tinggi. Hal tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel II.13.

Tabel II. 13
Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Bahaya	
		Total Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	-	-
2	Kabupaten Bintan	6.419	Rendah
3	Kota Batam	1.978	Sedang
4	Kabupaten Karimun	8.551	Sedang
5	Kabupaten Lingga	36.344	Tinggi
6	Kabupaten Natuna	22.101	Tinggi
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	46.932	Sedang
Provinsi Kepulauan Riau		122.325	Tinggi

Sumber: Peta Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

4. Potensi Banjir dan Banjir Bandang

Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Kawasan banjir terutama terdapat di kawasan tangkapan air yang daerah resapan airnya sudah mengalami kerusakan lingkungan (berubah fungsi lahan) seperti reklamasi dan wilayah dengan drainase yang kurang berfungsi secara baik, sehingga sungai tidak mampu lagi menampung jumlah aliran permukaan dan air meluap dari badan sungai. Total luas bahaya banjir di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah 573.425,00 Ha dan berada pada kelas tinggi.

Potensi luas bahaya banjir di Provinsi Kepulauan Riau menurut kabupaten/kota dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel II.14.

Tabel II. 14
Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	11.104	Tinggi
2	Kabupaten Bintan	106.477	Tinggi
3	Kota Batam	78.136	Tinggi
4	Kabupaten Karimun	71.488	Sedang
5	Kabupaten Lingga	160.476	Sedang
6	Kabupaten Natuna	134.704	Sedang
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	11.080	Sedang
Provinsi Kepulauan Riau		573.425	Tinggi

Sumber: Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

Sementara itu, potensi luas bahaya banjir bandang merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana banjir bandang berdasarkan kajian bahaya banjir bandang. Total luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten terdampak banjir bandang, sedangkan kelas bahaya banjir bandang Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak bahaya banjir bandang. Potensi luas bahaya banjir bandang adalah 12.145,00 Ha dan berada pada kelas tinggi (lihat Tabel II.15).

Tabel II. 15
Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	2.601	Tinggi
2	Kabupaten Bintan	-	-
3	Kota Batam	5.675	Tinggi
4	Kabupaten Karimun	-	-
5	Kabupaten Lingga	2.442	Tinggi
6	Kabupaten Natuna	-	-
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	1.427	Tinggi
Provinsi Kepulauan Riau		12.145	Tinggi

Sumber: Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

5. Potensi Bahaya Gempa Bumi

Potensi bahaya gempa bumi merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana gempa bumi berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan total luas bahaya per kabupaten. Sedangkan kelas bahaya gempa bumi ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdampak bahaya gempa bumi. Potensi luas bahaya gempa bumi di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah 821.513,00 Ha dan berada pada kelas rendah. (lihat Tabel II.16).

Tabel II. 16
Potensi Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	15.016	Rendah
2	Kabupaten Bintan	131.049	Rendah
3	Kota Batam	102.165	Rendah
4	Kabupaten Karimun	92.269	Rendah
5	Kabupaten Lingga	219.493	Rendah
6	Kabupaten Natuna	199.193	Rendah
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	62.328	Rendah
Provinsi Kepulauan Riau		821.513	Rendah

Sumber: Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

6. Potensi Bahaya Kekeringan

Potensi bahaya kekeringan memaparkan jumlah luas wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kekeringan berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan total luas bahaya tiap kabupaten. Kelas bahaya kekeringan Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak kekeringan. Dari hasil kajian dihasilkan total luas bahaya kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah 816.627,00 Ha dan berada pada kelas tinggi. (lihat Tabel II.17).

Tabel II. 17
Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	15.003	Sedang
2	Kabupaten Bintan	130.383	Tinggi
3	Kota Batam	101.363	Sedang
4	Kabupaten Karimun	91.726	Sedang
5	Kabupaten Lingga	218.158	Tinggi
6	Kabupaten Natuna	198.569	Tinggi

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	61.425	Tinggi
Provinsi Kepulauan Riau		816.627	Tinggi

Sumber: Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

7. Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi berdasarkan kajian bahaya gelombang ekstrim dan abrasi. Total luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota yang terdampak gelombang ekstrim dan abrasi, sedangkan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari seluruh wilayah yang terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Adapun total luas wilayah yang memiliki potensi bahaya gelombang ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau seluas 108.958 ha dengan status kelas bahaya yang tinggi. Adapun rincian bahaya gelombang ekstrim dan abrasi per kabupaten/kota dapat dilihat lebih lanjut di Tabel II.18.

Tabel II. 18
Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	1.515	Rendah
2	Kabupaten Bintan	13.837	Tinggi
3	Kota Batam	18.947	Tinggi
4	Kabupaten Karimun	14.495	Tinggi
5	Kabupaten Lingga	30.497	Tinggi
6	Kabupaten Natuna	12.776	Tinggi
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	16.891	Tinggi
Provinsi Kepulauan Riau		108.958	Tinggi

Sumber: Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

8. Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim

Potensi bahaya cuaca ekstrim merupakan jumlah luas wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana cuaca ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya di Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan total luas bahaya per kabupaten/ kota. Kelas bahaya cuaca ekstrim ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdampak cuaca ekstrim.

Dari hasil analisis, total luas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah 153.636,00 Ha dan berada pada kelas tinggi.

Tabel II. 19
Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	-	-
2	Kabupaten Bintan	511	Sedang
3	Kota Batam	-	-
4	Kabupaten Karimun	-	-
5	Kabupaten Lingga	97	Sedang
6	Kabupaten Natuna	153.028	Tinggi
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	-	-
Provinsi Kepulauan Riau		153.636	Tinggi

Sumber: Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

9. Potensi Bahaya Epidemik dan Wabah Penyakit

Kawasan potensi bahaya epidemik dan wabah penyakit memperlihatkan potensi luas bahaya terdampak epidemik dan wabah penyakit tiap kabupaten/kota. Potensi bahaya epidemik dan wabah penyakit pada Tabel 2.19 memaparkan jumlah luas wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana epidemik dan wabah penyakit berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan total luas bahaya tiap kabupaten/kota. Kelas bahaya epidemik dan wabah penyakit ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak epidemik dan wabah penyakit. Di Provinsi Kepulauan Riau, potensi luas bahaya epidemik dan wabah penyakit secara keseluruhan adalah 798.499,00 Ha dan berada pada kelas tinggi. (lihat Tabel II.20).

Tabel II. 20
Potensi Bahaya Epidemik dan Wabah Penyakit

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	14.711	Tinggi
2	Kabupaten Bintan	128.705	Tinggi
3	Kota Batam	96.958	Tinggi
4	Kabupaten Karimun	89.528	Tinggi
5	Kabupaten Lingga	214.051	Sedang
6	Kabupaten Natuna	195.646	Sedang
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	58.900	Sedang
Provinsi Kepulauan Riau		798.499	Tinggi

Sumber: Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

10. Potensi Bahaya Pandemi Covid-19

Potensi luas bahaya pandemi COVID-19 merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana pandemi COVID-19 berdasarkan kajian bahaya pandemi COVID-19. Total luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten terdampak pandemi COVID-19, sedangkan kelas bahaya pandemi COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak bahaya pandemi COVID-19. Potensi luas bahaya pandemi COVID-19 adalah 789.558,00 Ha dan berada pada kelas tinggi. (lihat Tabel II.21).

Tabel II. 21
Potensi Bahaya Pandemi Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	14.773	Sedang
2	Kabupaten Bintan	128.608	Rendah
3	Kota Batam	86.609	Tinggi
4	Kabupaten Karimun	89.497	Sedang
5	Kabupaten Lingga	212.855	Rendah
6	Kabupaten Natuna	195.566	Rendah
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	59.650	Rendah
Provinsi Kepulauan Riau		789.558	Tinggi

Sumber: Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

2.1.8 Kondisi Demografis

Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 2.408 pulau yang tersebar luas, dimana hanya sebanyak 385 pulau yang berpenghuni, sisanya sebagai pulau tidak berpenghuni. Provinsi Kepulauan Riau sebagai suatu provinsi kepulauan dengan pulau-pulau kecil yang membentuk gugusan pulau, sehingga dalam pengaturan tata ruang, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, maupun pelayanan kepada masyarakat didasarkan kepada konsepsi gugus pulau.

Penduduk merupakan subjek sekaligus objek dari pembangunan sesuai dengan konsep pembangunan berwawasan kependudukan. Pembangunan disesuaikan dengan potensi dan kondisi kependudukan di suatu daerah. Arah kebijakan pembangunan manusia berorientasi pada penyiapan SDM unggul selaras dengan kebijakan nasional menuju Indonesia Maju. SDM unggul yaitu SDM yang memiliki kompetensi, soft skill, dan berkarakter. Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 sebanyak 2.064.564 jiwa, terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.053.296 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.011.268 jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 104,15%.

Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau juga dipengaruhi oleh faktor perpindahan penduduk yang datang (migrasi masuk) maupun perpindahan penduduk ke luar daerah (migrasi keluar). Pertumbuhan penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 sebesar -5,7%, jauh lebih rendah dari tahun 2019 sebesar 2,49%. Pertumbuhan penduduk yang besar di Kota Batam lebih disebabkan oleh migrasi masuk penduduk karena perkembangan Kota Batam yang sangat pesat sehingga menarik perhatian bagi penduduk dari daerah lain. Pertumbuhan penduduk terkecil berada di Kabupaten Lingga.

Secara rinci potret kondisi kependudukan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dalam Tabel II.22.

Tabel II. 22
Indikator Kependudukan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

Indikator Kependudukan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penduduk	1.973.043	2.028.169	2.082.694	2.136.521	2.189.653	2.064.564
Laki-Laki	1.007.979	1.035.511	1.062.692	1.089.442	1.115.765	1.053.296
Perempuan	965.064	992.658	1.020.002	1.047.079	1.073.888	1.011.268
Pertumbuhan penduduk (%)	2,90	2,79	2,69	2,58	2,49	-5,7
Kepadatan wilayah/km²	186	191	254	260	267	-
Rasio Jenis Kelamin	104,45	104,32	104,19	104,05	103,90	104,15

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (data diolah)

Jumlah penduduk Kabupaten/Kota Kepulauan Riau menurut BPS tahun 2020 persebaran penduduk tertinggi berada di Kota Batam sebanyak 1.196.396 jiwa. sedangkan untuk persebaran paling rendah berada di Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 47.402 jiwa. Secara rinci, jumlah penduduk menurut kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel II.23.

Tabel II. 23
Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2020

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Tanjungpinang	202.215	204.735	207.057	209.280	211.583	227.663
Bintan	153.020	154.584	156.313	157.927	159.403	159.518
Kota Batam	1.188.985	1.236.399	1.282.196	1.329.773	1.376.009	1.196.396
Karimun	225.298	227.277	229.194	231.145	232.797	253.457
Lingga	88.591	88.971	89.330	89.501	89.781	98.633
Natuna	74.520	75.282	76.192	76.968	77.771	81.495

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kepulauan Anambas	40.414	40.921	41.412	41.927	42.309	47.402
Provinsi Kepulauan Riau	1.973.043	2.028.169	2.082.694	2.136.521	2.189.653	2.064.564

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (data diolah)

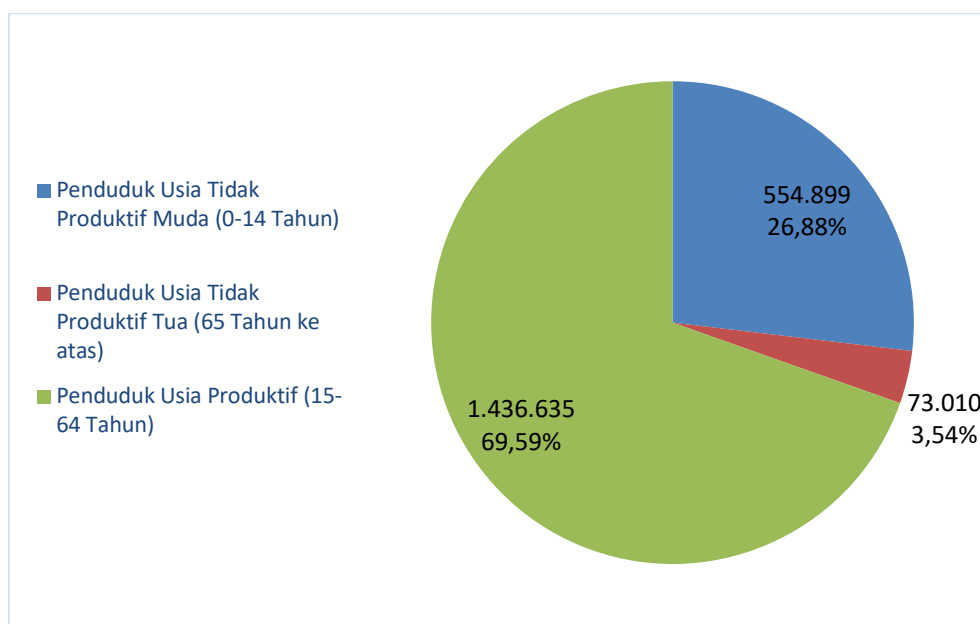
Sementara itu, Struktur umur penduduk Kepulauan Riau didominasi oleh penduduk muda dan penduduk umur 30-39 tahun. Frekuensi terbesar penduduk laki-laki berada pada kelompok umur 0-9 tahun. Sedangkan frekuensi terbesar penduduk perempuan berada pada kelompok umur 0-9 tahun. Distribusi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin untuk tahun 2020 dapat dilihat lebih lanjut dalam tabel berikut.

Tabel II. 24
Komposisi Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Usia Tahun 2020

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	97.600	92.888	190.488
5 - 9	97.709	93.094	190.803
10 - 14	89.348	84.260	173.608
15 - 19	88.201	84.284	172.485
20 - 24	89.544	87.978	177.522
25 - 29	90.003	89.436	179.439
30 - 34	92.696	93.362	186.058
35 - 39	88.624	88.370	176.994
40 - 44	83.864	81.291	165.155
45 - 49	72.147	68.327	140.474
50 - 54	55.987	50.465	106.452
55 - 59	42.371	37.433	79.804
60 - 64	27.719	24.533	52.252
65 - 69	17.762	16.005	33.767
70 - 74	10.618	9.924	20.542
75+	9.103	9.598	18.701
Provinsi Kepulauan Riau	1.053.296	1.011.248	2.064.544

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2021

Jumlah penduduk menurut kelompok umur provinsi Kepulauan Riau di dominasi penduduk usia Produktif (15-64 tahun) sebanyak 1.436.635 jiwa (69,59%), dan untuk penduduk usia tidak produktif muda (0-14 tahun) sebanyak 554.889 jiwa (26,88%), sedangkan yang terendah yaitu penduduk usia tidak produktif tua (65 tahun keatas) sebanyak 73.010 jiwa (3,54%).



Gambar 2. 2
Perbandingan Usai Produktif dan Tidak Produktif Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio Ketergantungan di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 43,71%, seperti terlihat pada Tabel II.25.

Tabel II. 25
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No	Kelompok Umur	2016		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Penduduk Usia Tidak Produktif Muda (0-14 tahun)	284.657	270.242	554.899
2	Penduduk Usia Tidak Produktif Tua (65 tahun keatas)	37.483	35.527	73.010
3	Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun)	731.156	705.479	1.436.635
3	Jumlah penduduk	1.053.296	1.011.248	2.064.544
4	Rasio Ketergantungan	44,06	43,34	43,71

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2017

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan). PDRB dapat dibedakan menjadi dua yaitu PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku.

Hal ini pun terjadi pada perkembangan nilai PDRB Provinsi Kepulauan Riau atas harga berlaku yaitu mengalami peningkatan dari tahun 2015-2019 dari 199.570,39 milyar rupiah pada tahun 2015 meningkat menjadi 267.658,24 milyar rupiah pada tahun 2019 tetapi karena pandemi covid-19, nilai PDRB Provinsi Kepulauan Riau atas harga berlaku mengalami penurunan menjadi 254.253,28 milyar rupiah pada tahun 2020.

Dilihat dari kontribusi terhadap PDRB, terlihat bahwa sektor industri pengolahan merupakan kontributor terbesar terhadap pembentukan PDRB Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai kontribusi yang berada pada kisaran 38,35-40,76 persen selama periode 2015 hingga 2020. Adapun 5 Sektor ekonomi yang menunjukkan kontribusi terbesar sepanjang tahun 2015-2020 baik untuk harga berlaku maupun harga konstan yaitu sektor Industri Pengolahan, Konstruksi, Pertambangan dan Penggalian, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada saat ini terletak pada kelima sektor tersebut. Dengan demikian, strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dapat diarahkan untuk menunjang kegiatan perekonomian kelima sektor tersebut. Perkembangan ini dapat dilihat pada Tabel II.26.

Tabel II. 26
PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan 2020 dan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020 (Milyar rupiah)

No	Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020	
		ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.018,41	7.729,47	5.945,61	7.981,53	5.757,78	8.100,22	5.717,73	8.223,77	5.466,78	8.061,29
2	Pertambangan dan Penggalian	26.883,19	33.083,03	25.648,83	32.061,78	25.995,36	35.148,52	26.037,64	34.964,44	24.951,04	28.391,33
3	Industri Pengolahan	61.497,86	80.842,35	62.436,28	84.404,23	65.018,04	91.792,57	69.079,81	100.705,38	71.325,79	105.899,71
4	Pengadaan Listrik, Gas	1.523,11	2.468,48	1.621,70	2.689,97	1.600,28	2.644,61	1.653,05	2.763,73	1.580,66	2.603,10
5	Pengadaan Air	203,26	252,52	222,66	282,71	225,03	288,74	224,90	291,29	218,65	281,46
6	Konstruksi	28.073,93	38.848,43	29.042,76	41.409,19	31.345,83	46.628,25	33.924,66	52.239,25	31.752,17	49.317,72
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.858,55	17.716,68	13.665,03	19.653,11	14.523,51	22.074,79	15.408,88	24.314,35	13.449,61	21.561,95
8	Transportasi dan Pergudangan	4.413,81	6.953,59	4.654,49	7.471,82	4.696,77	7.648,63	4.280,15	7.219,02	2.558,45	4.111,95
9	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	3.159,14	4.346,14	3.536,02	5.061,47	3.895,60	5.585,88	4.283,34	6.208,87	2.526,91	3.391,34
10	Informasi dan Komunikasi	3.469,62	3.969,12	3.736,38	4.485,79	4.136,74	5.016,21	4.626,51	5.603,09	5.392,39	6.483,54
11	Jasa Keuangan	4.335,03	5.800,41	4.466,53	6.254,65	4.724,11	6.781,34	4.951,67	7.271,53	4.798,29	6.991,38
12	Real Estate	2.443,35	3.131,44	2.549,27	3.415,73	2.539,78	3.467,24	2.542,82	3.563,18	2.330,97	3.195,11
13	Jasa Perusahaan	8,28	10,10	8,88	11,34	9,49	12,48	8,65	11,38	5,03	5,82
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.583,27	5.106,64	3.750,53	5.914,07	4.013,02	6.385,00	4.073,85	6.791,47	4.398,45	7.347,30
15	Jasa Pendidikan	2.201,37	2.931,37	2.418,96	3.415,20	2.450,78	3.708,43	2.461,46	3.849,23	2.259,58	3.896,18
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.467,87	1.882,15	1.618,90	2.119,21	1.668,14	2.228,24	1.714,54	2.305,97	1.679,46	2.277,84
17	Jasa Lainnya	712,98	980,77	758,86	1.075,07	898,50	1.311,08	906,21	1.332,30	282,47	436,25
	Produk Domestik Regional Bruto	162.853,04	216.007,66	166.081,68	227.706,88	173.498,75	248.822,23	181.895,86	267.658,24	174.976,70	254.253,29

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, diolah

Mengacu pada kajian Background Study Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020, dibandingkan dengan nasional maka struktur ekonomi Provinsi Kepulauan Riau sudah sangat berciri industri sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel II.27.

Tabel II. 27
Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Dibandingkan Nasional Tahun 2019-2020

No	Lapangan Usaha	Nasional		Provinsi Kepulauan Riau	
		Kontribusi (2020)	Pertumbuhan (2019-2020)	Kontribusi (2020)	Pertumbuhan (2019-2020)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,70	1,75	3,17	-4,39
2	Pertambangan dan Penggalian	6,44	-1,95	11,17	-4,17
3	Industri Pengolahan	19,88	-2,93	41,65	3,25
4	Pengadaan Listrik , Gas	1,16	-2,34	1,02	-4,38
5	Pengadaan Air	0,07	4,94	0,11	-2,78
6	Konstruksi	10,71	-3,26	19,4	-6,4
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,93	-3,72	8,48	-12,72
8	Transportasi dan Pergudangan	4,47	-15,04	1,62	-40,23
9	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	2,55	-10,22	1,33	-41,01
10	Informasi dan Komunikasi	4,51	10,58	2,55	16,55
11	Jasa Keuangan	4,51	3,25	2,75	-3,1
12	Real Estate	2,94	2,32	1,26	-8,33
13	Jasa Perusahaan	1,91	-5,44	0	-41,88
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,76	-0,03	2,89	7,97
15	Jasa Pendidikan	3,56	2,63	1,53	-8,2
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,30	11,60	0,9	-2,05
17	Jasa Lainnya	1,96	-4,10	0,17	-68,83
	Produk Domestik Regional Bruto	100	-2,07	100	-3,80

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, diolah

Dilihat dari persebarannya, PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 mencerminkan perubahan PDRB tanpa dipengaruhi oleh harga yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu jika dilihat berdasarkan Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2015-2020 Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kepulauan Riau dengan mengeluarkan inflasi maka Kabupaten Lingga merupakan kota yang memiliki penurunan ekonomi terendah akibat

dampak Covid-19 sebesar -0,68 % pada tahun 2020 dan Kepulauan Anambas merupakan kabupaten dengan penurunan ekonomi tertinggi yaitu sebesar -7,83. Sedangkan persebaran PDRB Atas Dasar Harga Berlaku maka Kota Batam adalah wilayah dengan kontribusi PDRB tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau yakni sebesar 60,80 persen pada tahun 2015 dan meningkat 63,97 persen pada tahun 2020. Selanjutnya Kabupaten Bintan sebesar 7,78 persen pada tahun 2015 dan mengalami kenaikan menjadi 8,22 persen pada tahun 2020. Sedangkan kontribusi terendah adalah Kabupaten Lingga yaitu pada tahun 2015 hanya sebesar 1,53 persen dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 1,70 persen. Hal ini bisa dilihat lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel II. 28
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2020 dan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016-2020 (Milyar rupiah)

No	Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020	
		ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB
1	Kota Tanjungpinang	13.197,81	17.065,53	13.544,58	18.088,95	13.979,22	19.078,15	14.436,94	20.167,98	13.938,24	19.665,01
2	Kabupaten Bintan	12.620,12	16.596,40	13.244,04	17.982,66	13.886,09	19.597,81	14.540,07	21.303,01	13.917,80	20.743,70
3	Kota Batam	95.369,70	130.553,21	97.862,56	137.925,34	102.718,60	151.285,14	108.800,35	164.490,12	106.029,65	161.364,18
4	Kabupaten Karimun	8.152,07	10.610,20	8.583,14	11.618,49	9.016,34	12.628,78	9.456,92	13.544,17	9.117,12	13.310,63
5	Kabupaten Lingga	2.529,11	3.284,25	2.682,78	3.659,73	2.790,12	3.969,33	2.934,66	4.274,27	2.914,60	4.292,43
6	Kabupaten Natuna	14.538,93	18.552,33	14.665,42	19.604,96	15.036,09	21.123,65	15.299,36	21.795,5	14.642,75	18.405,91
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	13.155,24	16.597,58	13.142,46	17.256,61	12.063,35	16.849,27	12.047,35	17.439,77	11.104,45	14.453,58
	Provinsi Kepulauan Riau	162.853,04	216.007,66	166.081,68	227.706,88	173.498,75	248.822,23	181.895,86	267.658,24	174.976,7	254.253,29

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, diolah

Analisis Location Quotient merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui sektor basis pada suatu wilayah. Semakin besar Nilai LQ maka semakin berpengaruh terhadap perekonomian suatu wilayah. Selama kurun waktu 2016-2021 tidak terjadi perubahan kedudukan sektor basis menjadi sektor non basis ataupun dari sektor non basis menjadi sektor basis. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi struktur ekonomi basis maupun non basis Provinsi Kepulauan Riau selama 5 tahun cenderung tetap. Rata-rata LQ selama kurun waktu lima tahun yang merupakan sektor basis/sektor yang diutamakan dalam pengembangan/ peningkatan produksinya di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Pertambangan dan Penggalian (peringkat 1), Industri Pengolahan (peringkat 2), Konstruksi (peringkat 3), dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (peringkat 4).

Dari sisi permintaan, peningkatan pendapatan (nilai tambah) yang terjadi pada sektor basis di Provinsi Kepulauan Riau, yakni pada sektor Pertambangan dan Penggalian atau sektor Konstruksi atau sektor Industri Pengolahan ataupun pada sektor Pengadaan Air, melalui upah dan gaji yang tenaga kerja sektor-sektor tersebut terima maka akan meningkatkan belanjanya baik terhadap output pada sektor basis itu sendiri maupun output pada sektor non basis. Peningkatan permintaan pada sektor non basis pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan (nilai tambah) pada sektor non basis yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan (nilai tambah) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan.

Dari sisi penawaran, pada kasus dimana keterkaitan antara perusahaan-perusahaan sangat kuat, maka pertumbuhan yang terjadi pada sektor basis akan meningkatkan permintaan input antara (bahan baku dan bahan penolong) yang digunakan dalam sektor basis. Input pada sektor basis diantaranya merupakan output pada sektor non basis. Sehingga kenaikan output pada sektor basis akan meningkatkan pula output maupun tenaga kerja pada sektor non basis.

Sebagai contoh, peningkatan permintaan output pada sektor Konstruksi pada awalnya akan meningkatkan permintaan tenaga kerja sektor Konstruksi. Pada saat yang bersamaan, input antara yang digunakan dalam konstruksi seperti pasir, semen, paku, kawat dan barang-barang dari besi dan baja lainnya, jasa angkut material, dan lain-lain juga akan meningkat. Input antara tersebut merupakan output dari sektor lainnya seperti pasir merupakan output dari sektor pertambangan dan penggalian, semen merupakan output dari industri semen, paku dan kawat dari industri barang dari logam, dan jasa angkut material merupakan output jasa dari sektor Transportasi.

Output yang berasal dari sektor-sektor yang berbasis produksi barang akan melalui sektor perdagangan dimana akan tercipta margin perdagangan yang merupakan nilai

tambah bagi sektor perdagangan. Kenaikan output pada sektor pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, transportasi, dan perdagangan akan menyebabkan kenaikan permintaan tenaga kerja dan kebutuhan inputnya. Sehingga, kenaikan output dan tenaga kerja tidak berhenti pada tahap itu saja, tetapi selanjutnya akan meningkatkan output di sektor lainnya termasuk sektor non basis. Misal tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut meningkatkan permintaan terhadap sektor pendidikan karena pekerja tersebut dapat menyekolahkan anak-anaknya dan peningkatan permintaan terhadap kebutuhan leisure seperti jasa hiburan dan rekreasi, akomodasi dan makan minum, dan sebagainya.

Hasil perhitungan Shift-Share dilakukan perhitungan KPN (Komponen Pertumbuhan Nasional), KPP (Komponen Pertumbuhan Proporsional) dan KPPW (Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah) untuk mengetahui sektor apa saja yang berpotensi untuk memajukan perekonomian di tingkat Provinsi Kepulauan Riau. KPN/National Share di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 21,53% Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kontribusi pada semua sektor sebagai akibat dari kebijakan nasional. Sektor ekonomi dengan peningkatan kontribusi KPN terbesar adalah Industri Pengolahan. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor Industri Pengolahan sangat berpengaruh terhadap perubahan kebijakan nasional, yang berarti bahwa apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, maka kontribusi sektor industri pengolahan beserta subsektornya akan mengalami perubahan. Sektor ekonomi dengan peningkatan kontribusi KPN terkecil adalah Jasa Perusahaan. Hal ini berarti sektor jasa perusahaan tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap perubahan kebijakan Nasional.

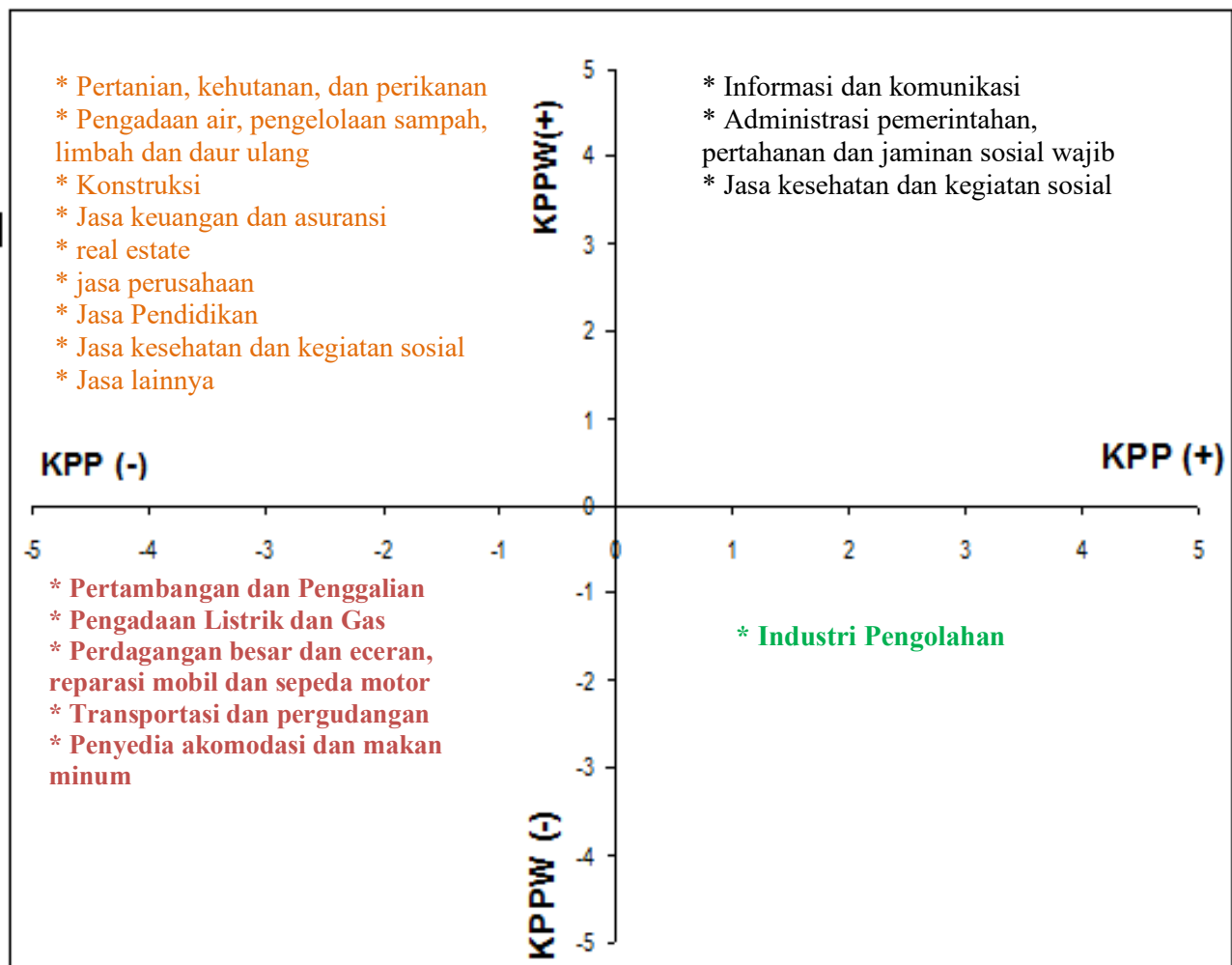
Hasil interpretasi Pergeseran Bersih, KPP dan KPPW beberapa sektor mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibanding sektor-sektor lainnya dan ada juga beberapa sektor memiliki daya saing lebih baik dibanding sektor-sektor lainnya. Sehingga peningkatan PDRB dari pengaruh pertumbuhan nasional akan terkoreksi oleh pengaruh dari pertumbuhan sektoral dan tingkat daya saing. Kesimpulan hasilnya sebagai berikut.

1. Sektor yang secara nasional mengalami **pertumbuhan secara cepat**, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; konstruksi; informasi dan komunikasi jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi wajib pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa lainnya.
2. Sektor yang secara nasional mengalami **pertumbuhan secara lambat (perlu dipacu)**, yaitu adalah sektor pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan

sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum.

3. Sektor yang **memiliki daya saing**, yaitu sektor industri pengolahan; informasi dan komunikasi; administrasi wajib pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.
4. Sektor yang **tidak memiliki daya saing** yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; konstruksi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa lainnya.

Analisis Tipologi Klassen mendasarkan pada sektor, subsector atau usaha dengan cara membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dan dengan pertumbuhan ekonomi daerah (nasional), menunjukkan posisi pertumbuhan dan pangsa sektor, subsektor, usaha, atau komoditi pembentuk variabel regional suatu daerah. Berikut merupakan Gambar hasil analisis tipologi sektor Provinsi Kepulauan Riau.



Sumber : Hasil Analisis, 2021

Keterangan :

KPP = perubahan produksi atau kesempatan kerja suatu wilayah yg disebabkan oleh komposisi sektor – sektor industri di wilayah tersebut, perbedaan sektor dalam permintaan produk akhir, serta perbedaan dalam struktur dan keragaman pasar

KPPW = perubahan produksi atau kesempatan kerja suatu wilayah yang disebabkan oleh keunggulan komparatif wilayah tersebut, dukungan kelembagaan, prasarana sosial ekonomi serta kebijakan lokal di wilayah tersebut.

Gambar 3. 1
Diagnosa Sektor dengan Komponen KPP dan KPPW di Kepulauan Riau

Kesimpulan:

1. Tumbuh cepat, Berdaya saing	:	1. Informasi dan komunikasi 2. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 3. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
2. Tumbuh cepat, Tak Berdaya saing	:	1. Industri Pengolahan
3. Tumbuh Lambat, Berdaya saing	:	1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan 2. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 3. Konstruksi 4. Jasa keuangan dan asuransi 5. Real estate 6. Jasa perusahaan 7. Jasa Pendidikan 8. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 9. Jasa lainnya
4. Tumbuh Lambat, Tak Berdaya Saing	:	1. Pertambangan dan Penggalan 2. Pengadaan Listrik dan Gas 3. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 4. Transportasi dan pergudangan 5. * Penyedia akomodasi dan makan minum

Pengaruh pertumbuhan sektoral yang lambat disebabkan oleh perbedaan karakteristik sektoral di Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional, dimana sektor-sektor yang tumbuh lambat tidak berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional tumbuh cepat. Cepat atau lambatnya pertumbuhan sektor/tingkat daya saing suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya ditentukan oleh keunggulan komparatif, akses ke pasar, dukungan kelembagaan dan prasarana sosial ekonomi, serta kebijakan ekonomi regional pada wilayah yang bersangkutan. Sektor yang mengalami pertumbuhan lambat dan/atau tak berdaya saing perlu dipacu lagi agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

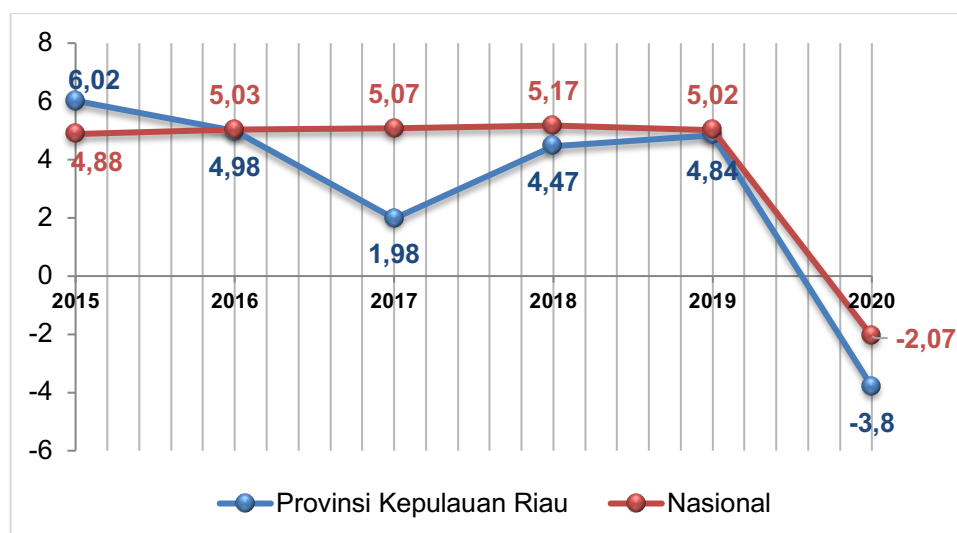
Sektor ekonomi unggulan yang terdapat pada suatu wilayah dapat diidentifikasi melalui analisis gabungan dari analisis LQ dan Shift Share. Hasil dari analisis tersebut kemudian dapat digunakan untuk mengetahui sektor yang dapat meningkatkan perekonomian daerah. Analisis sektor ekonomi unggulan ini membutuhkan data hasil perhitungan rata-rata LQ selama lima tahun dan Shift Share. Berikut merupakan gambaran sektor ekonomi unggulan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hasil perhitungan rata-rata LQ selama lima tahun dan Shift Share.

1. Sektor Unggulan	:	1. Industri Pengolahan
2. Sektor Potensial	:	1. Pertambangan dan Penggalian 2. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3. Konstruksi
3. Sektor Berkembang	:	1. Informasi dan Komunikasi 2. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
4. Sektor Terbelakang	:	1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2. Pengadaan Listrik dan Gas 3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4. Transportasi dan Pergudangan 5. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6. Jasa Keuangan dan Asuransi 7. Real Estate 8. Jasa Perusahaan 9. Jasa Pendidikan 10. Jasa lainnya

Prioritas pertama dalam pengembangan sektor unggulan yaitu pada sektor industri pengolahan. Selanjutnya sektor potensial untuk dikembangkan adalah sektor pertambangan dan penggalian lalu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi.

B. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan perkembangan fluktuatif, selaras dengan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu enam tahun terakhir menunjukkan nilai tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 6,02 persen. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 kemudian menurun menjadi 4,98 persen di tahun 2016 dan kembali menurun sebesar 1,98 persen di tahun 2017. Pada tahun 2018 dan 2019, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau akhirnya menunjukkan tren positif dengan adanya kenaikan menjadi 4,58 persen di tahun 2018 dan kembali mengalami peningkatan menjadi 4,89 persen di tahun 2019. Meskipun demikian, pada tahun 2020 perekonomian di seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau bertumbuh secara negatif sehingga menyebabkan nilai pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau menjadi sebesar -3,80. Penurunan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau yang sejalan dengan ekonomi nasional berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan hampir seluruh sektor industri mengalami pelemahan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2022 (diolah)

Gambar 2. 3
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2015-2020

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu enam tahun menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif dan beragam. Berdasarkan Tabel II.29 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 hingga 2016 mengalami penurunan dan selaras dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau. Pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau baru menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2018 dan 2019, tetapi kemudian kembali menurun hingga mencapai nilai minus pada tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19. Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang paling mundur diantara kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Riau.

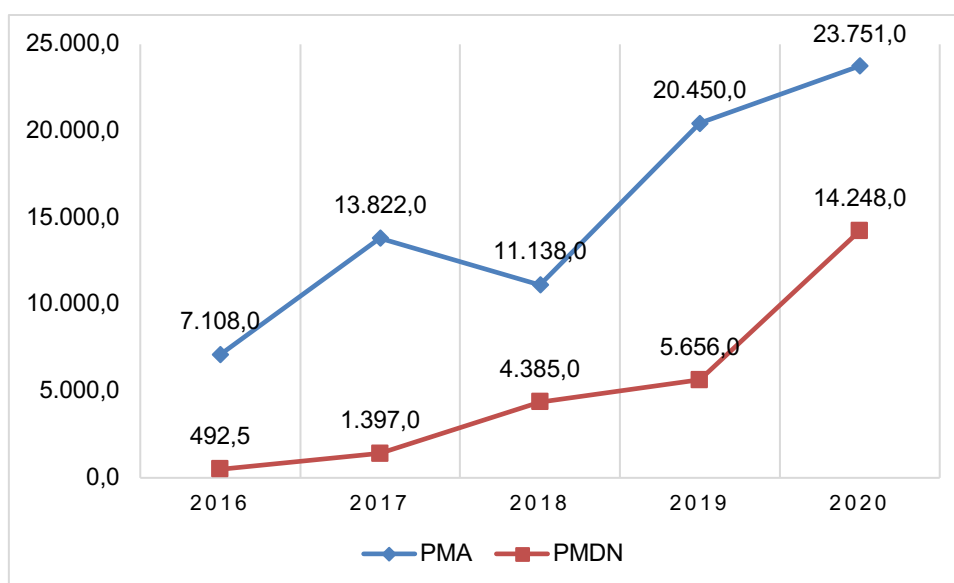
Tabel II. 29
Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Tanjungpinang	5,70	5,01	2,63	3,21	3,27	-3,45
Kab. Bintan	5,16	5,05	4,94	4,85	4,71	-4,28
Kota Batam	6,87	5,43	2,61	4,96	5,92	-2,55
Kab. Karimun	6,54	6,17	5,29	5,05	4,89	-3,59
Kab. Lingga	2,38	4,09	6,08	4,00	5,18	-0,68
Kab. Natuna	3,90	3,00	0,87	2,53	1,75	-4,29
Kab. Kepulauan Anambas	3,03	2,90	-0,10	-8,21	-0,13	-7,83
Provinsi Kepulauan Riau	6,02	4,98	1,98	4,47	4,84	-3,80

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2022 (diolah)

C. Investasi

Investasi di Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan adanya peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi nilai investasi PMA dan PMDN yang signifikan dari Tahun 2016 yaitu Realisasi Investasi PMDN sebesar Rp.492,5 (miliar) dengan 130 Proyek menjadi Rp.14,248 (Miliar) dengan 2.294 Proyek di tahun 2020. Sedangkan Realisasi Investasi PMA Tahun 2016 sebesar 519,077 (US\$.Ribu) dengan 874 proyek dan mengalami kenaikan yang sangat tinggi di Tahun 2020 sebesar 1.649,4(US\$) atau Rp.23.751 (Milliar) dengan 2.268 Proyek. Sebaran investasi juga menjadi aspek yang perlu diperbaiki, mengingat realisasi investasi masih terfokus di Kota Batam. Meningkatnya realisasi investasi tidak luput dari semakin banyak nya minat dari investor untuk menanamkan modal nya, di Tahun 2016 jumlah Investor PMA dan PMDN sebanyak 358 Investor yang mengalami peningkatan secara signifikan di tahun 2020 sebanyak 5,714 Investor PMA dan PMDN di karenakan mulai Tahun 2019 Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) diganti (OSS) *Online Single Submission* sesuai dengan penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

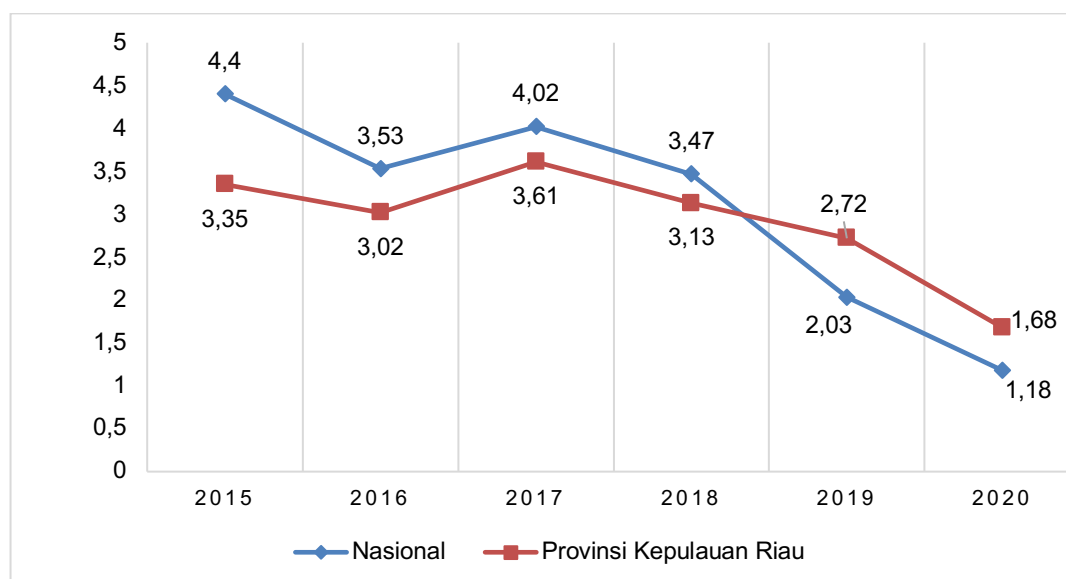


Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2. 4
Grafik Perkembangan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2016-2020 di Provinsi Kepulauan Riau

D. Inflasi

Inflasi yang terjadi di suatu wilayah dapat menunjukkan tingkat ketersediaan barang dan jasa serta efisiensi kerja ekonomi. Pada dasarnya inflasi adalah kenaikan harga secara umum dalam jangka waktu tertentu. Apabila harga barang dan jasa dalam negeri meningkat, maka akan terjadi kenaikan inflasi. Meskipun inflasi secara umum menurun, namun inflasi pada kebutuhan pokok perlu menjadi perhatian. Karena komoditas makanan adalah penyumbang terbesar yang membentuk Indeks Harga Konsumen (IHK) dan berpengaruh terhadap Garis Kemiskinan. Jika dilihat secara makro maka tingkat inflasi Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional, namun tren pertumbuhannya sejalan dengan angka inflasi nasional.



Sumber: Diolah dari Data BPS Nasional dan BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022

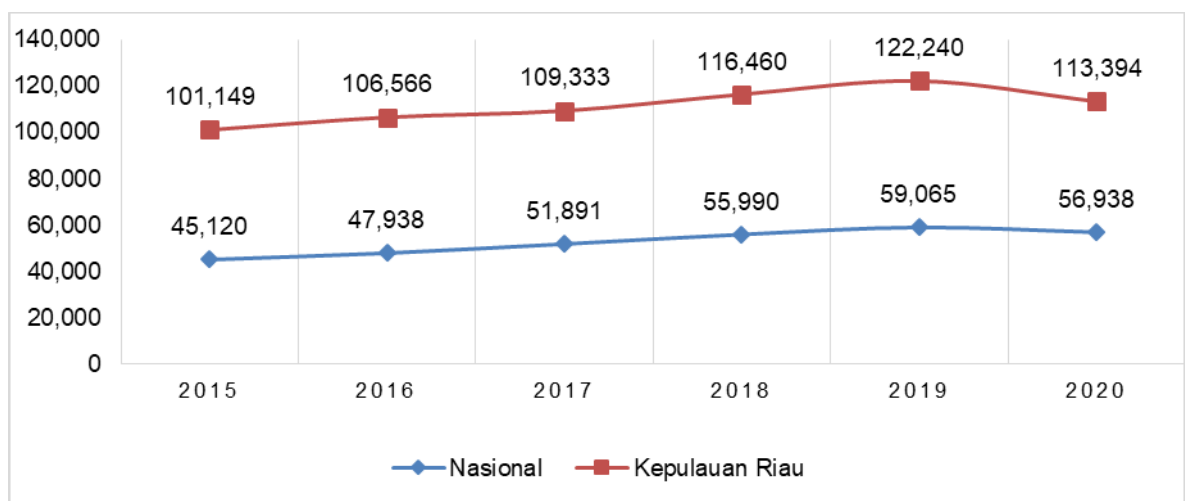
Gambar 2. 5
Tingkat Inflasi Nasional dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

E. PDRB per Kapita

PDRB per Kapita menggambarkan nilai PDRB yang diterima oleh setiap penduduk dan biasanya digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran suatu wilayah. PDRB per Kapita dihasilkan dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku yang dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Selama kurun waktu enam tahun terakhir, nilai PDRB per Kapita Provinsi Kepulauan Riau atas dasar harga berlaku selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per Kapita Provinsi Kepulauan Riau atas dasar harga berlaku sebesar Rp 101.149 ribu meningkat menjadi meningkat menjadi Rp

122.240 ribu pada tahun 2019 dan terjadi penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp 113.394 ribu akibat dari dampak pandemi COVID-19.

Meskipun PDRB per Kapita Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 mengalami penurunan tetapi secara agregat tahun 2015 - 2020 PDRB per Kapita mengalami kenaikan dengan meningkatnya PDRB per Kapita tersebut, maka secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau semakin baik. Apabila dibandingkan dengan PDB per Kapita nasional, nilai PDRB per Kapita Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena PDRB Provinsi Kepulauan Riau yang sudah cukup tinggi nilainya dan pembagi PDRB yang jauh lebih kecil, dalam hal ini jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan jumlah penduduk seluruh Indonesia.

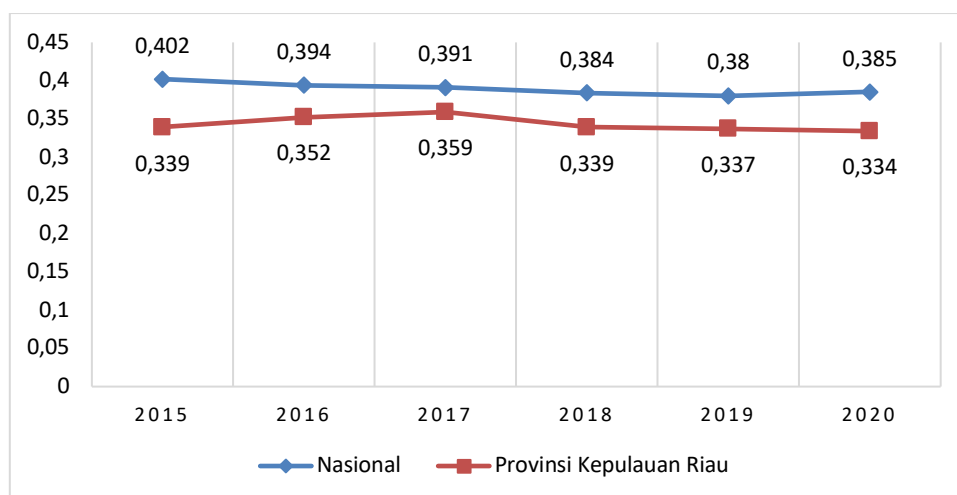


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

Gambar 2. 6
Perkembangan PDRB Perkapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020 (Ribuan Rupiah)

F. Indeks Gini

Indeks Gini didefinisikan sebagai suatu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat di suatu wilayah. Nilai Indeks Gini ditentukan dari 0 hingga 1. Ketimpangan antar kelompok pendapatan dikatakan ketimpangan “rendah” bila Indeks Gini kurang dari 0,3 dikatakan Ketimpangan “sedang” bila Indeks Gini antara 0,3 – 0,4; dan Ketimpangan “tinggi” bila indeks Gini di atas 0,4. Nilai Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau antara tahun 2015-2020 berfluktuasi dari sebesar 0,339 pada tahun 2015 menjadi 0,337 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 kembali turun menjadi 0,334. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan meskipun sedang berada dalam kondisi Covid-19. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 2. 7
Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Per September Tahun 2016-2020

Nilai Indeks Gini di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan fluktuasi dari waktu ke waktu. Perkembangan Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 berada dalam kategori ketimpangan rendah, yaitu 0,334. Perkembangan Indeks Gini periode 2015-2020 sempat meningkat di tahun 2017 yaitu 0,359 namun kemudian menurun di tahun 2020 berada di bawah Indeks Gini nasional. Penurunan poin Indeks Gini mengindikasikan bahwa telah terjadi penurunan ketimpangan pengeluaran di Provinsi Kepulauan Riau. Tingkat ketimpangan secara nasional lebih besar dibandingkan tingkat ketimpangan di Provinsi Kepulauan Riau.

Sementara itu, jika melihat tren Indeks Gini untuk Kabupaten/Kota maka Kota Tanjungpinang memiliki Indeks Gini tertinggi di tahun 2020 dan terendah adalah di Kabupaten Lingga. Untuk tahun 2019 Indeks Gini tertinggi terjadi di Kota Batam dan Tahun 2018 terjadi di Kabupaten Karimun. Sementara itu, untuk yang terendah di tahun 2019 dan 2018 terjadi pada Kabupaten Lingga dan Kabupaten Anambas. Hal tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel II. 30
Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau per Maret 2018-2020

Wilayah Kepri	Gini Rasio		
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Kepulauan Riau	0,33	0,34	0,34
Tanjungpinang	0,32	0,31	0,35
Bintan	0,33	0,30	0,31
Batam	0,31	0,33	0,32
Karimun	0,35	0,30	0,32

Wilayah Kepri	Gini Rasio		
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Lingga	0,29	0,28	0,28
Natuna	0,33	0,30	0,34
Kep. Anambas	0,29	0,28	0,30

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

G. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pola konsumsi rumah tangga dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Persentase pengeluaran untuk pangan akan menurun sejalan dengan meningkatnya pendapatan. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, maka semakin baik tingkat perekonomian masyarakat. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu enam tahun dari 2015-2020 terus mengalami peningkatan. Nilai rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita riil per tahun tahun 2015 sebesar Rp 1.344.712 ribu dan pada tahun 2020 menjadi Rp 1.465.121 ribu pada tahun 2020, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.31.

Tabel II. 31
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Total Pengeluaran Rumah Tangga Nonpangan	742.641	783.597	805.334	826.448	989.093	n/a
2.	Total Pengeluaran	1.344.712	1.465.121	1.564.877	1.574.392	1.778.150	1.465.121
3.	Rasio	55,2	53,5	51,5	52,5	55,6	n/a

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022

H. Kemiskinan

Indikator yang dapat menggambarkan gambaran kesejahteraan masyarakat adalah kemiskinan diantaranya jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Kemiskinan sudah menjadi permasalahan dan isu global. Pengentasan kemiskinan harus terus dilakukan untuk dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu cara yang ditempuh adalah melalui tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun pada tahun 2030.

Kemiskinan sering kali didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya, seperti: pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, maka kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan-makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau, 2018). Jumlah penduduk yang tergolong miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan untuk tahun 2021 jika dibanding tahun 2020. Meski demikian, secara umum, tingkat kemiskinan mengalami fluktuasi baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Untuk lebih jelasnya mengenai profil kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel II.32.

Tabel II. 32
Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau September 2015-2021

Profil Kemiskinan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin	114.830	119.140	128.430	125.360	127.760	142.610	144.460
Persentase Penduduk Miskin (persen)	5,78	5.84	6.13	5,83	5,8	6,13	6,12
Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	480.812	502.653	536.027	567.972	602.038	617.532	642.425
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (persen)	0,86	0,71	1,18	0,591	0,9	1,21	1,07
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (persen)	0,23	0,15	0,31	0,11	0,18	0,42	0,28

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Berdasarkan data BPS tahun 2020, penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 142.610 jiwa. Namun, berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI, di Provinsi Kepulauan Riau terdapat sebanyak 110.276 jiwa penduduk dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah dengan jumlah terbanyak di Kota Batam, dan paling sedikit di Kabupaten Kepulauan Anambas. DTKS adalah data yang memuat informasi sosial ekonomi bagi 40% penduduk dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia secara by name by address. Angka 40% penduduk tersebut ialah persentase secara nasional. Di setiap daerah, persentase penduduk yang masuk dalam DTKS berbeda-beda. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel II.33.

Tabel II. 33
Jumlah Penduduk dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah berdasarkan
Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Desil 4+	Jumlah
1	Kota Tanjungpinang	1.717	6.110	877	487	2.308	11.499
2	Kabupaten Bintan	191	1.159	2.050	2.686	4.296	10.382
3	Kota Batam	17.837	5.705	5.204	6.008	18.882	53.636
4	Kabupaten Karimun	7	49	776	4.593	11.107	16.532
5	Kabupaten Lingga	1.529	1.852	2.735	615	2.580	9.311
6	Kabupaten Natuna	157	289	645	1.514	3.760	6.365
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	1	21	196	436	1.897	2.551
Jumlah		21.439	15.185	12.483	16.339	44.830	110.276

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Rumah tangga dalam DTKS dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraannya ke dalam 10 desil, yang dapat juga dinyatakan dalam persentil 1 hingga 100 :

- 1) Desil 1 (sangat miskin) : kelompok 1–10% terendah dalam DTKS.
- 2) Desil 2 (miskin) : kelompok 11–20% terendah dalam DTKS.
- 3) Desil 3 (hampir miskin) : kelompok 21–30% terendah dalam DTKS.
- 4) Desil 4 (rentan miskin) : kelompok 31–40% terendah dalam DTKS.
- 5) Desil 4 Plus (Desil 5–10) : persentil 41–100.

Pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengambil kebijakan menjadikan kelompok Desil 1–3 sebagai kelompok sasaran yang dituju oleh program penanganan kemiskinan, sehingga target pada tahun 2018–2021 didasarkan pada data Desil 1–3 dalam DTKS 2018, yaitu 64.506 KK. Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan mengambil kebijakan menjadikan kelompok Desil 1–4 sebagai kelompok sasaran yang dituju oleh program penanganan kemiskinan, sehingga target mulai tahun 2022 akan didasarkan pada data Desil 1–4 dalam DTKS. Berdasarkan DTKS per 2020, kelompok Desil 1–4 berjumlah 65.446 KK.

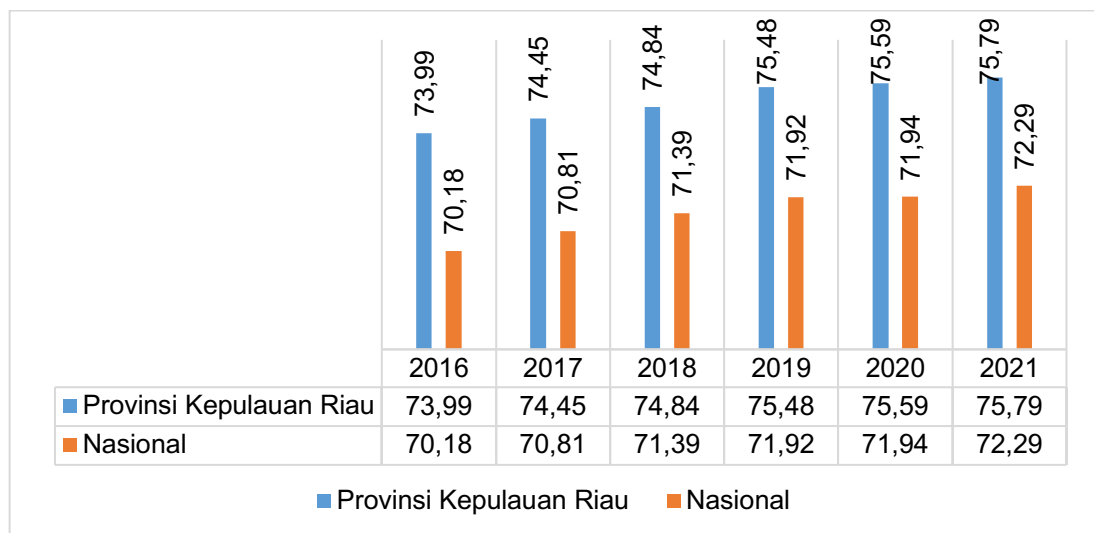
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam

memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); (2) Pengetahuan (*knowledge*); (3) Standar hidup layak (*decent standard of living*). Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan hidup, angka harapan sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita.

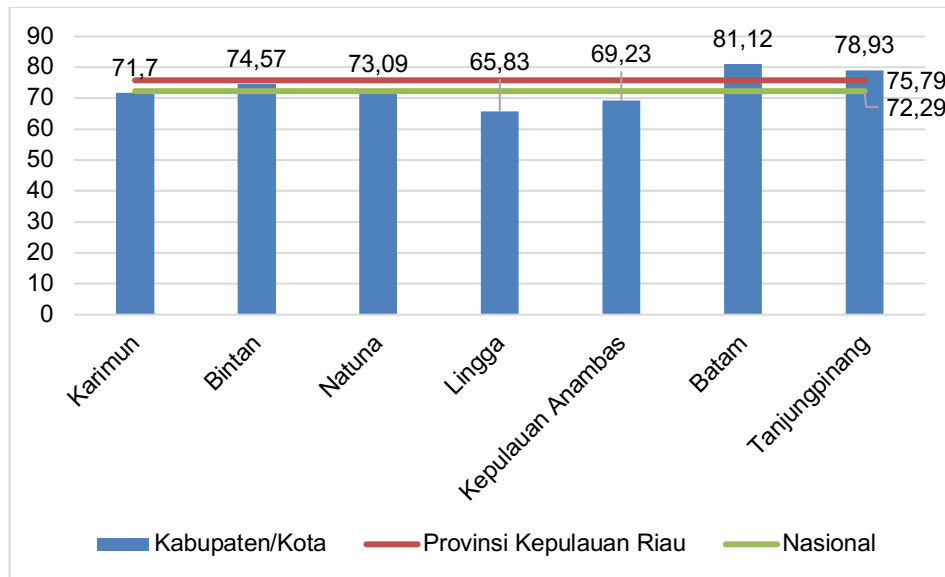
IPM Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan, yaitu sebesar 73,99 meningkat menjadi sebesar 75,79 pada tahun 2021. Nilai IPM Provinsi Kepulauan Riau juga menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Nasional. Kondisi tersebut berkontribusi positif terhadap pencapaian IPM Nasional yang tiap tahunnya, secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional Tahun 2022

Gambar 2. 8
Perbandingan IPM Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional tahun 2016-2021

IPM tahun 2021 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang menempati posisi tertinggi yaitu Kota Batam sebesar 81,12 berada di atas Provinsi Kepulauan Riau, dan yang berada pada urutan terendah yaitu Kabupaten Lingga sebesar 65,83.



Sumber : BPS Nasional Tahun 2022

Gambar 2. 9
IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021

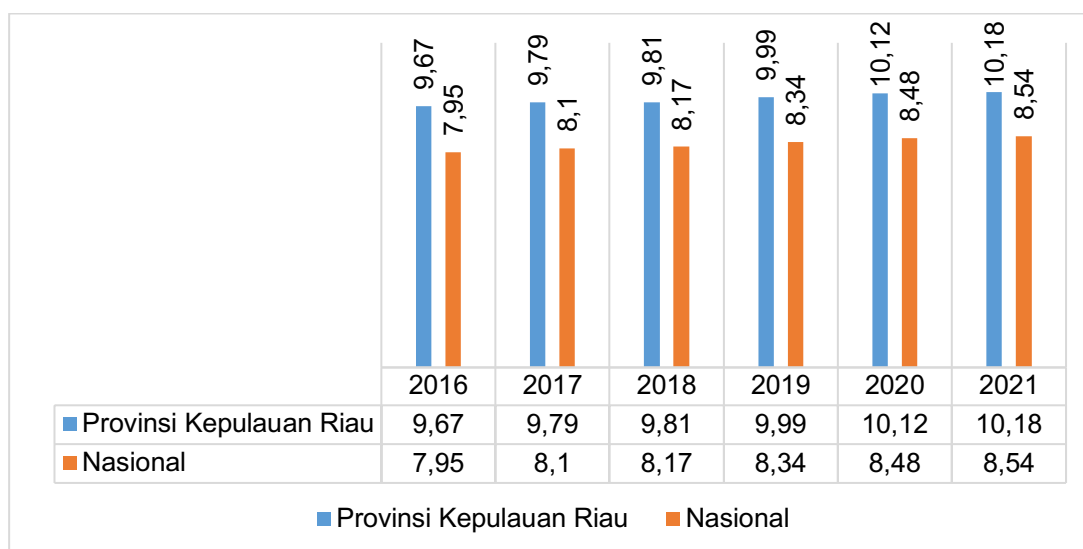
Kemajuan pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau bervariasi. Variasi tersebut tentunya disebabkan oleh faktor sumber daya (alam dan manusia) dan kebijakan pemerintah daerah yang berbeda. Capaian pembangunan manusia yang tercermin dari angka IPM perlu terus ditingkatkan dan diawasi agar pembangunan manusia dapat terlaksana dengan baik dan merata. Kota Batam menempati peringkat pertama se-Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan Kabupaten Lingga menempati peringkat terbawah. Peringkat kedua sampai peringkat keenam berturut-turut diduduki oleh Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas.

Gambaran indikator pembentuk IPM Provinsi Kepulauan Riau secara lengkap sebagai berikut:

1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan, yaitu dari sebesar 9,67 tahun naik menjadi sebesar 10,18 tahun pada 2021. Dengan kondisi tersebut, pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau telah mampu memenuhi wajib belajar 9 tahun bagi masyarakat yang

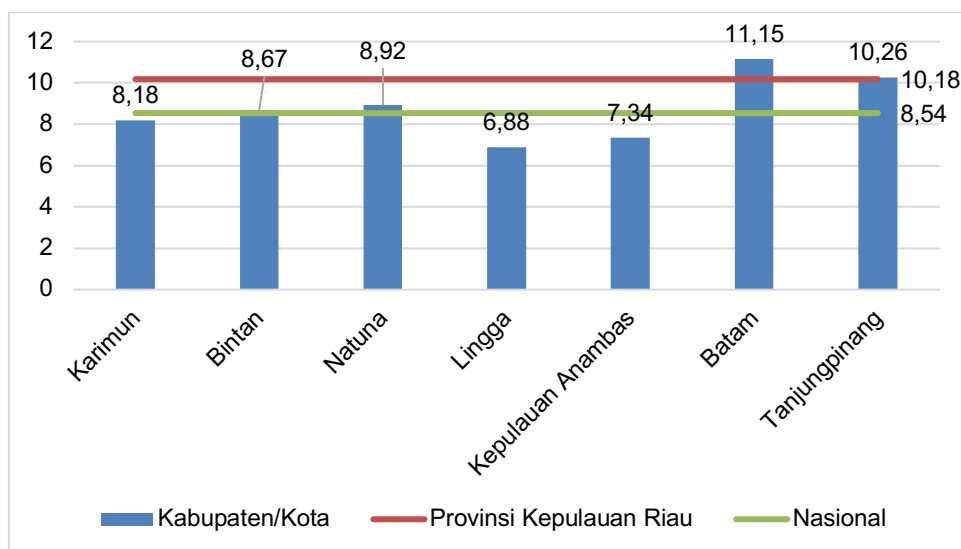
menjadi kebijakan pemerintah pusat, meskipun secara Nasional pencapaian rata-rata lama sekolah masih di bawah 9 tahun, secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional Tahun 2022

Gambar 2. 10
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2021

Posisi relatif rata-rata lama sekolah kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 angka tertinggi dicapai Kota Batam sebesar 11,15 tahun dan terendah di Kabupaten Lingga sebesar 6,88 tahun.

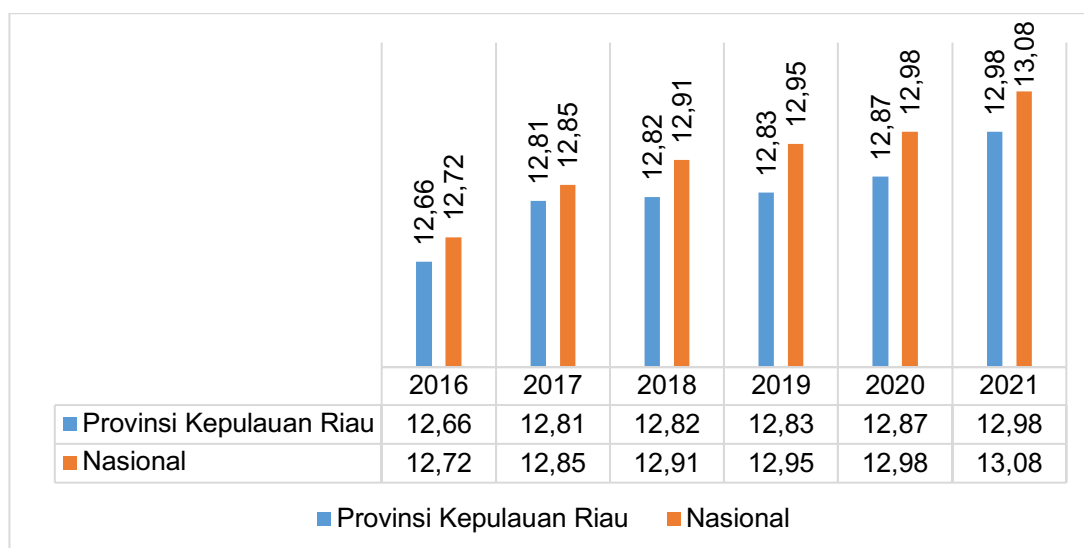


Sumber : BPS Nasional Tahun 2022

Gambar 2. 11
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

2. Angka Harapan Lama Sekolah

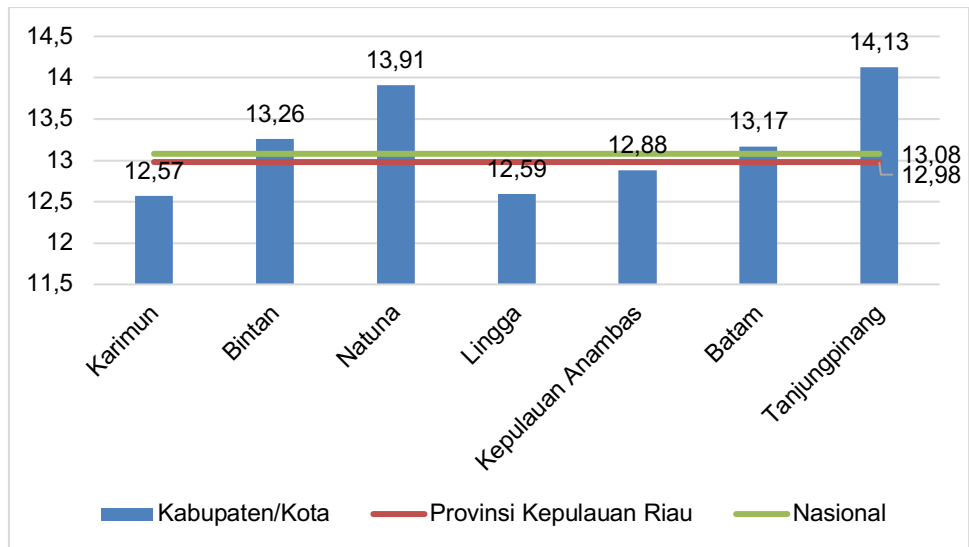
Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS Provinsi kepulauan Riau pada kurun waktu enam tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2016 sebesar 12,66 tahun meningkat menjadi sebesar 12,91 tahun pada tahun 2021. Kondisi tersebut berkontribusi positif terhadap pencapaian di tingkat nasional, secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional Tahun 2022

Gambar 2. 12
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional
Tahun 2016-2021

Angka Harapan Lama Sekolah kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021, menunjukkan bahwa nilai tertinggi berada di Kota Tanjungpinang sebesar 14,13 tahun, dan angka terendah berada di Kabupaten Karimun sebesar 12,57 tahun, secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.

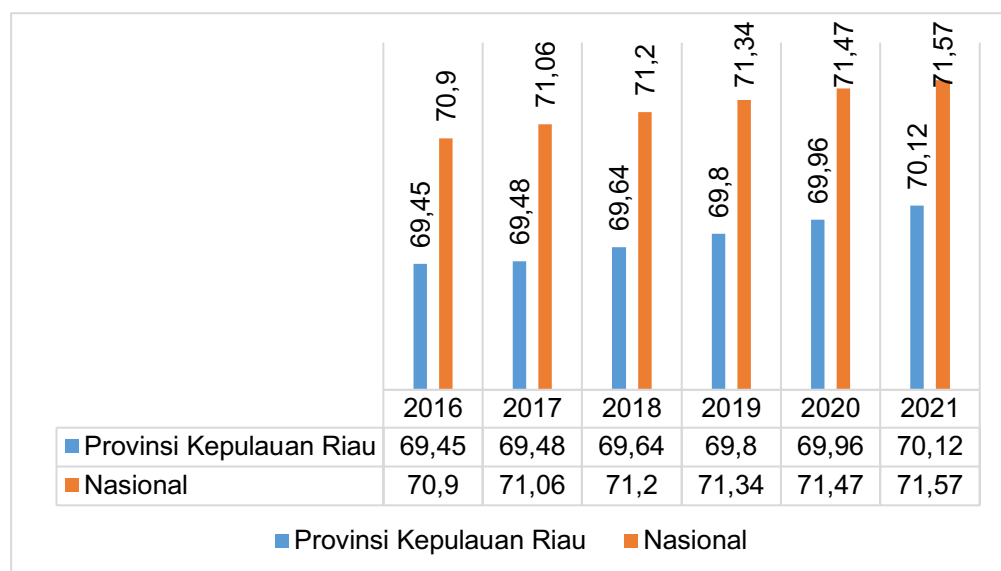


Sumber : BPS Nasional Tahun 2022

Gambar 2. 13
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

3. Angka Harapan Hidup

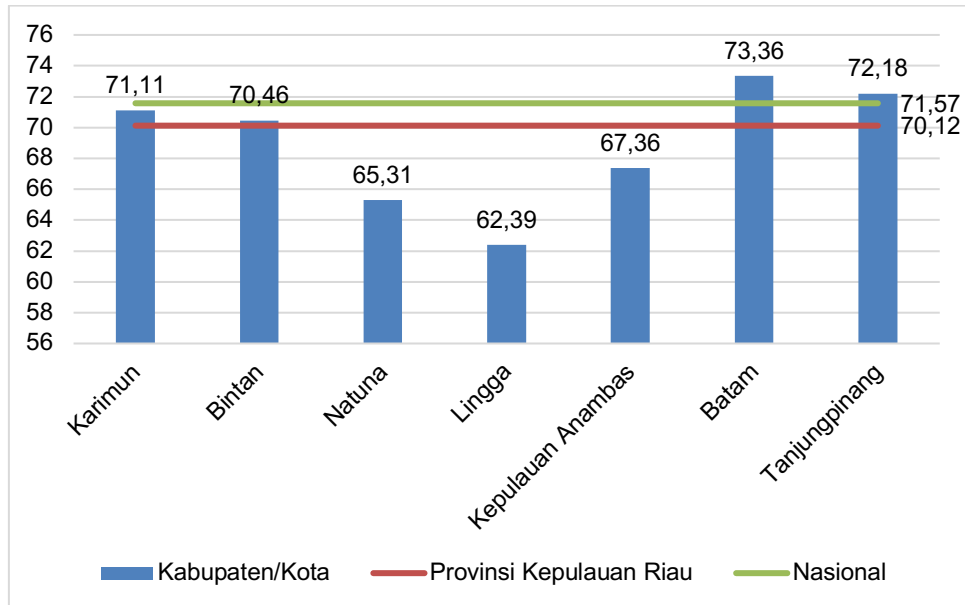
Angka Harapan Hidup merupakan angka yang menunjukkan perkiraan usia seseorang dihitung sejak dilahirkan. Angka harapan hidup Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 hingga 2021 mengalami peningkatan, yaitu dari sebesar 69,4 5 tahun naik menjadi sebesar 70,12 tahun pada 2021. Kondisi tersebut sama dengan Angka Harapan Hidup Nasional yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.



Sumber : BPS Nasional Tahun 2022

Gambar 2. 14
Perkembangan Angka Harapan Hidup Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2021

AHH Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021, dengan nilai tertinggi dicapai Kota Batam sebesar 73,36 tahun dan terendah di Kabupaten Lingga 62,39 tahun. Capaian AHH Provinsi Kepulauan Riau tergolong tinggi.

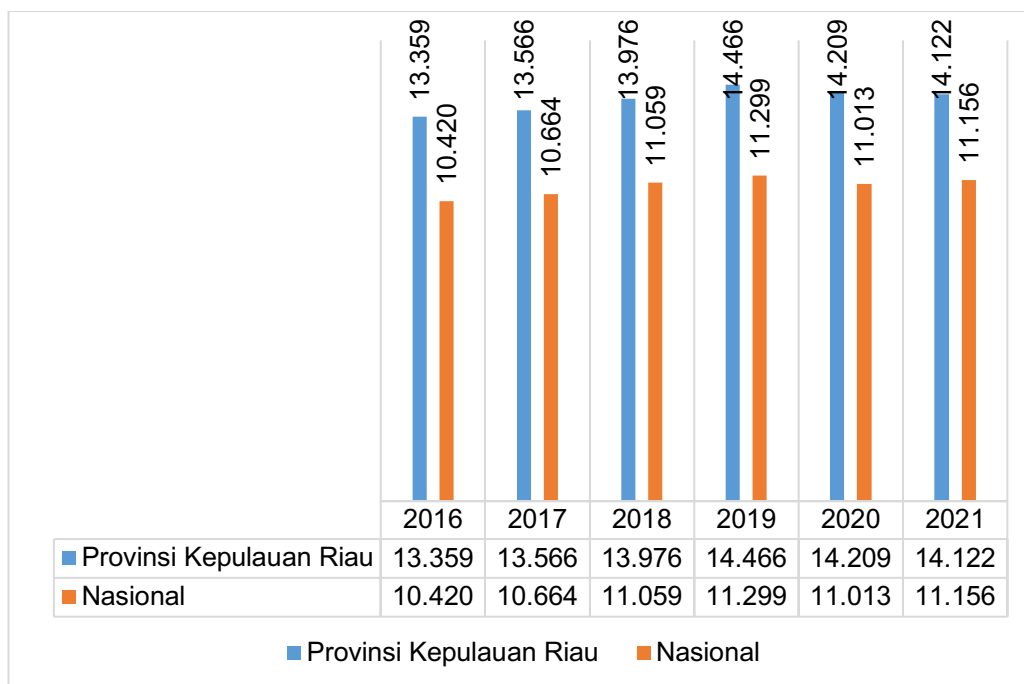


Sumber : BPS Nasional Tahun 2022

Gambar 2. 15
Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

4. Pengeluaran Riil per Kapita (Daya Beli)

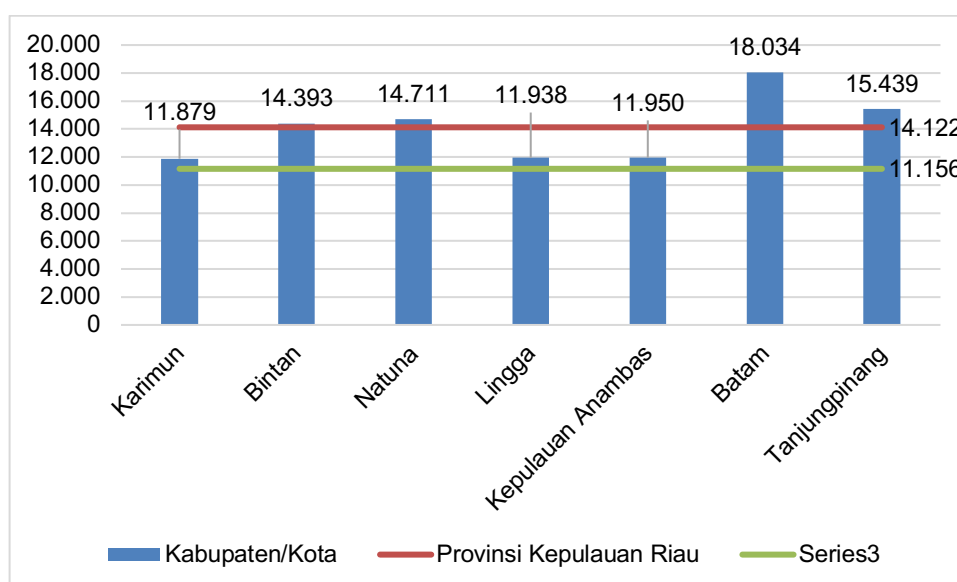
Pengeluaran Riil per Kapita menunjukkan daya beli, yaitu kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Rata-rata pengeluaran per kapita Provinsi kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2021 mengalami kenaikan dari sebesar Rp 13.359 ribu menjadi sebesar Rp 14.122 ribu. Kondisi tersebut berkontribusi positif terhadap pencapaian Nasional yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.



Sumber : BPS Nasional Tahun 2022

Gambar 2. 16
Perkembangan Pengeluaran Riil Perkapita (Daya Beli) Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2021

Pengeluaran Riil per Kapita kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021, angka tertinggi berada di Kota Batam sebesar Rp 18.034 ribu, dan angka terendah berada di Kabupaten Lingga Rp 11.938 ribu.



Sumber : BPS Nasional Tahun 2022

Gambar 2. 17
Pengeluaran Riil per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

B. Ketenagakerjaan

1. Angkatan Kerja

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 adanya peningkatan jumlah angkatan kerja dan jumlah pengangguran jika dibanding keadaan Agustus 2019. Angkatan kerja yang bekerja sebanyak 1.016.600, sedangkan yang menganggur sebanyak 117.176 orang. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2020 mencapai 1.133.776 orang, meningkat 128.616 orang dari tahun 2019. Dari angkatan kerja tersebut, jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2017 sebanyak 896.931 orang dan jumlah penganggur sebanyak 69.160 orang.

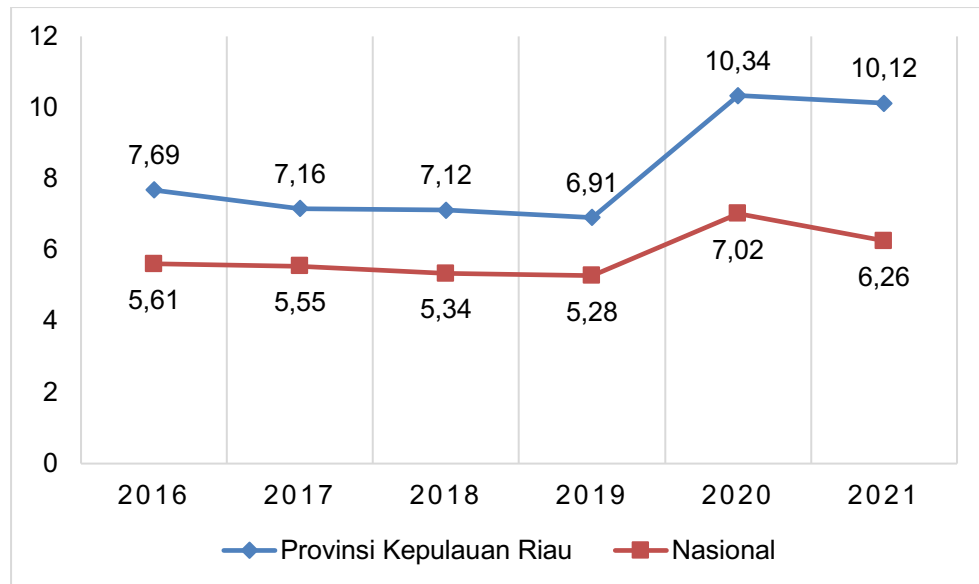
Tabel II. 34
Jumlah dan Persentase Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, dan Pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja	Penduduk Bekerja		Pengangguran	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
2015	891.988	836.670	93,80	55.318	6,20
2016	931.436	859.813	92,31	71.622	7,69
2017	966.091	896.000	92,74	69.160	7,16
2018	970.132	901.019	92,88	69.113	7,12
2019	1.005.160	935.682	93,09	69.478	6,91
2020	1.133.776	1.016.600	89,66	117.176	10,34

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2021

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

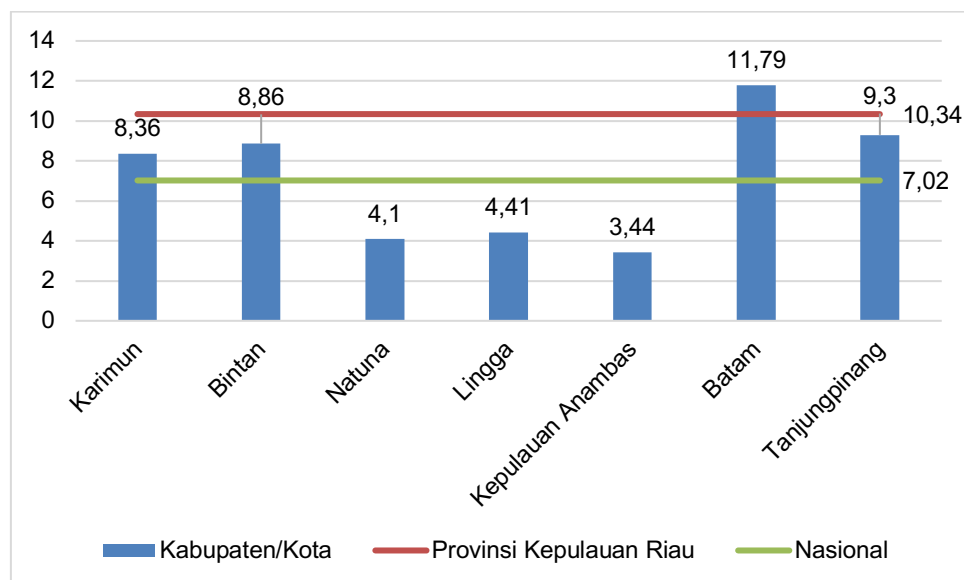
Persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja disebut dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. TPT Provinsi Kepulauan Riau pada Agustus 2021 mencapai 10,12%, kondisi ini meningkat dibandingkan dengan TPT Agustus 2016 sebesar 7,69%, seperti terlihat pada Gambar berikut ini.



Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Kepulauan Riau, 2022

Gambar 2. 18
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2021

Dilihat per kabupaten/kota, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 tertinggi di Kota Batam yaitu sebesar 11,79%, sedangkan terendah di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 3,44, seperti terlihat pada Gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Gambar 2. 19
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk ke dalam angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Kepulauan Riau secara garis besar menunjukkan peningkatan setiap tahunnya yang beriringan dengan penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang juga bertambah setiap tahunnya.

Penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018 dan 2019 cenderung menurun. Namun, pada tahun 2020 angka tersebut kembali mengalami peningkatan sebesar 1,52 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan nilai ini sangat dipengaruhi oleh dampak dari pandemi COVID-19 terhadap dunia kerja. Jumlah angkatan kerja diharapkan untuk ke depannya lebih meningkat agar semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel II. 35
Jumlah dan Persentase Angkatan Kerja dan TPAK Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2015-2020

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja (orang)	Persentase TPAK
2015	891.988	65,07
2016	931.435	65,93
2017	966.091	66,41
2018	970.132	64,72
2019	1.005.160	64,76
2020	1.133.776	66,28

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2021

BAB III

KONDISI SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa) SAAT INI

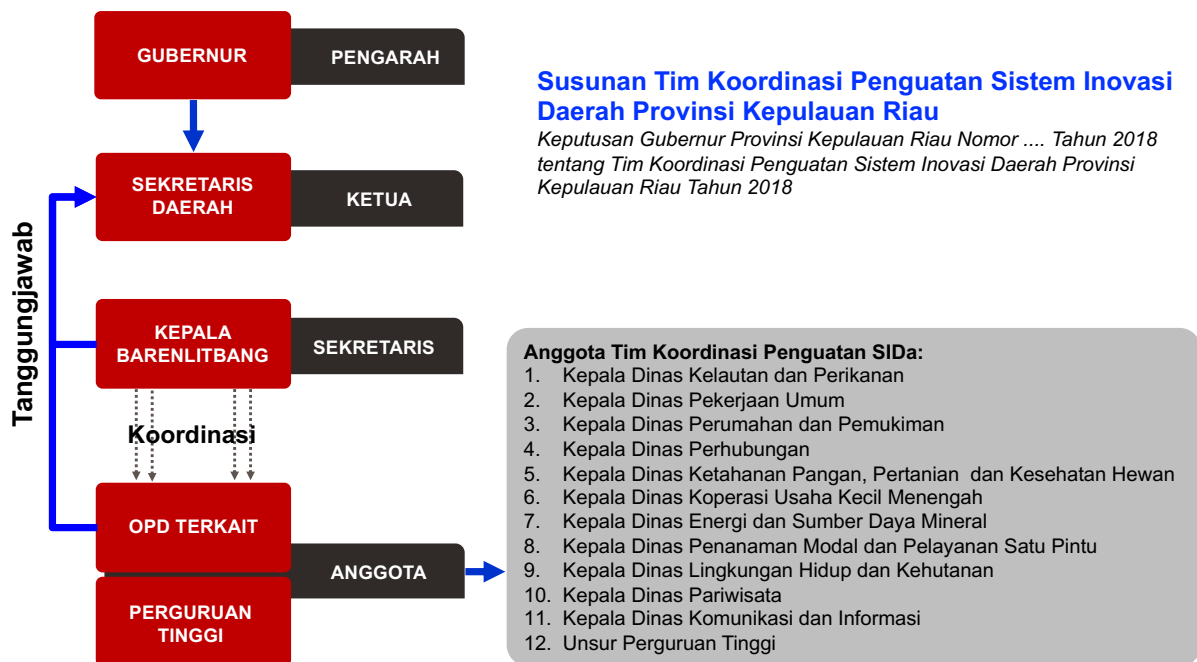
3.1 Kebijakan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

3.1.1 Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah daerah, agar mampu berdaya saing, terarah, terpadu dan berkesinambungan, diperlukan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagai implementasi Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, pada tahun 2018 ini telah menerbitkan Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018.

Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Tim Koordinasi Penguatan SIDa mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, membina, mengawasi, dan melaporkan penguatan pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Kepulauan Riau, serta bertanggungjawab terhadap (1) Penyusunan dokumen Roadmap penguatan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau; (2) Pengintegrasian Dokumen Program Sistem Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau; (3) Sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas Sistem Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau; (4) Penataan unsur Sistem Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau; (5) Pengembangan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau; (6) Persiapan rumusan kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau; (7) Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan penguatan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau; (8) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau; dan (9) Pelaporan hasil pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Bagan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penguatan SIDa Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut :



Gambar 3. 2
Bagan Susunan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

3.1.2 Kebijakan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam Kerangka Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Roadmap SIDa Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan arahan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagai upaya menyikapi tuntutan peningkatan produktivitas daya saing daerah yang mensyaratkan kapasitas inovatif dengan mengacu pada agenda kebijakan inovasi saat ini. Amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada pasal 386 bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu pada pasal 387, Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan perlu mengacu prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) peningkatan efisiensi; (b) perbaikan efektivitas; (c) perbaikan kualitas pelayanan; (d) tidak ada konflik kepentingan; (e) berorientasi kepada kepentingan umum; (f) dilakukan secara terbuka; (g) memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan (h) dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pemerintah dalam rangka mendorong inovasi daerah seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menerbitkan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Pada pasal 4 dan pasal 5, bentuk inovasi daerah sebagai berikut:

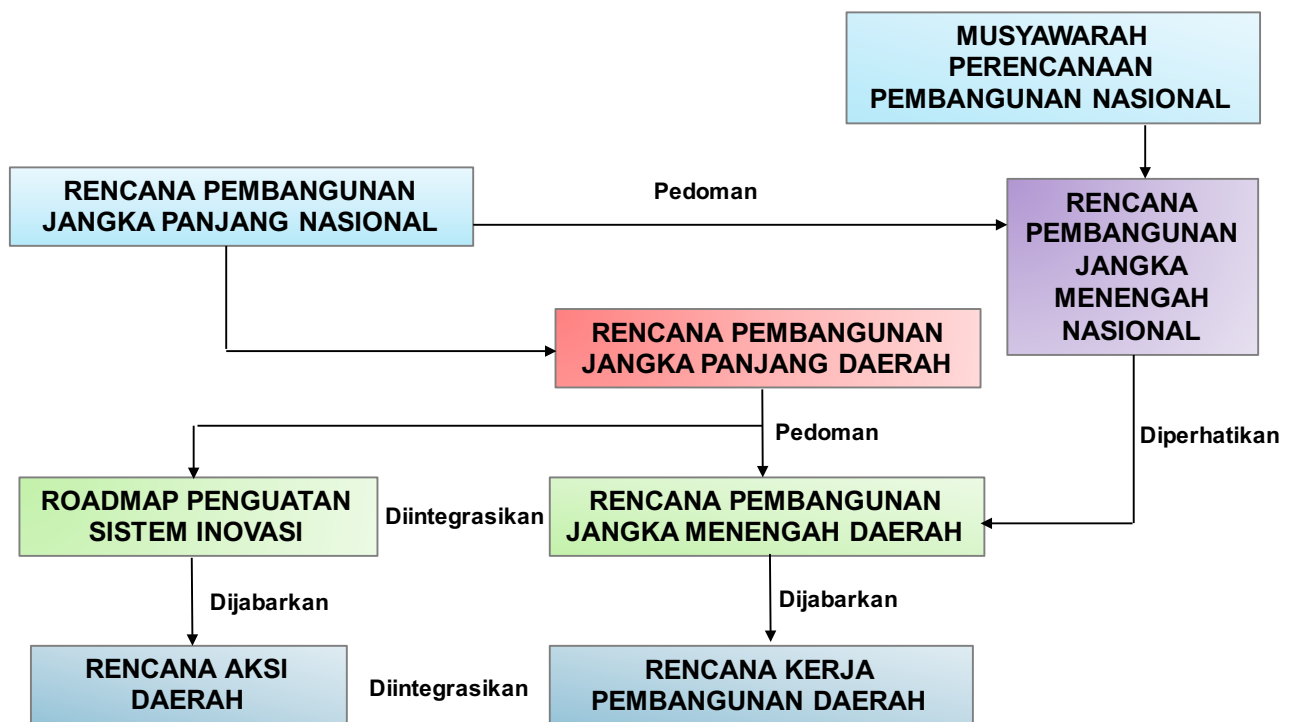
- (1) **Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah**, merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) **Inovasi Pelayanan Publik**, merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) **Inovasi Daerah lainnya**, merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Dalam menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada pasal 3, perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang; rencana pembangunan jangka menengah; dan rencana pembangunan tahunan. Kedudukan Road Map SIDA dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu :

1. Mengacu/mempedomani Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang dan Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk tahap lima tahunan, untuk Provinsi Kepulauan Riau tertuang didalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
2. Mengacu/mempedomani Visi dan Misi pembangunan jangka menengah dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, untuk Provinsi Kepulauan Riau tertuang didalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021. Hasil Roadmap SIDA diharapkan dapat memberikan masukan program pengembangan inovasi sesuai dengan tema dan sub tema serta program prioritas SIDA di Provinsi Kepulauan Riau.

3. Mengintegrasikan Road Map SIDA kedalam rancangan teknokratis atau review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (kondisi ideal).
4. Mengintegrasikan Road Map SIDA kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), terkait dengan penjabaran dalam kegiatan tahunan dari masing-masing OPD pendukung penguatan SIDA.

Dengan demikian Roadmap SIDA Provinsi Kepulauan Riau merupakan dokumen perencanaan yang memberikan masukan tentang arah pembangunan daerah terkait dengan pengembangan inovasi daerah dan IPTEK oleh seluruh stakeholders terkait secara multidisiplin, utamanya memberikan arahan kebijakan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.



Sumber : BPPPT, 2017

Gambar 3. 3
Kedudukan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

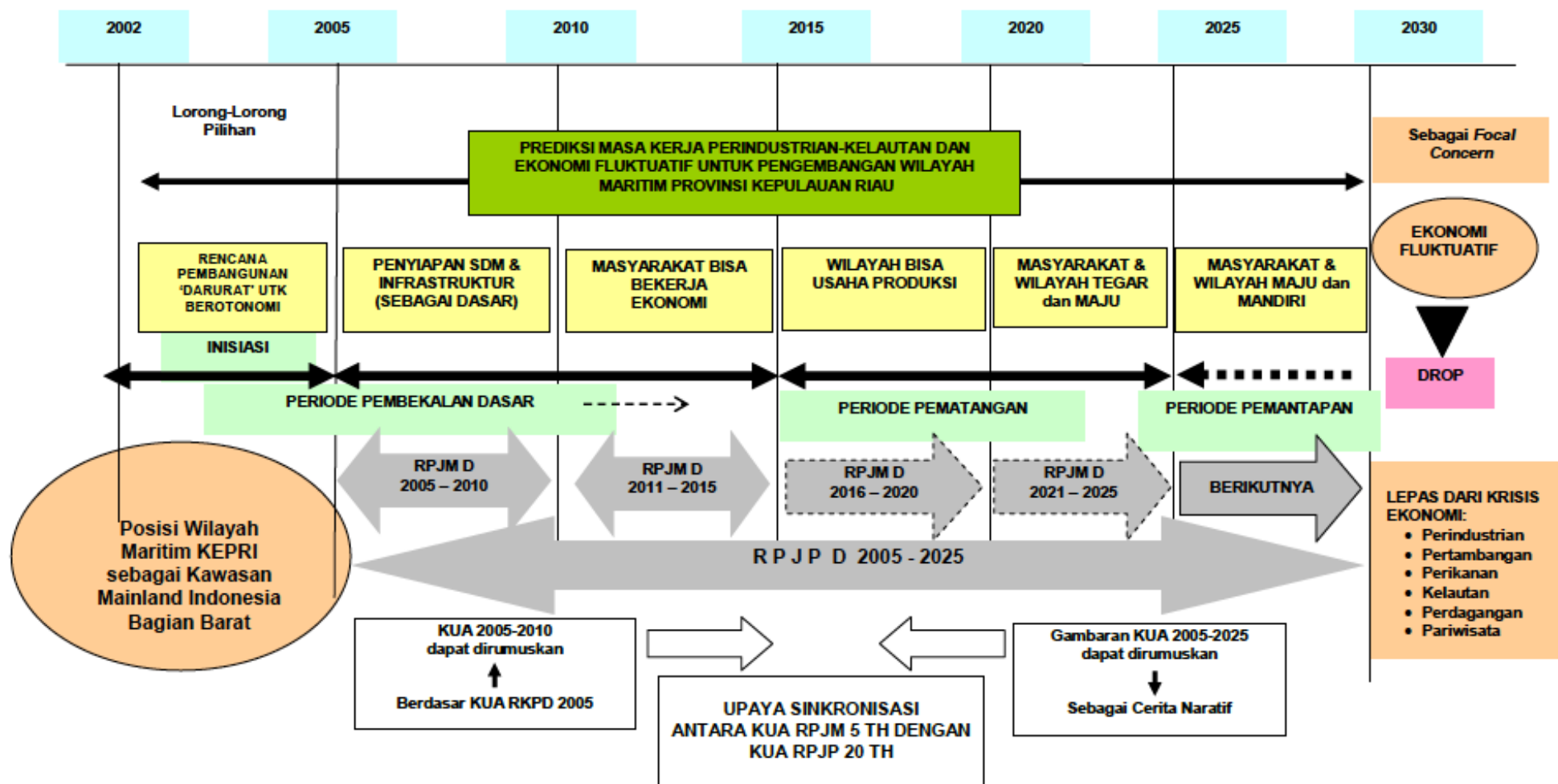
1. RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025

Skenario pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau didasarkan pada asumsi usia produksi/masa kerja sumber daya perikanan/kelautan, pertambangan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata diperkirakan akan mengalami fluktuasi dalam jangka 30 tahun mendatang. Beberapa pemikiran pengembangan Provinsi Kepulauan Riau pasca fluktuatif antara lain pengembangan ekonomi maritim dan bisnis jasa perdagangan di luar kegiatan pertanian pada umumnya di sekitar wilayah gugus laut gugus pulau yang ada, pelayanan jasa industrialisasi kepulauan yang berbasis maritim, pengembangan pariwisata kelautan dan maritim dan potensi jaringan kerja lintas wilayah yang selama ini belum optimal perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Periode pertama merupakan periode inisiasi dimana komitmen pembangunan Provinsi Kepulauan Riau telah dituangkan dalam RPJM Provinsi Kepulauan Riau 2005-2010 adalah penyiapan sumberdaya manusia (SDM) dengan dukungan infrastruktur. Pembangunan SDM menjadi prioritas pembangunan dalam periode ini sebagai kerangka dasar pengembangan Provinsi Kepulauan Riau agar nantinya memiliki pelaku-pelaku pembangunan andal yang secara khusus ditujukan bagi generasi muda saat ini dan juga generasi yang akan datang.

Periode selanjutnya, yaitu periode tahun 2015-2025/periode pematangan. Pada periode ini diharapkan masyarakat atau SDM yang telah dibina akan dapat mengembangkan kegiatan ekonomi, dimana produksi keluarga dapat menjadi produksi wilayah kemudian produksi menyeluruh. Tahap berikutnya lagi dari pasca skenario jangka panjang adalah periode pemantapan (tahun 2026 dan ke depan lagi) pada saat mana masyarakat dan wilayah provinsi telah menjadi tegar dan maju dalam pengertian siap untuk melakukan pembaharuan dan melaksanakan tujuan jangka panjang sehingga mampu mewujudkan visi sebagai wilayah perindustrian pengolahan, pertambangan, perdagangan sektor kelautan dan perikanan dan pariwisata yang andal untuk berupaya lebih maju lagi dengan memanfaatkan ruang darat, laut dan udara secara simultan.

Upaya menciptakan lorong-lorong waktu yang menawarkan berbagai pilihan untuk skenario pengembangan jangka panjang Provinsi Kepulauan Riau dapat dicermati pada gambar berikut:



Sumber : RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025

Gambar 3. 4 Skenario Pengembangan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2002-2030

Posisi Strategis (yang Dinamis) Provinsi Kepulauan Riau dalam Kerangka Skenario Pengembangan Jangka Panjang , yaitu:

1. Dari Visi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau saat ini (2005) yang bertumpu pada SDM diungkapkan dalam posisi geografis wilayah gugus laut gugus pulau Kepulauan Riau dalam konteks wilayah kelautan Indonesia bagian Barat, sebagai "*Hinterland* dengan kegiatan perindustrian/pertambangan/perikanan/perdagangan/pariwisata/jasa regional" Kawasan Barat Indonesia, Nasional dan ASEAN. Hal ini dipakai sebagai TUJUAN pembangunan/VISI membangun Provinsi Kepulauan Riau saat ini dan jangka panjang (wacana ke depan). Posisi geografis saat ini memang sebagai hinterland jasa pelayanan perindustrian/ perikanan/kelautan/perdagangan/pariwisata regional yang belum dinamis tanpa nuansa pengaruh investasi besar.
2. Untuk mencapai tujuan/visi ke depan tersebut diramalkan ada lorong waktu yang perlu dipilih untuk dilalui, dan itu atas dasar kekuatan konteks posisi hinterland kawasan Barat Indonesia dalam wilayah kemaritiman yang lebih luas yang disandang wilayah gugus laut gugus pulau Kepulauan Riau menjadi sebagai jalur pendorong garis kritikal dalam 7 langkah sub-skenario logis-strategis. Sifat kritikal-logis-strategis karena merupakan penentu dan menurut logika perkembangan wilayah kemaritiman dan strategis dalam menggapai cita-cita masa depan secara tepat sasaran.
3. Dapat digambarkan pada situasi saat ini posisi wilayah gugus laut gugus pulau Provinsi Kepulauan Riau sebagai titik awal dan sekaligus sebagai titik tujuan dengan kuantitas dan kualitas yang berbeda (cerminan generasi muda ke arah manusia dewasa/matang/lanjut). Yaitu: langkah (1) hinterland jasa regional Laut Natuna/Kawasan Barat Indonesia/Indonesia/ASEAN, sebagai situasi kondisi awal dan situasi kondisi tujuan/akhir skenario. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan persyaratan kerja sungguh-sungguh (diprogramkan dan direalisasikan perwujudannya) dengan 7 langkah berikut ini:
 - a. Langkah (1) : sebagai hinterland jasa/pelayanan regional yang memiliki syarat sebagai "a resource hinterland of activities" berbagai sektor yang mungkin dikembangkan, memerlukan simpul interaksi komoditas di Batam/Jakarta/Pontianak masa kini dan masa datang perlu digarap secara memadai.
 - b. Langkah (2) : diperlukan pembentukan/penjalinan kerjasama lintas kota-kabupaten-provinsi secara regional Provinsi Kepulauan Riau/Kawasan

Barat Indonesia/Indonesia/ASEAN, akan mempersyaratkan kelembagaan dan mekanisme kerja dengan dukungan SDM dan perangkat pemerintah daerah dan lembaga bisnis dan sumberdaya lain guna mengoperasikan kerjasama pembangunan kemaritiman' tersebut agar dapat berfungsi menggerakkan potensi ekonomi daerah dan regional.

- c. Langkah (3) : tumpuan harapan di ruang darat, laut dan udara "Kemaritiman" sebagai arena kehidupan baru harus digarap dalam pengertian yang lebih luas. Aset darat, laut dan udara dengan keseluruhan isi dan konteks (wawasan bahari dalam Kedaulatan Negara di Ruang Laut dan Udara) perlu diupaya-kembangkan sebagai ladang penghidupan dengan upaya korporasi produksi darat-udara. Banyak kemungkinan yang dapat dijadikan langkah aksi sebagai orang penjelajah kelautan luas (sejarah dan hikayat turunan pejuang pelaut/kemaritiman) dengan hasil ladang darat, laut dan udara dimanapun, perlu diproses di wilayah gugus laut gugus pulau Provinsi Kepulauan Riau sehingga dengan hubungan simpul koleksi distribusi hasil 'Kemaritiman' (seabusiness and seaindustrial region) di SIMPUL INTI Gugus Bareleng Bintan.
- d. Langkah (4) : dengan semua hinterland dan simpul gugus laut gugus pulau yang dapat dijangkau, akan menciptakan alur sistem hubungan hinterland dan simpul, untuk ini perlu menjalin upaya korporasi kegiatan seabusiness dan seaindustry di wilayah hinterland dan simpul-simpul pemrosesan, tentu dengan pusat simpul di Kota Batam/Tanjung Balai Karimun/Dabo/Ranai. Berbagai upaya dapat di 'kerja-korporasi'-kan dalam kegiatan pelayanan jasa kemaritiman umum (corporate servicing) produksi atau perdagangan lintas wilayah (corporate business) dengan menciptakan secara berjenjang sub simpul antara simpul koleksi dan simpul distribusi. Akan dapat tercipta "multi aksi antar sektor dan lintas wilayah."
- e. Langkah (5) : meski perlahan tapi pasti dari upaya interaksi di wilayah hinterland-simpul (sejauh upaya dan tebaran jangkauan) perlu diupayakan penjalinan kerjasama hulu – hilir – simpul – konsumen – pasar dengan berbagai kegiatan bisnis yang mungkin (misal: corporate seabusiness, corporate market networking) menciptakan jaringan kerja pemasaran: transportasi dan depo transit/terminal seabisnis dan lain-

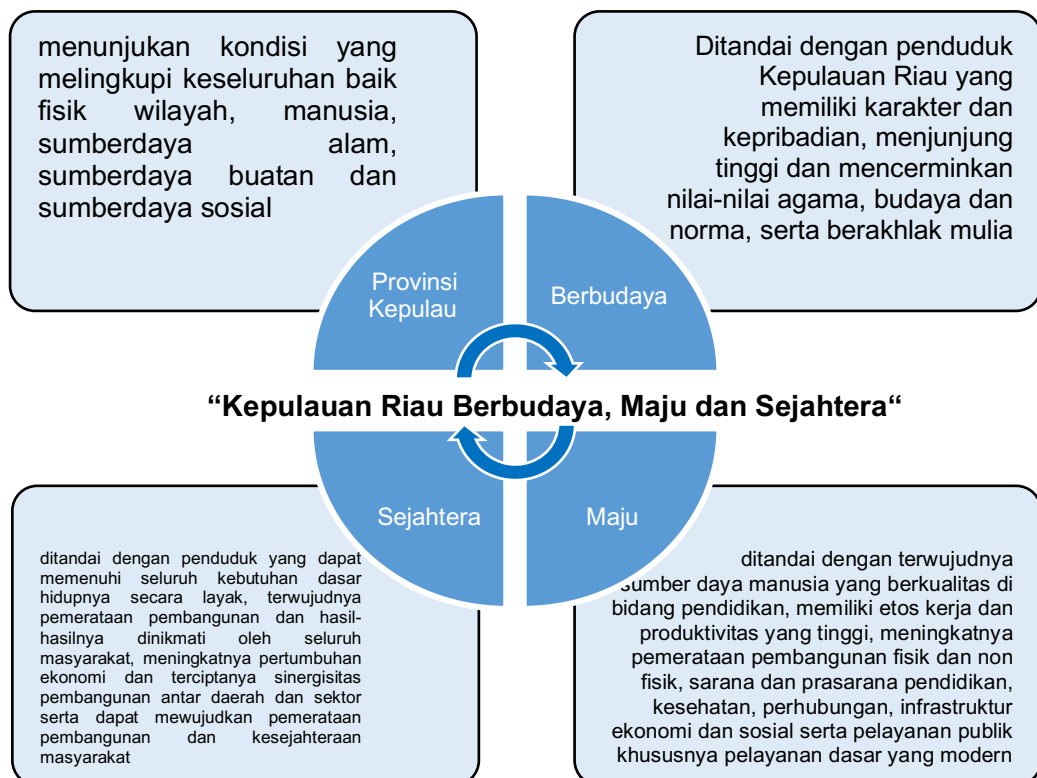
lain sehingga selalu ada arus barang/jasa/manusia antara hinterland dengan simpul (hubungan desa-kota). Diharapkan di wilayah darat, laut dan udara gugus laut gugus pulau Provinsi Kepulauan Riau dapat terciptakan jejaring dan pusat jaringan yang kompleks oleh inovasi/improvisasi masyarakat sehingga terbentuk wilayah kemaritiman Kepulauan Riau sebagai "seapolitan region" Indonesia Bagian Barat.

- f. Langkah (6) : Implikasi bagi masyarakat dan wilayah gugus laut gugus pulau Provinsi Kepulauan Riau secara internal akan terbiasa menjadi pelaku proaktif dalam tata laku ekonomi regional dengan dukungan budaya dan infrastruktural serta sumberdaya-sumberdaya kelautan yang diupayakan berkembang (harapan meningkat secara kuantitas dan kualitas). Dari anak muda menjadi pejuang maritim dewasa menjadi matang dalam memproduksi untuk keluarga-berproduksi untuk wilayah gugus laut gugus pulau kabupaten/kota//provinsi dan wilayah kelautan lebih luas.
- g. Langkah (7) : terwujudnya visi-misi Provinsi Kepulauan Riau jangka panjang, secara integratif-sinergis langkah-langkah sebelumnya yang selalu diupayakan meningkat kuantitas dan kualitas yang diasumsikan akan menggapai cita-cita masa depan secara bertahap pula/berjenjang namun pasti, ke arah 'hinterland investasi/jasa kemaritiman regional" itu. Secara nyata diharapkan Provinsi Kepulauan Riau betul-betul merupakan hinterland produksi-distribusi barang/jasa/manusia kelautan dalam Konteks Regional Maritim Kepulauan Riau/Kawasan Barat Indonesia bahkan nasional dan internasional, dengan pelayanan jasa pengolahan kemaritiman dan upaya corporate sea-exporting yang memiliki jaringan kerja besar ekspor/impor dalam negeri dan luar negeri di bidang kelautan/kemaritiman.

Ketujuh (7) langkah upaya pengembangan dari posisi hinterland jasa produksi kelautan umum/perdagangan/pariwisata awal ke arah tercapainya posisi dinamis hinterland produksi dengan distribusi sea-bisnis sea-industrial di masa depan yang perlu dioperasionalkan secara sungguh-sungguh oleh semua pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) wilayah maritim Provinsi Kepulauan Riau.

Filosofi yang mendasari pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana yang terdapat pada Motto Provinsi Kepulauan Riau, yaitu *“Berpancang Amanah, Bersauh Marwah”*. Berdasarkan sejarah, potensi, kondisi dan permasalahan yang dialami pada masa lalu serta tantangan dan peluang dihadapi Provinsi Kepulauan Riau dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang yang dilandasi oleh kehendak dan cita-cita luhur pembentukan Daerah, maka Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025 yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 adalah **“Kepulauan Riau Berbudaya, Maju dan Sejahtera”**.

Secara konseptual visi pembangunan daerah tahun 2005–2025 mengarah dan mendukung tujuan pembangunan jangka panjang nasional 2005–2025 yaitu Indonesia yang mandiri, maju dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025. Visi pembangunan tersebut harus dapat diukur agar mudah dinilai kondisi daerah 20 (dua puluh) tahun yang akan datang yaitu kondisi berbudaya, kemajuan dan kesejahteraan yang ingin diwujudkan. Penjelasan unsur Visi tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 5
Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025 Dalam RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025

Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Riau dijabarkan kedalam 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau yang Memiliki Kepribadian dan Berakhlak Mulia.
2. Menciptakan Sumber Daya Manusia Kepulauan Riau yang Berkualitas Pendidikan, Memiliki Etos Kerja dan Produktivitas yang Tinggi.
3. Meningkatkan Daya Saing Daerah Agar Mampu Melaksanakan Pembangunan Dalam Perekonomian Nasional dan Global Khususnya Dalam Bidang Industri Pengolahan, Perikanan dan Kelautan serta Pariwisata.
4. Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Dasar Hidupnya Secara Layak.
5. Mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Bidang Industri Pengolahan, Perikanan dan Kelautan Serta Pariwisata.

2. RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Visi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2021–2024 dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yaitu:

“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:

- Makmur: Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang layak, sehat, dan sejahtera.

- Berdaya Saing: Terwujudnya masyarakat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.
- Berbudaya: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nusantara.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026, yaitu:

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan dengan kembali memulihkan perekonomian Kepulauan Riau yang sempat terjatuh cukup dalam akibat Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang secara demografis sebagai daerah maritim dengan potensi laut yang besar tentu menjadi suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi lainnya seperti pertambangan, pariwisata dan lain-lain yang akan dikelola secara maksimal sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi dan *smart service* kepada masyarakat, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk

menunjang pelaksanaan hal tersebut maka kualitas dan penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenahi.

3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Takwa.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh Era Globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing dalam hal keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kesehatan, dan daya saing SDM. Namun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan berkarakter.

4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Budaya Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga kelestariannya. Budaya Melayu sebagai suatu filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau pernah mengantarkan Kepulauan Riau menjadi daerah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Upaya pelestarian budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau tetap terjaga sehingga tidak tergerus oleh zaman. Di sisi lain, kemajemukan masyarakat Kepulauan Riau menjadi modal sosial tersendiri dalam beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk mempererat hal tersebut maka keselarasan, keserasian, dan toleransi antar umat beragama, suku, dan etnis menjadi pilar penting yang harus dijaga dan dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di masyarakat.

5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir. Masih terjadinya ketimpangan

pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang buruk. Hal tersebut dapat terselesaikan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, akses transportasi antar pulau dan juga pembangunan air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau setiap daerah.

Di dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, gambaran mengenai pengembangan Sistem Inovasi Daerah termuat dalam Analisis Permasalahan dan Isu-Isu Strategis. Namun kondisi saat ini pengembangan sistem inovasi daerah belum optimal pengembangannya, padahal potensi kemaritiman dan pariwisata Provinsi Kepulauan Riau merupakan modal dan potensi besar dalam pengembangan inovasi daerah.

Jika dilihat dari prioritas pemanfaatan ruang di Provinsi Kepulauan Riau, menurut RTRW Provinsi Kepulauan Riau, maka potensi pengembangan Sistem Inovasi Daerah diwujudkan dalam : *pertama*, Struktur Ruang Provinsi melalui perwujudan sistem perkotaan, transportasi darat-laut-udara, jaringan energi, telekomunikasi, sumberdaya air dan jaringan lainnya; *kedua*, perwujudan Kawasan Strategis Provinsi; *ketiga*, Perwujudan Pola Ruang Provinsi melalui pengendalian pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya darat; dan *keempat*, Perwujudan Pola Ruang Laut melalui perlindungan dan pengawasan kawasan laut, serta pengembangan dan pemanfaatan sumber daya laut.

Implikasi tantangannya: (1) harus mengembangkan struktur ruang provinsi melalui sistem perkotaan, transportasi darat-laut-udara, jaringan energi, telekomunikasi, sumberdaya air dan jaringan lainnya yang saling interkoneksi; (2) harus menciptakan kawasan strategis provinsi yang disesuaikan dengan keunggulan dan potensi daerah; (3) menata dan memanfaatkan kawasan lindung dan budidaya darat yang berorientasi ekonomi perdagangan yang kompetitif, maupun yang memberi kenyamanan bagi pelaku usaha atau investor; (4) harus mengembangkan sistem pengawasan Pola Ruang Laut berupa perlindungan dan pengawasan kawasan laut, serta pengembangan dan pemanfaatan sumber daya laut. (5) mengembangkan daerah yang tanggap dan cepat dalam mengembangkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Dalam menyusun Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Provinsi Kepulauan Riau, perlu memperhatikan arah kebijakan tahunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021, dimana nantinya akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Arah kebijakan tahunan

ini dimaksudkan untuk mengetahui tahapan dan prioritas setiap tahun yang ditetapkan dengan disesuaikan urgensi permasalahan dan isu strategis dalam kurun waktu tahun berjalan. Namun demikian kesinambungan arah kebijakan tahunan ini perlu diperhatikan dalam rangka mencapai sasaran RPJMD Kepulauan Riau.

Arah kebijakan tahunan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026, yaitu:

- 1) Pembangunan pada tahun pertama akan diarahkan pada Pemulihan Ekonomi Dengan Penguatan Jaring Pengaman Sosial Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.

Pada tahun pertama ini, fokus utama kebijakan pembangunan yang akan dijalankan ialah terkait dengan upaya pemulihan ekonomi serta menjamin layanan Kesehatan masyarakat ditengah Pandemi Covid-19. Beberapa strategi yang akan difokuskan pada tahun pertama ini ialah peningkatan kapasitas permodalan bagi UMKM, pemberian insentif dan akses permodalan bagi para industri yang mengalami kesulitan ekonomi, peningkatan promosi wisata melalui berbagai event dengan memanfaatkan media dan teknologi informasi, peningkatan kapasitas dan perlindungan bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), percepatan penyediaan sarana dan prasarana pemulihan Kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, digitalisasi layanan kesehatan melalui layanan berbasis IT, mengembangkan minat dan bakat pemuda agar terhindar dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), perluasan kesempatan kerja, meningkatkan kualitas sistem pemberdayaan sosial, penguatan sektor pertanian berbasis kearifan lokal, mengintensifkan penyebaran informasi publik secara up to date melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan, pemerataan layanan kesehatan dengan menyediakan layanan kesehatan sampai ke desa dan dusun, ketersediaan BUMD pertanian dan perkebunan, pemetaan potensi investasi, penambahan tenaga medis di pulau-pulau seperti Dokter Keluarga, bidan keluarga dan perawat, peningkatan gizi masyarakat melalui peningkatan gizi dan anak, mengintensifkan penyebaran informasi publik secara up to date melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, memaksimalkan penerapan e-government guna memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan, mengintensifkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam perekaman dan pendataan penduduk, mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pendekatan kesejahteraan keluarga, menjamin perlindungan sosial dan

Kesehatan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan pelecehan, meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dan unsur kebudayaan lainnya dalam pengembangan budaya Melayu, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar umat beragama, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar etnis dan suku, meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel, meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal, jaminan pengembangan karir bagi apar ASN berprestasi, penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kompetensi ASN yang berkelanjutan, menjamin pemenuhan hak anak (PHA), bantuan permodalan bagi para pelaku usaha sektor pertanian, mendorong eksistensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penopang ekonomi desa, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan secara merata bagi seluruh masyarakat, meningkatkan kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan, efisien, dan efektif, meningkatkan layanan SPBE (Administrasi pemerintahan, ASN, Bisnis, dan Publik), mengembangkan layanan pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan merata, mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang meritokratis dan berintegritas, mendorong keberlanjutan sekolah dari dasar hingga perguruan tinggi, internalisasi dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya Melayu, serta pengoptimalan pengelolaan sumber daya kesehatan secara berkelanjutan, efisien, dan efektif.

- 2) Pembangunan pada tahun kedua akan diarahkan pada Peningkatan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Pembangunan Infrastruktur serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.

Pada tahun kedua ini, diharapkan Pandemi Covid-19 sudah tertangani dengan baik sehingga aktivitas ekonomi masyarakat sudah berjalan dengan normal kembali. Oleh karena itu, pada tahun kedua ini fokus pembangunan akan diarahkan pada akselerasi untuk meningkatkan ekonomi yang sudah pulih kembali. Beberapa strategi yang akan difokuskan pada tahun kedua ini ialah peningkatan kualitas kelembagaan UMKM melalui pemanfaatan teknologi informasi, jaminan pengembangan karir bagi apar ASN berprestasi, penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kompetensi ASN yang berkelanjutan, fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi, percepatan pemerataan layanan kelistrikan untuk setiap wilayah, peningkatan penataan desa dan kerjasama desa, peningkatan

upaya pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, optimalisasi penerapatan Free Trade Zone secara menyeluruh, pengembangan tourism linkage networking antar kabupaten dan kota, pengembangan wisata ramah kesehatan (model kegiatan wisata pada masa pandemi), divesifikasi objek wisata yang adaptif dan tanggap terhadap perubahan lingkungan, meningkatkan daya saing UMKM, penguasaan dan peningkatan industri kecil menengah (IKM), optimalisasi kontribusi BUMD terhadap peningkatan PAD, optimalisasi pengelolaan potensi PAD, kemudahan layanan perizinan dengan one day service, pemetaan potensi investasi, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan, peningkatan kapasitas dan kualitas para pelaku ekonomi kreatif secara inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas tata kelola dan layanan Pendidikan yang bermuatan lokal dan sinkron dengan kebutuhan Industri, peningkatan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan, akselerasi pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan, mengembangkan peta rawan bencana dan sistem tanggap bencana yang antisipatif dengan melibatkan kesiapsiagaan masyarakat, mengembangkan sistem pemulihan bencana yang terintegrasi, peningkatan sarana dan prasarana penanganan bencana pemetaan kluster daerah pertanian secara terpadu dengan menyesuaikan kondisi dan potensi masing-masing daerah, meningkatkan kontribusi sektor industri non migas terhadap PDRB harga berlaku, meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku, pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan, Pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan, Penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan produksi perikanan, Pengembangan perikanan tangkap, Pengembangan perikanan budidaya, Pengembangan akses pasar perikanan orientasi ekspor, Pengembangan kawasan strategis industri sektor perikanan, meningkatkan layanan SPBE (Administrasi pemerintahan, ASN, Bisnis, dan Publik), peningkatan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel, meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal, mengintensifkan penyebaran informasi publik secara up to date melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, memaksimalkan penerapan e-government guna memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan, mengintensifkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam perekaman dan pendataan penduduk, penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan produksi perikanan

dan kelautan, peningkatan kapasitas ekonomi perempuan pada sektor produktif dan ekonomi keluarga, meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dan unsur kebudayaan lainnya dalam pengembangan budaya Melayu, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar umat beragama, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar etnis dan suku, peningkatan partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata berbasis budaya lokal, mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang meritokratis dan berintegritas, internalisasi dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya Melayu, serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah daratan dan pesisir.

- 3) Pembangunan pada tahun ketiga akan diarahkan pada Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah untuk Kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.

Pada tahun ketiga diharapkan roda perekonomian sudah pulih dan mengalami peningkatan yang pesat, sehingga perlu terus ditingkatkan dengan tambahan investasi serta penguatan daya saing Daerah. Beberapa strategi yang akan difokuskan pada tahun ketiga ini ialah mendorong pembukaan wilayah industri baru berbasis potensi keunggulan daerah, peningkatan investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, penyederhanaan layanan perizinan investasi untuk memberikan kemudahan bagi para investor, perlindungan Ketenagakerjaan, jaminan pengembangan karir bagi apra ASN berprestasi, penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kompetensi ASN yang berkelanjutan, penyediaan fasilitas pendukung dalam upaya hutan lestari, pemulihan kawasan-kawasan tercemar serta berpotensi mengalami kerusakan lingkungan, pengembangan kawasan strategis industri dan pariwisata berbasis kemaritiman, pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan, pembinaan Hubungan Industrial, pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan, penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan produksi perikanan, pengembangan perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya, pengembangan akses pasar perikanan orientasi ekspor, pengembangan kawasan strategis industri sektor perikanan, penguasaan dan peningkatan industri kecil menengah (IKM), pengembangan industri galangan kapal, pengembangan pariwisata maritime, meningkatkan kontribusi sektor industri non migas terhadap PDRB harga berlaku, meningkatkan layanan SPBE (Administrasi pemerintahan, ASN, Bisnis, dan Publik), peningkatan tatalaksana konsesi tata ruang laut untuk

perkapalan, Pengembangan pelabuhan komersial dan niaga, Peningkatan tatalaksana konsesi migas bawah laut, Penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan sektor kelautan, Pengembangan kawasan strategis industri sektor kelautan, pemanfaatan jasa lingkungan dan perhutanan sosial, peningkatan sanitasi lingkungan, mendorong pemulihan kawasan-kawasan hutan yang telah tercemari, mengintensifkan penyebaran informasi publik secara up to date melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, memaksimalkan penerapan e-government guna memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan, peningkatan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel, meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal, mengintensifkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam perekaman dan pendataan penduduk, menumbuhkan jiwa entrepreneur muda yang peka terhadap pengembangan potensi regional, internalisasi dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya Melayu, meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dan unsur kebudayaan lainnya dalam pengembangan budaya Melayu, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar umat beragama, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar etnis dan suku, mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur vital yang menjadi kebutuhan masing-masing wilayah.

- 4) Pembangunan pada tahun keempat akan diarahkan pada Pemerataan Pembangunan Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.

Pada tahun ke empat diharapkan seluruh sendi-sendi aktivitas keseharian masyarakat sudah Kembali secara utuh dalam kondisi normal. Sehingga perekonomian semakin meningkat serta pengembangan investasi terus bertambah. Oleh karena itu, pada tahun keempat ini difokuskan untuk peningkatan pemerataan pembangunan sebagai hasil dari terbukanya kawasan-kawasan ekonomi baru di Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa strategi yang akan difokuskan pada tahun keempat ini ialah ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah, mengintensifkan penyebaran informasi publik secara up to date melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, memaksimalkan penerapan e-government guna memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan, meningkatkan layanan SPBE (Administrasi pemerintahan, ASN, Bisnis, dan Publik), peningkatan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan

keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel, meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal, mengintensifkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam perekaman dan pendataan penduduk, meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dan unsur kebudayaan lainnya dalam pengembangan budaya Melayu, Menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur secara berkelanjutan, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar umat beragama, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar etnis dan suku, internalisasi dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya Melayu, serta meningkatkan infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh.

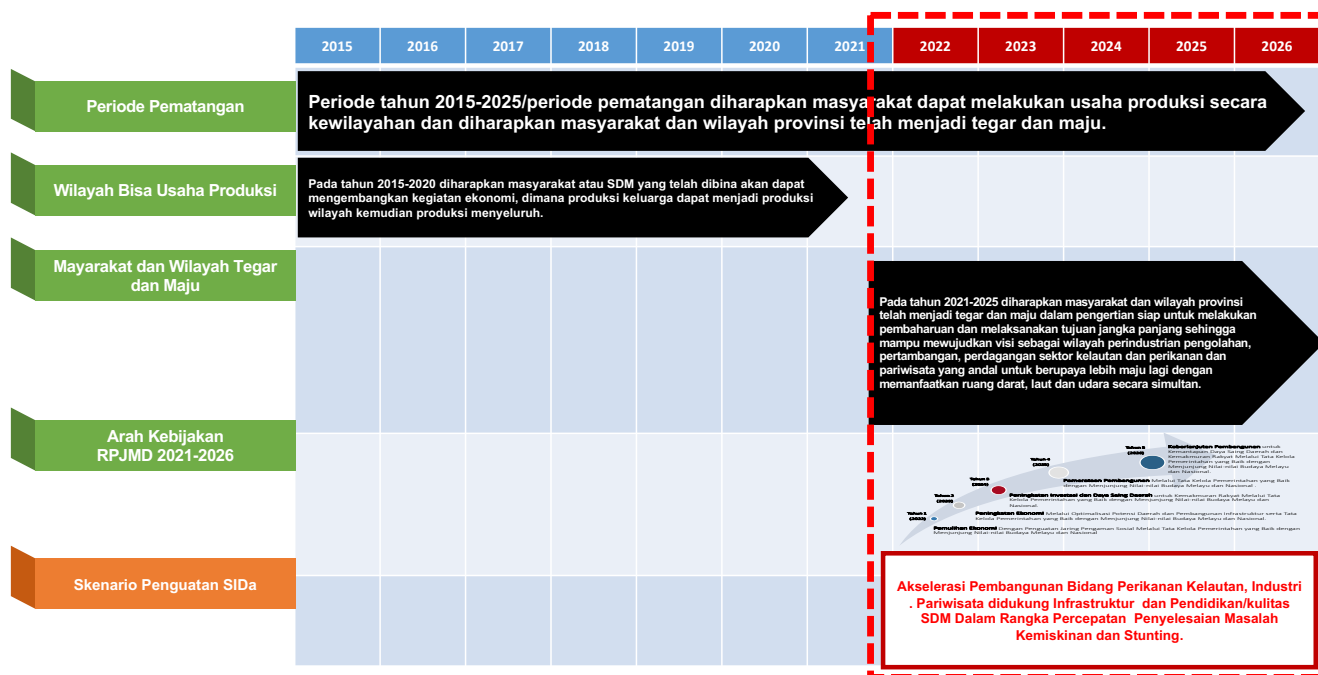
- 5) Pembangunan pada tahun kelima akan diarahkan pada Keberlanjutan Pembangunan untuk Kemantapan Daya Saing Daerah dan Kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.

Pada tahun kelima, diharapkan seluruh perencanaan mulai dari tahun pertama dapat berjalan dengan baik, sehingga tahun kelima ini difokuskan pada melanjutkan strategi-strategi pembangunan yang sebelumnya telah terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan Daerah. Fokus strategi pada periode ini pada dasarnya akan terus melakukan inovasi-inovasi untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian empat tahun sebelumnya.

3. Skenario Penguatan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Periode penguatan SIDA Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 merupakan periode pematangan diantara tahun 2015-2025. Pada periode ini diharapkan masyarakat atau SDM yang telah dibina akan dapat mengembangkan kegiatan ekonomi, dimana produksi keluarga dapat menjadi produksi wilayah kemudian produksi menyeluruh, serta periode pada saat mana masyarakat dan wilayah provinsi telah menjadi tegar dan maju dalam pengertian siap untuk melakukan pembaharuan dan melaksanakan tujuan jangka panjang sehingga mampu mewujudkan visi sebagai wilayah perindustrian pengolahan, pertambangan, perdagangan sektor kelautan dan perikanan dan pariwisata yang andal untuk berupaya lebih maju lagi dengan memanfaatkan ruang darat, laut dan udara secara simultan. Selain itu, periode pengembangan dan penguatan SIDA Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 juga termasuk pada periode arah kebijakan tahunan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 pada tahun 2022-2026.

Melihat skenario pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau, sehingga skenario dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi kebijakan terkait penguatan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 diarahkan pada **“Akselerasi Pembangunan Bidang Perikanan Kelautan, Industri, dan Pariwisata didukung Infrastruktur dan Pendidikan/kualitas SDM Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Masalah Kemiskinan dan Stunting”**.



Gambar 3. 6
Skenario Penguatan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

3.2 Unsur-Unsur Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Unsur-unsur SIDa yang mencakup kelembagaan SIDa, Jaringan SIDa dan Sumber Daya SIDa ditujukan untuk mewujudkan dukungan kapasitas dan kapabilitas lembaga dalam memperkuat kerangka pelaksanaan SIDa yang mengedepankan aspek berkembangnya inovasi. Dalam mempermudah pelaksanaan SIDa di Provinsi Kepulauan Riau, maka diperlukan pengukuran kondisi SIDa Saat ini dilihat dari capaian indikator output penguatan kebijakan SIDa dan penataan unsur SIDa. Penguatan Kebijakan SIDa merupakan aktifitas dalam menguatkan kebijakan-kebijakan makro yang mendukung pelaksanaan penguatan SIDa di daerah. Penguatan Kebijakan SIDa harus dapat dijadikan acuan untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

3.2.1 Kelembagaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

1. Institusi Pemerintah

Adapun institusi pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau , yang dapat berperan dalam pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat Daerah
- d. Dinas Daerah, antara lain :
 - 1) Dinas Pendidikan
 - 2) Dinas Kesehatan
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
 - 4) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Penanggulangan Kebakaran
 - 6) Dinas Sosial
 - 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 8) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
 - 9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 10) Dinas Perhubungan
 - 11) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - 12) Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 13) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - 14) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - 15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 16) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
 - 17) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - 18) Dinas Kelautan dan Perikanan
 - 19) Dinas Pariwisata
 - 20) Dinas Kebudayaan
 - 21) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
 - 22) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

- e. Badan Daerah Provinsi terdiri dari:
 - 1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - 3) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
 - 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2. Lembaga Penunjang Inovasi

Pengembangan inovasi daerah utamanya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik sangat diperlukan kemitraan dengan stakeholder di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja pengembangan sistem inovasi daerah serta membantu perangkat daerah di wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Lembaga-lembaga penunjang inovasi di Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

- a. Barenlitbang (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan) Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Badan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kepulauan Riau – Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian.
- c. LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).
- e. Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepulauan Riau.
- f. Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Riau di Sekupang, Kota Batam.
- g. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

3. Perusahaan Industri

Dunia usaha memiliki potensi dalam pengembangan berbagai macam inovasi daerah. Perusahaan atau usaha industri melakukan kegiatan ekonomi dimana bertujuan menghasilkan barang atau jasa. guna memenuhi kebutuhan manusia. Perusahaan industri di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari Industri Besar dan Sedang. Industri Besar dan Sedang mencakup semua perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 20 orang atau lebih. Klasifikasi industri yang digunakan berdasar kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

KBLI adalah klasifikasi lapangan usaha yang berdasar kepada *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities* (ISIC) revisi 4 yang telah disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

Industri manufaktur adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Industri manufaktur dikelompokkan ke dalam 4 golongan berdasarkan banyaknya pekerja, yaitu: industri besar (100 orang pekerja atau lebih), industri sedang/menengah (20–99 orang pekerja), industri kecil (5–19 orang pekerja), dan industri mikro (1–4 orang pekerja).

Adapun detail nama perusahaan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III. 1
Daftar Perusahaan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Riau

Area	Perusahaan
Karimun	<ol style="list-style-type: none"> 1. CHANDRA TIRTA LESTARI PRATAMA, PT 2. EUNINDO USAHA MANDIRI. PT 3. KARIMUN SEMBAWANG SHIPYARD, PT 4. CINCIN SUMUR <HAIR> 5. INDUSTRI ARANG BAKAR 6. MORNING BAKERY, PT 7. CITRA ALAM SUMER WITA, PT 8. INMAS SUN SHINE, PT 9. MULTI OCEAN SHIPYARD, PT 10. DAPUR ARANG (KAWIE) 11. JASA BERSAMA, CV 12. PABRIK SAGU ALAM MAKMUR 13. DAPUR ARANG (NASIR) 14. KARIMUN MARINE SHIPYARD, PT 15. PABRIK SAGU LINGGA (JURAIMI) 16. PENGOLAHAN ARAG (TEDDY) 17. SAIPEM INDONESIA, PT 18. SARI KOTAMA, PT 19. TRI TIRTA ARG A JAYA, PT
Bintan	<ol style="list-style-type: none"> 1. A & ONE PRECISION ENGINEERING, PT 2. BINTAN MARINE TECHNOLOGI, PT 3. CENTROTECJIT BINTAN, PT 4. AMC, PT 5. BINTAN OFFSHORE,PT 6. DOKING (SAMIN) 7. BERKAT CITRA AGUNG, PT 8. CCI BINTAN INDONESIA, PT 9. ESCO BINTAN INDONESIA, PT 10. BINTAN INDO PERMAI, PT 11. CEDAR ACCESSORIS, PT

Area	Perusahaan
	12. HARAPAN MAKMUR, CV 13. HONEY INDONESIA, PT 14. IS PREMIER CONTAINER BINTAN, PT 15. PERTAMA PRECISION BINTAN, PT 16. SINGATAC BINTAN, PT 17. JAMU MEDAN/TUAK 18. PHILTI JAYA BINTANG, PT 19. SUMBER IZUMI MAS PERKASA, PT 20. NUMBING JAYA, PT 21. PT SEMPURNA CONCENTINDO 22. SUNG BAKERY 23. PEPPERL AND FUCHS BINTAN, PT 24. SANDEN ELECTRONICS INDONESIA, PT 25. TWC BINTAN, PT 26. UD SINAR PERMAI INDAH 27. YOSHIKAWA ELECTRONICS BINTAN, PT
Natuna	MINA SEJAHTERA, CV
Lingga	1. DAPUR ARANG (KUALA) 2. DAPUR ARANG SUNGAI TELUR KUB RAJUNGAN
Kepulauan Anambas	GREARINDO PRAKARSA, PT
Batam	1. ABLY METAL INDONESIA, PT 2. ACE INDUSTRIES INDONESIA, PT 3. ADI CANDRA BARUNA INDAH, PT 4. ALCOTRAINDO BATAM, PT 5. ALTECO CHEMICAL INDONESIA, PT 6. ADVANCED PACKING SOLUTION, PT 7. ACEPLAS INDONESIA, PT 8. ALUSTEEL, PT 9. AEORATAMA BLOCK, PT 10. ACTIVE MARINE, PT 11. ALBEST MARINE, PT 12. AMBER KARYA, PT 13. ADI BATAMUNI JAYA, PT 14. AMCO, PT 15. AMPWAY STATIONERY MANUFACTURING, PT 16. ANGGREK HITAM, PT 17. ANUGERAH ABADI CITRARASA, PT 18. APOLLO ANEKA PRAKARSA, PT 19. AMTEK ENGINEERING BATAM, PT 20. ANUGERAH MAKMUR SEJAHTERA ABADI, PT 21. APPIPA INDONESIA, PT 22. AMTEK PLACTIC BATAM, PT 23. ANUGERAH BINTANG SAMUDRA INDONESIA, PT 24. ARGOMAS BATAM PRATAMA, PT 25. AMTEK PRECISION COMPONENT BATAM, PT 26. API INDONESIA 27. ARTHA JAYA SEMESTA, PT 28. ASAHI PLAS, PT 29. ASAHI SPRAY PAINTING, PT 30. ASIA PASIFIC, PT 31. ASSEMBY MESIN 32. ASIA COCOA INDONESIA, PT

Area	Perusahaan
	33. ASIA TECH MANUFACTURING INDONESIA, PT 34. ASSOCIATED PACKAGING INDONESIA, PT 35. ASUS SERVICE INDONESIA, PT 36. ASIA FOUNDRY ENGINEERING, PT 37. ASIARAYA BATAMINDO, PT 38. ASIA PAPERINDO PERKASA, PT 39. ASL SHIPYARD INDONESIA,PT 40. ATECH ELECTRONICS INDONESIA, PT 41. ATHIRA, PT 42. AV PLASTIK INDUSTRI BATAM, PT 43. AWATRONICS, PT 44. AYATANA MULTI MARINE, PT 45. BAHTERA BAHARI SHIPYARD, PT 46. BALINDO CITRA PERDANA, PT 47. BANDAR ABADI, PT 48. BANDAR VICTORY SHIPYARD, PT 49. BASWARA EKA TIYASA <HERIBERTUS AKU>, PT 50. BATAM BERSATU APPAREL, PT 51. BATAM CYCLECT, PT 52. BATAM EXPERINDO, PT 53. BATAM MARINA SHIPYARD, PT 54. BATAM MITRA SEJAHTERA, PT 55. BATAM PALLETINDO JAYA PT 56. BATAM PLASTIK 57. BATAM WELL INDUSTRY, PT 58. BATAMEC, PT 59. BEC, PT 60. BENGINT NUSANTARA, PT 61. BERLIAN ABADI PT 62. BETA REKATAMA JAYA, PT 63. GLOBAL MARINE ENGINEERING, PT 64. BIG METALINDO, PT 65. BINANGUN JAYA SUKSES, PT 66. BINGAS MANUFACTURE, PT 67. BINTAN BERSATU APPAREL <MOLLY TAN>, PT 68. BINTANG BATAM SUKSE,S PT 69. BINTANG INTIPERSADA SHIPYARD,PT 70. BINTANG TERANG SEJATI, PT 71. BIOWORLD BIOSCIENCES MANUFACTURING INDUS 72. BOX SENG, PT 73. BREAD TALK,PT 74. BREDERO SHAW INDONESIA, PT 75. BRILIAN LLOIDS, PT 76. BRITOIL OFF SHORE INDONESIA, PT 77. BUANA CIPTA MANDIRI, PT 78. BUMI LAUT PERKASA, PT 79. CAHAYA MURNI, PT 80. CAHAYA SAMUDRA SHIPYA RD, PT 81. CAKE BUAH NAGA, CV 82. CAMERON SYSTEM, PT 83. CATERPILAR INDONESIA BATAM, PT 84. CATUR EKA MANDIRI, PT 85. CATUR MAHA RASA WARALAB, PT 86. CCOL DFINE, PT 87. CELIN PRODUCTION,CV 88. CENDANA HAN WIJAYA, PT 89. CHENG HENG PAPER PRODUCTS PT 90. CHUCK ENGINEERING, PT

Area	Perusahaan
	91. CHUCK MACHINIL I ,PT 92. CHYE JOO SUKSES INDONESIA, PT 93. CIBA VISION BATAM, PT 94. CICOR PANATEC, PT 2 95. CINA COMMUNICATION, PT 96. CIPTA SARANA BAHRI, PT 97. CITRA AGRAMASINTI NUSANTARA, PT 98. CITRA ENGINEERING, PT 99. CITRA LAUTAN TEDUH, PT 100. CITRA SHIPYARD, PT 101. CITRA TUBINDO TBK, PT 102. CLADTEK BI-METAL MANUFACTURING, PT 103. COMPLETION PRODUCTS INDONESIA, PT 104. COVENANT ENGINEERING, PT 105. CROWN HEAD WEAR SKINITTING, PT 106. CUNG FURNITURE INDAH, PT 107. CYCRAFT TECHNOLOGY INDONESIA, PT 108. DAIHAN LABTECH PT 109. DAIHO INDONESIA, PT 110. DATABANK INDONESIA, PT 111. DELTA SHIPYARD, PT 112. DEMOH ENGINEERING PT 113. DEPOT AIR MINUM 114. DHARMA PACIFIC ENGINEERING, PT 115. DHARMA SENTOSA MARINDO, PT 116. DIAMONT TAILOR 117. DIAN JAYA UTAMA, CV 118. DINACAST INDONESIA, PT 119. DIP ENGENERING, PT 120. DJITOE MESINDO, PT 121. DOELLKEN BINTAN, PT 122. DRY DOCKS WORD PERTA 123. DUNIA MARINDO, PT 124. DUTA DIMENSI, PT 125. DUTA MULTI KARYA, PT 126. DWI MARINE INDONESIA, PT 127. DYAN MENTARI, CV 128. DWI SUMBER ARCA WAJA, PT 129. ECOGREEN OLEOCHEMICALS, PT 130. EKA SURYA, PT 131. ELITE PACKAGING, PT 132. ELNUSA FABRIKASI KONTRUKSI, PT 133. ENG NGIAP PLASTRONIC, PT 134. EPCOS <TDK>, PT 135. EPSON BATAM, PT 136. ERA CIPTA PERDANA, CV 137. ESCOTAMA HANDAL, PT 138. ETHIC FOOD, PT 139. ETOWA PACKAGING INDONESIA, PT 140. EUSUN TECHNOLOGY BATAM, PT 141. EVERGROWN TECHNOLOGY, PT 142. EX BATAM INDONESIA, PT 143. EXCELLENT PLASMA BATAM, PT 144. EXPRO INDONESIA, PT 145. EXSON ENGINEERING, PT 146. FANTASTIK INTERNASIONAL, PT 147. FARAS, PT 148. FAST MANUFACTURING, PT

Area	Perusahaan
	149. FEEN MARINE, PT 150. FINE PRECISION, PT 151. FININDO BATAM, PT 152. FLEXTRONIC TECNOLOGI INDONESIA, PT 153. FLUID SCIENCES BATAM, PT 154. FOSTER ELECTRIC INDONESIA, PT 155. FUTNIPLUS ASIA, PT 156. GAJAH IZUMI MAS PERKASA, PT 157. GALANGAN KAPAL <PT B S B T> 158. GALANGAN MERCUSUAR, PT 159. GALAXI INVESTASI HARAPAN <GIH>, PT 160. GELFEX INDONESIA, PT 161. GEMILANG SUKSES GLOBA LIN, PT 162. GENERAL CARBON INDUSTRY, PT 163. GENLE, PT 164. GERAJ BATIK <FIRDAUS> 165. GETRONICS BATAM, PT 166. GHIM LI INDONESIA, PT 167. GIKEN PRECISION INDONESIA, PT 168. GLOBAL CITRA PRATAMA, PT 169. GLOBAL HARVEST DRECIION ENGINEERING, PT 170. GLOBAL KONSTRINDO ENGINEERING PT 171. GLOBAL MUKTI SOLUSI INDO, PT 172. GLOBAL PROCESS SYSTEM PT 173. GLOBAL RISING TECHNOLOGIES, PT 174. GLOPACK PACKAGING, PT 175. GOLDEN ABASCA, PT 176. GOLDEN BINTAGUR TIMBEL, PT 177. GOLDHILL INDUSTRI, PT 178. GOLDWELL PLASTIK INDONESIA, PT 179. GOOD DAY BAKERY 180. GORENGAN 77 TAHU SUMEDANG 181. GRAHA TRISAKTI INDUSTRI, PT 182. GRAPHIKA BATAM BETON, PT 183. GREEN FLEXIBLE INDUSTRIES, PT 184. GREEN STRUCTUKE INDUSTRIES, PT 185. GREENLAM ASIA PACIFIC, PT 186. GREENTECH GLOBALINDO, PT 187. GUDANG <GLOBAL MARINE ENGINEERING>, PT 188. GUDANG PT NASRI JAYA, PT 189. GUDANG SINGA RANJUNGAN <LATIPAH> 190. GUDANG TAICHANG, PT 191. H.TECH OILFELD EQUIPMENT, PT 192. HANSA ENGINEERING INDONESIA PT 193. HANTONG PRECISION MANUFACTURING, PT 194. HARAPAN CITRA JAYA, PT 195. HARMON JAGAT JAYA INDO, PT 196. HARSIKA MANDIRI UTAMA, PT 197. HASAN CAN PACKAGING, PT 198. HAYASHI INDO DINAMIKA, PT 199. HEMPELINDONESIA, PT 200. HENG GUAN BATAM INDUSTRIES, PT 201. HLN BATAM, PT 202. HO WAH GENTING, PT 203. HOLCIM PT 204. HONFOONG PLASTIC INDUSTRIES, PT 205. HONG TAI UTAMA, PT 206. HT MANUFACTURING, PT

Area	Perusahaan
	207. HUNTING ENERGY ASIA, PT <SOELASNO L> 208. HYDRIL INDONESIA, PT 209. HYDROJET, PT 210. HYMINDO PETROMAS UTAMA, PT 211. HYMOLD BATAM, PT 212. HYUNDAI, PT 213. IDEA, PT 214. IDROS PT 215. IDEAL PARKINDO BATAM, PT 216. IEV INDONESIA, PT 217. IMECO INTER SARANA, PT 218. INDOBANGKIT, PT 219. INDOPACK INDUSTRIES BATAM, PT 220. INFI NEON TECHNOLOGIES, PT 1 221. INLINE FLUID CONTROL, PT 222. INSTULATION INDO INTER, PT 223. INTERNATIONAL PAPER PACKAGING, PT 224. INTERPAK INDUSTRIES BATAM, PT 225. INTI DUTA SURYA, PT 226. INTRICON INDONESIA, PT 227. INZIGN, PT 228. ISTYLE, PT 229. I-TECK GENERAL ENGINEERING, PT 230. JAMES PRODUCTS COMPANY, PT 231. JAPAN MEDICAL SUPPLY BATAM, PT 232. JAPAN MEDICAL SUPPLY BATAM, PT 233. JASINDO EXPREST, PT 234. JAYA ASIATIC, PT 235. JENI PRIMA PUTRA, PT 236. JINFINDO,PT 237. JOTUN INDONESIA, PT 238. JOVAN TECHNOLOGIES, PT 239. JP TECHNOLOGY, PT 240. JUTAM READYMIX CONCRETE, PT 241. KACALIA, PT 242. KARIMUN ANUGRAH SEJATI, PT 243. KARTINBA INDAH, PT 244. KARYA CELCON PARAMA AERATED CONCRETE, PT 245. KARYA MAKMUR PERKASA, PT 246. KARYA PLASTIK UTAMA, PT 247. KARYA PUTRA BERTUAH, PT 248. KARYA SEMPURNA A, PT 249. KARYA SINDO SAMUDRA, PT 250. KARYA TEKHNİK UTAMA, PT 251. KARYASINDO SAMUDERA BIRU SHIPYARD, PT 252. KAWAL BERSAMA MANDIRI, PT 253. KCM, PT 254. KEMET ELECTRONICS INDONESIA, PT 2 255. KHIANT SUKSES, CV 256. KINEMA SYTRANS MULTIMEDIA, PT 257. KING SAFETY WEAR, PT 258. KNN KONTRUKSI INDONESIA 259. KONVEKSI <SUYITI> 260. KOP SURFACE PRODUCTS, PT 261. KSW BATAM, PT 262. KUALITEK, PT 263. KUMALA INDONESIA SHIPYARD, PT 264. LAB BERU, PT

Area	Perusahaan
	265. LABROY SHIPBUILDING ENGINEERING, PT 266. LABTECH PENTA INTERNATIONAL, PT 267. LAFARGE CEMENT INDONESIA, PT 268. LANCANG KUNING SUKSES, PT 269. LAS TERALIS <DEDET> 270. LATRADE BATAM INDONESIA, PT 271. LAUTAN BENING PT 272. LAUTAN LESTARI SHIPYARD, PT 273. LAVO IMAGING INDONESIA, PT 274. LB TECHNOLOGIES BATAM, PT 275. LEADON, PT 276. LETEX GARMINDO, CV 277. LGB INDONESIA, PT 278. LGT INDONESIA, PT 279. LIFE WATER 280. LIMS NAUTICAL SHIPYARD, PT 281. LINGGA, PT 282. LKD MULTI INDUSTRI PT 283. LOIZS 88, PT 284. LOISALAINPT 285. LORDWAY ACCOMMODATION ENGINEERING, PT 286. MAATS PT 287. MADEIRA INDONESIA, PT 288. MAHA KARYA BATAM, PT 289. MANDALA PRIMA SARANA PT 290. MANDIRI GIFHA NUSANTARA, PT 291. MARCONI MATORINDO ORI EX, PT 292. MARCOPOLO SHIPYARD, PT 293. MARINATAMA GEMANUSA, PT 294. MARITINE INDOLESTARI, PT 295. MARUWA INDONESIA, PT 296. MC CONEL DOWEL SERVIS ,PT 297. MCCONNELL DOWELL SERVICES PT 298. MCDERMOTT INDONESIA, PT 299. MEAN POWER SUPPLY MESIN, PT 300. MEDIA PRINTER, PT 301. MEGA TEKNOLOGI, PT 302. MENJAHIT KAIN LAP <RAMLI> 303. METAL BATAM PT 304. METRIC PACK MANDIRI, PT 305. MILLIONIULT, PT 306. MITRA ARTHA MANDIRI, PT 307. MITRA DINAMIS, CV 308. MITRA RAYA SARANA, PT 309. MITRA TRIMUKTI PRATAMA, PT 310. MOMENT OTOMASI INDONESIA, PT 311. MOMENTUM ANUGERAH INDONESIA, PT 312. MORNING BAKERY, PT 313. MULTI FRIEND SHIP INDUSTRIES, PT 314. MULTI KERJA BATATAMA, PT 315. MULTI PLASTINDO UTAMA, PT 316. MULTI PRIMA, PT 317. NAGANO DRILUBE INDONESIA PT 318. NAM KWONG ELEKTRIK, PT 319. NANINDAH MUTIARA SHIP YARD, PT 320. NASRI JAYA, PT 321. NATION FITTING, PT 322. NATIONAL INDUSTRIAL GASES INDONESIA, PT

Area	Perusahaan
	323. NEJILOCK TECHNOLOGYND, PT
	324. NEPTUNE SUBSEA STABILISATION PT
	325. NEXUS ENGINEERING INDONESIA, PT
	326. NIPPON STEEL PT
	327. NISSIN KOGYO BATAM, PT
	328. NISSIN KOGYO BATAM, PT 1
	329. NISSIN KOGYO BATAM, PT 2
	330. NISSIN KOGYO BATAM, PT 3
	331. NITTOH BATAM PT
	332. NOBLE BATAM, PT
	333. NOK ASIA BATAM, PT
	334. NOK PRECISION COMPONENT BATAM, PT
	335. NONGSA JAYA BUANA, PT
	336. NSP TECHNOLOGY BATAM, PT
	337. NUSANHELI, PT
	338. OCTAGON PRECISION INDONESIA, PT
	339. OLAH REDIMIX HOMEIX, PT
	340. ONG KIAN INDONESIA, PT
	341. OSCAR FRAME INDUSTRIE.PT
	342. OSI ELECTRONICS, PT
	343. OSI ELECTRONICS, PT
	344. OZ FASTENER, PT
	345. P N B C INDONESIA, PT
	346. PALINDO MARINE SHIPYARD, PT
	347. PALMA PROGRESS SHIPYARD, PT
	348. PAN BATAM ISLAND SHIPYARD, PT
	349. PANASONIC ELECTRONIC DEVICES BATAM, PT
	350. PANDAN BAHARI, PT
	351. PASIFIC ATLANTIC SHIPYARD, PT
	352. PASIFIC COMPOSITES UTAMA BATAM, PT
	353. PASSION PLASTICS, PT
	354. PATLITE INDONESIA, PT
	355. PATRAINDO NUSA PERTIWI, PT
	356. PATRIA MARITIM PERKASA, PT
	357. PCI ELECTRONIC INTERNATIONAL, PT
	358. PCI, PT
	359. PEMBORONG WELDINGAN KAPAL <GATOT>
	360. PENGOLAHAN IKAN <TUTDANG>
	361. PENGUSAHA SHIPYARD
	362. PERKASA BETON BATAM, PT
	363. PERKIN ELMER BATAM, PT
	364. PETER GARMINDO PRIMA, PT
	365. PETRUS INDONESIA, PT
	366. PHILIPS INDUSTRIES BATAM, PT
	367. PIONEER OFFSHORE INDORAYA PT
	368. PIPA MAS PUTIH, PT
	369. PLASMOTECH BATAM PT
	370. POTEH IRENG
	371. POWER FOAM, PT
	372. PRADANA INDAH SEJAHTERA, PT
	373. PRATAMA BINTANG PRAKARSA, PT
	374. PRATAMA ENGINEERING SUPPLIES, PT
	375. PRECINDO ABADI, PT
	376. PRIMO MICROPHONES INDONESIA, PT
	377. PRISCHA PRECISION, PT
	378. PROFAB INDONESIA, PT
	379. PRO-PACK INDUSTRIES, PT
	380. PROPERTY BEST QUALITY, PT

Area	Perusahaan
	381. PROSERV, PT 382. PRUMPANG RAYA ANUGRAH, PT 383. PULAU CAHAYA TERANG, PT 384. RAAJRATNA WIRE , PT 385. RACER TECHNOLOGY BATAM, PT 386. RAE ENERGY STRATEGIC ENERGY, PT 387. RAPALA VMC BATAM, PT 388. REACS PRECISION BATAM, PT 389. RIPOS BINTANA PRESS, PT 390. RISEA PROPULSION INDONESIA, PT 391. RISIS INDONESIA, PT 392. RISTECH MANUFACTURING, PT 393. ROCK INTERNATIONAL TOBACCO, PT 394. RODA ASIA JAYA, PT 395. ROICE INTERPRISECO, PT 396. RONSTAN INTERNATIONAL, PT 397. ROTARI, PT 398. ROYCE ENTERPRISE CO, PT 399. RPC INDONESIA, PT 400. RUBYCON INDONESIA, PT 401. SAGATEK, PT 402. SAMUDRA OCEONERING ROV, PT 403. SANIPAK INDONESIA, PT 1 404. SANMINA SCI BATAM, PT 405. SANSYU PRECISION BATAM, PT 406. SANWA ENGINEERING BATAM, PT 407. SANYO ENERGI, PT 408. SAT NUSA PERSADA, PT 409. SAVEMAN GARMENT BATAM, PT 410. SAWOO TECHNOLOGY, PT 411. SCHNEIDER ELECTRIC MANUFACTURING BATAM, PT 412. SEFONG INDUSTRY, PT 413. SELECTA BESTAMA, PT 414. SEMEN BOSOWA INDONESIA PLANT BATAM, PT 415. SEMPURNA MANDIRI SUKSES, PT 416. SEMPURNA READY MIX CONCRETE PT 417. SENTEK INDONESIA, PT 418. SERVOTECH INDONESIA, PT 419. SETIA RAYA PACIFIC, PT 420. SHIBAURA INDONESIA BATAM, PT 421. SHIMANO BATAM, PT 422. SHYE CHANG BATAM INDONESIA PT 423. SIIX ELECTRONIC INDONESIA, PT 424. SIN LEE MANUFACTURING, PT 425. SINAR ALAMINDO PRATAMA, PT 426. SINAR BAHTERA MULIA, PT 427. SINAR BARU UTAMA JAYA,PT 428. SINAR CENDANA, PT 429. SINAR INDAH PT 430. SINAR INTER PLAST, PT 431. SINBA TECHNOLOGY INDUSTRI, PT 432. SINDOTEX BRATAMA, PT 433. SINOMETAL STAMPING TEKNOLOGI BATAM, PT 434. SINYOTAMA INDONESIA, PT 435. SKP MARINE ENGINEERING, PT 436. SLG REKATAMA, PT 437. SM ENGINEERING, PT 438. SMOE INDONESIA BATAM FABRICATION YARD, PT

Area	Perusahaan
	439. SMART STEEL SOLUTION, PT 440. SOUTH PIONEER INDONESIA, PT 441. SOUTHER TRISTAR. PT 442. SP MANUFACTURING, PT 443. SPCO PIPE LINE SERVICES, PT 444. SRI INDAH ALUMINIUM EXTRUSION, PT 445. STX PRECISION BATAM, PT 446. SUBSEA SERVICES INDONESIA, PT 447. SUMBER MARINE SHIPYARD <SMS> , PT 448. SUMBER SAMUDERA MAKMUR, PT 449. SUMBER TEKNIKINDO BATAM, PT 450. SUMITOMO WIRING SYSTEM BATAM INDONESIA, PT 451. SUN PRECISION ENGINEERING INDONESIA, PT 452. SUNDA OPTIMA PIPE, PT 453. SUNMAX INDUSTRI, CV 454. SUNNINGDAALE TECH, PT 455. SUNTECH INTERNASIONAL, PT 456. SUNTECH PLASTICS INDUSTRIES BATAM, PT 457. SUNTECK INDO KERAMIK, PT 458. SUPER BAKERY <YUDI> 459. SUPER BOX INDUSTRIES, PT 460. SUPER PAKINDO, PT 461. SUPRA TEKNOLOGI PLASTIK, PT 462. SURYA AGUNG PLASINDO. PT 463. SURYA GEMILANG, PT 464. SURYA TEKNOLOGI BATAM, PT 465. SYNERGY OIL NUSANTARA, PT 466. SYS-MAC, PT 467. TABITA FURNITURE, PT 468. TAKA MARINDO, PT 469. TAKAMORI INDONESIA, PT 470. TAN INDO SUKSES, PT <KANTOR> 471. TANJUNGPURA, PT 472. TASINDO UTAMA INDAH, PT 473. TCF MAJU, PT 474. TEAM METAL INDONESIA, PT 475. TEC INDONESIA, PT 476. TECHMICRON, PT 477. TECHNICS OFFSHORE JAYA, PT 478. TECHNIP, PT 479. TECKWAH PAPER PRODUCTS INDONESIA, PT 480. TECTRON MANUFACTURING, PT 481. TEMPAT MASAK <LARKO> 482. THAI CHENG DEVELOPMENT, PT 483. THREE CAST INDONESIA, PT 484. TIONG WOON OASIS, PT 485. TJ COMMERCIAL, PT 486. TJOKRO BERSAUDARA BATAMINDO, PT 487. TOMOE VALUE BATAM, PT 488. TOP BAKER, PT 489. TOP FOAM BATAM, PT 490. TOPUS INTERNATIONAL, PT 491. TOYO KONETSU INDONESIA PT 492. TOYO KONETSU INDONESIA, PT 493. TOYOSHIMA, PT 494. TRANSALINDO EKA PERSADA, PT 495. TRANSCAL SUNTECH INTERNASIONAL, PT 496. TREESBEE, PT

Area	Perusahaan
	497. TRI PILAR PERKASA, PT 498. TRI SUKSES PLASTINDO, PT 499. TRIBUN MEDIA GRAFIKA, PT 500. TRIKARYA ALAM, PT 501. TRIO CIPTRA GEMILANG, PT 502. TRIPLUS HITECH, PT 503. TROPICAL ELECTRONIC, PT 504. TUNAS KARYA BAHARI INDONESIA, PT 505. TURBO DIESEL , PT 506. UCONNECT ELECTRONICS, PT 507. UNI METALTECH INDUSTRY, PT 508. UNION JAYA SEJATI, CV 509. UNION PLASTICS INDUSTRIES, PT 510. UNISEM, PT 511. UNIVERSAL LABORATORIES, PT 512. USAHA BERSAMA CEMERLANG, CV 513. USAHA PENGERINGAN IKAN 514. USAHA PENJAHIT KAIN MAJUN 515. USAHA PEST CONTROL <MAMAN SUHARMAN> 516. USDA SEROJA JAYA, PT 517. USENG TEKNOLOGI UTAMA, PT 518. UWATEC BATAM, PT 519. VALEO AC INDONESIA, PT 2 520. VARTA MICROBATTERY INDONESIA, PT 521. VENTURINDO JAYA BATAM, PT 522. VESINTER INDONESIA, PT 523. VETCO GRAY INDONESIA, PT 524. VIKING ENGINEERING, PT 525. VINJAYA UTAMA, PT 526. VISTA MARITIM INDONESIA PT 527. VMC FISHING TACKLE INDONESIA, PT 528. VOLEX BATAM INDAH, PT 529. WAHANA TIRTA MILENIA, PT 530. WASCO ENGINEERING INDONESIA, PT 531. WEARSMART TEXTILES, PT 532. WIK FARTEAST BATAM, PT 533. WILMAX CONTROL SYSTEM, PT 534. WIN WIN RUBBER TECHNOLOGIES, PT 535. WOHLRAB INDONESIA, PT 536. WORLD WIDE EQUIPMENTP, PT 537. WORN 2 WIN, PT 538. YASH INDO PRIMA <AHRI ADY ARSYAD>, PT 539. YAVINDO SUMBER PERSADA, PT 540. YAYAN CAKE-HOUSE, CV 541. YEAKIN PLASTIK INDUSTRI, PT 542. YINGMEI INTOBACCO INT, PT 543. YOEW SAN, PT 544. YOKOGAWA MANUFACTURING BATAM, PT 545. YUAN CHANG BATAM INDONESIA ,PT 546. YUDDY NIFEGIS PLASTINDO, PT 547. ZINK POWER, PT
Tanjung Pinang	1. ALIMA SAMUDRA, PT 2. ANUGRAH BATA SEJAHTERA CV 3. BINTAN MARINA SHIPYARD, PT 4. BINTAN SHIPPING BIOTEKNIK, PT 5. CENDANA HAN WIJAYA, PT <MORNING BAKERY>

Area	Perusahaan
	6. CUACA MARINA SERVICE TAMA PT <GUDANG> 7. EFRA, CV 8. EFTRA, PT 9. GALAXY OCEAN SHIPYARD, PT 10. GRAPHIKA BETON, PT 11. HOLLAND BAKERY PRODUKSI KUE, PT 12. INDO BATA, PT 13. INDOCORN UTAMA KARYA, PT 14. KETAM "PAK HASAN" 15. KOPI KAPAL TANGKER, PT 16. KYRIA REZEKI, CV 17. PANCA RASA PRATAMA, PT 18. PIONIR WANA NIAGA, PT 19. SERAYA BETON PERKASA, PT 20. SHANGHAI STUDIO, PT 21. SUKSES BAHARI NUSANTARA, PT 22. SUMATERA MAJU JAYA, PT 23. SWAKARYA INDAH BUSANA, PT 24. TOBONG BATA MERAH, PT

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau 2017 - Direktori Perusahaan Industri Besar dan Sedang Provinsi Kepulauan Riau – Hasil Sensus Ekonomi 2016

4. Organisasi Kemasyarakatan Daerah

Organisasi dan lembaga kemasyarakatan daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang terdaftar dalam Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau, baik yang aktif maupun tidak aktif diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Adapun organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat berfungsi sebagai :

- Wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya.
- Wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi.
- Wadah peran serta dalam usaha menyukkseskan pembangunan nasional.
- Sebagai sarana penyalur aspirasi anggota dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota dan/atau antar organisasi kemasyarakatan, dan antara organisasi kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan social politik, badan permusyawaratan/perwakilan rakyat dan pemerintah.

5. Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi di Provinsi Kepulauan Riau baik negeri maupun swasta yang dapat menunjang Sistem Inovasi Daerah (sumber data: <https://www.bibliotika.com/2016/12/uuniversitas-di-kepulauan-riau.html>) sebagai berikut:

- a. Perguruan Tinggi Negeri
 1. Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang
 2. Politeknik Negeri Batam, Batam
- b. Perguruan Tinggi/Universitas/Politeknik/Sekolah Tinggi/Akademi Swasta
 1. Universitas Putera Batam, Batam
 2. Universitas Batam, Batam
 3. Universitas Internasional Batam, Batam
 4. Universitas Riau Kepulauan, Batam
 5. Universitas Karimun, Tanjung Balai Karimun
 6. Politeknik Pariwisata Batam, Batam
 7. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji, Tanjungpinang
 8. Sekolah Tinggi Ekonomi Pembangunan, Tanjungpinang
 9. Sekolah Tinggi Teknik Batam, Batam
 10. Sekolah Tinggi Teknik Bentara Persada Batam, Batam
 11. Sekolah Tinggi Teknik Ibnu Sina, Batam
 12. Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjungpinang, Tanjungpinang
 13. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Batam, Batam
 14. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bentara Persada, Batam
 15. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ibnu Sina, Batam
 16. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Putera Batam, Batam
 17. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah, Tanjungpinang
 18. Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi International Gurindam Archipelago, Tanjungpinang
 19. Sekolah Tinggi Katolik Bentara Persada, Batam
 20. Sekolah Tinggi Teologi Calvary, Batam
 21. Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia, Batam
 22. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Fayed, Batam
 23. Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Bintan, Bintan
 24. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karimun, Karimun
 25. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cakrawala, Karimun
 26. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bunda Tanah Melayu, Lingga
 27. Akademi Akuntansi Tanjung Pinang, Tanjungpinang
 28. Akademi Kebidanan Anugerah Bintang Tanjungpinang, Tanjungpinang
 29. Akademi Bahasa Asing Putera Batam, Batam
 30. Akademi Bahasa Asing Tanjung Pinang, Tanjungpinang
 31. Akademi Keperawatan Angkatan Laut, Tanjungpinang
 32. Akademi Keperawatan Mitra Bunda Persada, Batam
 33. Akademi Keperawatan Griya Husada

6. SMK di Provinsi Kepulauan Riau

Selain perguruan tinggi beberapa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Kepulauan Riau baik negeri atau swasta yang dapat berperan dalam penyiapan SDM yang berkualitas dalam mendukung sistem inovasi daerah (sumber data: <https://disdik.kepriprov.go.id/2018/Data%20SMK%2031%20Januari%202018.pdf> sebagai berikut:

Tabel III. 2
Daftar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Di Provinsi Kepulauan Riau

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	NPSN	NAMA SEKOLAH	STATUS SEKOLAH	ALAMAT
1	Kab. Bintan	Kec. Bintan Utara	11002262	SMK SWASTA MUHAMMADIYAH	Swasta	Jl. Mekar Sari No. 03
2	Kab. Bintan	Kec. Bintan Utara	11002263	SMKN 1 BINTAN UTARA	Negeri	Jl. Pasar Baru, No.1
3	Kab. Bintan	Kec. Bintan Utara	11002266	SMKS PERKAPALAN HANG TUAH	Swasta	Jl. Kesatrian, No. 09
4	Kab. Bintan	Kec. Gunung Kijang	11003305	SMKN 1 GUNUNG KIJANG	Negeri	Jl. Poros Pulau Pucung - Lome Km. 48
5	Kab. Bintan	Kec. Seri Kuala Lobam	69854734	SMKN 1 SERI KUALA LOBAM	Negeri	Jl. BUSUNG LAMA
6	Kab. Bintan	Kec. Seri Kuala Lobam	69873700	SMK MARITIM LINTAS BARAT	Swasta	Jl. RAYA BUSUNG NO. 54 RT.002 RW. 001
7	Kab. Bintan	Kec. Bintan Timur	11002265	SMKS PERIKANAN DAN KELAUTAN	Swasta	Jl. PELABUHAN SRIBAYINTAN KIJANG
8	Kab. Bintan	Kec. Bintan Timur	11002481	SMKN 1 BINTAN TIMUR	Negeri	Jl. Korindo Km. 22
9	Kab. Karimun	Kec. Moro	11002144	SMKN 1 MORO	Negeri	Jl. BATU LIPAI MORO
10	Kab. Karimun	Kec. Kundur	11000205	SMKS BUDI MULIA KUNDUR	Swasta	Jl. URUNG SEI SEBESI TANJUNG BATU
11	Kab. Karimun	Kec. Karimun	11002145	SMKS YASPIKA	Swasta	Jl. PENDIDIKAN NO.28
12	Kab. Karimun	Kec. Karimun	11003035	SMKS VIDYA SASANA	Swasta	VETERAN NO.1 KAPLING TG. BALAI KARIMUN
13	Kab. Karimun	Kec. Meral	69881360	SMK WIDYA KARIMUN	Swasta	Jl. LETJEN SUPRPTO NO.10 SUNGAI RAYA
14	Kab. Karimun	Kec. Tebing	11002143	SMKN 1 KARIMUN	Negeri	Jl PAYA CINCIN SEI BATI
15	Kab. Karimun	Kec. Tebing	69864705	SMK NEGERI 2 KARIMUN	Negeri	Jl. Payacincin Sungai Bati
16	Kab. Karimun	Kec. Kundur Utara	69960641	SMK NEGERI KUNDUR UTARA	Negeri	Jl. HANG TUAH NO. 009A
17	Kab. Karimun	Kec. Kundur Barat	11002580	SMKN KUNDUR	Negeri	Jl. BESAR SAWANG KM. 14
18	Kab. Natuna	Kec. Bunguran Barat	11000320	SMKN 1 BUNGURAN BARAT	Negeri	PANGLIMA HUJAN SEDANAU
19	Kab. Natuna	Kec. Bunguran Barat	11003175	SMKN 2 BUNGURAN BARAT	Negeri	KI HAJAR DEWANTARA
20	Kab. Natuna	Kec. Bunguran Timur	11000319	SMKS YPMR RANAI	Swasta	Jl. H. ADAM MALIK BANDARSYAH
21	Kab. Natuna	Kec. Bunguran Timur	11002052	SMKN 1 BUNGURAN TIMUR	Negeri	TARUNA NO.01 BANDARSYAH
22	Kab. Natuna	Kec. Bunguran Timur	69855657	SMKS PARIWISATA BUNGURAN TIMUR	Swasta	Jln. Tegul Khusu' Batu Naga Rt.03/Rw.01 Sungai Ulu
23	Kab. Natuna	Kec. Bunguran Timur	69927141	SMK MIGAS NATUNA	Swasta	Jl. Gusti Mohd. Taib-Padang Kurak. Bandarsyah
24	Kab. Lingga	Kec. Singkep	11002074	SMK MAHARDIKA SINGKEP	Swasta	Jl. NAVIGASI RT. 03 RW. 05
25	Kab. Lingga	Kec. Singkep	11002814	SMKN 1 SINGKEP	Negeri	Jl. GERGAS
26	Kab. Lingga	Kec. Lingga	60725422	SMKN 2 LINGGA	Negeri	JALAN BUKIT KUALI DAIK LINGGA
27	Kab. Lingga	Kec. Senayang	11002073	SMKN 1 SENAYANG	Negeri	PULAU SEBANGKA
28	Kab. Lingga	Kec. Lingga Timur	11003241	SMKN 1 LINGGA	Negeri	DUSUN II MULYASARI
29	Kab. Kepulauan Anambas	Kec. Jemaja Timur	69859733	SMKN 3 ANAMBAS	Negeri	ULU MARAS
30	Kab. Kepulauan Anambas	Kec. Siantan Tengah	11003192	SMKN 1 ANAMBAS	Negeri	Jl. H. ALI NO.38 AIR ASUK
31	Kab. Kepulauan Anambas	Kec. Siantan Tengah	69859732	SMKN 2 ANAMBAS	Negeri	Jl. Tanjung Mulia
32	Kota Batam	Kec. Sekupang	11002571	SMKN 4 BATAM	Negeri	TIBAN II
33	Kota Batam	Kec. Sekupang	69786475	SMKS TERPADU	Swasta	KOMPLEK TIBAN MAS ASRI

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	NPSN	NAMA SEKOLAH	STATUS SEKOLAH	ALAMAT
				PUTRA JAYA BATAM		BLOK B No. 12-17 JALAN GAJAH MADA
34	Kota Batam	Kec. Sekupang	69815388	SMKS WIDYA 2 BATAM	Swasta	JL. Gajah Mada No. 1 Tiban 3
35	Kota Batam	Kec. Sekupang	69955442	SMK IT AR RISALAH	Swasta	KAV. MENTARAU BLOK J NO. 100
36	Kota Batam	Kec. Sei Beduk	11002570	SMKN 3 BATAM	Negeri	LETJEN S.PARMAN
37	Kota Batam	Kec. Sei Beduk	11003249	SMKS LAKSAMANA	Swasta	JL. S. PARMAN PINTU 1 BLOK E NO. 17 TG.PIAYU
38	Kota Batam	Kec. Lubuk Baja	11000370	SMKS IBNU SINA BATAM	Swasta	TEUKU UMAR LUBUK BAJA KOTA
39	Kota Batam	Kec. Lubuk Baja	11000371	SMKS KARTINI BATAM	Swasta	KOMPLEK BALOI VIEW BATU BATAM
40	Kota Batam	Kec. Lubuk Baja	11002205	SMKS AL AZHAR BATAM	Swasta	Jl. Gunung Bromo - Baloi Indah
41	Kota Batam	Kec. Lubuk Baja	11002211	SMKS PERMATA HARAPAN 1 BATAM	Swasta	GAJAH MADA D/A KOMP.BATU BATAM MAS BLOK D & E NO. 1-3 BATAM
42	Kota Batam	Kec. Lubuk Baja	60728422	SMKS GLOBE NATIONAL PLUS	Swasta	JL. SRIWIJAYA NO. 18, KEL. KAMPUNG PELITA
43	Kota Batam	Kec. Lubuk Baja	69877321	SMK PUTRA JAYA SCHOOL BATAM	Swasta	KOMPLEK 91 SQUARE, JL DUYUNG BLOK G&I, Lt 3&4
44	Kota Batam	Kec. Batu Ampar	11002213	SMKS WIDYA BATAM	Swasta	PRAMBANAN NO.99
45	Kota Batam	Kec. Batu Ampar	11002576	SMKS MULTISTUDI HIGH SCHOOL BATAM	Swasta	KUDA LAUT NO.1 KAV.121 BATU AMPAR BATAM
46	Kota Batam	Kec. Batu Ampar	69900375	SMKS INSAN MANDIRI BATAM	Swasta	Perum palem raya tanjung sengkung
47	Kota Batam	Kec. Batu Ampar	69950403	SMK MONTE SIENNA	Swasta	JL. YOS SUDARSO
48	Kota Batam	Kec. Nongsa	11003158	SMKN 6 BATAM	Negeri	KAMPUNG PANAU
49	Kota Batam	Kec. Nongsa	69944774	SMK PENERBANGAN	Swasta	Jl. Hang Jebat Taman Batu Besar Sambau
50	Kota Batam	Kec. Bengkong	11000357	SMKS ALJABAR BATAM	Swasta	BENGKONG STM ALJABAR NO. 1
51	Kota Batam	Kec. Bengkong	11000369	SMKS HARMONI BATAM	Swasta	BENGKONG JAYA NO.1 TOP 100 BATAM
52	Kota Batam	Kec. Bengkong	11002208	SMKS PELAYARAN NASIONAL BATAM	Swasta	JL. KOMP. PENDIDIKAN DAN WISATA MARITIM NO.01
53	Kota Batam	Kec. Bengkong	11002575	SMKS ISLAM HANG TUAH BATAM	Swasta	RANAI NO.11 BENGKONG POLISI BATAM
54	Kota Batam	Kec. Bengkong	69786474	SMKS NURUL JADID BATAM	Swasta	BENGKONG PERMAI BLOK B RT 02/RW 02
55	Kota Batam	Kec. Bengkong	69815385	SMKS PENERBANGAN NASIONAL BATAM	Swasta	Jl.Pendidikan dan wisata maritim no.1 Tanjung Buntung Bengkong Laut Batam
56	Kota Batam	Kec. Bengkong	69815386	SMKS EBEN HAEZER BATAM	Swasta	Bengkong Palapa II Blok C No.51 Kelurahan Tanjung Buntung
57	Kota Batam	Kec. Batam Kota	11002206	SMKS BATAM BUSINESS SCHOOL	Swasta	KOMP.REZEKI GRAHA MAS BLOK A & B NO.17-20
58	Kota Batam	Kec. Batam Kota	11002209	SMKS NASIONAL BATAM	Swasta	Komplek Ruko Triarsa Equalita Blok M 07 Pasir Putih Batam Centre
59	Kota Batam	Kec. Batam Kota	11002210	SMKN 2 BATAM	Negeri	Jl. PEMUDA NO.5 BATAM CENTRE
60	Kota Batam	Kec. Batam Kota	11002574	SMKS MANAGEMENT TRAINING SYSTEM	Swasta	Komplek Grand California Blok B1/1-4 & B2/9-11 Batam Centre
61	Kota Batam	Kec. Batam Kota	11003007	SMKS HARAPAN UTAMA	Swasta	ROSEDALE SIMPANG FRANKY BATAM CENTER
62	Kota Batam	Kec. Batam Kota	11003250	SMKS KOLESE TIARA BANGSA	Swasta	KOMPLEK PERMATA HIJAU NO. 5-9 JL. ENGKU PUTRI BATAM CENTER
63	Kota Batam	Kec. Batam Kota	60728424	SMKS REAL INFORMATIKA BATAM	Swasta	KOMPLEK PERMATA NIAGA BLOK C NO 28-30
64	Kota Batam	Kec. Batam Kota	69774885	SMKN 7 BATAM	Negeri	PERUM SEKAWAN PEMKO

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	NPSN	NAMA SEKOLAH	STATUS SEKOLAH	ALAMAT
65	Kota Batam	Kec. Batam Kota	69786476	SMKS PERTIWI BATAM	Swasta	JL. JEND. SUDIRMAN, PERUM ODESSA A 16 No. 3-7
66	Kota Batam	Kec. Batam Kota	69786477	SMKS YEHONALA	Swasta	KOMP. RUKO AKU TAHU II BLOK C, SEI PANAS
67	Kota Batam	Kec. Batam Kota	69815391	SMKS BATAM INTERNATIONAL SCHOOL	Swasta	Komp. Pertokoan Rananta Blok A No. 5-7 Legenda Batam Centre
68	Kota Batam	Kec. Batam Kota	69830473	SMK PELAYARAN BATAM	Swasta	JL. PELAYARAN BATAM, KOMPLEK PRIMA SEJATI, BLOK A NO 5-9
69	Kota Batam	Kec. Batam Kota	69872145	SMK MAITREYAWIRA	Swasta	KOMP. MAHA VIHARA DUTA MAITREYA JL. BUKIT BERUNTUNG
70	Kota Batam	Kec. Batam Kota	69944259	SMK MAARIF NU KOTA BATAM	Swasta	RUKO LAKOTA BLOK : C NO. 8 BATAM CENTER
71	Kota Batam	Kec. Batam Kota	69950848	SMK PENERBANGAN - SPAN	Swasta	RUKO ODESSA BLOK A 16 NO 15-16
72	Kota Batam	Kec. Batam Kota	69955510	SMK RESTU BUNDA	Swasta	JL. RAJA ALI KELANA KOMPLEK GRAHA NUSA PERMAI
73	Kota Batam	Kec. Sagulung	11002212	SMKS TELADAN BATAM	Swasta	BRIGJEN KATAMSO KM.1
74	Kota Batam	Kec. Sagulung	11003006	SMKN 5 BATAM	Negeri	Kav. Bukit Kamboja-Kel.Sei Pelunggut-Kec.Sagulung
75	Kota Batam	Kec. Sagulung	11003260	SMKS PERMATA HARAPAN 2 BATAM	Swasta	KOMPLEKS BATU AJI CENTER PARK BLOK G
76	Kota Batam	Kec. Sagulung	69857721	SMK Tunas Muda Berkarya Batam	Swasta	Jl. Letjen. Soeprapto Komplek Perumahan BRB. Sagulung Batam
77	Kota Batam	Kec. Sagulung	69900438	SMKS INDO MALAY SCHOOL BATAM	Swasta	JL. SUPRAPTO KOMPLEK TOP 100 BLOK G5 No 2-5 Tembesi, Sagulung, Batam 29439
78	Kota Batam	Kec. Sagulung	69958871	SMKIT DARUSSALAM BOARDING SCHOOL 01	Swasta	Komp. Pendidikan Darussalam Batam 3
79	Kota Batam	Kec. Batu Aji	11000358	SMKS EPPATA BATAM	Swasta	PERUM MUKAKUNING PARADISE BLOK F BATU AJI
80	Kota Batam	Kec. Batu Aji	11000382	SMKN 1 BATAM	Negeri	PROF.DR.HAMKA NO.1 TEMBESI
81	Kota Batam	Kec. Batu Aji	11002207	SMKS HANG NADIM BATAM	Swasta	PENDIDIKAN NO.3 BLK PASAR MELAYU BATU AJI
82	Kota Batam	Kec. Batu Aji	11003119	SMKS MUHAMMADIYAH BATAM	Swasta	PROF. DR HAMKA NO. 3
83	Kota Batam	Kec. Batu Aji	60728423	SMKS PUTRA BATAM	Swasta	JL. LETJEND. R. SOEPRAPTO, KEL. BULIANG
84	Kota Batam	Kec. Batu Aji	69815389	SMKS WIDYA 3 BATAM	Swasta	JALAN WAN SRI BENI KOMPLEK WIDYA PARAMITRA
85	Kota Batam	Kec. Batu Aji	69825145	SMK PLUS KEMILAU BANGSA	Swasta	KAMPUS UNRIKA JL. BATU AJI BARU NO. 99 BATAM
86	Kota Batam	Kec. Batu Aji	69901085	SMKS PUTRA JAYA CENTRE	Swasta	Komp. Batu Aji Centre blok A 10 No.2-8 dan blok A 11 No. 1-2
87	Kota Tanjungpinang	Kec. Tanjung Pinang Barat	11000425	SMKS INDRASAKTI TANJUNGPINANG	Swasta	WIRATNO NO.55 A
88	Kota Tanjungpinang	Kec. Tanjung Pinang Barat	11001979	SMKS PARIWISATA ENGKU KELANA TANJUNGPINANG	Swasta	JL. TUGU PAHLAWAN
89	Kota Tanjungpinang	Kec. Tanjung Pinang Timur	11000415	SMKS RAJA HAJI TANJUNGPINANG	Swasta	JL. RAJA HAJI FISABILILLAH TANJUNGPINANG
90	Kota Tanjungpinang	Kec. Tanjung Pinang Timur	11000426	SMKN 3 TANJUNGPINANG	Negeri	SULTAN SULAIMAN
91	Kota Tanjungpinang	Kec. Tanjung Pinang Timur	11002495	SMKN 4 TANJUNGPINANG	Negeri	JL. NUSANTARA KM.14
92	Kota Tanjungpinang	Kec. Tanjung Pinang Timur	69774641	SMKS BINTAN INSANI	Swasta	Jl. RAJA HAJI FISABILILLAH
93	Kota Tanjungpinang	Kec. Bukit Bestari	11000416	SMKS PEMBANGUNAN	Swasta	RAJA HAJI FISABILILLAH NO.42
94	Kota Tanjungpinang	Kec. Bukit Bestari	11000438	SMKN 1 TANJUNGPINANG	Negeri	JALAN PRAMUKA NO.6
95	Kota Tanjungpinang	Kec. Bukit Bestari	11000439	SMKN 2 TANJUNGPINANG	Negeri	JALAN PRAMUKA NO.1
96	Kota	Kec. Bukit Bestari	11003164	SMKS	Swasta	JL.IR. SUTAMI KOMP. VILLA

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	NPSN	NAMA SEKOLAH	STATUS SEKOLAH	ALAMAT
	Tanjungpinang			MAITREYAWIRA		AKASIA NO.66
97	Kota Tanjungpinang	Kec. Bukit Bestari	69756150	SMKS KESEHATAN WIDYA TANJUNGPINANG	Swasta	JL. D.I PANJAITAN KM 6 NO 15

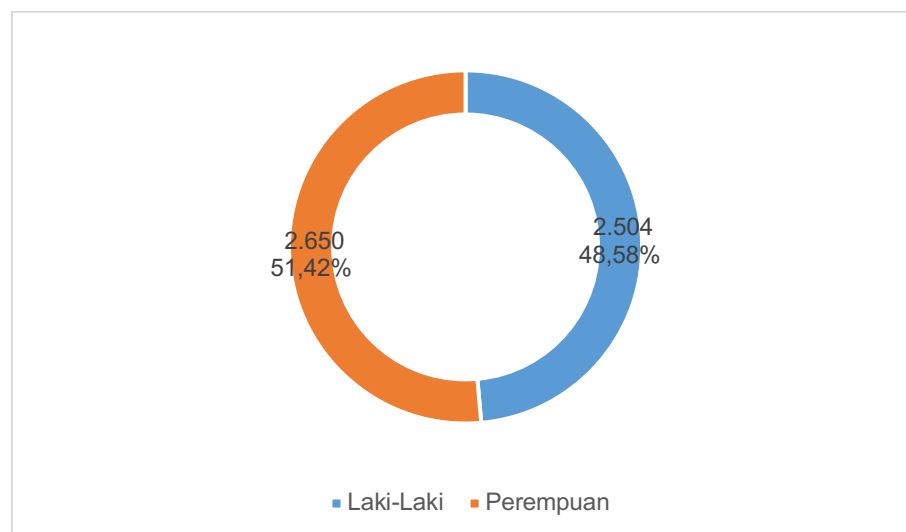
3.2.2 Jaringan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Jaringan SIDa Provinsi Kepulauan Riau dapat dikembangkan dari enam pilar pemangku kepentingan penguatan SIDa, terdiri dari Perangkat Daerah, Universitas/Akademisi/ Politeknik, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Non Pemerintah Lainnya, Dunia Usaha/Dunia Industri, Komunitas Kreatif dan Media Massa. Enam pilar pemangku kepentingan penguatan SIDa ini terutama yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau baik tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten Kota maupun tingkat Nasional yang menjadi perwakilan di Daerah. Saat ini pelaksanaan jaringan SIDa Provinsi Kepulauan Riau belum optimal, sehingga diperlukan pembentukan Forum Inovasi Daerah dan Jejaring Inovasi Daerah. Forum Inovasi Daerah nantinya mempunyai tugas melakukan pengawalan terhadap implementasi Tema dan Sub Tema pengembangan dan penguatan SIDa Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan Jejaring Inovasi mempunyai tugas dalam pencapaian kondisi umum SIDa berdasarkan Kerangka Kerja Inovasi (KKI). Forum Inovasi Daerah maupun Jejaring Inovasi Daerah akan mendukung pencapaian target kinerja SIDa yang akan dicapai.

3.2.3 Sumberdaya Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

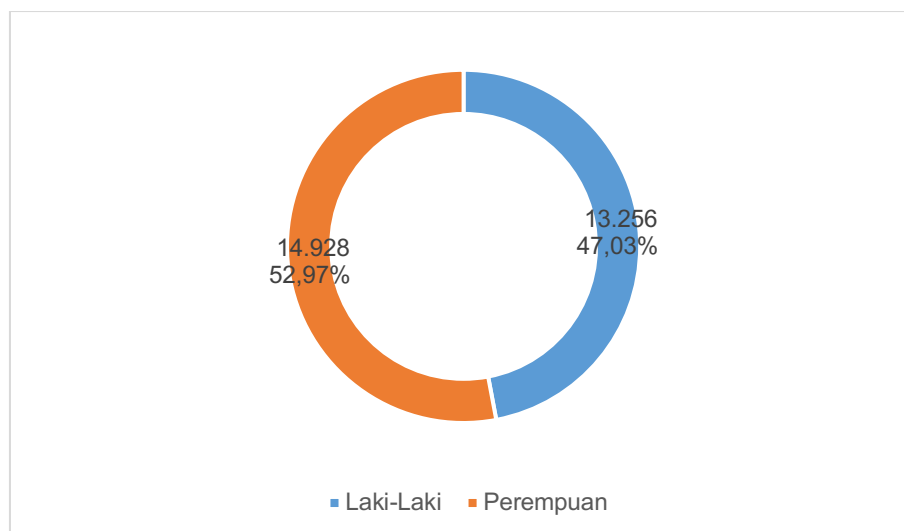
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki sumberdaya Pegawai Negeri Sipil dalam pengembangan dan penguatan Sistem Inovasi Daerah yang dapat dimanfaatkan keahlian dan kepakarannya sesuai dengan tematik dan/atau spesifik sumberdaya, pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya, dan pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir. Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdapat Pegawai Negeri Sipil sebanyak 5.154 orang, terdiri dari 51,54% perempuan dan 48,58% laki-laki. 5.154 orang tersebar diseluruh Dinas dan instansi, yaitu: Inspektorat Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah; Badan Kesbang dan Politik; Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Catatan Sipil; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas

Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Dinas Perhubungan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pendidikan; Dinas Pariwisata; Dinas Kebudayaan; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; Dinas Sosial; Dinas Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Dinas Komunikasi dan Informatika; Biro Administrasi Perekonomian; Biro Kesejahteraan Rakyat; Biro Umum; Biro Hukum; Biro Administrasi Pemerintahan dan Perbatasan; Biro Administrasi Pembangunan; Administrasi Layanan Pengadaan; Biro Organisasi dan Korpri; Biro Humas, Protokol dan Penghubung; Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran; Sekrtariat DPRD; RSUD Tanjungpinang; RSUD Tanjung Uban. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menurut jenis kelamin secara rinci pada Gambar berikut.



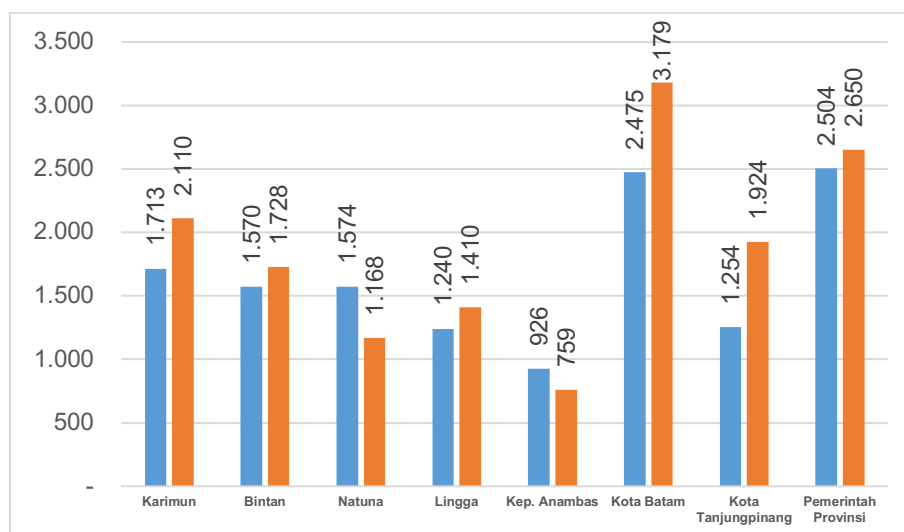
Gambar 3. 7
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Secara keseluruhan baik di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, jumlah Pegawai Negeri Sipil mencapai 28.184 orang yang terdiri dari 52,97% perempuan dan 47,03% laki-laki.



Gambar 3. 8
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau

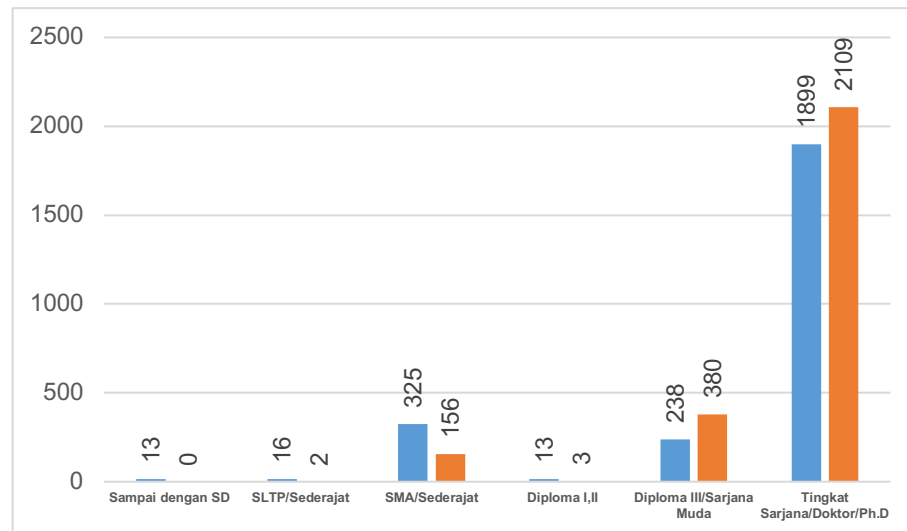
Dilihat persebarannya, jumlah Pegawai Negeri Sipil terendah berada di lingkungan Pemerintah Kep. Anambas sebanyak 1.685 orang dan jumlah Pegawai Negeri Sipil tertinggi berada di lingkungan Pemerintah Kota Batam mencapai sebanyak 5.654 orang. Bahkan jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batam lebih tinggi dibandingkan jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 5.154 orang, seperti terlihat pada Gambar berikut.



Gambar 3. 9
Persebaran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau

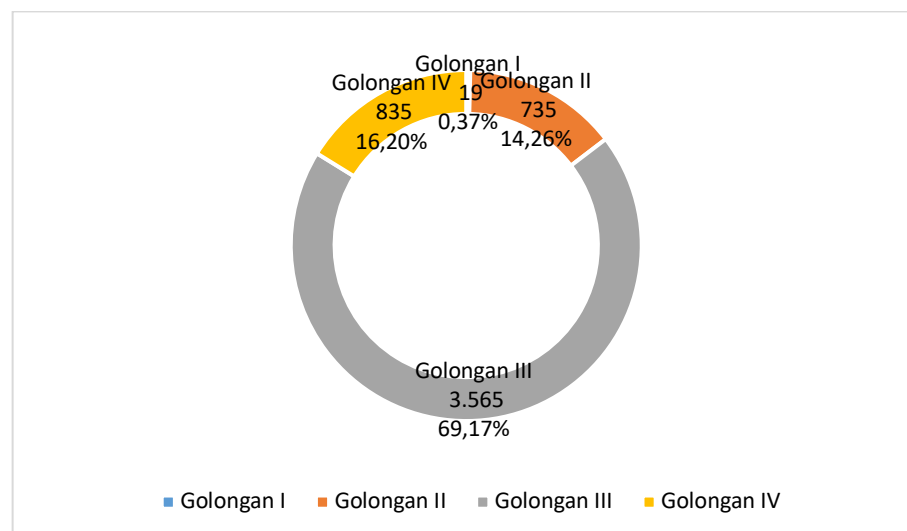
Rata-rata Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D sebesar

77,76% (4.008 orang), diikuti Diploma III/Sarjana Muda 11,99% (618 orang), SMA/Sederajat sebesar 9,33% (481 orang), SLTP/Sederajat sebesar 0,35% (18 orang), Diploma I dan II sebesar 0,31% (16 orang), dan hanya sampai dengan SD/Sederajat sebesar 0,25% (13 orang).



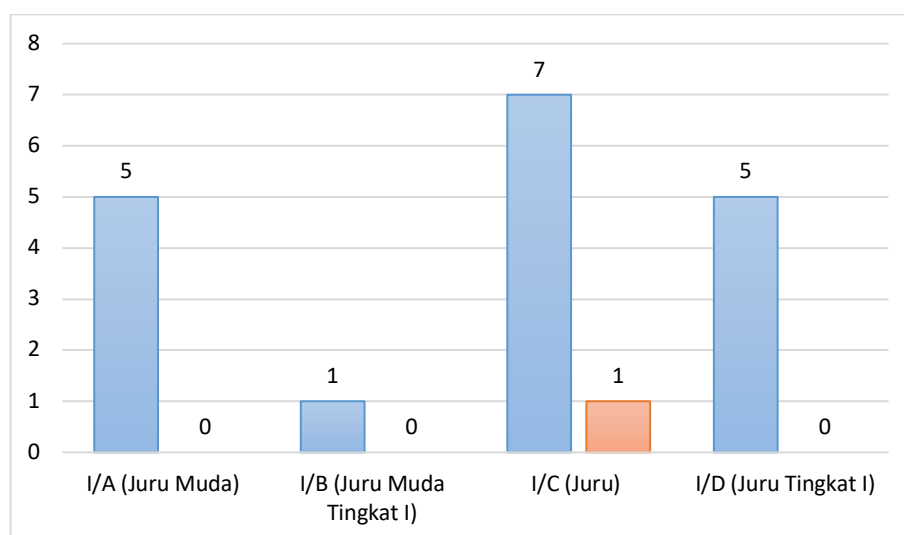
Gambar 3. 10
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Pegawai Negeri Sipil Golongan III mendominasi total Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 69,17%, seperti terlihat pada Gambar berikut.



Gambar 3. 11
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi dan Golongan Kepangkatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

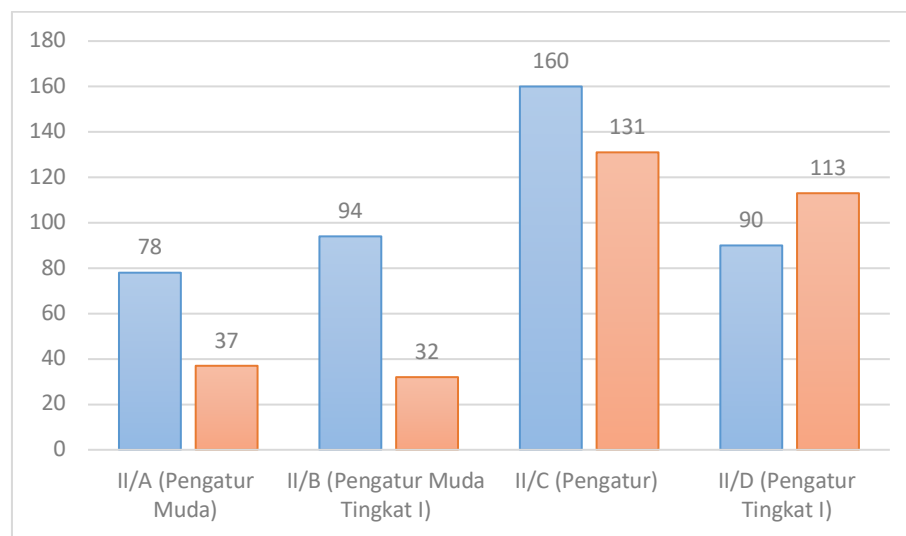
JURU merupakan jenjang kepangkatan untuk PNS Golongan I/a hingga I/d dengan sebutan secara berjenjang: JURU MUDA, JURU MUDA TINGKAT I, JURU, dan JURU TINGKAT I. Jika dilihat dari persyaratan golongannya maka yang menempati golongan ini adalah mereka dengan pendidikan formal jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Pertama, atau yang setingkat. Dari ketentuan tersebut dapat diasumsikan bahwa pekerjaan-pekerjaan di tingkat kepangkatan JURU baru membutuhkan kemampuan-kemampuan skolastik dasar dan belum menuntut suatu ketrampilan bidang ilmu tertentu. Dapat dikatakan bahwa JURU merupakan pelaksana pembantu (pemberi ASISTENSI) dalam bagian kegiatan yang menjadi tanggung jawab jenjang kepangkatan di atasnya (PENGATUR). Jumlah Pegawai Negeri Sipil Golongan I di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 19 orang atau 0,37% dari total Pegawai Negeri Sipil, secara rinci Jumlah Pegawai Negeri Sipil Golongan I/Juru Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 3. 12
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Golongan I/Juru Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

PENGATUR merupakan jenjang kepangkatan untuk PNS Golongan II/a hingga II/d dengan sebutan secara berjenjang: PENGATUR MUDA, PENGATUR MUDA TINGKAT I, PENGATUR, dan PENGATUR TINGKAT I. Jika dilihat dari persyaratan golongannya maka yang menempati golongan ini adalah mereka dengan pendidikan formal jenjang Sekolah Lanjutan Atas hingga Diploma III, atau yang setingkat. Dari ketentuan tersebut dapat diasumsikan bahwa pekerjaan-pekerjaan di tingkat kepangkatan PENGATUR sudah mulai menuntut suatu ketrampilan dari bidang ilmu

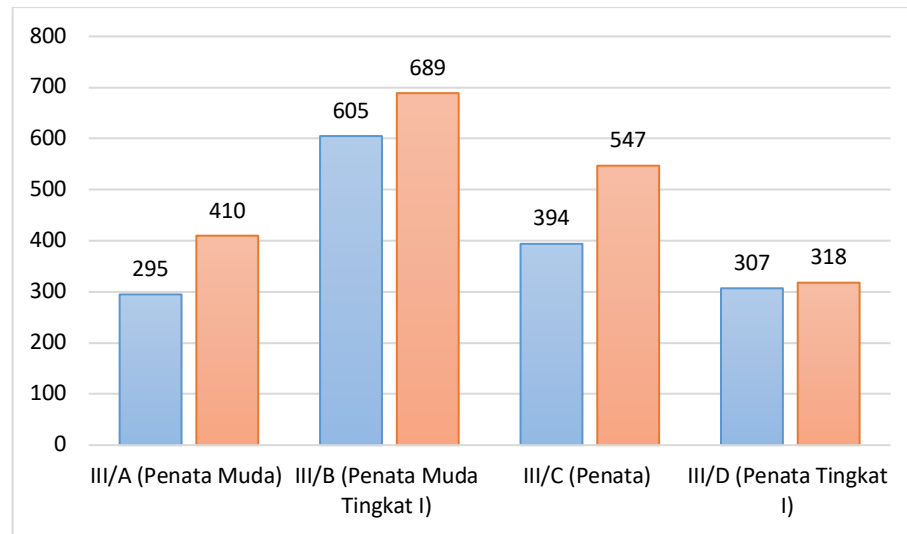
tertentu, namun sifatnya sangat teknis. Dengan demikian pada tingkatan ini, PENGATUR adalah orang yang MELAKSANAKAN langkah-langkah realisasi suatu kegiatan yang merupakan operasionalisasi dari program instansinya. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Golongan II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 735 orang atau 14,26% dari total Pegawai Negeri Sipil, secara rinci Jumlah Pegawai Negeri Sipil Golongan II/Pengatur Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 3. 13
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Golongan II/Pengatur Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

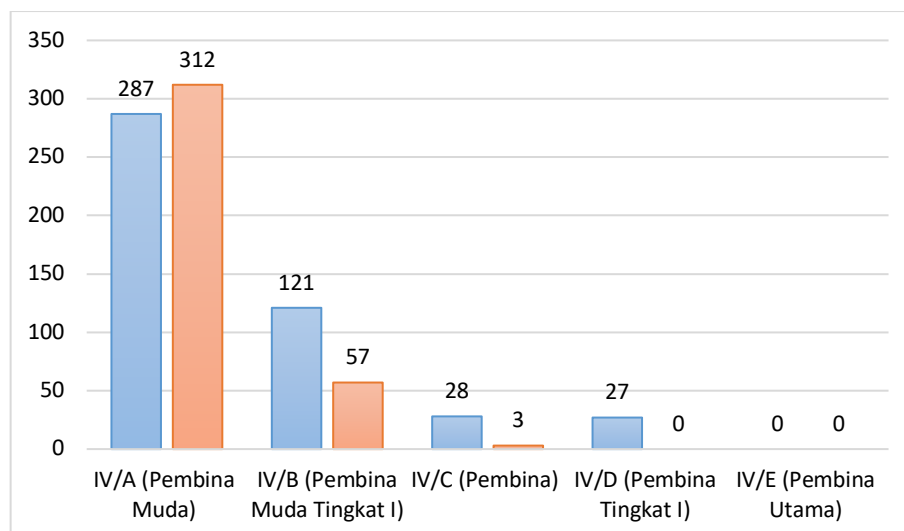
PENATA merupakan jenjang kepangkatan untuk PNS Golongan III/a hingga III/d dengan sebutan secara berjenjang: PENATA MUDA, PENATA MUDA TINGKAT I, PENATA, dan PENATATINGKAT I. Jika dilihat dari persyaratan golongannya maka yang menempati golongan ini adalah mereka dengan pendidikan formal jenjang S1 atau Diploma IV ke atas, atau yang setingkat. Dari ketentuan tersebut dapat diasumsikan bahwa pekerjaan-pekerjaan di tingkat kepangkatan PENATA sudah mulai menuntut suatu keahlian bidang ilmu tertentu dengan lingkup pemahaman kaidah ilmu yang telah mendalam. Dengan pemahamannya yang komprehensif tentang sesuatu maka PENATA bukan lagi sekedar pelaksana, melainkan sudah memiliki tanggung jawab MENJAMIN MUTU proses dan keluaran kerja tingkatan PENGATUR. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Golongan III di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 3.565 orang atau 69,17% dari total Pegawai Negeri Sipil, secara rinci Jumlah Pegawai Negeri Sipil Golongan III/Penata Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin di

Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 3. 14
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Golongan III/Pejabat Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

PEMBINA merupakan jenjang kepangkatan untuk PNS Golongan IV/a hingga IV/e dengan sebutan secara berjenjang: PEMBINA, PEMBINA TINGKAT I, PEMBINA UTAMA MUDA, PEMBINA UTAMA MADYA dan PEMBINA UTAMA. Sebagai jenjang tertinggi, kepangkatan ini tentunya diperoleh sesudah melalui suatu perjalanan karier yang panjang sebagai PNS. Ini berarti pekerjaan pada kelompok kepangkatan PEMBINA semestinya bukan saja menuntut suatu keahlian bidang ilmu tertentu yang mendalam, namun juga menuntut suatu kematangan dan kearifan kerja yang sudah diperoleh sepanjang masa kerjanya. Dengan demikian, PEMBINA adalah model peran bagi jenjang-jenjang di bawahnya guna keperluan MEMBINA DAN MENGEMBANGKAN kekuatan sumberdaya untuk jangkauan pandang ke depan. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Golongan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 835 orang atau 16,20% dari total Pegawai Negeri Sipil, secara rinci Jumlah Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/Pembina Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 3. 15
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/Pembina Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2017

3.2.4 Pilar Prakarsa Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Kondisi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Pilar Prakarsa Penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagai berikut.

Tabel III. 3
Kondisi Umum Pilar Prakarsa Penguatan SIDA
Provinsi Kepulauan Riau Saat Ini

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Eksisting
1. Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	1. Rasio investasi IPTEKIN per PDB (APBD) provinsi	Investasi IPTEKIN belum dijadikan ukuran kinerja provinsi
	2. Jumlah regulasi yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	<ul style="list-style-type: none"> • SKPD dan instansi terkait sudah memiliki dan menerapkan SOP dalam pelayanan tetapi belum optimal • Roadmap yang mengintegrasikan SIDA ke dalam RPJMD belum tersedia • Provinsi sudah menerapkan JDIH yang mempermudah pengguna layanan untuk keperluan terkait peraturan dan regulasi
	3. Jumlah basis data yang tertata	Data masih tersebar dan belum tertata dengan baik
2. Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) /atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	1. Jumlah tim koordinasi penguatan SIDA kabupaten/kota	Kelembagaan penguatan sistem inovasi di kabupaten/kota belum ada
	2. Jumlah balitbangda kab/kota	Balitbangda belum ada di setiap kabupaten/kota
	3. Jumlah peneliti dan perekayasa di Kabupaten/Kota	SDM IPTEKIN masih lemah
3. Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	1. Jumlah kerjasama antar aktor inovasi daerah	Kolaborasi aktor inovasi daerah belum tersinergi dengan baik

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Eksisting
	2. Jumlah Ruang Publik Kreatif (RPK)	Interaksi antar anggota kelompok masyarakat di RPK belum berkembang
4. Budaya inovasi	1. Jumlah apresiasi terhadap pelaku inovasi	Apresiasi terhadap kegiatan kreatif inovatif belum berkembang
	2. Jumlah sekolah yang mengadopsi tentang kewirausahaan dan IPTEKIN	Partisipasi masyarakat dalam berinovasi, mengikuti pendidikan dan pelatihan ketrampilan belum besar
5. Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	Jumlah kab/kota yang sinkron dengan agenda IPTEKIN atau sistem inovasi	<ul style="list-style-type: none"> Kerjasama antar daerah dalam wilayah provinsi Sumatera Selatan belum berjalan dengan optimal bagi pembangunan daerah; Kerjasama antar pusat daerah masih belum berjalan dengan optimal bagi pembangunan daerah
6. Keselarasan dengan perkembangan global	1. Jumlah perempuan yang menduduki jabatan di pemerintahan provinsi	Kesetaraan gender masih rendah
	2. Cakupan penanganan permasalahan AMDAL	Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelestarian lingkungan masih rendah
	3. Jumlah HKI yang terdaftar	Kesadaran HKI di masyarakat masih lemah

Tabel III. 4
Kondisi Pilar Prakarsa Penguatan SIDA Berkembangnya Klaster Industri Unggulan Daerah (KIUD)
Provinsi Kepulauan Riau Saat Ini

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Eksisting
1. Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	1. Jumlah dokumen potensi unggulan daerah	Sebagian data potensi unggulan daerah tersedia tetapi masih tersebar di berbagai instansi, belum lengkap dan belum dapat diakses online
	2. Jumlah insentif yang diberikan pada KIUD	Landasan legal bagi pengembangan KIUD belum ada
	3. Jumlah klaster industri unggulan daerah	Roadmap klaster ada di tingkat SKPD dan belum masuk ke dalam RPJMD
	4. Jumlah infrastruktur quality assurance klaster industri unggulan daerah	Infrastruktur quality assurance klaster industri unggulan daerah masih lemah
2. Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) /atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	Persentase aset IPTEKIN yang dimanfaatkan dalam klaster industri unggulan daerah	Hasil research yang mendukung klaster masih terpisah di berbagai lembaga litbangyasa
3. Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	Jumlah kerjasama antar pelaku dalam klaster industri unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Interaksi antara para pemangku kepentingan di industri karet dengan pemasok IPTEKIN belum optimal; • Pengguna IPTEKIN di kalangan KUKM belum optimal

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Eksisting
4. Budaya inovasi	Jumlah spesifikasi yang diacu oleh pelaku dalam klaster	Budaya penerapan IPTEKIN di tingkat pemasok bahan mentah industri belum berkembang;
5. Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	Jumlah hasil inovasi dalam klaster unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Rantai nilai di klaster industri belum kuat • Aktifitas klaster industri belum berkembang
6. Keselarasan dengan perkembangan global	Jumlah kasus penolakan ekspor produk klaster unggulan daerah	Adanya kampanye negatif internasional tentang mutu produk Indonesia

Tabel III. 5
Kondisi Pilar Prakarsa Penguatan SIDA Berkembangnya Jaringan IPTEKIN
Provinsi Kepulauan Riau Saat Ini

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Eksisting
1. Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	1. Jumlah kawasan pusat belajar IPTEKIN	Belum ada kawasan pusat belajar IPTEKIN
	2. Jumlah dokumen acuan untuk ketersediaan inovasi	Belum semua SKPD memberikan akses pelayanan berbasis online yang berkaitan dengan dokumen acuan untuk ketersediaan inovas
2. Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) /atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	3. Jumlah aliansi (kemitraan) strategis IPTEKIN	Kerjasama litbangyasa belum optimal dan masih bersifat bilateral belum dalam bentuk networking
	4. Jumlah kawasan technopark	Belum tersedianya kawasan technopark
3. Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	Jumlah aktor yang dilayani oleh Pusat Inovasi (PI)	Lembaga yang mewadahi networking secara legal belum berjalan optimal (misal pusat unggulan inovasi)
4. Budaya inovasi	Proporsi keterlibatan dalam kemitraan strategis	Budaya berjejaring antara aktor inovasi belum berkembang
5. Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	Jumlah technopark yang masuk dalam ASTPI	Keterkaitan antar technopark dengan pelaku technopark nasional ASTPI (Asosiasi Science Technology Park Indonesia), regional ASPA (Asian Science Park Association) dan internasional WTA (World Technopolis Association) belum terbentuk;
6. Keselarasan dengan perkembangan global	Jumlah kerjasama dengan lembaga litbang internasional	Masih rendahnya kerjasama dengan lembaga litbang internasional

Tabel III. 6
Kondisi Pilar Prakarsa Penguatan SIDA Berkembangnya Bisnis Inovatif
Provinsi Kepulauan Riau Saat Ini

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Eksisting
1. Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	1. Jumlah dukungan pembiayaan APBD untuk UKM IPTEKIN	bantuan modal KUKM bersumber dari APBD berupa modal tunai dan peralatan kerja belum optimal
	2. Jumlah dukungan pembiayaan non APBD untuk UKM IPTEKIN	bantuan modal KUKM bersumber dari non APBD berupa modal tunai dan peralatan kerja belum optimal
2. Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) /atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	1. Jumlah pusat inovasi	Kelembagaan pusat inovasi (inkubator teknologi) belum berjalan optimal;
	2. Jumlah aktifitas pelayanan pusat inovasi	Inisiatif berwirausaha berbasis IPTEKIN dari kalangan pemuda masih rendah
	3. Jumlah pos pelayanan teknologi (posyantek) untuk pengembangan teknologi tepat guna	Peran pos pelayanan teknologi (posyantek) dan belum optimal
3. Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	Jumlah kemitraan strategis dan kolaborasi untuk inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan expert di kalangan KUKM masih rendah • Interaksi antara penghasil teknologi dan kalangan bisnis belum berkembang
4. Budaya inovasi	1. Jumlah UKM yang ditingkatkan kapasitasnya	Daya serap masyarakat terhadap IPTEKIN masih rendah
	2. Jumlah peserta yang mengikuti program pendidikan teknopreneur	Budaya menciptakan kesempatan/lapangan kerja di kalangan pendidikan tinggi belum berkembang
	3. Jumlah perguruan tinggi yang	Budaya menciptakan

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Eksisting
	mengadopsi program pendidikan teknopreneur	kesempatan/lapangan kerja di kalangan pendidikan tinggi belum berkembang
5. Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	Jumlah bisnis inovatif dalam klaster industri	Jenis usaha inovatif potensial tumbuh secara alami bukan atas desain sehingga daya dukung klaster industri menjadi tidak optimal
6. Keselarasan dengan perkembangan global	Jumlah produk inovatif yang terstandar	Produk dari bisnis inovatif yang terstandar belum ada;
	Jumlah bisnis inovatif yang produknya diterima dipasar internasional	Kerjasama internasional dalam pengembangan bisnis inovatif belum terjalin

Tabel III. 7
Kondisi Pilar Prakarsa Penguatan SIDA Berkembangnya Bidang-Bidang IPTEKIN Strategis Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Saat Ini

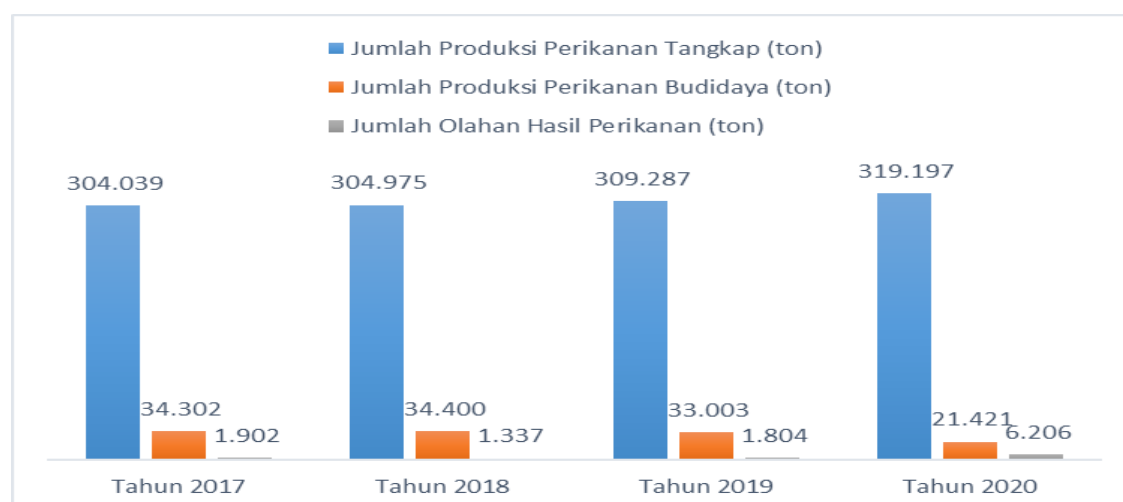
Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Eksisting
1. Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	1. Jumlah kesepakatan provinsi dan kabupaten/kota tentang penguatan sistem inovasi	Kesepakatan Kepala Daerah Gubernur-Bupati/Walikota dalam pengembangan tematik SIDA belum terwujud menjadi regulasi yang nyata
	2. Jumlah paten HKI yang terdaftar	HKI belum terdata dengan baik
2. Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) /atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	Jumlah lembaga litbangyasa	Lembaga litbangyasa di Kabupaten/Kota masih belum terbentuk, pun bila ada belum berfungsi optimal
3. Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	Jumlah kerjasama IPTEKIN antar aktor inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Interaksi aktor inovasi dalam pengembangan tematik daerah masih terbatas • Inisiatif Kabupaten/Kota dalam menyuarakan kebutuhan IPTEKIN sesuai potensi lokal belum dilakukan secara optimal
4. Budaya inovasi	Jumlah pelayanan IPTEKIN di daerah	Akses IPTEKIN belum menjadi kebutuhan prioritas bagi pemangku kepentingan
5. Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	Jumlah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan strategis daerah dan dimanfaatkan	Kebijakan-kebijakan daerah dalam pengembangan tematik belum sesuai proporsi yang dibutuhkan
6. Keselarasan dengan perkembangan global	Jumlah pemenuhan ketentuan internasional dalam eksploitasi sumberdaya alam lokal	eksploitasi SDA lokal dalam pembiayaan pembangunan daerah merupakan isu yang belum terpecahkan

3.3 Kondisi Daerah Dilihat dari Skenario Penguatan SIDA

Melihat skenario pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau, sehingga skenario dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi kebijakan terkait penguatan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 diarahkan pada **“Akselerasi Pembangunan Bidang Perikanan Kelautan, Industri, dan Pariwisata didukung Infrastruktur dan Pendidikan/kualitas SDM Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Masalah Kemiskinan dan Stunting”**, kondisi skenario penguatan SIDA Provinsi Kepulauan Riau saat ini dapat dilihat pada uraian berikut.

3.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Sektor pertanian penting lainnya di Provinsi Kepulauan Riau adalah subsektor perikanan. Kepulauan Riau memiliki potensi perikanan yang sangat besar mengingat lebih dari 96 persen wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah laut. Kawasan perikanan Provinsi Kepulauan Riau meliputi seluruh wilayah laut dan perairan yang terdiri dari Kawasan Perikanan Tangkap dan Kawasan Perikanan Budidaya. Dari kawasan tersebut, komoditas unggulan terdiri dari rumput laut (seaweed), ikan dan biota laut bernilai ekonomi tinggi serta komoditi hasil budidaya perikanan. Berlimpahnya kekayaan kelautan Provinsi Kepulauan Riau tidak lantas menjadikan sektor perikanan sebagai sektor unggulan daerah. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap menunjukkan terjadinya peningkatan setiap tahunnya. Namun, penurunan jumlah produksi perikanan budidaya justru menunjukkan tren yang menurun sampai dengan Tahun 2020 meskipun di saat yang bersamaan jumlah olahan hasil perikanan mengalami kenaikan yang cukup besar di tahun 2020. Hal tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar berikut.



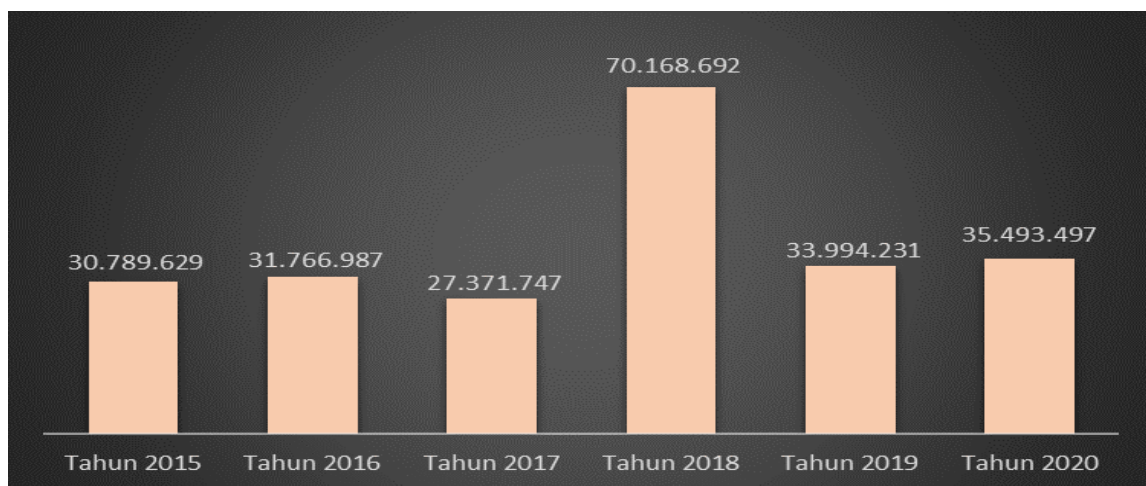
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 3. 16
Perbandingan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap, Produksi Perikanan Budidaya, dan
Produksi Olahan Hasil Perikanan (ton) Tahun 2017-2020

Pembangunan kelautan dan perikanan melalui program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diarahkan dalam rangka mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing di pasar domestik dan internasional dengan menerapkan sistem industri yang efisien dan nirlimbah. Kebijakan dimaksud mengacu pada pendekatan *market driven* atau pasar yang menjadi acuan kebijakan, sehingga ketersediaan produk dapat diterima dan diminati oleh konsumen. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus merupakan produk kelautan dan perikanan yang memiliki sifat *high quality, safe, traceable, high value content* dan kompetitif.

Peningkatan volume produk olahan hasil perikanan adalah indikator kinerja utama keberhasilan program kegiatan yang dilakukan. Dari data yang disajikan produk olahan perikanan Kepulauan Riau masih belum tampak signifikan dibandingkan dengan produksi yang dihasilkan. Peningkatan volume produk olahan sangat ditentukan oleh berkembangnya Unit Pengolahan Ikan (UPI), baik skala UMKM maupun skala besar.

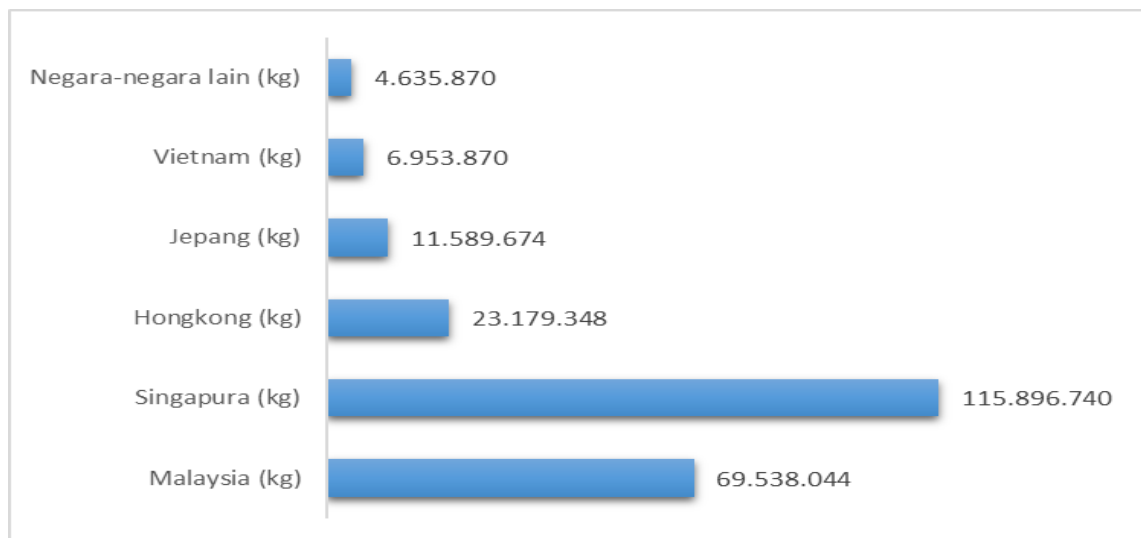
Selain jumlah produksi perikanan, kinerja perikanan juga dapat dilihat dari nilai ekspor perikanan berdasarkan US Dollar (USD). Berdasarkan laporan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, nilai ekspor perikanan meningkat signifikan pada tahun 2018 namun pada tahun 2019-2020 kembali mengalami penurunan. Jika pada tahun 2015 nilai ekspor perikanan mencapai USD 30,789,629, angka tersebut meningkat ke angka USD 35.493.497 pada tahun 2020.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 3. 17
Nilai Ekspor Hasil Perikanan (dalam USD)

Sementara itu, negara tujuan ekspor produksi ikan terbanyak Provinsi Kepulauan Riau adalah Singapura disusul oleh Malaysia. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar berikut.



Sumber: Statistik Ekspor Provinsi Kepulauan Riau 2019

Gambar 3. 18
Jumlah Ekspor Ikan Segar Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

Menilai kinerja sektor perikanan juga dapat dilihat dari kesejahteraan nelayan, yang dapat dideteksi dari nilai tukarnya. Dibandingkan dengan angka nasional, baik nilai tukar nelayan maupun pembudidaya ikan Kepulauan Riau lebih tinggi dari angka nasional, demikian juga dengan perkembangannya yang juga lebih baik. Pada tingkat konsumsi. Membaiknya kinerja nilai tukar nelayan berkaitan dengan pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan adanya stimulus berupa sarana dan prasarana perikanan tangkap skala kecil yaitu alat penangkap ikan dan sampan bermesin. Selain itu juga, pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan budidaya yang menyediakan stimulus terhadap perkembangan budidaya ikan khususnya budidaya ikan laut. Stimulus yang diberikan berupa pakan, benih dan sarana pendukung lainnya. Kemudian, melalui peran UPTD Balai Benih Ikan dilakukan pengujian yang memproduksi benih ikan untuk memenuhi kebutuhan pembudidaya ikan di Provinsi Kepulauan Riau khususnya.

Tabel III. 8
Nilai Tukar Nelayan Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020

No.	Nilai Tukar	Capaian					Sumber
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Nelayan Kepulauan Riau	108,5	110,7	115,26	117,42	115,94	BPS
2.	Pembudidaya Ikan	107,28	107,23	108,20	126,77	101,83	BPS
3	Nelayan Nasional	102,38	102,82	104,05	105,99	107,53	BPS

No.	Nilai Tukar	Capaian					Sumber
		2016	2017	2018	2019	2020	
4	Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)	55,79	56,02	58,58	62,28	65,43	Susenas KKP

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Salah satu indikator lain keberhasilan kinerja bidang perikanan adalah tingkat konsumsi ikan. Saat ini posisi konsumsi ikan Kepulauan Riau jauh lebih tinggi daripada target nasional yang berkisar pada angka 45 kg/kapita/tahun. Sebagai wilayah kepulauan maka konsumsi ikan adalah pola konsumsi yang telah berakar kuat di masyarakat, itulah sebabnya saat rata-rata konsumsi ikan Indonesia baru di angka sekitar 4 kg, Kepulauan Riau sudah mencapai lebih dari 55 kg perkapita per tahun.

Tabel III. 9
Kinerja Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

No.	Uraian	Capaian					Sumber
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)	55,79	56,02	58,58	62,28	65,43	Susenas KKP
2	Persentase kepatuhan pelaku usaha	99	99	99	99	99	-
3	Persentase penanganan pengaduan yang tertangani	100	100	100	100	100	-
4	Kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola minimum (level 3)	-	1	1	1	n/a	Dinas KP Prov. Kepulauan Riau

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

3.3.2 Urusan Pertanian

Sektor pertanian di Kepulauan Riau merupakan sektor yang memiliki kontribusi cukup kecil dalam perekonomian dengan pertumbuhan yang negatif, sehingga sektor ini masuk dalam kategori sektor non unggulan. Namun jika dilihat dari penduduk yang terlibat dalam sektor pertanian, maka sektor ini menjadi sektor unggulan. Sektor yang tumbuh negatif dengan kontribusi kecil ini jelas menjadi sektor yang tertinggal (*Background Study Ekonomi*, 2020).

Tabel III. 10
Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor dan Subsektor Pertanian Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2015-2019

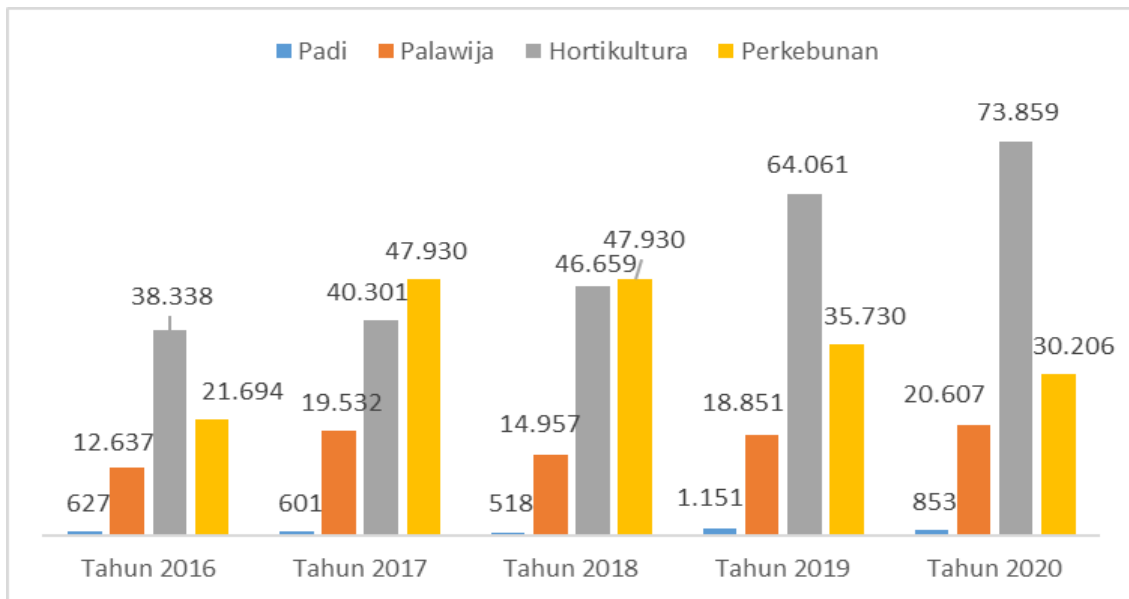
Sektor/Subsektor	2015		2016		2017		2018		2019	
	K	P	K	P	K	P	K	P	K	P
Pertanian	3,55	5,78	3,58	5,79	3,58	-1,21	3,26	-2,85	3,08	-0,7
Tanaman pangan	0,02	6,59	0,02	3,97	0,02	-5,60	0,01	-24,37	0,01	-10,31
Hortikultura	0,15	3,90	0,14	-1,82	0,14	0,39	0,13	5,71	0,15	17,90
Perkebunan	0,70	2,22	0,66	-2,26	0,68	4,13	0,66	1,35	0,66	6,86
Peternakan	0,32	6,18	0,33	8,29	0,35	8,73	0,35	6,90	0,38	12,26
Perikanan	2,32	7,04	2,39	8,35	2,28	-3,77	2,07	-5,81	1,84	-6,15

Ket: K= kontribusi ; P = pertumbuhan

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Sektor pertanian yang kurang optimal dan bukan unggulan ini tetap harus menjadi perhatian penting, sebab sektor pertanianlah yang menjadi sumber penghasilan penduduk sekaligus sebagai supplier pangan. Pertanian dan perkebunan menjadi salah satu sektor unggulan untuk mengurangi ketergantungan terhadap hasil bumi seperti pertambangan dan penggalian. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kawasan peruntukan pertanian seluas 227.682,63 ha. Kawasan tersebut terdiri dari kawasan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Pengembangan kawasan budidaya ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi berdasarkan kesesuaian lahan secara berkelanjutan demi mendukung ketahanan pangan serta pengembangan berorientasi agribisnis pertanian. Lebih lanjut, kawasan peternakan kemudian dibagi menjadi dua peruntukan, meliputi: skala agribisnis dan skala peternakan rakyat. Kawasan agribisnis di Provinsi Kepulauan Riau diprioritaskan di Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, dan beberapa pulau lainnya yang memiliki potensi serta kesesuaian dari aspek daya dukung lahan dan agroklimat. Sementara itu, pengembangan kawasan budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan dialokasikan di Kabupaten Lingga dan Kabupaten Bintan.

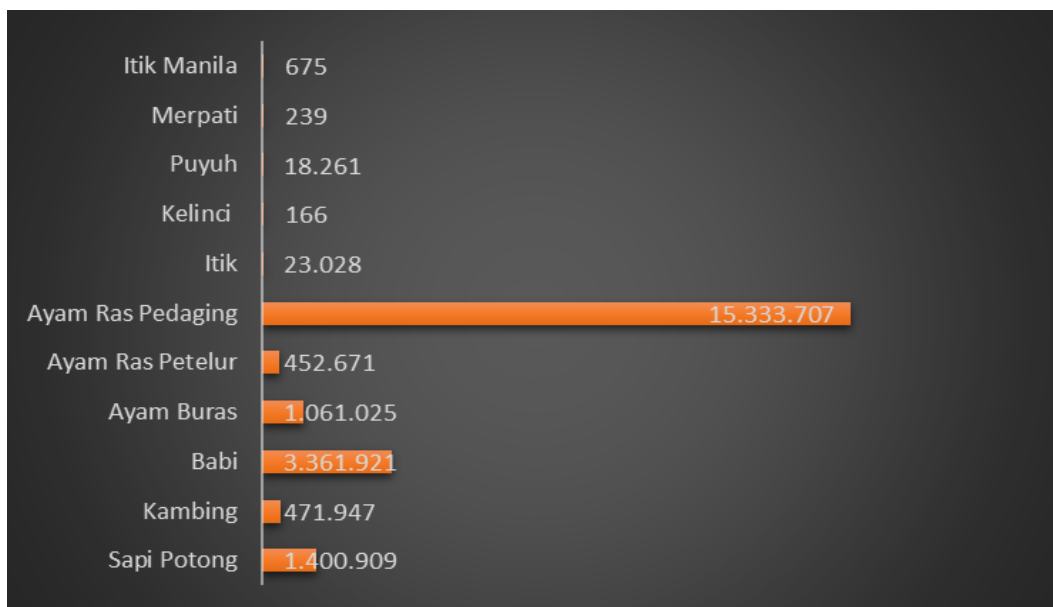
Di antara berbagai produk pertanian itu, produk perkebunan dan hortikultura merupakan produk dominan di Kepulauan Riau, sedangkan produk padi adalah produk pertanian yang paling rendah. Hal ini berkaitan dengan wilayah Kepulauan Riau yang sebagian besar adalah laut. Dilihat dari perkembangan produksinya juga mengalami fluktuasi, terutama untuk perkebunan.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 3. 19
Perbandingan Jumlah Produksi Padi, Palawija, Hortikultura, dan Perkebunan di Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020

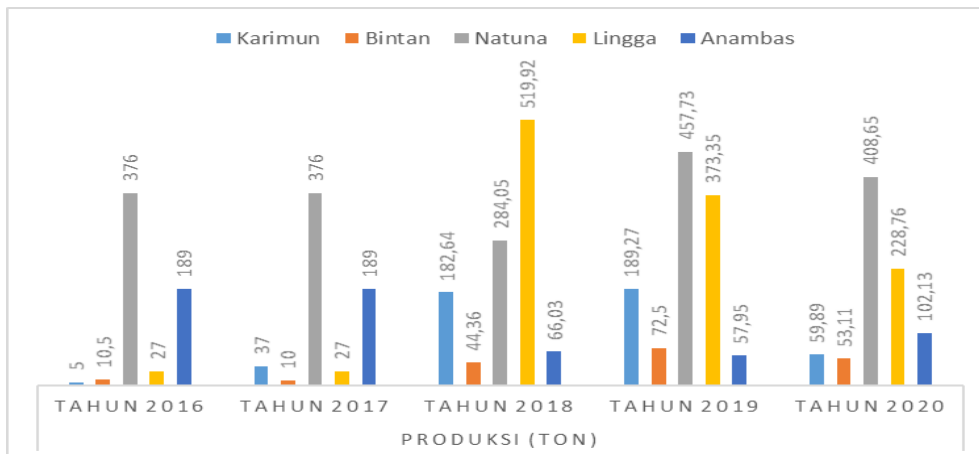
Meskipun hasil produksi pertanian hortikultura meningkat, namun secara substansi kinerja indikator tersebut masih belum optimal. Hal ini dikarenakan buah dan sayuran masih berasal dari provinsi lain bahkan diimpor. Untuk peternakan, produk peternakan unggas lebih unggul jika dibandingkan dengan ternak besar. Sekali lagi persoalan sempitnya lahan menjadi masalah untuk ternak besar.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 3. 20
Perbandingan Produksi Hasil Produk Peternakan (kg) Tahun 2020

Dilihat dari persebarannya, maka produk pertanian, utamanya padi tersebar di seluruh kabupaten dengan kontributor terbesar di Kabupaten Natuna, disusul oleh Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Karimun. Di tahun 2020 jumlah produksi padi dari setiap kabupaten sangat fluktuatif dengan kecenderungan menurun setiap tahunnya.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 3. 21
Jumlah Produksi Padi Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020

3.3.3 Urusan Perindustrian

Kinerja sektor perindustrian di Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh dua bidang yaitu bidang Industri Agro dan Manufaktur dan Bidang Industri Kecil dan Menengah. Sektor Perindustrian dalam hal ini Industri Pengolahan menjadi salah satu sektor yang dominan dalam pembentukan PDRB Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut bisa dilihat dari kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB, yang selama beberapa tahun terakhir selalu menunjukkan kontribusi terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya. Berdasarkan data BPS, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 mencapai 42,77% mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 yang sebesar 37,57%. Besarnya kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB salah satunya dipengaruhi oleh banyaknya perusahaan yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan data BPS, jumlah perusahaan besar dan menengah tahun 2017 dengan klasifikasi jumlah tenaga kerja diatas 20 orang sebanyak 444 perusahaan, dimana sebanyak 390 diantaranya berada di kota Batam.

Jumlah industri kecil di Kepulauan Riau mencapai 2.500 unit pada tahun 2020, meningkat jika dibandingkan kondisi tahun 2019 yang jumlahnya 2.400 unit. Dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaku industri kecil, banyak hal yang dilakukan oleh

pemerintah. Upaya yang dilakukan antara lain melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap pelaku industri kecil dan menengah baik melalui pelatihan, bimtek, sosialisasi, bantuan mesin dan peralatan, fasilitasi klinik kemasan, dan menyertakan pelaku industri serta produk-produk dari pelaku industri kecil ke berbagai kegiatan pameran maupun expo. Hanya saja yang menjadi kendala adalah masih terbatasnya jumlah produk-produk pelaku industri kecil yang bisa difasilitasi oleh pemerintah untuk mengikuti pameran atau expo. Cakupan IKM yang dibina provinsi sebanyak 11,57%, sedangkan cakupan pelaku IKM yang mengikuti promo produk sebanyak 0,05%. Dalam rangka meningkatkan jumlah wirausaha baru di Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah juga melakukan pelatihan terhadap warga masyarakat yang belum memiliki usaha yang diharapkan dapat tumbuh sebagai wirausaha baru.

Dalam rangka meningkatkan kinerja sektor industri, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama kabupaten/kota mengembangkan kawasan industri dengan jumlah semakin meningkat dari sejumlah 22 unit pada tahun 2011 menjadi 32 unit pada tahun 2020. Kawasan industri ini akan ditingkatkan jumlahnya pada tahun-tahun mendatang sehingga dapat memicu pertumbuhan industri. Secara rinci kinerja urusan perindustrian dalam kurun waktu tahun 2015-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel III. 11
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor perindustrian	%	37,56	37,43	37,07	36,85	37,57	42,77
2	Pertumbuhan sektor perindustrian	%	5,61	3,36	1,53	4,14	6,25	13,84
3	Jumlah Sentra Industri dilengkapi Infrastruktur penunjang	sentra	2	4	6	8	8	8
4	Jumlah rencana pembangunan industri provinsi.	dokumen	0	0	1	2	2	1
5	Jumlah industri kecil dan Menengah	unit	1.632	1.723	2.000	2.200	2.400	2.500
6	Rata-rata omset IKM yang dibina	%	n/a	0,008	0,012	0,021	0,014	n/a
7	Cakupan pelaku IKM yang mengikuti promo produk	IKM	n/a	n/a	18	20	24	10
8	Cakupan IKM yang dibina provinsi	IKM	n/a	60	145	175	338	120
9	Jumlah IKM yang terfasilitas melalui klinik kemasan	IKM	180	180	180	180	180	250
10	Jumlah calon wirausaha baru yang dilatih	orang	n/a	n/a	20	20	30	20
11	Jumlah IKM yang mendapat bantuan mesin dan peralatan	orang	n/a	n/a	20	60	150	45
12	Jumlah kawasan industri	kawasan	26	26	26	26	26	32

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

3.3.4 Urusan Pariwisata

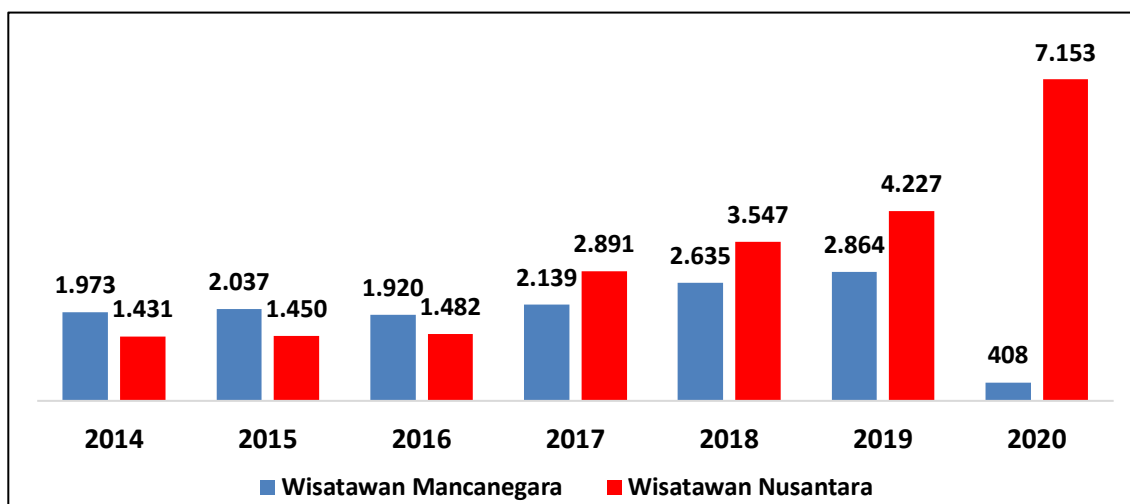
Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau. Kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi makro dapat dideteksi dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Wisatawan yang datang akan membutuhkan tempat untuk menginap dan tempat untuk berkonsumsi. Namun demikian, sebelum adanya pandemi COVID-19 kontribusi sektor ini menunjukkan peningkatan, ini sebuah indikasi terus berkembangnya sektor pariwisata.

Tabel III. 12
Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kepulauan Riau terhadap PDRB

Uraian	Capaian					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,94%	1,94%	2,13%	2,26%	2,36%	1,60%*

Sumber: BPS, Kepulauan Riau dalam Angka 2020 * angka sementara

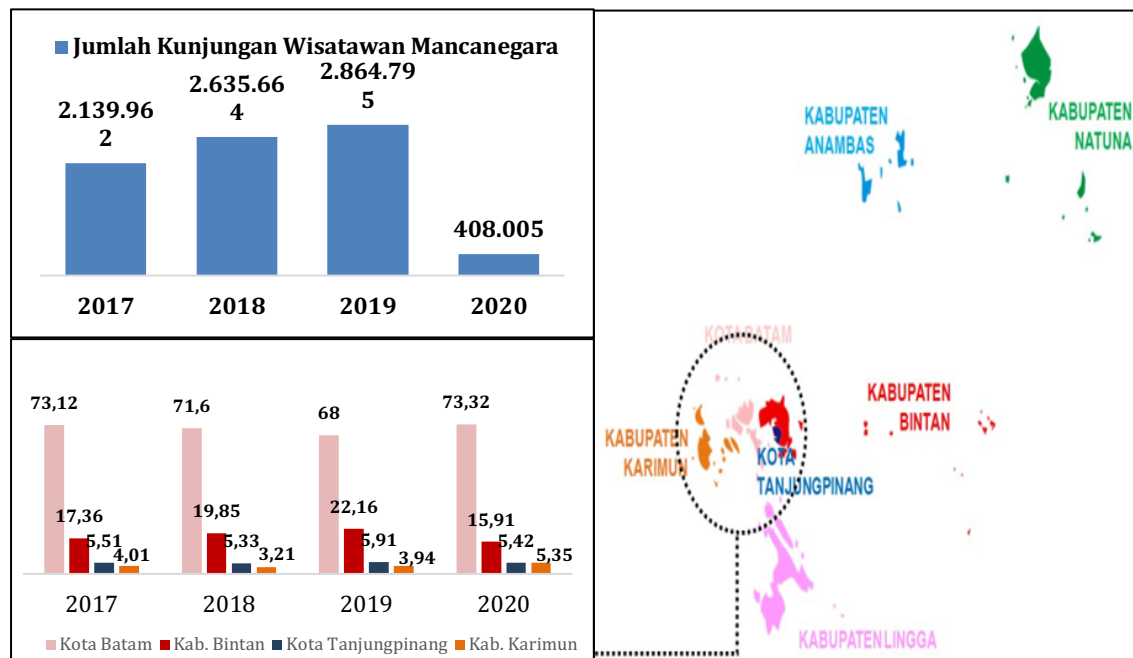
Kinerja pada sektor akomodasi dan penyediaan makan minum bersumber dari jumlah kunjungan wisata yang terus bertambah didukung oleh jumlah kunjungan wisata dan rata rata lama menginap yang semakin tinggi. Jumlah kunjungan wisata ke Kepulauan Riau baik domestik maupun mancanegara terus menunjukkan peningkatan, walaupun untuk wisatawan mancanegara peningkatannya kurang signifikan. Dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, dalam hal jumlah kunjungan wisata Kepulauan Riau menempati urutan kedua setelah Bali.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 3. 22
Perbandingan Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara 2014-2020 (Ribuan Orang)

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 paling banyak melewati pintu masuk dari kota Batam yaitu sebanyak 299,158 orang (73,32%), selanjutnya Kabupaten Bintan sebanyak 64,896 orang (15,91%), Kabupaten Karimun sebanyak 21,836 orang (5,35%), dan melewati Kota Tanjungpinang sebanyak 22,115 orang (5,42%). Total jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 sebesar 408.005 orang. Dari seluruh kabupaten/ kota pintu masuk wisatawan mancanegara mengalami penurunan kunjungan yang signifikan; Kota Batam mengalami prosentase penurunan 84,64%, Kabupaten Bintan mengalami prosentase penurunan tertinggi sebesar 89,78 %, Kota Tanjungpinang mengalami prosentase penurunan sebesar 86,94 % dan Kabupaten Karimun mengalami prosentase penurunan sebesar 80,93%.

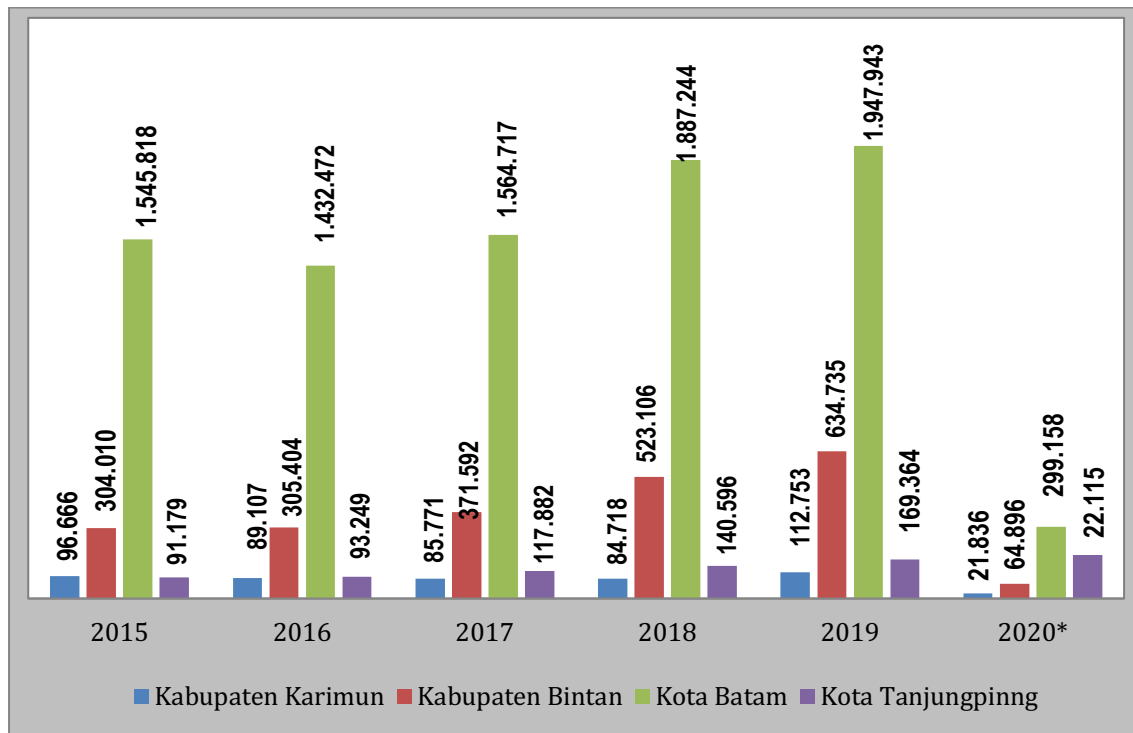


Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 3. 23
Mapping Jumlah Kunjungan Wisatawan Berdasarkan Empat Pintu Masuk 2017-2020

Setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau memiliki ciri khas dan potensi wisata masing-masing. Sebagai contoh, berdasarkan BPS Kabupaten Bintan (2019) 89,29% wisatawan di Bintan didominasi oleh wisatawan mancanegara. Pariwisata di Kabupaten Bintan berkembang pesat dengan dikelolanya Kawasan Wisata Lagoi yang terkenal sebagai pusat resor, leisure activities, serta berbagai gelaran internasional. Sementara itu, pariwisata di Tanjungpinang juga didominasi oleh wisatawan mancanegara dengan potensi wisata sejarah dan budaya, wisata belanja dan kuliner, serta event wisata. Tanjungpinang sebagai pusat pemerintahan ini kaya akan akulturasi

budaya Melayu dan Tionghoa yang berpotensi untuk pengembangan wisata budaya. Sama seperti Bintan dan Tanjungpinang, pariwisata di Karimun juga didominasi oleh wisatawan mancanegara. Berdasar pada BPS Karimun (2019), 92% wisatawan di Karimun adalah wisatawan mancanegara. Koridor Kawasan Karimun memiliki potensi wisata alam (pantai dan air terjun), sejarah dan budaya, serta resor dengan konsep “Pulau Pribadi” di Pulau Sugi.



Sumber: Data BPS 2020, * data masuk hingga November 2020

Gambar 3. 24
Jumlah Wisatawan Mancanegara melalui Empat Pintu 2015-2020

Dilihat dari asalnya, maka wisman berkebangsaan Singapura masih mendominasi angka berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau pada periode Januari hingga Desember 2019 atau hampir setengah (48,52 persen) dari total seluruh kunjungan wisman yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau. wisman berkebangsaan Malaysia berkontribusi sebesar 10,57% sedangkan wisman berkebangsaan Tiongkok berkontribusi sebesar 10,00%. sedangkan wisatawan dari negara lainnya yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau kontribusinya masih dibawah 6% selama tahun 2019, seperti India, Philipina, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Australia, dan Amerika.

Sementara itu pada tahun 2020 (data masuk hingga Desember 2020) wisman berkebangsaan Singapura juga masih mendominasi angka berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau pada periode Januari hingga Desember 2020 dengan kontribusi 44,91% dari total seluruh kunjungan wisman yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau.

wisman berkebangsaan Malaysia berkontribusi sebesar 11,43% wisman berkebangsaan Tiongkok berkontribusi sebesar 6,02%, sedangkan wisman berkebangsaan India berkontribusi sebesar 4,30%. sedangkan wisatawan dari negara lainnya yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau kontribusinya masih dibawah 2% selama tahun 2020, seperti Philipina, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Australia, dan Amerika.

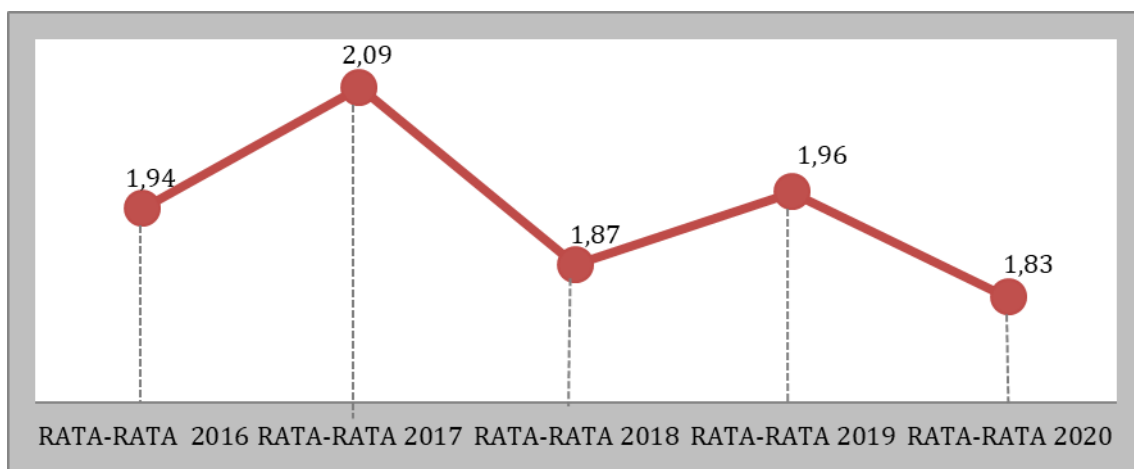
Rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara di Kepulauan Riau dikarenakan adanya Covid-19 yang melanda dunia. Adanya wabah pandemi covid-19 kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat dan ekonomi yaitu larangan masuk atau transit bagi orang asing di Indonesia. Selain itu banyak negara yang melarang warga negaranya untuk bepergian sehingga memberi tekanan terhadap perekonomian terutama pada sektor pariwisata.

Untuk percepatan pemulihan pariwisata, pemerintah melaksanakan program sertifikasi *Cleanliness* (Kebersihan), *Health* (Kesehatan), *Safety* (Keselamatan) & *Environment Sustainability* (Kelestarian Lingkungan) untuk melakukan verifikasi jenis usaha/sektor/fasilitas dan layanan publik serta deklarasi mandiri wilayah bagi para pelaku usaha. Sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability* (CHSE) berfungsi sebagai jaminan kepada wisatawan dan masyarakat bahwa produk dan pelayanan sudah memenuhi protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan. Dengan adanya sertifikasi CHSE ini tempat wisata dipastikan telah memenuhi standard status kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Label Indonesia Care akan menjadi penanda bahwa lokasi wisata tersebut aman untuk dikunjungi, sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan dan masyarakat, yang pada akhirnya akan memutar kembali roda perekonomian khususnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Bila jumlah wisatawan mancanegara cenderung stagnan dari tahun ke tahun, wisatawan Nusantara justru menunjukkan sebaliknya. Tren menunjukkan adanya peningkatan wisatawan Nusantara dari 1,48 juta orang di tahun 2016 meningkat menjadi 2,89 juta orang di tahun 2017, dan kembali meningkat menjadi 3,5 juta orang di tahun 2018. Tidak mengherankan kunjungan wisatawan Nusantara meraih posisi ke- 17 seluruh Indonesia dan mengalami pertumbuhan paling pesat di wilayah Sumatra dalam lima tahun terakhir (lihat Lakip Dinas Pariwisata, 2018). Bila aktivitas pariwisata meningkat, pariwisata dapat menjadi salah satu daya ungkit bagi sektor-sektor lainnya baik itu pertanian, perdagangan bahkan sektor jasa lainnya. Tren adanya peningkatan wisatawan Nusantara dari 3,5 juta orang di tahun 2018 juga meningkat menjadi 4,2 juta orang di tahun 2019, dan kembali meningkat menjadi 7,1 juta orang di tahun 2020.

Kunjungan wisatawan nusantara ke Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Kepulauan Riau berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Pariwisata dan Badan Pusat Statistik menempati peringkat ke -12 seluruh Indonesia atau mengalami peningkatan 5 (lima) titik di mana pada tahun sebelumnya Kepulauan Riau ada di peringkat ke-17. Sementara itu Kepulauan Riau menempati peringkat ke-4 di wilayah Sumatera di bawah Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sumatera Barat, akan tetapi mengalami pertumbuhan yang paling pesat di wilayah Sumatera, bahkan di Indonesia. Pada tahun sebelumnya Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Kepulauan Riau hanya berada pada posisi ke-8 di wilayah Sumatera.

Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau selama bulan Desember 2020 adalah 1,3 hari, atau turun 0,06 poin dibanding dengan rata-rata lama menginap tamu pada November 2020. Pada bulan Desember 2020, rata-rata lama menginap tamu Indonesia mencapai 1,31 hari atau lebih rendah 2,96 poin dibanding dengan rata-rata lama menginap tamu asing yang mencapai 4,27 hari. Total Rata-rata lama menginap wisatawan dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Gambar 3. 25
Rata-rata Lama Menginap (hari) Tahun 2016-2020

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Desember 2020 mencapai rata-rata 27,41 persen atau naik 2,77 poin dibanding TPK november 2020 sebesar 24,64 persen. Jika dibandingkan dengan bulan Desember tahun sebelumnya, TPK hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau turun sebesar 29,26 poin, dimana TPK bulan Desember 2019 yaitu sebesar 56,67 persen. Pada bulan Desember 2020, TPK hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau lebih

rendah 13,38 poin dibanding dengan TPK hotel berbintang secara nasional, dimana rata-rata TPK Nasional sebesar 40,79 persen

Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata dan rata-rata lama menginap, telah dilakukan beberapa upaya. Capaian kinerja dari upaya-upaya tersebut secara detail disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel III. 13
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kunjungan wisatawan Mancanegara	juta orang	2,03	2,1	2,07	2,6	2,8	0, 408
2	Kunjungan wisatawan Nusantara	juta orang	<i>n/a</i>	1,48	2,89	3,5	4,2	7,15
3	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	1,84	1.94	2.09	1.87	1.99	1.83
4	Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum	%	1,94	1,94	2,13	2,26	2,36	1,60*
5	Jumlah obyek wisata Unggulan	Unit	2	2	16	16	16	16
6	Jumlah Desa Wisata	Desa	15	19	22	25	31	58
7	Jumlah Kelompok Sadar Wisata	kelompok	17	20	30	51	81	81
8	Jumlah Pola Perjalanan	paket	<i>n/a</i>	4	<i>n/a</i>	2	4	5
9	Kapasitas Profesionalisme SDM Pariwisata	orang		1100	75	325	572	1.095
10	Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif Aktif	%	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	2.73	13.3	24.21	21.74
11	CEO Kepulauan Riau di CEO Kemenpar	event	<i>n/a</i>	1	3	6	6	4
12	Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	milyar rupiah	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	14.299	19.625	14.422
13	Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	%	49.18	48.19	52.66	53.75	50.87	22.76

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Terdapat beberapa kinerja yang menunjukkan adanya fluktuasi, utamanya berkaitan dengan upaya untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat lokal. Sebagai contoh adalah jumlah desa wisata. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya untuk mendorong pariwisata berbasis masyarakat belum berjalan secara baik di semua daerah, namun dalam beberapa tahun terakhir terdapat beberapa penambahan jumlah desa wisata di Kepulauan Riau.

Mendukung pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, pemerintah kabupaten/kota telah mulai dengan pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kreatif. Ada 3 kabupaten/kota yang telah memiliki ruang kreatif, seperti Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga. Kota Tanjungpinang sendiri telah memiliki 6 ruang ekonomi kreatif, perkembangan tiap tahunnya terus meningkat.

Dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata tidak dapat berjalan sendiri dan harus ditunjang dengan sektor-sektor pembangunan lainnya. Seperti aksesibilitas jalan, pelabuhan laut maupun udara merupakan kewenangan dari instansi lain seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan. Hal ini telah tercantum dalam Grand Design Pariwisata Kepulauan Riau yaitu RIPPDA Provinsi Kepulauan Riau 2012-2022.

3.3.5 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan merupakan salah satu prasarana penting dalam pengembangan suatu wilayah, jalan yang baik akan memudahkan aksesibilitas manusia, barang dan jasa. Jalan berkondisi baik adalah jalan dengan permukaan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan jalan. Persentase jalan provinsi berkondisi baik merupakan perbandingan dari jumlah jalan provinsi berkondisi baik dengan panjang jalan provinsi. Namun demikian, kondisi jalan baik pada tahun 2020 menurun menjadi 60,25% yang mana target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD pada tahun tersebut sebesar 73,24%. Pada tahun 2016 ruas jalan berstatus provinsi mengalami perubahan yang semula (SK Gubernur No. 530 Tahun 2010) sepanjang 679,49 km berubah menjadi 896,45 km (SK Gubernur No. 1.863 Tahun 2016).

Kondisi ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan Provinsi Kepulauan Riau yang telah diperbaiki, ditingkatkan, dan dibangun melalui APBD Provinsi maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) sepanjang 29.66 km melalui program pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan dan program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan. Sejak tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau telah memperbaiki ruas jalan provinsi menjadi berkondisi baik sepanjang 66.38 km. Namun di tahun 2020 ruas jalan Provinsi yang berkondisi baik kembali mengalami penurunan. Oleh karena itu kondisi jalan rusak yang masih harus diperbaiki masih membutuhkan jumlah anggaran perbaikan yang masih sangat besar.

Tabel III. 14
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Jalan Berkondisi Baik
Dari Tahun 2015 - 2020

Indikator Kinerja	Prov/ Kab/ Kota	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
Persentase jalan berkondisi baik (%)	Prov Kepulauan Riau	71.37%	66.21%	67.30%	70.31%	73.64%	74.51%
	Tanjungpinang	82.49%	67.14%	69.98%	71.34%	73.42%	74.09%
	Bintan	77.24%	92.46%	92.46%	93.41%	93.97%	94.30%
	Batam	90.30%	79.18%	81.85%	93.30%	98.47%	103.68%
	Karimun	92.61%	72.60%	73.30%	75.86%	78.15%	78.49%
	Lingga	53.54%	53.63%	54.27%	54.33%	58.44%	58.55%
	Natuna	67.65%	50.91%	52.45%	57.39%	61.30%	61.43%
	Kep. Anambas	55.22%	48.20%	48.20%	50.02%	56.39%	56.39%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Pada Tabel 2.61, Jalan yang berkondisi baik pada Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2015 sebesar 71,37%. Pada tahun 2016, 2017, 2018 persentase jalan yang berada dalam kondisi baik menurun jika dibandingkan tahun 2015. Akan tetapi jumlah ini meningkat pada tahun 2019 dan 2020. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki persentase jalan berkondisi baik paling rendah jika dibandingkan Kabupaten/Kota yang lain di Provinsi Kepulauan Riau yakni sebesar 56,39% pada tahun 2020. Kota Batam memiliki realisasi persentase kondisi jalan baik paling tinggi diantara Kabupaten/Kota yang lain.

Sementara itu, tingkat konektivitas antar wilayah strategis Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 sepanjang 32.343 km, pada Kabupaten Karimun sepanjang 10.973 km. Tingkat konektivitas antar wilayah strategis (km) cukup dekat yakni pada Kota Tanjung Pinang sepanjang 0,85 km, Kabupaten Bintan sepanjang 1,7 km, Kota Batam sepanjang 5,08 km, Kabupaten Lingga sepanjang 2,15 km, Kabupaten Natuna sepanjang 6,99 km dan Kabupaten Kepulauan Anambas sepanjang 4,6 km. Lebih lengkap dapaian indikator kinerja konektivitas dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel III. 15
Realisasi Indikator Kinerja Konektivitas Tahun 2015 - 2020 per Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja	Provinsi/ Kab/ Kota	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
Tingkat konektivitas antar wilayah strategis (km)	Provinsi						
	Kepulauan	3,29	4,65	6,97	16,20	25,96	32,34
	Riau						
	Tanjungpinang	0	0	0	0.00	0.25	0.85
	Bintan	0	0	0	0.80	1.70	1.7
	Batam	1,0	1,5	1,5	2.98	5.08	5.08
	Karimun	0,9	0,9	1,5	3.46	6.20	10.973
	Lingga	0	0	0	0.80	1.15	2.15
	Natuna	1,39	1,80	2,62	6.81	6.99	6.99
	Kep. Anambas	0	0,45	1,35	1.35	4.60	4.6

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Jembatan berfungsi sebagai penunjang untuk menjangkau daerah yang satu dengan yang lain agar lebih efisien dan efektif. Jembatan dalam kondisi baik adalah jembatan yang ditentukan dari segi baiknya kondisi struktur. Persentase jembatan berkondisi baik merupakan perbandingan dari panjang jembatan berkondisi baik dengan panjang jembatan provinsi.

Evaluasi terhadap persentase jembatan berkondisi baik tahun 2020 dapat digambarkan panjang jembatan berkondisi baik yakni 3.621,12 m dibagi dengan panjang jembatan provinsi yakni 4.145.70 m dengan persentase 87.34%. Dari Tabel 2.63, kinerja pencapaian jalan, jembatan, dll masih perlu untuk lebih dioptimalkan dukungan pembangunannya baik terhadap sektor pariwisata ataupun pendidikan terutama terkait isu sinergitas dengan OPD terkait

3.3.6 Urusan Perhubungan

Sebagai provinsi kepulauan yang sebagian wilayahnya adalah perairan, ketersediaan pelabuhan sebagai sarana transportasi utama sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran konektivitas transportasi antarsatu daerah ke daerah lainnya. Saat ini jumlah ketersediaan pelabuhan laut yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dalam rentang waktu 2016 – 2020 adalah sebanyak 33 pelabuhan.

Pelaksanaan pembangunan pelabuhan dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yang dimulai dengan mengusulkan untuk dimasukkan ke dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) (untuk pembangunan baru) apabila sudah ada kemudian

ada penetapan lokasi kemudian dilakukan pra-feasibility study (FS) dan studi Amdal hingga ke tahap desain dan konstruksi.

Saat ini pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Perhubungan telah mengirimkan usulan kepada Menteri Perhubungan RI Berdasarkan Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 120/834.I/DISHUB-SET/2020 Tanggal 15 Juni 2020 Perihal Usulan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Review Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Dalam usulan tersebut terdapat 6 (enam) pelabuhan yang diusulkan untuk dimasukkan ke dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).

Tabel III. 16
Data Lokasi dan Rencana Lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Pelabuhan
1	Kota Batam	Bengkong
2	Kota Batam	Tanjung Sauh
3	Kabupaten Karimun	Kundur
4	Kabupaten Natuna	Teluk Buton
5	Kabupaten Kepulauan Anambas	Air Bini (Siantan Selatan)
6	Kabupaten Kepulauan Anambas	Teluk Durian

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Indikator jumlah arus penumpang angkutan umum adalah jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah. Tren untuk jumlah arus penumpang angkutan umum ditampilkan pada Tabel berikut.

Tabel III. 17
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penumpang Bis	1.244.359	2.028.963	2.398.798	2.650.580	729.551
	Jumlah Penumpang Angkutan Penyeberangan (Roro)	597.793	651.735	475.012	590.992	342.863
2	Jumlah Penumpang Angkutan Laut	14.705.440	15.980.784	16.986.652	17.860.415	6.427.808
3	Jumlah Penumpang Angkutan Udara	6.159.886	6.160.343	5.697.422	4.636.867	2.737.851
Total Jumlah Penumpang		22.707.478	24.821.825	25.557.884	25.738.854	10.238.073

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Kenaikan arus penumpang angkutan laut dikarenakan:

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana angkutan laut yang selalu menjadi perhatian dari segi kualitas dan kuantitas pada transportasi angkutan laut.
- 2) Perkembangan dan peningkatan informasi tentang kepastian jadwal kapal yang sudah semakin terbuka dan informatif baik melalui media cetak dan elektronik.
- 3) Jumlah lintasan pelayaran yang sudah dapat dijangkau pada wilayah kepulauan yang sejalan dengan pembangunan pelabuhan-pelabuhan yang terus ditingkatkan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- 4) Harga tiket kapal yang cenderung relatif stabil dan alternatif angkutan dengan biaya menengah yang menjadi pilihan masyarakat pada umumnya.
- 5) Saat ini Kepulauan Riau khususnya angkutan laut menjadi sarana transportasi yang merupakan kebutuhan utama dalam menyatukan wilayah-wilayah kepulauan.
- 6) Terbentuknya kawasan-kawasan wisata bahari yang menjadi daya tarik wisatawan domestik, nasional, dan internasional.
- 7) Peningkatan pembangunan di seluruh wilayah Kepulauan Riau baik dari sektor pemerintah dan non-pemerintah dalam menunjang industri maritim dan non-maritim yang menarik jumlah kebutuhan tenaga kerja selain tenaga kerja lokal.

Penurunan penumpang angkutan udara dikarenakan:

- 1) Lokasi Kepulauan Riau yang berada di perbatasan Singapura yang menawarkan harga tiket lebih murah dengan tujuan domestik.
- 2) Rute penerbangan yang kurang karena tidak adanya potensi *demand* ekonomi mengalami penurunan.

Dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan transportasi, setiap kendaraan yang menyelenggarakan transportasi harus memiliki ijin. Berikut disajikan capaian jumlah ijin trayek yang dikeluarkan.

Tabel III. 18
Jumlah Ijin Trayek dikeluarkan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Izin Penyeberangan	1	1	6	1	3
2	Jumlah Izin Pelayaran Rakyat	330	350	372	487	342
3	Jumlah Izin Pelayaran Nasional	7	10	23	15	13

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Ijin trayek yang dikeluarkan terlihat fluktuatif. Ijin trayek yang turun berkaitan dengan adanya perbaikan/*docking* pada kapal yang melayani trayek yang sudah dikeluarkan izinnya. Sementara naiknya ijin trayek berkaitan dengan ijin lintasan

penyeberangan antar-kabupaten/kota dalam provinsi. Berbagai fasilitas penyeberangan yang telah tersedia mampu meningkatkan arus penyeberangan baik barang maupun orang.

Tabel III. 19
Jumlah Barang Terangkut oleh Angkutan Umum di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Barang Penyeberangan	24.713	12.208	198.521	276.935	117.939
2	Barang Angkutan Laut	26.413.210	31.135.600	15.462.988	30.255.306	10.910.520

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Peningkatan arus penyeberangan berkaitan dengan:

- 1) Perkembangan dan peningkatan informasi tentang kepastian jadwal kapal yang sudah semakin terbuka dan informatif baik melalui media cetak dan elektronik.
- 2) Jumlah lintasan pelayaran yang sudah dapat dijangkau pada wilayah kepulauan yang sejalan dengan pembangunan pelabuhan-pelabuhan yang terus ditingkatkan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Saat ini Kepulauan Riau khususnya angkutan laut menjadi sarana transportasi yang merupakan kebutuhan utama dalam menyatukan wilayah-wilayah kepulauan
- 4) Terbentuknya kawasan-kawasan wisata bahari yang menjadi daya tarik wisatawan domestik, nasional, dan internasional
- 5) Peningkatan pembangunan di seluruh wilayah Kepulauan Riau baik dari sektor pemerintah dan nonpemerintah dalam menunjang industri maritim dan nonmaritim yang menarik jumlah tenaga kerja selain tenaga kerja lokal.

Untuk melayani transportasi udara, Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2020 memiliki 8 (delapan) bandar udara. Ada penambahan 2 (dua) bandar udara yaitu: Bandar Udara Letung di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Bandar Udara Tambelan di Kabupaten Bintan. Sementara itu, ketersediaan prasarana sisi darat perhubungan baru tersedia di Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam atau sebanyak 2 dari 8 bandara.

Tabel III. 20
Jumlah Bandara dan Ketersediaan Prasarana Sisi Darat di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Bandar Udara	6	7	7	7	8
Ketersediaan prasarana sisi darat perhubungan udara	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Ketersediaan fasilitas keselamatan keamanan transportasi di jalan-jalan provinsi Kepulauan Riau belum memadai jumlahnya. Hal ini dikarenakan jumlah fasilitas keselamatan keamanan transportasi yang dibutuhkan sebanyak 325.594 unit sedangkan yang tersedia sebanyak 300.954 unit atau masih terdapat kekurangan 25.000 unit. Selain itu, kondisi prasarana yang tidak dalam kondisi baik (rusak) yakni sebanyak 300.954 unit 30% diantaranya (90.000 an) dalam kondisi perlu perbaikan/penggantian dan perawatan. Jumlah ketersediaan alat perlengkapan jalan yang ada di jalan milik Provinsi Kepulauan Riau yang berada di kabupaten/kota masih terbilang minim. Kondisi ini dapat dijadikan salah satu alasan penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kondisi alat perlengkapan jalan yang ada saat ini di jalan milik Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel III. 21
Kondisi Fasilitas Alat Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No	Alat Perlengkapan Jalan	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Tidak Baik	
1	Rambu	buah	113	420	553
2	Rambu RPPJ F	buah	6	2	8
3	Rambu Peringatan	buah	32	10	42
4	Rambu Ganda	buah	24	3	27
5	Deliniator	buah	2.197	503	2.700
6	Guardril	meter	682	200	882
7	Pita Kejut	meter	1.650	312	1.962
8	Paku Marka	buah	3.770	417	4.187
9	Zebra Cross	m2	203	32	235
10	Marka Jalan	meter	3.300	1.200	4.500
11	Warning Light	buah	33	24	57
12	LPJU	buah	74	10	84
13	Zoss	titik	1	3	4
14	Traffic Light	titik	5	0	5
15	JPO	unit	1	3	4
16	Halte	unit	6	0	6

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Pada tabel 2.130 terlihat bahwa 420 dari 553 (75,94%) rambu jalan tidak dalam kondisi baik. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 24,05% rambu lalu lintas yang dapat digunakan dengan baik.

Tabel III. 22
Jumlah Bandar Udara/Pelabuhan/Terminal Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bandar Udara	6	7	7	7	8
2	Pelabuhan Penyeberangan (Roro)	8	10	10	10	10
3	Pelabuhan Laut	20	22	25	28	31
4	Terminal Type B	2	2	2	2	2
	Jumlah	36	41	44	47	51

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Kepulauan Riau pada tahun 2017-2020 memiliki Pelabuhan penyeberangan (roro) sebanyak 10 pelabuhan. Selain itu terminal tipe B berjumlah 2 terminal. Selanjutnya angkutan umum berupa armada penyeberangan berjumlah 12 dan armada perhubungan laut berjumlah 68 pada tahun 2020.

Tabel III. 23
Jumlah Armada Angkutan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Armada Penyeberangan (Roro)	9	9	11	12	12
2	Armada Perhubungan Laut	41	46	53	60	68
	Jumlah	50	54	64	72	90

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Tabel III. 24
Jumlah Trayek Angkutan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Trayek Angkutan Darat	4	6	8	10	12
2	Trayek Angkutan Penyeberangan (Roro)	10	10	10	10	14
3	Trayek Angkutan Laut	53	56	63	63	63
4	Trayek Angkutan Udara	4	5	7	14	18

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Sebagai negara dengan jumlah laut yang dominan, Kepulauan Riau memiliki arus barang yang cukup tinggi. Pada tahun 2020 jumlah kendaraan yang melalui angkutan penyeberangan naik menjadi 304.628 kendaraan dari sebelumnya pada tahun 2019 sebanyak 276.935.

Tabel III. 25
Jumlah Arus Barang Angkutan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah arus kendaraan melalui Angkutan Penyeberangan (Roro)	24.713	12.208	198.521	276.935	304.628
2	Jumlah Barang melalui Angkutan Laut	26.413.210	31.135.600	15.462.988	30.255.306	25.578.647
3	Jumlah arus Barang melalui Angkutan Udara	46.134.982,5	50.541.314	60.904.841	72.086.740	32.983.840
Jumlah Arus Barang		72.572.905,5	81.689.122	76.566.350	102.618.981	58.867.115

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Tingginya arus barang maupun arus orang pada mode armada angkutan umum perairan, menjadikan retribusi yang tinggi bagi jasa kepelabuhan yakni pada tahun 2020 sebesar Rp429.718.867. Selain itu retribusi izin bidang perhubungan juga mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2020 yakni menjadi sebesar Rp689.760.000.

Tabel III. 26
Jumlah Pendapatan Retribusi Bidang Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Retribusi Jasa Kepelabuhanan	3.131.250	7.058.500	303.563.680	269.962.310	429.718.867
2	Retribusi Izin Bidang Perhubungan	14.500.000	12.450.000	605.590.000	341.900.000	689.760.000
Jumlah		17.631.250	19.508.500	909.153.680	611.862.310	1.119.478.867

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

3.3.7 Urusan Tenaga Kerja

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan yang timbul ialah besarnya jumlah angkatan kerja dan memiliki kecenderungan selalu meningkat. Hal ini sejalan dengan transisi demografi yang tengah berlangsung di negeri ini, yaitu semakin menurunnya angka kelahiran maupun angka kematian.

Transisi demografi ini menyebabkan komposisi penduduk sedemikian rupa sehingga penduduk usia produktif meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Sehubungan dengan itu, pengelolaan ketenagakerjaan sebagai sumber daya pembangunan merupakan hal yang sangat penting mendapat

perhatian, karena untuk mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan segala sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia.

Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi merupakan sejumlah orang yang ikut serta dalam kegiatan produksi pada masing-masing sektor ekonomi. Namun, besarnya persentase penduduk yang telah bekerja belum merupakan satu ukuran dalam menentukan apakah masalah ketenagakerjaan dapat dikatakan berhasil. Banyak faktor yang memengaruhi aspek ketenagakerjaan pada suatu daerah. Selain banyaknya penduduk yang telah terserap dalam kegiatan ekonomi, kualitas dari tenaga kerja tersebut juga akan memengaruhi output produksi. Capaian indikator kinerja pada urusan tenaga kerja secara rinci dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel III. 27
Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Karakteristik	2016	2017	2018	2019	2020
Angka partisipasi angkatan kerja	931,435	966,091	970,132	1.005,161	1.062,087*
Tingkat partisipasi angkatan kerja	66,00	66,41	64,72	64,76	67,50*
Pencari kerja yang ditempatkan	56,40 %	66,91 %	63,80 %	60,81 %	*
Tingkat pengangguran terbuka	7,69	7,16	7,12	6,91	5,57*
Keselamatan dan perlindungan	1,38	1,73	2,51	2,74	3,15*
Persentase Tenaga Kerja Asing yang diawasi (Jumlah Tenaga Asing yang diawasi/Jumlah Tenaga Asing)	n/a**	n/a **	1,79	11,56	n/a
Besaran Pemeriksaan Perusahaan	22,70 %	24,64 %	25,05 %	28,18 %	32,09 %*
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	3,97 %	3,16 %	4,12 %	2,79 %	2,30 %
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	42,63	0	52,30	40,53	n/a
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	130	0	0	40	n/a
Persentase lulusan BLK yang diterima kerja	80 %	75 %	86,04 %	70 %	n/a

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2020 menunjukkan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja dan jumlah pengangguran jika dibanding keadaan Agustus 2019. Jumlah angkatan kerja pada Tahun 2020 sebanyak 1.133.776 mengalami penambahan sebanyak 128.616 orang dibandingkan keadaan 2019. Angkatan kerja yang bekerja sebanyak 1.016.600, sedangkan yang menganggur sebanyak 117.176 orang.

Tabel III. 28
Jumlah dan Persentase Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, dan Pengangguran di
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja	Penduduk Bekerja		Pengangguran	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
2015	891.988	836.670	93,80	55.318	6,20
2016	931.436	859.813	92,31	71.622	7,69
2017	966.091	896.000	92,74	69.160	7,16
2018	970.132	901.019	92,88	69.113	7,12
2019	1.005.160	935.682	93,09	69.478	6,91
2020	1.133.776	1.016.600	89,66	117.176	10,34

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2021

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk ke dalam angkatan kerja. Secara garis besar jumlah angkatan kerja di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan setiap tahunnya yang beriringan dengan penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang juga bertambah setiap tahunnya.

Pada tahun 2018 dan 2019 penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau cenderung menurun. Namun, pada tahun 2020 angka tersebut kembali mengalami peningkatan sebesar 1,52 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan nilai ini sangat dipengaruhi oleh dampak dari Pandemi Covid-19 terhadap dunia kerja. Jumlah angkatan kerja diharapkan untuk ke depannya lebih meningkat agar semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel III. 29
Jumlah dan Persentase Angkatan Kerja dan TPAK Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2015-2020

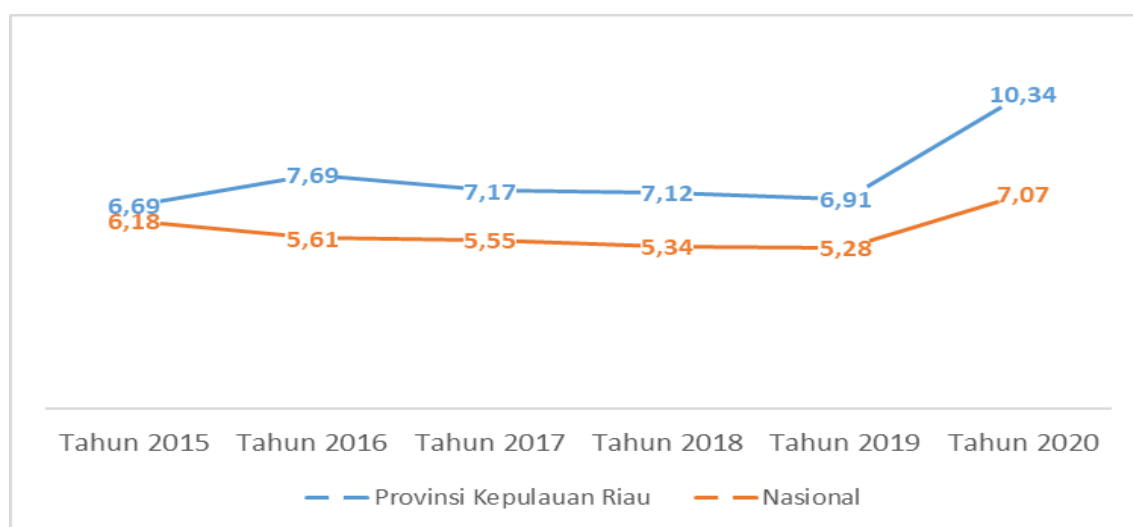
Tahun	Jumlah Angkatan Kerja (orang)	Persentase TPAK
2015	891.988	65,07
2016	931.435	65,93
2017	966.091	66,41
2018	970.132	64,72
2019	1.005.160	64,76
2020	1.133.776	66,28

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2021

Salah satu permasalahan ketenagakerjaan yang sedang dihadapi Indonesia yaitu peningkatan penawaran tenaga kerja yang tidak diikuti oleh kesempatan kerja. Demikian pula yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau, kondisi tersebut tidak jauh berbeda. Sebagai dampak yang dihasilkannya, kelebihan penawaran tenaga kerja tersebut memunculkan pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah

indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar tenaga kerja.

Jumlah pengangguran pada 2020 mengalami peningkatan yang cukup tinggi mencapai 117.176 orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun, dimana TPT Agustus 2020 sebesar 10,34 persen atau naik sebesar 3,43 persen poin apabila dibandingkan dengan TPT Agustus 2019, dimana TPT Agustus 2019 sebesar 6,91 persen. Meski demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Riau mencatat TPT sebesar 6,91 persen menempatkan Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah dengan angka pengangguran tertinggi keempat di Indonesia.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

Gambar 3. 26
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

Berdasarkan kabupaten/kota, terdapat satu kota yang memiliki TPT di atas TPT Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Kota Batam untuk tahun 2020, Kabupaten Bintan untuk Tahun 2019, Kota Batam untuk untuk Tahun 2018, dan Kabupaten Bintan di Tahun 2017.

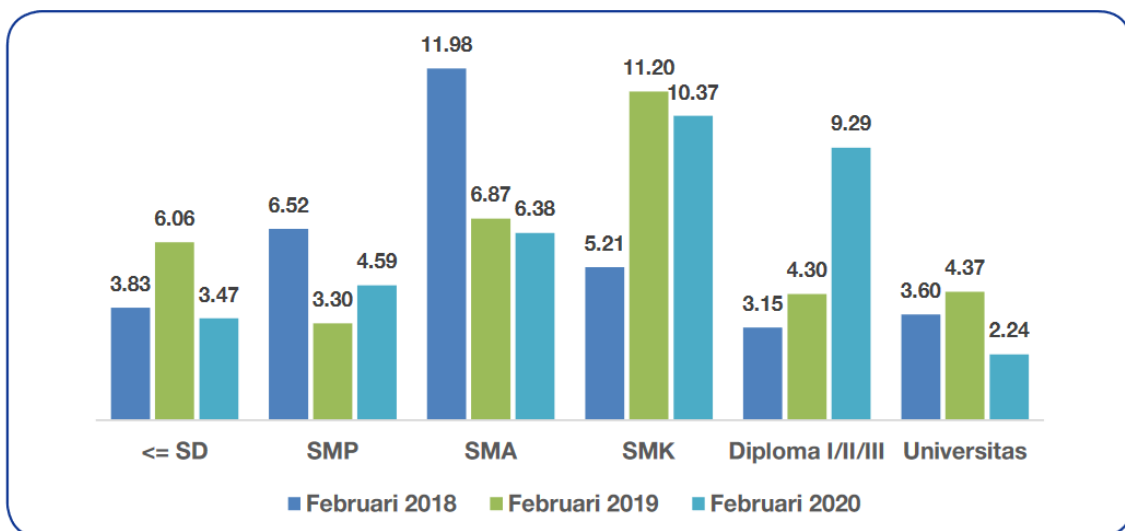
Tabel III. 30
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020

Wilayah	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Kepulauan Riau	7,16	7,12	6,91	10,34
Tanjungpinang	7,11	5,49	5,64	9,30
Bintan	8,08	5,89	8,01	8,86
Batam	7,82	8,93	7,72	11,79

Wilayah	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Karimun	5,7	2,45	5,46	8,36
Lingga	3,23	3,65	4,01	4,41
Natuna	4,07	3,52	3,33	4,10
Kepulauan Anambas	5,18	2,46	2,91	3,44

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

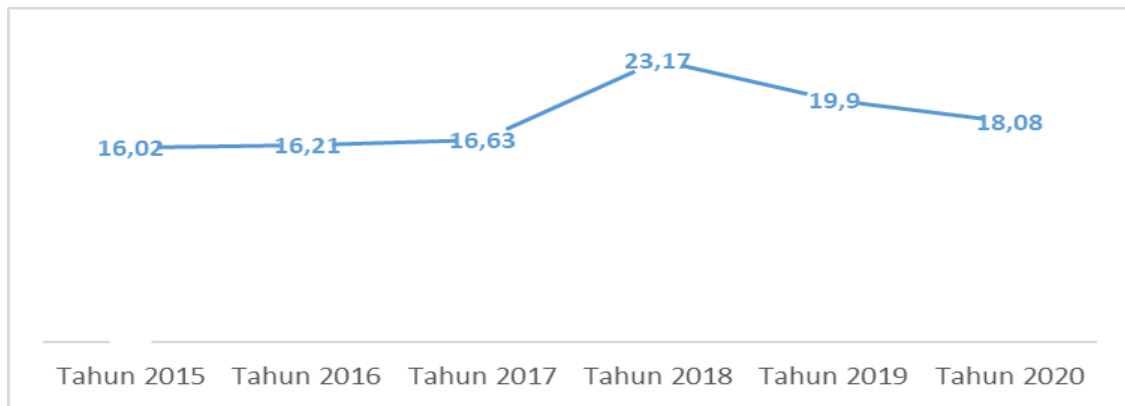
Dilihat dari tingkat pendidikan pada Februari 2020, TPT untuk SMK masih mendominasi di antara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 10,37 persen. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada Diploma I/II/III sebesar 9,29 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK dan Diploma I/II/III. TPT pada tingkat Universitas, SD dan SMA menunjukkan penurunan jika dibandingkan tahun 2019. Pada tingkat Universitas, TPT sebesar 2,24 persen, sedangkan pada TPT tingkat SD adalah 3,47 persen dan TPT SMA sebesar 6,38 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 3. 27
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kepulauan Riau, Februari 2018 - Februari 2020
Pengangguran pada Kelompok Usia Muda

Penduduk angkatan kerja usia muda adalah penduduk yang berusia 15-24 tahun, karena usia 25 tahun sudah dianggap sebagai penduduk dewasa. Adapun persentase tingkat pengangguran terbuka umur muda di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

Gambar 3. 28
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Umur Muda di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2015-2020

Pada tahun 2020, TPT penduduk usia muda sebesar 18,08 persen yang artinya dari 100 penduduk angkatan kerja usia 15-24 tahun terdapat 18 orang pengangguran. Jika dibandingkan dengan kategori sebelumnya, maka didapatkan bahwa TPT penduduk angkatan kerja usia muda lebih rendah dibanding TPT total penduduk angkatan kerja. Meskipun TPT usia muda 2020 naik dibanding tahun sebelumnya, namun secara jumlah pengangguran usia muda jauh lebih tinggi dibanding usia yang lain. Terdapat 44.208 orang pengangguran usia muda dari 117,176 orang pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau atau sebesar 37,73 persen.

Indikator pencari kerja yang ditempatkan menggambarkan banyaknya pencari kerja yang memperoleh pekerjaan. Kondisi perekonomian di beberapa kabupaten/kota mulai menunjukkan tren yang positif bagi terserapnya tenaga kerja. Seperti Kota Batam pada tahun 2020 yang masih merupakan pusat aktivitas perekonomian di Kepulauan Riau, menunjukkan bahwa sebanyak 2.860 para pencari kerja telah ditempatkan.

Pelatihan kerja berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Berdasarkan data pemerintah, indikator yang digunakan untuk pelatihan kerja ini antara lain: Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan, Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, dan Persentase lulusan BLK yang diterima kerja.

3.4 Analisis Strength, Opportunity, Aspiration and Result (SOAR)

Faktor-faktor strategis yang menggambarkan strategi menggunakan kekuatan untuk mencapai aspirasi, strategi berorientasi kepada aspirasi yang diharapkan untuk memanfaatkan peluang, strategi berdasarkan kekuatan untuk mencapai hasil yang terukur, dan strategi yang berorientasi kepada kesempatan untuk mencapai hasil yang sudah terukur. Faktor-faktor strategis secara spesifik mencerminkan kebutuhan dari perangkat daerah dalam rangka pengembangan dan penguatan SIDA, namun secara umum untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel III. 31
Analisis SOAR Dalam Penguatan SIDA, Berdasarkan Hasil Desk

Internal Eksternal	Strengths (Faktor Kekuatan Internal)	Opportunities (Peluang Eksternal)
Aspirations (Faktor Harapan Dari Internal)	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengelolaan potensi sumberdaya alam kelautan, perikanan, pertanian, pariwisata dan pertambangan. • Peningkatan kemudahan dan promosi investasi. • Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan dan Pelatihan SDM Tenaga Kerja yang Terampil. • Peningkatan kualitas data sasaran program pembangunan Pemerintah Daerah melalui pemutakhiran data yang terpadu dan berkelanjutan. • Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Mutu Pendidikan Sekolah Menengah. • Peningkatan dukungan partisipasi masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan investasi kawasan industri pada wilayah <i>Free Trade Zone</i> dan Kawasan Ekonomi Khusus. • Peningkatan peluang investasi. • Peningkatan kapasitas aparatur dalam pelayanan perijinan dan SDM Tenaga Kerja yang Terampil, Kompeten, Profesionalisme dan Berdaya Saing. • Peningkatan ketepatan sasaran Program Pembangunan Pemerintah baik Pusat dan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau.
Results (Daftar Hasil yang Terukur Untuk Diwujudkan)	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan investasi pada sektor-sektor unggulan dan potensial. • Peningkatan pelayanan perizinan sesuai standar. • Peningkatan pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan sesuai standar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pelaku Bisnis. • Peningkatan jejaring informasi bursa kerja antara Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha/Industri.

Internal Eksternal	Strengths (Faktor Kekuatan Internal)	Opportunities (Peluang Eksternal)
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas tenaga kerja sesuai standar. • Peningkatan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan yang terampil. • Peningkatan kerjasama lintas sektor. • Peningkatan ketersediaan dan akses informasi potensi dan keunggulan daerah. • Peningkatan usaha mikro kecil pengolahan produk unggulan daerah. 	

BAB IV

PELUANG DAN TANTANGAN

Peluang sekaligus tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan dan penguatan SIDA Povinsi Kepulauan Riau, diantaranya kebijakan pemulihan sosial ekonomi pasca pandemi COVID-19, kebijakan pembangunan ekonomi berkelanjutan, inklusif dan stabil dengan perekonomian secara nasional yang tumbuh antara 6-8 persen per tahun, adanya ASEAN Free Trade Area (AFTA) hingga kepada pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, akselerasi pembangunan konsep Dual Track Strategy, kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, Bonus Demografi, kemiskinan dan kerentanan, keragaman karakter dan jatidiri bangsa (bahasa, adat, tradisi, dan nilai-nilai kearifan lokal), wilayah kepulauan dengan luas wilayah laut yang mendominasi, pengembangan kawasan perbatasan yang diarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

1. Tahun 2021 merupakan masa transisi dari penanganan pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang berdampak pada sosial, ekonomi dan keuangan, menuju periode normal untuk pemulihan. Kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pasca pandemi COVID-19 dalam rangka mempersiapkan fondasi yang kokoh untuk melaksanakan transformasi ekonomi mencapai Visi Indonesia Maju 2045, dengan arah kebijakan Pemulihan Sosial Ekonomi. Pemulihan sosial ekonomi dilakukan dengan berbagai langkah stimulus ekonomi baik melalui jalur konsumsi untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan maupun stimulus dukungan terhadap dunia usaha. Stimulus dunia usaha diharapkan dapat membantu aktivitas produksi untuk tidak terdampak secara permanen. Ketika pandemi COVID-19 berakhir, aktivitas produksi diharapkan dapat kembali pulih sesuai dengan kapasitas normalnya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, untuk merespon pandemi COVID-19, Pemerintah telah melakukan kebijakan countercyclical untuk percepatan penanganan COVID-19 sekaligus akselerasi pemulihan sosial-ekonomi. Secara garis besar respon kebijakan stimulus fiskal tersebut difokuskan untuk pencegahan, pengendalian dan penanganan COVID-19 dengan dukungan tambahan anggaran di Bidang Kesehatan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan melalui program jaring pengaman sosial.

Di samping itu, untuk memitigasi pemburukan di berbagai sektor ekonomi yang terdampak, Pemerintah juga memberikan dukungan stimulus untuk dunia usaha diberikan dalam beberapa menu baik bagi usaha ultra-mikro dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun bagi Industri dan BUMN. Pemulihan ekonomi nasional diterapkan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan keberlangsungan pelaku usaha baik di sektor riil maupun sektor keuangan agar tetap mampu menjalankan usahanya dan terhindar dari pemburukan yang semakin dalam.

2. Pada tahun 2013, pendapatan perkapita Indonesia telah mencapai USD 3.500 yang menempatkan Indonesia berada pada lapis bawah negara-negara berpenghasilan menengah. Agar Indonesia mampu menjadi negara berpendapatan tinggi, tentu memerlukan pertumbuhan yang lebih tinggi dari pertumbuhan global. Untuk mencapai negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2030, perekonomian nasional dituntut tumbuh rata-rata antara 6 – 8 persen per tahun. Agar berkelanjutan, pertumbuhan yang tinggi tersebut harus bersifat inklusif, serta tetap menjaga kestabilan ekonomi. Upaya mencapai tujuan tersebut memerlukan peran Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penetapan dan penerapan strategi yang cermat dan tepat, serta memerlukan optimalisasi pemanfaatan seluruh potensi ekonomi yang ada dalam peningkatan produktivitas sektor-sektor dominan, unggulan dan potensial, serta pengembangan sektor-sektor non basis. Kebijakan pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mendorong akselerasi pembangunan pada kabupaten/kota yang tertinggal melalui konsep Dual Track Strategy, yaitu (1) Kawasan BBK, terdiri dari Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun serta Kota Tanjungpinang. Kawasan BBK dibangun untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan wilayah BBKT agar sejajar dengan kawasan-kawasan sejenis yang sudah lebih maju dan sejahtera; (2) Kawasan NAL terdiri dari Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga. Kawasan ini dibangun untuk mengembangkan sentra-sentra ekonomi di wilayah Natuna, Anambas dan Lingga (NAL) sesuai dengan potensi/agro ekosistem dominan. Akselerasi pembangunan konsep Dual Track Strategy bertumpu pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, efisiensi dan nilai tambah sumber daya alam, penguatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyediaan infrastruktur yang terpadu dan merata.
3. Kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam rangka mempercepat pengembangan ekonomi dan membangun keseimbangan pembangunan antar wilayah dalam kerangka satu kesatuan ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan KEK diatur dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 yang

merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyasar empat tujuan yaitu : (1) Meningkatnya penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis; (2) Optimalisasi kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi; (3) Adanya percepatan perkembangan daerah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk keseimbangan pembangunan antar wilayah; (4) Terwujudnya model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Kehadiran KEK diharapkan dapat membangun kemampuan dan daya saing ekonomi pada level nasional melalui industri-industri bernilai tambah dan berantai nilai. Pengembangan KEK diharapkan mampu membentuk daya saing ekonomi nasional di pasar domestik dan internasional. Pengembangan KEK dilandasi oleh pemanfaatan instrumen penanaman modal dan pengembangan infrastruktur yang diletakkan dalam kerangka pembangunan ekonomi wilayah. Untuk mencapai maksud manfaat keekonomian dari KEK, Pemerintah berkomitmen memfasilitasi pengembangan KEK dengan insentif fiskal dan non fiskal. Pengembangan KEK diarahkan untuk memberikan kontribusi optimal dalam pencapaian setidaknya 4 (empat) agenda prioritas nasional yang tertuang di Nawacita, yaitu: 1. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 2. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; 3. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; 4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 menargetkan untuk membentuk 25 KEK di Indonesia hingga tahun 2019 yang terdiri atas 15 KEK industri dan 10 KEK pariwisata. Hingga tahun 2014 telah ditetapkan 8 KEK. Dengan demikian target tambahan KEK baru dalam periode 2015-2019 ialah sejumlah 17 KEK yang terdiri atas 10 KEK industri/ non-pariwisata dan 7 KEK pariwisata. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017, KEK Galang Batang resmi ditetapkan dan telah diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2017. KEK yang berlokasi di Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau tersebut memiliki luas lahan sebesar 2.333,6 Ha. PT Bintan Alumina Indonesia sebagai Badan Usaha Pengusul juga akan menjadi Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK tersebut. KEK Galang Batang akan terdiri atas 4 zona yaitu: Zona Pengolahan Ekspor, Zona Logistik, Zona Industri, dan Zona Energi. KEK ini akan dikembangkan sebagai kawasan basis industri pengolahan dan pemurnian bijih bauksit (refining) menjadi alumina, pengolahan alumina

menjadi aluminium ingot (smelting), energi, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), logistik, pengembangan pelabuhan bongkar muat dan lainnya.

Sektor pertambangan dan penggalian telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Kabupaten Bintan. Dengan ditetapkannya KEK Galang Batang sebagai tempat pemusatan kegiatan industri dengan pengolahan produk dari hulu ke hilir, KEK ini diperkirakan akan menarik investasi senilai Rp 36,25 triliun selama 6 tahun ke depan. Selain itu, KEK Galang Batang juga diproyeksikan untuk menyerap tenaga kerja sebanyak 23.200 orang. Adapun keunggulan geokonomi KEK Galang Batang adalah berada pada lokasi strategis Kepulauan Riau yang dilintasi oleh Selat Malaka yang dilalui 94.000 kapal setiap tahunnya. KEK Galang Batang juga berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang melintasi Laut Cina Selatan. Dengan orientasi pasar internasional, KEK Galang Batang diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang tinggi pada sektor industri. Keunggulan geostrategi wilayah Kepulauan Riau merupakan bagian dari kerjasama Segitiga Pertumbuhan Ekonomi Indonesia – Malaysia – Singapura melalui Growth Triangle Singapura – Johor – Riau dan Kepulauan Riau. KEK Galang Batang akan berkembang bersamaan dengan pengembangan wilayah beberapa kawasan di Indonesia seperti Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, Batam dan Karimun

4. Pemberlakuan The ASEAN Community pada tahun 2015, peningkatan integrasi ini di satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi; Pada tingkat regional, kerjasama ekonomi ASEAN semakin meningkat sejak dimulainya integrasi ekonomi regional dalam ASEAN Free Trade Area (AFTA) hingga kepada pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil antarnegara ASEAN. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi secara cermat dan terintegrasi. Kesiapan daerah perlu dilakukan di segala bidang secara menyeluruh, baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Edukasi masyarakat tentang peluang MEA 2015, peningkatan daya saing perekonomian nasional dan daerah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja lokal akan menjadi aset berharga bagi daerah untuk meraih keberhasilan MEA 2015 bagi kepentingan pembangunan nasional secara umum.
5. Pemerintah menetapkan Batam, Bintan dan Karimun di Provinsi Kepri sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone/FTZ) yang diatur melalui 3 Peraturan Pemerintah. Ketiga PP itu adalah PP No 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, PP No 47 Tahun 2007 tentang

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Dan PP No 48 Tahun 2007 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. Wilayah Batam meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru. Untuk wilayah Bintan di Kabupaten Bintan, meliputi kawasan industri Galang Batang, kawasan industri maritim dan Pulau Lobam. Sebagian kota Tanjungpinang meliputi kawasan industri Senggarang dan kawasan industri Dompok Darat. Untuk kawasan Karimun meliputi sebagian Pulau Karimun, dan seluruh Pulau Karimun Anak. Kegiatan yang diselenggarakan dalam FTZ Bintan dan Karimun, yaitu kegiatan sektor ekonomi yang meliputi sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata dan bidang lainnya. Kawasan yang ditetapkan sebagai FTZ Bintan meliputi sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan serta seluruh Kawasan Industri Galang Batang dan Kawasan Industri Maritim dan Pulau Lobam. Kawasan FTZ Bintan juga mencakup sebagian wilayah Kota Tanjungpinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompok Darat. Sedangkan wilayah di Karimun yang dijadikan FTZ adalah sebagian wilayah Pulau Karimun dan seluruh Pulau Anak Karimun.

6. Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati ‘bonus demografi’, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (dependency ratio) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (labor supply), tabungan (saving), dan kualitas sumber daya manusia (human capital). Di Indonesia, rasio ketergantungan telah menurun dan melewati batas di bawah 50 persen pada tahun 2012 dan mencapai titik terendah sebesar 46,9 persen antara tahun 2028 dan 2031. Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi baik secara nasional maupun regional. Penduduk usia produktif Indonesia sendiri menyumbang sekitar 38 persen dari total penduduk usia produktif di ASEAN. Apabila tidak didukung dengan kebijakan yang tepat, bonus demografi tidak akan dapat diraih, bahkan dapat menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan. Penduduk yang besar akan meningkatkan tekanan pada kebutuhan pangan dan energi serta kelestarian dan kualitas lingkungan. Pertumbuhan penduduk lanjut usia (population ageing) memerlukan jaminan perlindungan sosial, perlindungan hari tua dan pelayanan penyakit ketuaan (senescent diseases) dan degeneratif. Urbanisasi dan migrasi menuntut ketersediaan infrastruktur perkotaan yang memadai dan pada saat yang sama berpotensi memunculkan konflik sosial, pengangguran dan kriminalitas. Tingginya kepadatan penduduk juga berpotensi meningkatkan polusi dan penyebaran berbagai penyakit menular. Oleh karena itu,

kebijakan sumber daya manusia, kependudukan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, infrastruktur dan sumber daya alam serta politik hukum dan keamanan harus diarahkan dengan tepat untuk meraih bonus demografi.

7. Ketimpangan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menggambarkan masih besarnya kemiskinan dan kerentanan. Hal ini dicerminkan oleh angka kemiskinan yang turun melambat dan angka penyerapan tenaga kerja yang belum dapat mengurangi pekerja rentan secara berarti. Tiga kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada pada 40 persen penduduk berpendapatan terbawah adalah: (1) angkatan kerja yang bekerja tidak penuh (*underutilized*) terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu (*part time worker*), termasuk di dalamnya adalah rumah tangga nelayan, rumah tangga petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan, dan rumah tangga buruh perkotaan; (2) usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga (*unpaid worker*); dan (3) penduduk miskin yang tidak memiliki aset maupun pekerjaan.
8. Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat, perlu diimbangi dengan dengan pembangunan SDM dalam rangka memperkuat atau setidaknya mempertahankan karakter dan jatidiri bangsa dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya bahasa, adat, tradisi, dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat positif sebagai perekat persatuan bangsa; meningkatkan promosi budaya antar daerah dan diplomasi budaya antarnegara; dan meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya. Selain itu, adanya kecenderungan pengalihan ruang publik ke ruang privat yang mengakibatkan terbatasnya ruang/wadah penyaluran aspirasi masyarakat dan ekspresi inovasi karya budaya; belum optimalnya advokasi dan sosialisasi karya dan inovasi budaya kepada masyarakat sehingga apresiasi terhadap hasil karya seni dan inovator karya budaya rendah; (terbatasnya regenerasi dan hasil inovasi karya budaya serta pemanfaatan teknologi di dalam pengemasan karya budaya; terbatasnya HKI dan regulasi pasar yang mendukung karya seni dan budaya; belum optimalnya dokumentasi dan pengarsipan karya budaya; dan pemberian penghargaan bagi maestro dan pelaku budaya dalam rangka peningkatan apresiasi dan karya budaya. Kedepan diperlukan ke depan yang dihadapi adalah meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap seni, karya budaya dan tradisi sebagai kekayaan budaya bangsa, dan meningkatkan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual (HKI) terutama karya cipta seni dan budaya kreatif baik yang bersifat individual maupun komunal.

9. Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan dengan luas wilayah laut yang dominan, percepatan pembangunan kelautan merupakan tantangan yang harus diupayakan untuk kesejahteraan masyarakat. Tantangan utama lainnya adalah pengembangan industri kelautan, industri perikanan, perniagaan laut dan peningkatan pendayagunaan potensi laut dan dasar laut bagi kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan itu, upaya menjaga daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut juga merupakan tantangan dalam pembangunan kelautan.
10. Kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah Sumatera yang difokuskan untuk meningkatkan peran sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat dengan negara Malaysia, Singapura, Thailand, India, Vietnam. Fokus Pengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah Sumatera diarahkan pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Wilayah Sumatera, yang diantaranya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yaitu PKSN Ranai dan PKSN Batam, serta mempercepat pembangunan di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) tahun 2015-2019. Strategi pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untuk mewujudkan kemudahan aktivitas masyarakat kawasan perbatasan dalam berhubungan dengan negara tetangga dan pengelolaan sumber daya darat dan laut untuk menciptakan kawasan perbatasan yang berdaulat.
11. Indonesia memasuki era Revolusi Industri 4.0. Itu setidaknya yang tercermin dari peluncuran program Making Indonesia 4.0 oleh presiden Joko Widodo awal April 2018 . Revolusi Industri 4.0 tak hanya menawarkan sisi positif (“the promises”) tapi juga negatif (“the perils”). Revolusi yang ditopang oleh teknologi-teknologi abad 21 seperti machine learning, artificial intelligence, internet of things, hingga 3D printing. Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus mempersiapkan diri, merencanakan, dan menyusun strategi di tingkat pusat dan daerah untuk menghadapinya. Untuk bisa mengelola Revolusi Industri 4.0 diperlukan gaya pemerintahan yang kreatif, adaptif, cepat, dan mumpuni dalam mengelola perubahan eksponensial yang dihasilkan oleh Revolusi Industri 4.0. Dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 perlu adanya kolaborasi secara intens dengan seluruh elemen stakeholders (bisnis, akademis, komunitas, masyarakat) dalam menuntun proses transformasi digital di level pemerintah, industri, dan masyarakat secara luas.

Peluang sekaligus tantangan dalam pengembangan dan penguatan SIDA Povinsi Kepulauan Riau diatas telah dituangkan dalam kebijakan pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dalam kebijakan pembangunan kewilayahan, kebijakan pembangunan cross cutting, dan kebijakan pembangunan tahunan periode pembagunan jangka menengah tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. Kebijakan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2037. Tujuan Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau ialah untuk Mewujudkan Kepulauan Riau yang maju dan sejahtera melalui penataan ruang yang optimal dan berkelanjutan sebagai wilayah kepulauan. Upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, maka ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Keterpaduan Pusat-Pusat Kegiatan;
- 2) Mendorong Terbentuknya Aksesibilitas dan Konektivitas Jaringan Transportasi Kepulauan;
- 3) Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah;
- 4) Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam Guna Mendorong Pengembangan Ekonomi Wilayah;
- 5) Mengembangkan Zona dan Kawasan Industri Berdaya Saing Global;
- 6) Mendorong Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun;
- 7) Memelihara Kelestarian Wilayah Kepulauan; dan
- 8) Peningkatan Fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara.

Prioritas pemanfaatan ruang di Provinsi Kepulauan Riau dititikberatkan pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perwujudan Struktur Ruang Provinsi melalui perwujudan sistem perkotaan, transportasi darat-laut-udara, jaringan energi, telekomunikasi, sumberdaya air dan jaringan lainnya.
- 2) Perwujudan Pola Ruang Provinsi melalui pengendalian pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya darat.
- 3) Perwujudan Pola Ruang Laut melalui perlindungan dan pengawasan kawasan laut, serta pengembangan dan pemanfaatan sumber daya laut sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 4) Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi, meliputi: (1) Kawasan Strategis Provinsi di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Kota Tanjungpinang; (2) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas; (3) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga; dan (4) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna yang sekaligus sebagai Kawasan Strategis Nasional.

Kerangka umum pengembangan wilayah di Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan mengacu pada arah pembangunan wilayah Sumatera yang tertuang dalam RPJMN 2020-

2024. Salah satu arah pembangunan wilayah Sumatera dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020-2024 akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Arah pengembangan wilayah tersebut sangat sesuai dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 yang dijabarkan dalam misi pertama yaitu percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat, serta misi kelima yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau guna pengintegrasian dan percepatan pembangunan kawasan pesisir.

Arah pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan memperhatikan potensi, permasalahan dan isu strategis pada masing-masing wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah, maupun antar kelompok pendapatan. Semangat dan tekad kuat membangun daerah untuk meraih kemajuan, meningkatkan kemandirian, dan memperkuat daya saing daerah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Arah pengembangan wilayah ini juga disusun dengan mendasarkan pada rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau, untuk menjamin kebijakan, program dan kegiatan yang konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektor, mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah, sistem hukum dan kelembagaan yang handal, serta memperkuat koordinasi dan kerjasama yang solid antar perangkat daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Isu utama pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah masih besarnya kesenjangan pembangunan di berbagai sektor antar kabupaten/kota. Oleh karena itu, Dalam kurun waktu tahun tahun 2021-2026, arah kebijakan utama pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mendorong akselerasi pembangunan yang bertumpu pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi potensi setiap wilayah, peningkatan produktivitas, serta penyediaan infrastruktur dasar yang terpadu dan merata.

Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Kota Tanjungpinang	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pemerintahan • Pusat pendidikan • Pusat wisata Budaya Melayu dan industri halal
Kabupaten Bintan	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pariwisata internasional • Industri MRO dan pengolahan makanan
Kota Batam	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat hubungan logistik internasional dan Industri kedirgantaraan • Pusat Pariwisata, industri digital dan kreatif • <i>Pusat international trade and finance center</i>
Kabupaten Karimun	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat industri maritim • Pusat industri perikanan
Kabupaten Lingga	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pertanian, perkebunan dan peternakan • Pusat wisata
Kabupaten Natuna	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur perdagangan laut • Sentra perikanan, kelautan, dan wisata
Kabupaten Kepulauan Anambas	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra perikanan • Sentra wisata

2. Kebijakan pembangunan yang bersifat cross cutting merupakan upaya dalam melakukan pembangunan pada suatu sektor yang akan dilaksanakan melalui kolaborasi lebih dari satu perangkat daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam lingkup Provinsi Kepulauan Riau. Dalam bentuk operasional selanjutnya kebijakan ini akan dituangkan secara rinci berupa Rencana Aksi Daerah (RAD) pada setiap sektor yang akan dikolaborasikan.

1) Penanggulangan Kemiskinan

Salah satu kebijakan unggulan yang akan ditangani secara bersama-sama baik lintas OPD maupun lintas kabupaten/kota ialah penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini akan diarahkan pada penanganan masalah kemiskinan yang masih cukup besar di Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan menjadi 6,13 persen dari awalnya hanya 5,80 persen pada tahun 2019. Kenaikan persentase penduduk miskin ini tidak terlepas dari imbas pandemic Covid-19 yang cukup menggerus jalannya roda-roda perekonomian masyarakat. Dengan upaya bersama menghadapi masalah kemiskinan ini, maka diharapkan persentase penduduk miskin pada tahun 2026 dapat menurun menjadi 5,57%.

2) Penanggulangan Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Penanggulangan stunting juga menjadi fokus pembangunan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk Provinsi Kepulauan

Riau. Melalui upaya bersama dalam penanganan stunting di Provinsi Kepulauan Riau, maka diharapkan pada tahun 2026 angka Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita turun menjadi 12 persen dari awalnya sebesar 19 persen pada tahun 2021.

3) Pembangunan Infrastruktur

Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah yang terdiri dari berbagai pulau, sehingga diperlukan infrastruktur penghubung yang memadai untuk memudahkan arus orang dan barang wilayah. Kolaborasi pembangunan infrastruktur koneksi ini akan difokuskan pada pembangunan interkoneksi antar pulau, infrastruktur untuk penanganan banjir serta pemenuhan kebutuhan akan infrastruktur dasar. Selain dari pada itu Climate Change perlu menjadi perhatian didalam melakukan pembangunan di provinsi Kepulauan Riau.

4) Kluster Daerah Pertanian

Kluster daerah pertanian merupakan upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan sektor pertanian unggulan di masing-masing daerah. Kebijakan ini lebih difokuskan sebagai kolaborasi antar pemerintah kabupaten/kota yang nantinya akan menjadi objek kluster daerah pertanian tersebut. Dengan adanya kluster ini, maka diharapkan setiap kabupaten/kota memiliki produk unggulan pertanian yang pengembangannya tentu saja sesuai dengan kondisi geografis di kabupaten/kota tersebut. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan PDRB Sektor Pertanian dari 2,17 Triliun pada tahun 2021 menjadi 2,19 Triliun pada tahun 2026.

5) Tourism Linkage Networking

Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu kawasan terbesar yang mendapatkan kunjungan turis dari luar negeri, maka salah satu kebijakan prioritas ialah menargetkan pengembangan dan penguatan hubungan berkelanjutan antara sektor pariwisata dan sektor ekonomi produktif lainnya seperti pertanian, manufaktur dan hiburan yang terkait erat dengan sektor pariwisata. Tujuan utama dari Tourism Linkages Networking adalah untuk meningkatkan konsumsi barang dan jasa yang dapat diperoleh secara kompetitif dari sumber lokal. Hal Ini juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja sambil menghasilkan dan mempertahankan potensi penghasilan devisa Negara. Sehingga, dari kolaborasi ini dapat meningkatkan PDRB Sektor Pariwisata dari 2,17 Triliun pada tahun 2021 menjadi 3,49 Triliun pada tahun 2026.

6) Industri Perikanan dan Kelautan

Kolaborasi industri perikanan dan kelautan diarahkan pada pembangunan dan penguatan integrasi industri perikanan dan kelautan antar kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Daerah-daerah yang merupakan potensi penghasil ikan akan difokuskan pada produksi dan penangkapan ikan, sedangkan daerah yang merupakan pusat aktivitas ekonomi akan menjadi sentra pengolahan hasil-hasil perikanan dan kelautan. Kondisi ini diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan yang menjadi salah satu potensi besar di Provinsi Kepulauan Riau.

7) Link and match Pendidikan dan Industri

Salah satu permasalahan di Provinsi Kepulauan Riau ialah masih banyaknya pengangguran terbuka. Data pada tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau ialah sebesar 10,34 persen. Angka ini naik cukup signifikan yang sebelumnya hanya sebesar 6,91 persen pada tahun 2019. Kenaikan tingkat pengangguran ini juga tidak terlepas dari dampak pandemic Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya beberapa pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, masalah utama dari pengangguran terbuka ialah kurangnya link and match antara kebutuhan SDM di dunia kerja dengan kemampuan yang dimiliki oleh calon tenaga kerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesesuaian antara kompetensi yang diharapkan oleh dunia kerja dengan kompetensi para pencari kerja.

Kebijakan Pembangunan *Cross Cutting* merupakan beberapa program prioritas pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam bentuk kolaborasi antar organisasi perangkat daerah dan/atau antar kabupaten/kota.

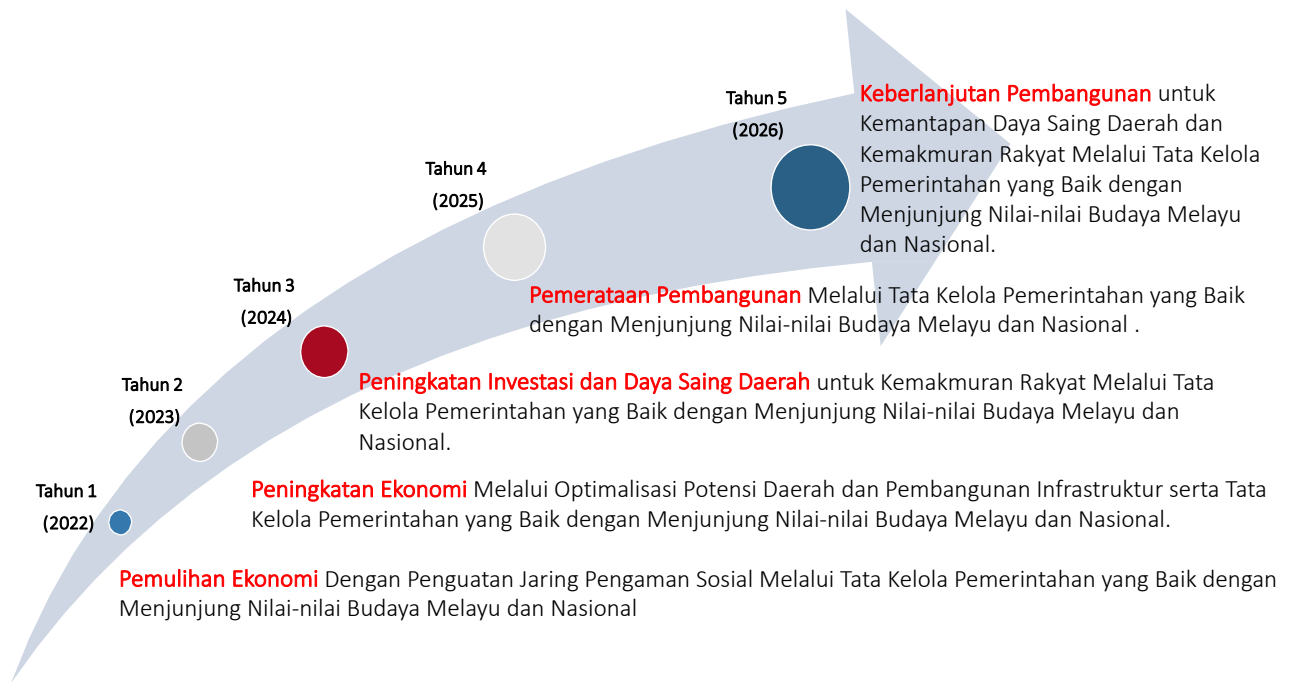
1 Penanggulangan Kemiskinan	2 Penanggulangan Stunting	3 Pembangunan Infrastruktur	4 Cluster Daerah Pertanian	5 Tourism Linkage Networking	6 Industri Perikanan dan Kelautan	7 Link and match Pendidikan dan Industri
Menurunkan angka kemiskinan dari 6,07% pada tahun 2021 menjadi 5,57% pada tahun 2026.	Menurunkan prevalensi stunting dari 16,82% pada tahun 2021 menjadi 12,8% pada tahun 2026.	Meningkatkan angka Rasio Konektivitas Provinsi dari 38,42% pada tahun 2021 menjadi 58,01% pada tahun 2026.	Meningkatkan PDRB Sektor Pertanian dari 2,17 Triliun pada tahun 2021 menjadi 2,19 Triliun pada tahun 2026.	Meningkatkan PDRB Sektor Pariwisata dari 1,61 Triliun pada tahun 2021 menjadi 2,60 Triliun pada tahun 2026.	Meningkatkan PDRB sektor Perikanan dari 3,28 Triliun pada tahun 2021 menjadi 3,33 Triliun pada tahun 2026.	Menurunkan angka pengangguran terbuka dari 10,22% pada tahun 2021 menjadi 7,49% pada tahun 2026.

3. Pelaksanakan kebijakan dan strategi dalam lima dalam pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional, serta dilaksanakan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance)

sebagai salah satu komitmen pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dengan demikian, setiap tahun strategi-strategi yang terkait dengan pelestarian budaya serta penerapan tata Kelola pemerintahan yang baik akan terus dilaksanakan, seperti internalisasi dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya Melayu, menjamin perlindungan sosial dan kesehatan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan pelecehan, mengintensifkan penyebaran informasi publik secara up to date melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, memaksimalkan penerapan e-government guna memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan, meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel, mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang meritokratis dan berintegritas, mengembangkan peta rawan bencana dan sistem tanggap bencana yang antisipatif dengan melibatkan kesiapsiagaan masyarakat, meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dan unsur kebudayaan lainnya dalam pengembangan budaya Melayu, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar umat beragama, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar etnis dan suku.

Arah kebijakan/tema pembangunan setiap tahun dalam perencanaan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau dalam pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- 1) Pembangunan pada tahun pertama akan diarahkan pada Pemulihan Ekonomi Dengan Penguatan Jaring Pengaman Sosial Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.
- 2) Pembangunan pada tahun kedua akan diarahkan pada Peningkatan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Pembangunan Infrastruktur serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.
- 3) Pembangunan pada tahun ketiga akan diarahkan pada Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah untuk Kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.
- 4) Pembangunan pada tahun keempat akan diarahkan pada Pemerataan Pembangunan Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.
- 5) Pembangunan pada tahun kelima akan diarahkan pada Keberlanjutan Pembangunan untuk Kemantapan Daya Saing Daerah dan Kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.



BAB V

KONDISI SIDa YANG AKAN DICAPAI

5.1 Tema Dan Sub Tema Pengembangan Dan Penguatan SIDa

Dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; visi dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang didalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025; visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang didalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026; dan kondisi SIDa Provinsi Kepulauan Riau saat ini; serta tantangan dan peluang pengembangan dan penguatan SIDa Provinsi Kepulauan Riau, maka diperoleh rumusan tema dan sub tema pengembangan dan penguatan sistem inovasi daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Tema :

“Akselerasi Pembangunan Bidang Perikanan Kelautan, Industri, dan Pariwisata didukung Infrastruktur dan Pendidikan/kualitas SDM Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Masalah Kemiskinan dan Stunting”.

2. Sub Tema :

- a. Potensi Unggulan Perikanan, Kelautan dan Pertanian.**
- b. Pengembangan Industri dan Pariwisata.**
- c. Infrastruktur dan Pendidikan/Kualitas SDM.**

5.2 Tujuan Pengembangan Dan Penguatan SIDa

Dengan memperhatikan tema dan sub tema maka tujuan pengembangan dan penguatan SIDa Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Tabel V. 1
Tujuan Pengembangan dan Penguatan SIDA Provinsi Kepulauan Riau

Sub Tema	Tujuan
Potensi Unggulan Perikanan, Kelautan dan Pertanian.	Optimalisasi Potensi Unggulan Perikanan, Kelautan dan Pertanian.
Pengembangan Industri dan Pariwisata.	Optimalisasi Pemanfaatan Peluang Pengembangan Industri dan Pariwisata.
Faktor Pendukung berupa Infrastruktur dan Pendidikan/Kualitas SDM	Akselerasi Faktor Pendukung berupa Infrastruktur dan Pendidikan/Kualits SDM.

5.3 Sasaran Pengembangan Dan Penguatan SIDA

Sasaran pengembangan dan penguatan SIDA Provinsi Kepulauan Riau dengan memperhatikan tujuan adalah:

Tabel V. 2
Sasaran Pengembangan dan Penguatan SIDA Provinsi Kepulauan Riau

Sub Tema	Tujuan	Sasaran
Potensi Unggulan Perikanan, Kelautan dan Pertanian.	Optimalisasi Potensi Unggulan Perikanan, Kelautan dan Pertanian.	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Usaha Perikanan, Kelautan dan Pertanian.
Pengembangan Industri dan Pariwisata.	Optimalisasi Pemanfaatan Peluang Pengembangan Industri dan Pariwisata.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri dan Pariwisata Pada Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat.
Faktor Pendukung berupa Infrastruktur dan Pendidikan/Kualitas SDM.	Akselerasi Faktor Pendukung berupa Infrastruktur dan Pendidikan/Kualits SDM.	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi dan Kualitas SDM.

5.4 Target Kinerja SIDA

Target Kinerja SIDA Provinsi Kepulauan Riau yang akan dicapai berdasarkan sub tema, tujuan, dan sasaran pengembangan dan penguatan SIDA Provinsi Kepulauan Riau disajikan pada Tabel berikut.

Tabel V. 3
Target Kinerja SIDA Yang Akan Dicapai Berdasarkan Sub Tema, Tujuan, dan Sasaran
Pengembangan dan Penguatan SIDA Provinsi Kepulauan Riau

Tema : “Akselerasi Pembangunan Bidang Perikanan Kelautan, Industri, dan Pariwisata didukung Infrastruktur dan Pendidikan/kualitas SDM Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Masalah Kemiskinan dan Stunting”

Sub Tema 1 : Potensi Unggulan Perikanan, Kelautan dan Pertanian

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi yang Akan Dicapai		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
			2022	Akhir Periode	
Optimalisasi Potensi Unggulan Perikanan, Kelautan dan Pertanian		Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)	3.297	3.330	Kelautan dan Perikanan
		Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)	2.177	2.196	Pertanian
	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Usaha Perikanan, Kelautan dan Pertanian	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	307.076,60	309.538,60	Kelautan dan Perikanan
		Nilai Nelayan/Tukar NTN (%)	115,00	116,3	Kelautan dan Perikanan
		Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	26.491,92	35,288,63	Kelautan dan Perikanan
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi (%)	109,55	112,32	Kelautan dan Perikanan
		Peningkatan Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	1.331,88	1.346,88	Kelautan dan Perikanan
		Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	1,35	1,64	Pertanian
		Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	0,74	1,03	Pertanian
		Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	2,8	3,8	Pertanian
		Nilai Tukar Petani (NTP)	99,88	99,99	Pertanian

Sub Tema 2 : Pengembangan Industri dan Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi yang Akan Dicapai		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
			2022	Akhir Periode	
Optimalisasi Pemanfaatan Peluang Pengembangan Industri dan Pariwisata		Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)	118.177	143.064	Perindustrian
		Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (Milyar Rupiah)	2.387	3.495	Pariwisata
	Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri dan Pariwisata Pada Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat	Nilai Produktivitas Industri Pengolahan (Milyar Rupiah)	118.177	143.064	Perindustrian
		Persentase Izin Usaha Industri (%)	60	100	Perindustrian
		Peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara (%)	20,67	23,06	Pariwisata
		Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan (%)	3	3	Pariwisata

Sub Tema 3 : Faktor Pendukung Berupa Infrastruktur dan Pendidikan/Kualitas SDM

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi yang Akan Dicapai		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
			2022	Akhir Periode	
Akselerasi Faktor Pendukung berupa Infrastruktur dan Pendidikan/Kualitas SDM		Rasio Konektivitas Provinsi (%)	41,33	65	Perhubungan
		Rasio Jalan Kondisi Baik (%)	63,25	69,25	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10,1	7,5	Tenaga Kerja
	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas	Rasio Konektivitas Angkutan Darat (%)	18	30	Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi yang Akan Dicapai		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
			2022	Akhir Periode	
	Pendidikan Vokasi dan Kualitas SDM	Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan (%)	23,33	35	Perhubungan
		Rasio Konektivitas Angkutan Laut (%)	31,82	50	Perhubungan
		Persentase Jalan Kondisi Baik (%)	63,25	69,25	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Tingkat Kesempatan Kerja (%)	90,00	90,66	Tenaga Kerja
		Tingkat lulusan pelatihan kerja (%)	100	100	Tenaga Kerja

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melaksanakan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) maupun daerah-daerah yang pernah bekerjasama dengan BPPT dalam workshop ini guna mensosialisasikan kuesioner Radar Inovasi Daerah (RIDa). RIDa sendiri merupakan sebuah instrumen yang dikembangkan oleh BPPT yang berfungsi untuk mengukur kapasitas inovatif daerah dengan menilai keterpenuhan komponen sistem inovasi dalam program inovatif daerah. Instrumen ini sudah mengalami beberapa perubahan sejak tahun 2011 menyesuaikan Kebijakan Nasional dengan versi terakhir yaitu RIDa 2020.

Urgensi dari adanya pengukuran kapasitas inovatif daerah melalui RIDa ini adalah untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah secara komprehensif. Beberapa daerah mungkin telah menemukan dan melaksanakan sebuah inovasi, namun belum tentu inovasi-inovasi tersebut tersistem secara berkelanjutan. Sedangkan di sisi lain, penerapan sistem dalam berinovasi yang menyeluruh dapat membantu percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan meningkatkan perekonomian lokal dan regional. Oleh karena itu, BPPT melaksanakan uji coba penilaian kapasitas inovatif daerah dengan aplikasi RIDa 2020 kepada beberapa daerah guna mengetahui keberhasilan analisa melalui RIDa 2020 terkait seberapa besar pelaksanaan sistem inovasi di daerah.

Aplikasi Radar Inovasi Daerah ini menggabungkan analisis dari aspek ekosistem inovasi pada Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) milik Kemenristek dan Indeks Inovasi Daerah (IID) milik Kemendagri. Konsep pengukuran RIDa 2020 terdiri dari 5 Program Inovatif dan 6 Kerangka Kebijakan Inovasi (KKI) yang telah dijabarkan pada form macro excel untuk kemudian diisi sesuai dengan kondisi daerah. 5 Program Inovatif tersebut adalah Program Ekosistem Inovasi; Program

Klaster Industri; Program Jaringan Inovasi; Program Technopreneur; dan Program Infrastruktur TIK. Sedangkan 6 KKI yang dimaksud adalah Kerangka Umum Kebijakan Inovasi; Kelembagaan dan Daya Dukung Inovasi; Kolaborasi bagi Inovasi dan Difusi Teknologi; Budaya Inovasi; Koherensi Kebijakan Pusat-Daerah; serta Penyelarasan dengan Isu Global.

Fokus Penilaian RIDa 2020					
	Program Ekosistem Inovasi	Program Klaster Industri	Program Jaringan Inovasi	Program Technopreneur	Program Infrastruktur TIK
KKI Kerangka umum untuk bisnis dan inovasi	Fokus pada infrastruktur dasar pendukung inovasi (Perber 03/362012) dan kemudahan investasi	Regulasi pengembangan produk unggulan daerah (Kemendagri No.9 tahun 2014)	Regulasi pengembangan technopark/pilar inovasi di daerah berdasarkan Perpres 106 tahun 2017	Regulasi ketersediaan infrastruktur inkubator (Permen KUKM No 24 Tahun 2015)	Regulasi pengembangan program TIK
KKI2 Kelembagaan dan daya dukung inovasi	Input SOM dan kualitas lembaga iptekin	Jumlah lembaga (universitas dan komunitas/asosiasi bisnis yang terlibat)	Jumlah lembaga yang terlibat pada kegiatan di wahana jejaring	Lembaga dalam pembinaan technopreneur	Jumlah lembaga yang terlibat dalam pengembangan TIK
KKI 3 Kolaborasi	Jumlah kerjasama daerah (G to G) dalam pengembangan inovasi	Jumlah dan skala Kerjasama pengelola klaster dengan Perguruan tinggi/itbangyasa	Jumlah dan skala kerjasama di wahana jejaring dengan aktor lain	Jumlah dan skala kerjasama pemerintah dibidang technopreneur	Jumlah dan skala kolaborasi dalam TIK
KKI 4 Budaya Inovasi	Muatan wirausaha dan Apresiasi inovasi	Jumlah klaster industri, pembinaan klaster	Jumlah wirausaha baru yang mendapat pembinaan di dalam technopark	Jumlah technopreneur	Pelatihan berbasis TIK
KKI 5 Koherensi kebijakan	Adopsi peraturan pengembangan SIDA secara berjenjang	Kesesuaian dengan program pembangunan industri sesuai dengan provinsi/tingkat yang lebih tinggi (Permenperin No 110 tahun 2-15)	Adopsi peraturan pengembangan wahana jejaring secara berjenjang	Adopsi peraturan pengembangan technopreneur secara berjenjang	Koherensi kebijakan dengan kerjasama pusat dan daerah
KKI 6 Penyelarasan dengan isu Global	Standar mutu internasional	Program lingkungan bagi klaster	Standar keikutsertaan dalam forum internasional	Paten personal	Penggunaan produk sesuai standar internasional

Sumber: BPPT, Materi Workshop Radar Inovasi Daerah (RIDa) 2020, 2021

Gambar 5. 1 Fokus Penilaian Radar Inovasi Daerah (RIDa) 2020

Dalam pengisian indikator kuesioner Radar Inovasi Daerah (RIDa) ini, Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan bertindak sebagai penanggung jawab dan bertugas mengkoordinasikan pengumpulan dan pengisian data kepada Perangkat Daerah maupun pihak-pihak lain yang bersangkutan. Sebagai rencana tindak lanjut, pihak BPPT akan melaksanakan analisis kapasitas sistem inovasi daerah berdasarkan data yang sudah terisi lengkap pada form macro excel serta lampiran data dukung yang telah di-upload. Melalui analisis ini, akan muncul nilai atau skor akhir kapasitas inovatif daerah yang menjelaskan hasil evaluasi kelemahan pada program inovatif daerah serta usulan/rekomendasi perbaikan program.

Kondisi umum SIDA berdasarkan kondisi penilaian Radar Inovasi Daerah (RIDa) menurut 5 Program Inovatif dan 6 Kerangka Kebijakan Inovasi (KKI) yang akan dicapai dalam mendukung target kinerja yang akan dicapai berdasarkan sub tema, tujuan, dan sasaran pengembangan dan penguatan SIDA Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Program Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah

Elemen KKI		Indikator Elemen KKI	Kondisi yang Akan Dicapai
KKI 1 Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi			
Basis data inovasi dan bisnis	1	Ketersediaan basis data inovasi dan bisnis.	Tersedianya data terkait gambaran potensi wilayah dalam pengembangan inovasi yang mampu menarik investasi dan bisnis
	2	Satu Data Daerah	Terselenggaranya pengelolaan dan keaktifan sistem satu data di daerah berdasarkan Perpres No 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia
Regulasi yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	3	Dokumen Sistem Inovasi Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RPJPD maupun Roadmap yang mengakomodasi system inovasi sebagai konsep perencanaan daerah yang tercantum dalam misi atau tujuan atau strategi dan arah kebijakan. Mandat ini diamanahkan oleh Peraturan bersama Kemeristek dan Kementerian Dalam Negeri No 03/36 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
	4	Regulasi insentif bisnis (SK/perda/perwal/perbup insentif)	Adanya kemudahan dan insentif fiskal maupun nonfiskal yang diberikan daerah untuk pengajuan perijinan dan investasi.
Infrastruktur Dasar Inovasi	5	Keberadaan ruang kreatif	Adanya Ruang Kreatif yang merupakan wahana untuk bertukar ide, membangkitkan kreatifitas, mengembangkan usaha produktif, memfasilitasi aktifitas ekonomi lokal dan mempermudah interaksi sosial. Ruang kreatif dapat berbentuk seperti taman kreatif yang dilengkapi dengan fasilitas internat, hub kreatif center, cowork center daerah.
	6	Kelembagaan penguatan SIDA (Tim Koordinasi PSIDA)	Adanya lembaga atau organisasi yang bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan inovasi. Tugas lembaga SIDA adalah menyusun roadmap SIDA dan mengakomodasi seluruh program dan kegiatan inovasi yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
	7	Rasio anggaran Litbangjirap/Iptekin terhadap anggaran belanja daerah (APBD)	Tersedianya anggaran yang dikeluarkan untuk pembiayaan program penelitian dan pengembangan berdasar pada Permendagri no 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah. Atau anggaran yang dikeluarkan untuk pembiayaan program kelitbangan (lihat Permendagri no 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan pengembangan dilingkungan Kementerian dalam negeri dan Pemerintah daerah) berdasarkan Permendagri no 13 tahun 2016.
Kemudahan berbisnis dan investasi	8	Waktu pelayanan perijinan	Jangka waktu pengajuan perijinan yang diperlukan oleh masyarakat dari awal

Elemen KKI		Indikator Elemen KKI	Kondisi yang Akan Dicapai
			pengajuan hingga diterimanya hasil, sesuai Standar waktu pelayanan perijinan berdasarkan pada Perpres Nomor 97 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
	9	Proses/teknis dalam pelayanan terkait bisnis dan investasi	Tersedianya sarana kemudahan untuk berbisnis dan berinvestasi bagi masyarakat yang ditandai dengan sejumlah faktor evaluasi seperti penerapan TIK, adanya SOP dan indeks kepuasan masyarakat.
KKI 2 Kelembagaan dan daya dukung IPTEK dan inovasi			
Kelembagaan Iptekin	10	Jumlah Perguruan tinggi	Adanya Keberadaan Perguruan tinggi di daerah
	11	Jumlah lembaga litbangjirap diluar perguruan tinggi	Adanya Keberadaan Lembaga Litbangjirap di daerah selain Perguruan tinggi
	12	Jumlah SMK	Tersedianya SMK yang memiliki jurusan yang mendukung pengembangan produk unggulan daerah.
Daya Dukung Iptekin	13	Rasio jabatan fungsional iptekin	Meningkatnya rasio pegawai dengan jabatan fungsional IPTEKIN (perekayasa, peneliti, perencana, dosen) per 1 juta penduduk di daerah.
	14	Kualitas perguruan tinggi terbaik di daerah	Meningkatnya Kualitas PT didasarkan dari klaster perguruan tinggi Sesuai klasterisasi terbaru yang dapat dilihat di website http://klasterisasi-pt.kemdikbud.go.id/ dengan menginputkan 6 digit kode perguruan tinggi.
	15	Rasio angkatan kerja yang berpendidikan tinggi	Meningkatnya rasio angkatan kerja yang berpendidikan tinggi.
	16	Rasio guru menengah atas (SMA/SMK) terhadap siswa	Meningkatnya Rasio guru menengah atas (SMA/SMK) terhadap jumlah siswa menengah atas.
	17	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
KKI 3 Kolaborasi bagi inovasi dan difusi teknologi			
Kemitraan strategis dan kolaboratif untuk inovasi	18	Jumlah dan skala kerjasama dalam peningkatan ekonomi daerah	Meningkatnya kerjasama yang dilakukan daerah terkait pengembangan inovasi dan ekonomi daerah.
KKI 4 Budaya inovasi			
Penguatan Budaya Inovasi Melalui Jalur Pendidikan dan Pelatihan Inovasi	19	Kondisi muatan pelajaran kewirausahaan	Terselenggaranya kurikulum wirausaha dalam jenjang sekolah menengah atas dan kejuruan
	20	Program pelatihan dan pendampingan (pengembangan kualitas SDM)	Adanya program pelatihan dan pendampingan bagi aparat (OPD) untuk mendukung berkembangnya inovasi. Seperti pelatihan dalam evaluasi program daerah yang berkaitan dengan inovasi.
Apresiasi dan kampanye inovasi	21	Jumlah apresiasi dan kampanye inovasi/tahun	Meningkatnya apresiasi inovasi yang diterima daerah dalam rangka peningkatan inovasi daerah seperti Anugerah Iptek dan Inovasi Nasional.

Elemen KKI		Indikator Elemen KKI	Kondisi yang Akan Dicapai
	22	Jumlah Apresiasi Inovasi yang diselenggarakan oleh daerah	Meningkatnya apresiasi inovasi yang diselenggarakan daerah dalam rangka peningkatan inovasi daerah.
KKI 5 Koherensi kebijakan Pusat dan Daerah			
Koordinasi kebijakan daerah, dan daerah-nasional	23	Kesesuaian kebijakan antar pusat daerah tentang implementasi sistem inovasi daerah	Terlaksananya amanah peraturan-peraturan yang diadopsi dan disepakati oleh pemerintah daerah dalam implementasi sistem inovasi daerah.
KKI 6 Penyelarasan dengan perkembangan global			
Standar pelayanan umum dan bisnis investasi	24	Sertifikasi ISO 9001	Terlaksananya sertifikasi ISO 9001 yang diperoleh PTSP, puskesmas/rumahsakit, OPD/BLUD/BUMD lainnya. Komitmen dapat berupa dokumen, anggaran, perencanaan-rapat, penyiapan sop. OPD/BLUD/BUMD yang memiliki sertifikasi ISO 9001 tidak dihitung kembali dalam kategori OPD/BLUD/BUMD yang memiliki komitmen dan sudah bergerak (perencanaan) untuk menerapkan ISO 9001.
Kekayaan Intelektual	25	Aktivitas pelayanan HaKI yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah	Meningkatnya pelayanan HaKI yang difasilitasi oleh daerah.
	26	Jumlah kekayaan intelektual daerah (indikasi geografis)	Terlaksananya pendaftaran 'indikasi geografis' berdasar UU nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis seperti contohnya produk ukir jepara, bandeng asap Sidoarjo, Salak Pondoh.

2. Program Penguatan Kluster Industri

Elemen KKI	No.	Indikator Elemen KKI	Kondisi yang Akan Dicapai
KKI 1 Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi			
Basis data inovasi dan bisnis	1	Ketersediaan basis data pengembangan kluster industri	Tersedianya data terkait pengembangan kluster seperti jumlah kluster industri, jumlah pengusaha/ aktor lain yang termasuk dalam kluster, persebaran wilayah kluster.
Regulasi yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	2	PUD (Produk Unggulan Daerah)	Adanya pengembangan Produk Unggulan Daerah dengan berdasarkan kriteria permendagri No. 9 tahun 2014 yang tercantum dalam dokumen rancangan induk pengembang industri daerah berdasar Permenperin Nomoer 110/M-Ind/per/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan rencana Pembangunan Industri provinsi dan rencana Pembangunan Industri kabupaten/Kota.
Infrastruktur Dasar Inovasi	3	Keberadaan sarana informasi daring unggulan daerah	Terlaksananya penggunaan sistem IT dalam pembentukan kluster. Sistem

Elemen KKI	No.	Indikator Elemen KKI	Kondisi yang Akan Dicapai
			informasi dapat berbentuk website, medsos, dll.
	4	Keberadaan Pokja pelaku klaster	Terbentuknya Pokja pelaku klaster secara khusus untuk membentuk /mengelola klaster industri. Terdapat 3 bentuk kelembagaan klaster yaitu SKPD, BUMN, Koperasi atau badan usaha atau perorangan yang mengatur pengelolaan klaster.
	5	Kenaikan omset klaster tiap tahun	Meningkatnya Rata-rata rasio kenaikan omset klaster yang minimal telah berkembang/ terbentuk selama 1 tahun.
KKI 2 Kelembagaaan dan daya dukung IPTEK dan inovasi			
Kelembagaan Iptekin-Litbangjirap	6	Jumlah perguruan tinggi dan lembaga Litbangjirap yang terlibat dalam pengembangan klaster industri daerah	Meningkatnya perguruan tinggi/lembaga litbangjirap baik pemerintah maupun swasta di daerah tersebut yang terlibat dalam pengembangan klaster industri daerah. Kriteria terlibat adalah dengan adanya kegiatan tertentu terkait pengembangan industri di klaster tertentu.
	7	Jumlah komunitas/asosiasi bisnis/lembaga lain yang terkait dengan pengembangan klaster industri daerah	Meningkatnya komunitas/ asosiasi bisnis yang terkait dengan pengembangan suatu klaster industri tertentu. Tuliskan jumlah klaster yang ada di daerah tersebut, jenis klaster yang dihitung mengikuti KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 5 digit. Kriteria terlibat adalah dengan adanya kegiatan tertentu terkait pengembangan industri di klaster tertentu.
Daya Dukung Iptekin	8	Rasio SDM pokja klaster dengan tingkat pendidikan minimal S1	Meningkatnya SDM pokja klaster yang memiliki tingkat pendidikan minimal S1. Standar yang dipakai menggunakan persentase data penduduk Indonesia berusia 15 tahun keatas yang memiliki tingkat pendidikan minimal S1 yaitu sekitar 10%.
KKI 3 Kolaborasi bagi inovasi dan difusi teknologi			
Kemitraan strategis dan kolaboratif untuk inovasi	9	Kerjasama antara klaster industri dengan lembaga lainnya (perguruan tinggi, perbankan, lembaga litbangjirap, dan lainnya)	Meningkatnya kerjasama antara pengelola klaster dengan lembaga lainnya dalam upaya pengembangan klaster industri. Kriteria kerjasama adalah dengan adanya kegiatan dalam MoU/Surat perjanjian kerjasama dalam rangka pengembangan industri di klaster tertentu.
Wahana Interaksi Pelaku Bisnis	10	Jumlah kegiatan yang diadakan sebagai sarana interaksi antar para pelaku bisnis di klaster industri daerah dalam setahun	Meningkatnya kegiatan yang diadakan sebagai sarana interaksi antar para pelaku bisnis di klaster industri daerah dalam setahun. Kegiatan yang dimaksud contohnya ialah pameran dagang, arena apresiasi inovasi IKM. Kriteria pameran dagang yaitu kegiatan yang diadakan dalam rangkaian event khusus misalnya menyambut ulang

Elemen KKI	No.	Indikator Elemen KKI	Kondisi yang Akan Dicapai
			tahun daerah, menyambut hari kemerdekaan, dll.
KKI 4 Budaya inovasi			
Penguatan Budaya Inovasi Melalui Jalur Pendidikan dan Pelatihan Inovasi	11	Jumlah pertemuan pokja klaster per tahun	Terlaksananya kegiatan atau pertemuan pokja klaster dalam jangka waktu 1 tahun.
	12	Jumlah program pelatihan dan pendampingan pengembangan kelompok usaha	Terlaksananya program pelatihan dan pendampingan pengembangan kelompok usaha dalam rangka pengembangan kualitas SDM dalam jangka waktu 1 tahun.
Penumbuhan usaha baru inovatif	13	Jumlah klaster industri	Adanya klaster industri yang ada di daerah dengan jenis klaster dilihat berdasarkan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 2 digit.
KKI 5 Koherensi kebijakan Pusat dan Daerah			
Koordinasi kebijakan daerah, dan daerah-nasional	14	Koordinasi program klaster dengan pemerintah daerah dan pusat	Tersusunnya dan terlaporkannya RPIK yang dijalankan sesuai dengan rancangan pembangunan industri provinsi dan nasional sesuai dengan kriteria yang terdapat pada Permenperin Nomer 110/M-Ind/per/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan rencana Pembangunan Industri provinsi dan rencana Pembangunan Industri kabupaten/Kota.
KKI 6 Penyelarasan dengan perkembangan global			
Lingkungan	15	Program lingkungan bagi klaster industri daerah	Adanya Jenis-jenis program lingkungan oleh/untuk klaster industri di daerah. Seperti IPAL komunal.
Standar	16	Program standarisasi produk klaster	Adanya Program standarisasi hasil produk yang dihasilkan dalam klaster industri yang ada.

3. Program Pengembangan Jejaringan Inovasi

Elemen KKI	No.	Indikator Elemen KKI	Kondisi yang Akan Dicapai
KKI 1 Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi			
Basis data inovasi dan bisnis	1	Ketersediaan database teknologi	Tersedianya data terkait dengan keberadaan lembaga dan kegiatan yang dilakukan.
	2	Adanya website tentang fasilitas/wahana jaringan inovasi	Tersedianya dan keaktifan website fasilitas/wahana jaringan.
Regulasi yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	3	Dokumen perencanaan dan legalitas pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi	Adanya kelengkapan dokumen perencanaan dan pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi. Legalitas kelembagaan fasilitas/wahana jaringan inovasi dapat berbentuk SK/Perbup/Perwal.
Infrastruktur Dasar Inovasi	4	Jumlah SDM pengelola fasilitas/wahana jaringan inovasi dengan tingkat pendidikan min S1	Adanya SDM pengelola wahana didasarkan pada struktur Permendagri No 12 Tahun 2017 tentang Pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang

Elemen KKI	No.	Indikator Elemen KKI	Kondisi yang Akan Dicapai
			dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pasal 27 Kabupaten/Kota Kelas A. UPTD digunakan sebagai bentuk umum yang digunakan oleh daerah dalam pembentukan lembaga technopark/pusat inovasi.
	5	Rasio anggaran pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi	Meningkatnya anggaran pengembangan wahana jejaring/kawasan technopark/pusat inovasi terhadap APBD. Dasar penentuan APBD adalah Permendagri No 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah dengan urusan pengembangan inovasi dan teknologi atau Anggaran yang dikeluarkan untuk pembiayaan program kelitbangan (permendagri no 17 tahun 2016) yang terkait dengan pendirian wahana jejaring berdasar permendagri no 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
	6	Sebaran anggaran pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi	Meningkatnya anggaran pengembangan wahana jejaring merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal konsep ekonomi berbasis pengetahuan melalui keikursertaan pembiayaan/ pengadaan program terkait dengan kawasan/wahana jejaring inovasi seperti technopark dan pusat inovasi.
	7	Pembangunan sarana/prasarana	Adanya wahana/ kawasan tejejaring inovasi ditandai dengan terbangunnya gedung dan sapras diatas lahan baik milik pemerintah/dimiliki pemerintah daerah/swasta.
	8	Jenis Penyelenggaraan Layanan Fasilitas/Wahana jaringan inovasi	Terselenggaranya Jenis Penyelenggaraan layanan di fasilitas/wahana jejaring inovasi sebagai salah satu tolak ukur keberfungsian wahana tersebut.
Kemudahan penggunaan fasilitas Technopark	9	Keberadaan SOP penggunaan fasilitas	Tersusunnya Standar operasional penggunaan fasilitas di kawasan.
KKI 2 Kelembagaan dan daya dukung IPTEK dan inovasi			
Kelembagaan Iptekin/ Litbangjirap	10	Jumlah perguruan tinggi, lembaga litbangjirap dan Sekolah yang terlibat dalam pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi	Meningkatnya partisipasi perguruan tinggi/lembaga litbangjirap baik pemerintah maupun swasta yang terlibat dalam kegiatan technopark/pusat inovasi/Kawasan lain yang memiliki fungsi serupa. . kriteria kerjasama adalah dengan adanya kegiatan dalam MoU/Surat perjanjian kerjasama. yang beririsan dengan fungsi kawasan technopark/pusat inovasi.
	11	Jumlah lembaga/komunitas yang terlibat dalam pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi	Meningkatnya komunitas yang melakukan kerjasama dengan kawasan technopark/pusat inovasi. kriteria kerjasama komunitas adalah dengan

Elemen KKI	No.	Indikator Elemen KKI	Kondisi yang Akan Dicapai
			adanya kegiatan dalam MoU/Surat perjanjian kerjasama yang berisikan dengan fungsi kawasan technopark/pusat inovasi.
Daya Dukung Iptekin	12	Pengembangan SDM Pengelola fasilitas/wahana jaringan inovasi	Terlaksananya pengembangan SDM diidentifikasi dengan Program pengembangan SDM pengelola.
Daya Absorpsi/ serap Pengguna terhadap Iptekin / Litbangjirap	13	Pemanfaatan hasil penelitian perguruan tinggi, lembaga litbangjirap, dan komunitas dalam fasilitas/wahana jaringan inovasi dalam rangka pengembangan fasilitas/wahana tersebut	Meningkatnya perguruan tinggi/lembaga litbangjirap/komunitas yang terlibat kerjasama dengan technopark/pusat inovasi/Kawasan lain dengan fungsi serupa yang sudah mendapatkan mitra pengguna dan/atau Komunitas/wirausaha yang mendapatkan pendampingan dari pihak lain.
KKI 3 Kolaborasi bagi inovasi dan difusi teknologi			
Kemitraan strategis dan kolaboratif	14	Kerjasama pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi	Meningkatnya kerjasama antar aktor jejaring.
Peningkatan Difusi Inovasi	15	Sebaran difusi inovasi jaringan inovasi	Meningkatnya inovasi yang sudah diaplikasikan (produk baru yang sudah dihasilkan).
KKI 4 Budaya inovasi			
Penguatan Budaya Inovasi Melalui Jalur Pendidikan dan Pelatihan Inovasi	16	Budaya berjejaring antar aktor inovasi	Adanya program pelatihan yang diadakan oleh wahana jaringan inovasi untuk komunitas/masyarakat dalam 1 tahun.
Penumbuhan wirausaha keratif	17	Jumlah wirausaha baru yang mendapat pembinaan di fasilitas/wahana jaringan inovasi	Meningkatnya akumulasi wirausaha baru yang mendapat pembinaan dalam fasilitas dalam kawasan technopark/pusat inovasi/kawasan dengan fungsi serupa adalah banyaknya pengusaha/start up yang mendapatkan kemudahan pelayanan teknis dan inkubasi
KKI 5 Koherensi kebijakan Pusat dan Daerah			
Koordinasi kebijakan daerah dan nasional	18	Kesesuaian kebijakan antara pusat-daerah tentang wahan jejaring	Terlaksananya amanah Peraturan-peraturan yang diadopsi dan disepakati oleh pemerintah daerah dalam hal pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi.
KKI 6 Penyelarasan dengan perkembangan global			
Standar	19	Positioning wahana jejaring inovasi dengan komunitas internasional	Meningkatnya keikutsertaan pengelola wahana jaringan inovasi (Technopark, Teknologi Transfer Office, dsb) terhadap forum internasional khususnya terkait lingkungan.

4. Program Penumbuhan Technopreneur

Elemen KKI	No.	Indikator Elemen KKI	Kondisi yang Akan Dicapai
KKI 1 Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi			
Basis data inovasi dan bisnis	1	Ketersediaan database teknopreneur/UMKM Inovatif	Tersedianya data terkait teknopreneur dan/atau UMKM inovatif di daerah penilaian meliputi data jumlah perusahaan, tenaga kerja, sektor usaha, besaran omzet, dan data pendukung lainnya.
Regulasi yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	2	Regulasi dan legalitas Lembaga pengembangan teknopreneur/UMKM Inovatif	Tersusunnya regulasi dan legalitas terkait pengembangan teknopreneur/UMKM Inovatif.
Infrastruktur Dasar Inovasi	3	Ketersediaan inkubator bisnis dan kepemilikannya	Tersedianya inkubator bisnis di daerah berdasarkan Permen KUKM No 24 Tahun 2015.
	4	Sarana dan prasarana inkubator	Tersedianya fasilitas-fasilitas dasar yang perlu disediakan oleh inkubator bisnis untuk menunjang fungsinya dalam memberikan layanan ke tenant inkubasi.
	5	Standar penyelenggaraan inkubator sebagai fasilitas penumbuhkembangkan teknopreneur	Adanya standar penyelenggaraan inkubasi bisnis di daerah berdasarkan Permen KUKM No 24 tahun 2015 yaitu prainkubasi (menjaring calon wirausaha), inkubasi (kontrak pendampingan tenant), dan pascainkubasi (jejaring alumni).
	6	Persentase alokasi Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk pengembangan teknopreneur	Tersedianya anggaran APBD (Berdasar lampiran Permendagri no 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah atau Permendagri no 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah) untuk segala kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan teknopreneur atau kewirausahaan.
Kemudahan berbisnis dan investasi	7	Besarnya penyaluran insentif / kemudahan pengembangan teknopreneur dan atau UMKM inovatif	Meningkatnya UMKM inovatif yang menerima insentif fisik (dana dan/atau alat) dari daerah, baik murni dari anggaran pemda atau dari kerja sama dengan pihak lain.
KKI 2 Kelembagaan dan daya dukung IPTEK dan inovasi			
Daya Dukung Inovasi	8	Sebaran Lembaga Litbangjirap yg berkontribusi dalam pengembangan teknopreneur dan/atau UMKM Inovatif daerah	Tersedianya lembaga litbangjirap/komunitas yang berkontribusi dalam pengembangan dan pembinaan teknopreneur dan/atau UMKM inovatif di berbagai lembaga daerah terkait.
Daya Absorpsi UMKM terhadap Iptekin	9	Rasio tingkat absorpsi UMKM terhadap hasil litbangjirap pengembangan teknopreneur dan/ atau UMKM inovatif	Meningkatnya UMKM inovatif yang memanfaatkan teknologi dari perguruan tinggi dan/atau lembaga litbangjirap sebagai nilai tambah proses produksi atau hasil akhir produk yang dipasarkan
KKI 3 Kolaborasi bagi inovasi dan difusi teknologi			

Elemen KKI	No.	Indikator Elemen KKI	Kondisi yang Akan Dicapai
Kemitraan strategis dan kolaboratif untuk inovasi	10	Sebaran kemitraan strategis teknopreneur dan/ atau UMKM inovatif	Meningkatnya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan seperti: (1) peningkatan jumlah teknopreneur daerah, (2) kerjasama inkubasi bisnis dengan wilayah lain atau nasional, atau (3) pelatihan teknopreneur dengan mendatangkan pengajar dari wilayah lain.
	11	Jumlah dan skala interaksi komersialisasi teknologi antara penghasil teknologi/lembaga keuangan/lembaga lainnya dengan teknopreneur dan/atau UMKM inovatif	Meningkatnya kerjasama antara para penghasil teknologi/lembaga keuangan/lembaga lainnya dengan teknopreneur dan/atau UMKM inovatif dalam kegiatan hilirisasi hasil teknologi hingga dijual di pasaran (misal: skala internasional berarti hasil inovasi pewarna batik universitas di wilayah X dikomersialkan teknopreneur daerah kemudian dipasarkan hingga ke negara lain).
KKI 4 Budaya inovasi			
Penguatan Budaya Inovasi Melalui Jalur Pendidikan dan Pelatihan Inovasi	12	Rasio wirausaha / UMKM inovatif terhadap jumlah penduduk daerah tsb	Meningkatnya wirausaha / UMKM inovatif di daerah dibandingkan dengan total jumlah penduduk di daerah pada tahun yang sama.
	13	Program peningkatan iklim kewirausahaan	Terselenggaranya program-program pendukung technopreneurship seperti techno camp, talent scouting, dan/atau kegiatan lain sejenis yang bertujuan memotivasi dan menjangkau calon wirausaha muda dalam 5 tahun terakhir.
KKI 5 Koherensi kebijakan Pusat dan Daerah			
Prakarsa pengembangan klaster industri unggulan daerah	14	Jumlah usaha inovatif potensial untuk mendukung klaster industri unggulan daerah	Meningkatnya UMKM inovatif yang sektor usahanya mendukung keberadaan klaster unggulan daerah.
Koordinasi kebijakan daerah, daerah-nasional	15	Koordinasi antara pemerintah daerah dalam satu regional dan antara pemerintah daerah dengan pusat	Terlaksananya amanah peraturan-peraturan yang diadopsi dan disepakati oleh pemerintah daerah dalam hal pengembangan teknopreneur.
KKI 6 Penyelarasan dengan perkembangan global			
Lingkungan	16	Penerapan label ramah lingkungan pada produk UMKM inovatif dalam 2018-2020	Terselenggaranya program pemerintah yang memberikan penyuluhan/ pelatihan/ pendampingan kepada Teknopreneur/UMKM inovatif terkait standarisasi produk yang ramah lingkungan (misal: rendah emisi, 100% daur ulang, pewarna alami, pengelolaan limbah, dll).
Kekayaan Intelektual	17	Rasio kepemilikan kekayaan intelektual oleh para teknopreneur dan/atau UMKM inovatif daerah terhadap total UMKM	Meningkatnya kekayaan intelektual yang telah didaftarkan ke Kemenkumham oleh para teknopreneur dan/ atau UMKM inovatif di daerah.

5. Program Penguatan Infrastruktur TIK

Elemen KKI	No.	Indikator Elemen KKI	Kondisi yang Akan Dicapai
KKI 1 Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi			
Basis data inovasi dan bisnis	1	Ketersediaan basis data TIK di daerah	Tersedianya data terkait pengembangan TIK di daerah, mengacu pada International Telecommunication Union (ITU) United Nation (UN) yang dipublikasikan setiap tahun melalui IT Outlook.
	2	Ketersediaan website	Tersedianya website daerah dengan website tiap OPD yang aktif dan terhubung.
Regulasi yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	3	Regulasi atau landasan legal bagi pengembangan TIK	Tersusunnya Landasan hukum terkait pengembangan TIK seperti program smart city, SPBE, dan lainnya.
	4	Masterplan pengembangan TIK	Terusunnya Masterplan pengembangan TIK seperti Masterplan smart city, SPBE, dan lainnya.
Infrastruktur Dasar Inovasi	5	Kelembagaan pengelola pengembangan TIK	Adanya proses pembentukan lembaga pengelola pengembangan TIK seperti kelembagaan pengelola smart city/SPBE/TIK lainnya.
	6	Rasio anggaran pengembangan TIK terhadap APBD	Meningkatnya anggaran untuk belanja bidang TIK terhadap total APBD. (Total APBD sudah ada pada isian program 1 ekosistem inovasi)
	7	Pembangunan fisik	Meningkatnya pembangunan infrastruktur fisik smart city, SPBE, dan TIK lainnya.
KKI 2 Kelembagaan dan daya dukung IPTEK dan inovasi			
Kelembagaan Iptekin- Litbangjirap	8	Kelembagaan Iptekin- litbangjirap yg terlibat dlm pengembangan TIK	Meningkatnya perguruan tinggi/ lembaga penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan (Litbangjirap), baik pemerintah maupun swasta yang terlibat dalam kegiatan /program TIK (smart city, SPBE, dan lainnya) kriteria kerjasama adalah dengan adanya MoU/Surat perjanjian kerjasama yang terkait dengan TIK.
	9	Jumlah lembaga/komunitas yang terlibat dalam pengembangan TIK	Meningkatnya komunitas yang terlibat dalam pengembangan TIK, kriteria kerjasama adalah dengan adanya MoU/Surat perjanjian kerjasama yang terkait dengan TIK.
KKI 3 Kolaborasi bagi inovasi dan difusi teknologi			
Kemitraan strategis dan kolaboratif untuk inovasi	10	Kolaborasi TIK antara Pengelola dengan perguruan tinggi, lembaga litbangjirap, Kementerian dan lembaga swasta lainnya	Meningkatnya kolaborasi TIK yang dilakukan oleh pengelola TIK dengan perguruan tinggi, lembaga litbangjirap, Kementerian dan lembaga swasta lainnya terkait pengembangan TIK. Jika belum terbentuk pengelola TIK maka diisi kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Kominfo atau lainnya.
KKI 4 Budaya inovasi			
Penguatan Budaya Inovasi Melalui Jalur Diklat Inovasi	11	Pengembangan SDM di bidang TIK	Terlaksananya Program pengembangan SDM pengelola TIK, termasuk training

Elemen KKI	No.	Indikator Elemen KKI	Kondisi yang Akan Dicapai
			SDM di bidang TIK pada OPD Kominfo dan lainnya.
KKI 5 Koherensi kebijakan Pusat dan Daerah			
Koordinasi kebijakan daerah dan nasional	12	Koordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat	Terlaksananya amanah peraturan yang diadopsi /dijadikan acuan oleh Pemerintah daerah dalam pengembangan TIK (Smartcity, SPBE, dan lainnya).
KKI 6 Penyelarasan dengan perkembangan global			
Standar	13	Jumlah produk yang digunakan sesuai dengan standar	Meningkatnya Penggunaan produk TIK sesuai dengan standar internasional (contoh memakai aplikasi software ori, menggunakan kabel tanam berbahan yang tidak berbahaya bagi lingkungan).

5.5 Langkah-Langkah Pencapaian Target Kinerja SIDA

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian target indikator SIDA melalui Forum Inovasi Daerah dan Jejaring Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

1. Forum Inovasi Daerah

Dalam rangka mendukung target kinerja SIDA yang akan dicapai dalam rangka pengembangan dan penguatan SIDA di Provinsi Kepulauan Riau diperlukan sebuah Forum Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Forum ini terdiri dari perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau/sektor-sektor yang berpengaruh terhadap keberhasilan tema dan sub tema dalam pengembangan dan penguatan SIDA Provinsi Kepulauan Riau terlihat pada Tabel berikut.

Tabel V. 4
Forum Inovasi Daerah Pengembangan dan Penguatan SIDA Provinsi Kepulauan Riau

Sub Tema	Sektor-Sektor Terkait		
	Utama	Pendukung	Penunjang
Potensi Unggulan Perikanan, Kelautan dan Pertanian.	1. Dinas Kelautan dan Perikanan; 2. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan.	1. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah; 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 3. Dinas Penanaman Modal dan PTSP; 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil; 5. Dinas Pendidikan; 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 7. Dinas Pariwisata;	1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; 2. Dinas Komunikasi dan Informasi; 3. Dinas Lingkungan Hidup; 4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 6. Dinas Perhubungan; 7. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;

Sub Tema	Sektor-Sektor Terkait		
	Utama	Pendukung	Penunjang
		8. Dinas Kebudayaan; 9. Dinas Sosial.	8. Perguruan Tinggi.
Pengembangan Industri dan Pariwisata.	1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 2. Dinas Pariwisata; 3. Dinas Kebudayaan.	1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP; 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 3. Dinas Perhubungan; 4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; 5. Dinas Kelautan dan Perikanan; 6. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah; 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil; 8. Dinas Sosial; 9. Dinas Pendidikan.	1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; 2. Dinas Komunikasi dan Informasi; 3. Dinas Lingkungan Hidup; 4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; 5. Perguruan Tinggi.
Faktor Pendukung berupa Infrastruktur dan Pendidikan/Kualitas SDM.	1. Dinas Perhubungan; 2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	1. Dinas Pendidikan; 2. Dinas Kelautan dan Perikanan; 3. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan; 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 5. Dinas Pariwisata; 6. Dinas Kebudayaan; 7. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah; 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil; 9. Dinas Sosial.	1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; 2. Dinas Komunikasi dan Informasi; 3. Dinas Lingkungan Hidup; 4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 6. Dinas Penanaman Modal dan PTSP; 7. Perguruan Tinggi.

2. Jejaring Inovasi Daerah

Selain Forum Inovasi Daerah diperlukan pengembangan Jejaring Inovasi Daerah bagi peningkatan SIDA Provinsi Kepri dalam pencapaian kondisi umum SIDA berdasarkan Kerangka Kerja Inovasi (KKI) yang meliputi Enam Pilar Pemangku Kepentingan pengembangan dan penguatan SIDA Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut :

Tabel V. 5
Jejaring Inovasi Daerah Pengembangan dan Penguatan SIDA Provinsi Kepulauan Riau

No.	Pemangku Kepentingan SIDA	Institusi
1	Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Barenlitbang Provinsi Kepri (koordinator pengembangan SIDA; Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) sebagai koordinator dalam Sinovik); Bappeda Kabupaten/Kota.
2	Universitas/Akademisi/ Politeknik	Universitas Maritim Raja Alihaji; Politeknik Negeri Batam; Universtas Putera Batam; Universitas Batam; Universitas Riau Kepulauan dan 30 perguruan tinggi lainnya yang memiliki LPPM dan pusat kajian/ penelitian)
3	Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Non Pemerintah Lainnya	Dewan Riset Daerah (DRD); Lembaga Adat Melayu (LAM); Paguyuban Seni dan Budaya Melayu; Kadinda; PHRI; FEDEP Provinsi Kepri; Kelompok UMKM Kepri; dan FEDEP Kabupaten/Kota
4	Dunia Usaha/Dunia Industri	PT. Pertamina (Persero); PT Angkasa Pura; kalangan perbankan; Pos dan Giro; Perum Pegadaian dan perusahaan swasta
5	Komunitas Kreatif di Provinsi Kepri dan sekitarnya	Kelompok Ilmiah Remaja (KIR); Komunitas Kreatif Pengembangan Wisata Kepri; Pengususah Kuliner dan Ekonomi Kreatif
6	Media Massa (termasuk media massa <i>online</i>)	Kantor Berita Antara; RRI dan TVRI; Radio Swasta Niaga; Radar Kepri; Perwakilan TV Swasta (koresponden) dan media on line (Kompas.com; Detik.com; Youtube)

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pengembangan dan penguatan SIDA Provinsi Kepulauan Riau adalah: Strategi Penguatan SIDA merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi penguatan SIDA Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan mempertimbangkan Kerangka Kebijakan Inovasi SIDA. Strategi yang dikembangkan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran penguatan SIDA di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:

1. Penguatan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi;
2. Penguatan kelembagaan dan daya dukung IPTEK dan inovasi;
3. Mewujudkan kolaborasi bagi inovasi dan difusi teknologi;
4. Mewujudkan budaya inovasi;
5. Mewujudkan koherensi kebijakan pusat dan daerah;
6. Mewujudkan penyelarasan dengan perkembangan global.

Arah kebijakan ini merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran penguatan SIDA. Penyusunan arah kebijakan menyesuaikan dengan sasaran penguatan SIDA yang memuat kerangka kebijakan inovasi dan strategi yang terkait.

Strategi	Arah Kebijakan
1. Penguatan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi	1) Membangun basis data inovasi dan bisnis
	2) Menyusun regulasi yang kondusif bagi inovasi dan bisnis
	3) Membangun kelengkapan infrastruktur dasar inovasi
	4) Menjamin kemudahan berbisnis dan investasi
	5) Menjamin kemudahan penggunaan fasilitas Technopark
2. Penguatan kelembagaan dan daya dukung IPTEK dan inovasi	1) Memperluas jejaring kelembagaan Iptekin-Litbangjirap
	2) Menjamin prakarsa daya dukung Iptekin
	3) Menjamin prakarsa daya absorpsi/serap Pengguna terhadap Iptekin / Litbangjirap
3. Mewujudkan kolaborasi bagi inovasi dan difusi teknologi	1) Membangun prosedur kemitraan strategis dan kolaboratif untuk inovasi
	2) Membangun wahana interaksi pelaku bisnis
	3) Membangun system difusi inovasi
4. Mewujudkan budaya inovasi	1) Menumbuhkan prakarsa budaya inovasi melalui jalur pendidikan dan pelatihan inovasi
	2) Membangun mekanisme apresiasi dan kampanye inovasi
	3) Pengembangan penumbuhan usaha baru inovatif
	1) Meningkatkan koordinasi kebijakan daerah, dan daerah-nasional

Strategi	Arah Kebijakan
5. Mewujudkan koherensi kebijakan pusat dan daerah	2) Menjamin prakarsa pengembangan klaster industri unggulan daerah
6. Mewujudkan penyelarasan dengan perkembangan global	1) Menyempurnakan standar pelayanan umum dan bisnis investasi
	2) Menjamin kekayaan Intelektual
	3) Menumbuhkan inovasi berbasis lingkungan

BAB VII

FOKUS DAN PROGRAM PRIORITAS

Fokus dan program prioritas pengembangan dan penguatan SIDA Provinsi Kepulauan Riau dengan memperhatikan faktor-faktor strategis yang merupakan kebutuhan perangkat daerah dalam rangka pengembangan dan penguatan SIDA guna kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau disesuaikan dengan arah kebijakan pengembangan dan penguatan SIDA Provinsi Kepulauan Riau pada peningkatan produktivitas, investasi dan peyerapan tenaga kerja sektor perikanan, pariwisata, perdagangan dan jasa, sebagai berikut:

Fokus Penguatan Sistem Inovasi Daerah adalah kebijakan umum yang merupakan sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai kegiatan yang paling efektif dalam mencapai sasaran. Program prioritas dirumuskan dengan memperhitungkan elemen dalam pencapaian penguatan SIDA. Selain itu, program prioritas bermanfaat untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dari berbagai pemangku kepentingan terkait untuk bersama-sama mencapai tujuan atau juga melakukan mekanisme monitoring terhadap kinerja. Fokus dan program prioritas dihasilkan dengan mengacu kepada strategi dan arah kebijakan yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada tahapan selanjutnya, fokus dan program prioritas dalam rangka Penguatan SIDA akan diimplementasikan dan dioperasionalkan dalam bentuk program/kegiatan pembangunan daerah.

Dalam RPJMD, perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran. Perumusan prioritas program pembangunan daerah merupakan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program unggulan yang secara khusus berhubungan dengan visi dan misi pembangunan Kepala Daerah. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, pemerintah daerah menetapkan beberapa program unggulan yang menjadi prioritas pembiayaan yang wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Penetapan program pembangunan disesuaikan dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Penyusunan program prioritas yang direncanakan dan akan dilaksanakan dalam rangka penguatan SIDA agar implementatif dan operasional harus selaras dan sinkron dengan program-program pembangunan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Sehubungan dengan hal ini, maka penyusunan program yang direncanakan dan akan dilaksanakan dalam rangka Penguatan SIDA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 harus selaras dan sinkron dengan program-program pembangunan daerah yang ada dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Tabel VII. 1
Fokus dan Program Prioritas menurut Strategi dan Arah Kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Strategi	Arah Kebijakan	Fokus	Program Prioritas
1. Penguatan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi	1) Membangun basis data inovasi dan bisnis	Ketersediaan basis data inovasi dan bisnis.	Penyediaan data terkait gambaran potensi wilayah dalam pengembangan inovasi dalam mendukung investasi dan bisnis
			Penyediaan data terkait pengembangan kluster.
			Penyediaan data terkait dengan keberadaan lembaga dan kegiatan Lembaga iptekin-litbangjirap.
			Penyediaan data terkait teknopreneur dan/atau UMKM inovatif.
			Penyediaan data terkait pengembangan TIK.
		Penerapan Satu Data Daerah	Penyelenggaraan pengelolaan dan keaktifan sistem satu data daerah
	2) Menyusun regulasi yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Integrasi website daerah dengan website tiap OPD.	Integrasi website daerah dengan website tiap OPD.
		Ketersediaan website tentang fasilitas/wahana jaringan inovasi	Penyediaan website fasilitas/wahana jaringan.
		Dokumen Sistem Inovasi Daerah	Penyusunan dokumen penguatan SIDa.
		Regulasi insentif bisnis (SK/perda/perwal/perbup insentif)	Pemberian kemudahan dan insentif fiskal maupun nonfiskal dalam pengajuan perijinan dan investasi.
		Pengembangan PUD (Produk Unggulan Daerah)	Pengembangan Produk Unggulan Daerah.
		Dokumen perencanaan dan legalitas pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi	Penyusunan dokumen perencanaan dan pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi.
			Pembentukan SK/Perbup/Perwal tentang legalitas kelembagaan fasilitas/wahana jaringan inovasi.
		Regulasi dan legalitas Lembaga pengembangan teknopreneur/UMKM Inovatif	Pembentukan regulasi dan legalitas terkait pengembangan teknopreneur/UMKM Inovatif.
		Regulasi atau landasan legal bagi pengembangan TIK	Pembentukan Landasan hukum terkait pengembangan TIK seperti program smart city, SPBE, dan lainnya.
		Masterplan pengembangan TIK	Penyusunan Masterplan pengembangan TIK (Masterplan smart city, SPBE, dan lainnya).

Strategi	Arah Kebijakan	Fokus	Program Prioritas
	3) Membangun kelengkapan infrastruktur dasar inovasi	Keberadaan ruang kreatif	Penyediaan ruang kreatif.
		Kelembagaan penguatan SIDA (Tim Koordinasi PSIDA)	Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan SIDA
		Anggaran Litbangjirap/Iptekin terhadap anggaran belanja daerah (APBD)	Penyediaan anggaran yang dikeluarkan untuk pembiayaan program penelitian dan pengembangan.
		Keberadaan sarana informasi daring unggulan daerah	Pelaksanaan penggunaan sistem IT dalam pembentukan klaster.
		Keberadaan Pokja pelaku klaster	Pembentukan Pokja pelaku klaster terdiri dari 3 bentuk kelembagaan klaster yaitu SKPD, BUMN, Koperasi atau badan usaha atau perorangan yang mengatur pengelolaan klaster.
		Kenaikan omset klaster tiap tahun	Peningkatan omset klaster telah berkembang/terbentuk.
		Kualitas SDM pengelola fasilitas/wahana jaringan inovasi dengan tingkat pendidikan min S1	Penyediaan SDM pengelola wahana.
		Anggaran pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi	Pembentukan UPTD/lembaga technopark/pusat inovasi.
		Pembangunan sarana/prasarana	Penyediaan anggaran pengembangan wahana jejaring/kawasan technopark/pusat inovasi.
		Jenis Penyelenggaraan Layanan Fasilitas/Wahana jaringan inovasi	Pembangunan gedung dan sapras UPTD/lembaga technopark/pusat inovas.
		Keberadaan SOP penggunaan fasilitas	Penyelenggaraan layanan di wahana jejaring/kawasan technopark/pusat inovasi.
		Ketersediaan inkubator bisnis dan kepemilikannya	Penyusunan standar opsional penggunaan fasilitas di wahana jejaring/kawasan technopark/pusat inovasi.
		Sarana dan prasarana inkubator	Penyediaan inkubator bisnis.
		Standar penyelenggaraan inkubator sebagai fasilitas penumbuhkembangkan teknopreneur	Penyediaan fasilitas-fasilitas dasar pada inkubator bisnis dalam menunjang layanan ke tenant inkubasi.
		Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk pengembangan teknopreneur	Penyusunan standar penyelenggaraan inkubasi bisnis yaitu prainkubasi (menjaring calon wirausaha), inkubasi (kontrak pendampingan tenant), dan pasca inkubasi (jejaring alumni).
			Penyediaan anggaran pengembangan teknopreneur atau kewirausahaan.

Strategi	Arah Kebijakan	Fokus	Program Prioritas
2. Penguatan kelembagaan dan daya dukung IPTEK dan inovasi	4) Menjamin kemudahan berbisnis dan investasi	Kelembagaan pengelola pengembangan TIK	Pembentukan lembaga pengelola pengembangan TIK.
		Anggaran pengembangan TIK terhadap APBD	Penyediaan anggaran bidang TIK.
		Pembangunan fisik	Penyediaan dan pembangunan infrastruktur fisik smart city, SPBE, dan TIK lainnya.
		Waktu pelayanan perijinan	Penyusunan dan Pengembangan SP, SOP dan Maklumat Pelayanan dalam Pelayanan Perijinan.
		Proses/teknis dalam pelayanan terkait bisnis dan investasi	Penyediaan sarana kemudahan untuk berbisnis dan berinvestasi bagi masyarakat.
	5) Menjamin kemudahan penggunaan fasilitas Technopark	Besarnya penyaluran insentif / kemudahan pengembangan teknopreneur dan atau UMKM inovatif	Pemberian insentif fisik (dana dan/atau alat) bagi UMKM inovatif.
		Keberadaan SOP penggunaan fasilitas	Penyusunan Standar operasional penggunaan fasilitas di wahana jejaring/kawasan technopark/pusat inovasi.
		Keberadaan Perguruan tinggi	Koordinasi penyediaan perguruan tinggi di daerah
		Keberadaan lembaga litbangjirap diluar perguruan tinggi	Pembentukan dan pengembangan Lembaga Litbangjirap di daerah selain Perguruan tinggi
			Peningkatan partisipasi perguruan tinggi/lembaga litbangjirap baik pemerintah maupun swasta dalam pengembangan kluster industri.
	1) Memperluas jejaring kelembagaan Iptekin-Litbangjirap	Keberadaan komunitas/asosiasi bisnis/lembaga lain dalam pengembangan kluster industri daerah	Pengembangan komunitas/ asosiasi bisnis kluster industri yang dihitung mengikuti KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 5 digit.
			Peningkatan Kerjasama dan partisipasi komunitas dalam pengembangan kawasan technopark/pusat inovasi.
		Penyediaan SMK	Penyediaan SMK yang memiliki jurusan dalam pengembangan produk unggulan daerah.
		Keberadaan perguruan tinggi, lembaga litbangjirap dan Sekolah yang terlibat dalam pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi	Peningkatan Kerjasama dan partisipasi perguruan tinggi/lembaga litbangjirap dalam kegiatan technopark/pusat inovasi/Kawasan lain.
		Kelembagaan Iptekin-litbangjirap yg terlibat dlm pengembangan TIK	Peningkatan kerjasama dan partisipasi perguruan tinggi/ lembaga penelitian pengembangan pengkajian

Strategi	Arah Kebijakan	Fokus	Program Prioritas
	2) Menjamin prakarsa daya dukung Iptekin		dan penerapan (Litbangjirap) dalam kegiatan /program TIK (smart city, SPBE, dan lainnya).
		Lembaga/komunitas yang terlibat dalam pengembangan TIK	Peningkatan kerjasama dan partisipasi komunitas dalam pengembangan TIK.
		Penyediaan jabatan fungsional iptekin	Penyediaan jabatan fungsional iptekin
		Meningkatkan kualitas perguruan tinggi di daerah	Peningkatan kualitas PT didasarkan dari klaster perguruan tinggi.
		Kualitas angkatan kerja yang berpendidikan tinggi	Peningkatan angkatan kerja yang berpendidikan tinggi
		Kualitas SDM pokja klaster dengan tingkat pendidikan minimal S1	Peningkatan kualitas SDM pokja klaster yang memiliki tingkat pendidikan minimal S1.
		Meningkatkan rasio guru menengah atas (SMA/SMK) terhadap siswa	Peningkatan rasio guru menengah atas (SMA/SMK) terhadap siswa
		Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Penyusunan Kajian Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
		Pengembangan SDM Pengelola fasilitas/wahana jaringan inovasi	Pelaksanaan program pengembangan SDM pengelola.
		Sebaran Lembaga Litbangjirap yg berkontribusi dalam pengembangan teknopreneur dan/atau UMKM Inovatif daerah	Peningkatan Kerjasama dan partisipasi lembaga litbangjirap/komunitas dalam pengembangan dan pembinaan teknopreneur dan/atau UMKM inovatif.
	3) Menjamin prakarsa daya absorpsi/serap Pengguna terhadap Iptekin / Litbangjirap	Pemanfaatan hasil penelitian perguruan tinggi, lembaga litbangjirap, dan komunitas dalam fasilitas/wahana jaringan inovasi dalam rangka pengembangan fasilitas/wahana tersebut	Peningkatan Kerjasama antara perguruan tinggi/lembaga litbangjirap/komunitas dengan technopark/pusat inovasi/Kawasan lain dalam pengembangan dan pendampingan mitra pengguna dan/atau Komunitas/wirausaha.
		Tingkat absorpsi UMKM terhadap hasil litbangjirap pengembangan teknopreneur dan/ atau UMKM inovatif	Peningkatan UMKM inovatif dalam pemanfaatan teknologi dari perguruan tinggi dan/atau lembaga litbangjirap sebagai nilai tambah proses produksi atau hasil akhir produk yang dipasarkan.
3. Mewujudkan kolaborasi bagi inovasi dan difusi teknologi	1) Membangun prosedur kemitraan strategis dan kolaboratif untuk inovasi	Meningkatkan kerjasama dalam peningkatan ekonomi daerah.	Peningkatan kerjasama daerah dalam pengembangan inovasi dan ekonomi daerah.
		Meningkatkan kerjasama antara klaster industri dengan lembaga	Peningkatan kerjasama antara pengelola klaster dengan lembaga lainnya dalam upaya pengembangan klaster industri.

Strategi	Arah Kebijakan	Fokus	Program Prioritas
		lainnya (perguruan tinggi, perbankan, lembaga litbangjirap, dan lainnya)	
		Kerjasama pengembangan fasilitas/ wahana jaringan inovasi	Peningkatan kerjasama antar aktor jejaring dalam pengembangan fasilitas/ wahana jaringan inovasi.
		Sebaran kemitraan strategis teknopreneur dan/ atau UMKM inovatif	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pengajar dari wilayah lain untuk kegiatan seperti: (1) peningkatan jumlah teknopreneur daerah, (2) kerjasama inkubasi bisnis dengan wilayah lain atau nasional, atau (3) pelatihan teknopreneur.
		Interaksi komersialisasi teknologi antara penghasil teknologi/lembaga keuangan/lembaga lainnya dengan teknopreneur dan/atau UMKM inovatif	Peningkatan kerjasama antara para penghasil teknologi/lembaga keuangan/lembaga lainnya dengan teknopreneur dan/atau UMKM inovatif dalam kegiatan hilirisasi hasil teknologi hingga dijual di pasaran.
		Kolaborasi TIK antara Pengelola dengan perguruan tinggi, lembaga litbangjirap, Kementerian dan lembaga swasta lainnya	Peningkatan kolaborasi pengembangan TIK antara pengelola TIK dengan perguruan tinggi, lembaga litbangjirap, Kementerian dan lembaga swasta lainnya.
	2) Membangun wahana interaksi pelaku bisnis	Pelaksanaan kegiatan sarana interaksi antar para pelaku bisnis di klaster industri daerah dalam setahun	Penyelenggaraan kegiatan sarana interaksi antar para pelaku bisnis di klaster industri daerah (pameran dagang, arena apresiasi inovasi IKM).
4. Mewujudkan budaya inovasi	3) Membangun system difusi inovasi	Sebaran difusi inovasi jaringan inovasi	Peningkatan penerapan inovasi (produk baru yang sudah dihasilkan).
	1) Menumbuhkan prakarsa budaya inovasi melalui jalur pendidikan dan pelatihan inovasi	Pelaksanaan muatan pelajaran kewirausahaan	Penyelenggaraan kurikulum wirausaha dalam jenjang sekolah menengah atas dan kejuruan
		Pelaksanaan program pelatihan dan pendampingan (pengembangan kualitas SDM)	Penyelenggaraan program pelatihan dan pendampingan bagi aparat (OPD) dalam pengembangan inovasi.
			Penyelenggaraan program pelatihan dan pendampingan pengembangan kelompok usaha dalam rangka pengembangan kualitas SDM.
		Pelaksanaan pertemuan pokja klaster	Penyelenggaraan kegiatan atau pertemuan pokja klaster.
		Budaya berjejaring antar aktor inovasi	Penyelenggaraan program pelatihan bagi komunitas/masyarakat oleh wahana jaringan inovasi.
		Wirausaha / UMKM inovatif	Peningkatan wirausaha / UMKM inovatif.

Strategi	Arah Kebijakan	Fokus	Program Prioritas
	2) Membangun mekanisme apresiasi dan kampanye inovasi 3) Pengembangan penumbuhan usaha baru inovatif	Pelaksanaan program peningkatan iklim kewirausahaan	Penyelenggaraan program-program pendukung technopreneurship (techno camp, talent scouting, dan/atau kegiatan lain sejenis) dalam memotivasi dan menjaring calon wirausaha muda.
		Pengembangan SDM di bidang TIK	Penyelenggaraan program pengembangan SDM pengelola TIK, termasuk training SDM di bidang TIK pada OPD Kominfo dan lainnya.
		Pelaksanaan kampanye inovasi	Penyelenggaraan kampanye inovasi.
		Pemberian apresiasi inovasi	Pemberian apresiasi inovasi dalam rangka peningkatan inovasi daerah seperti Anugerah Iptek dan Inovasi Nasional.
		Keberadaan klaster industri	Pengembangan klaster industri dengan jenis klaster dilihat berdasarkan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 2 digit.
		Jumlah wirausaha baru yang mendapat pembinaan di fasilitas/wahana jaringan inovasi	Peningkatan penyelenggaraan pembinaan dan kemudahan pelayanan teknis dan inkubasi dalam fasilitas kawasan technopark/pusat inovasi/kawasan dengan fungsi serupa bagi wirausaha baru/pengusaha/start up.
5. Mewujudkan koherensi kebijakan pusat dan daerah	1) Meningkatkan koordinasi kebijakan daerah, dan daerah-nasional	Kesesuaian kebijakan antar pusat daerah tentang implementasi sistem inovasi daerah	Penguatan implementasi sistem inovasi daerah.
			Pelaksanaan pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi.
			Pelaksanaan pengembangan teknopreneur.
			Pelaksanaan pengembangan TIK (Smartcity, SPBE, dan lainnya).
	2) Menjamin prakarsa pengembangan klaster industri unggulan daerah	Koordinasi program klaster dengan pemerintah daerah dan pusat	Penyusunan dan pelaporan pelaksanaan rencana Pembangunan Industri provinsi dan rencana Pembangunan Industri kabupaten/Kota.
		Keberadaan usaha inovatif potensial untuk mendukung klaster industri unggulan daerah	Peningkatan UMKM inovatif dalam mendukung keberadaan klaster unggulan daerah.
6. Mewujudkan penyelarasan dengan perkembangan global	1) Menyempurnakan standar pelayanan umum dan bisnis investasi	Sertifikasi ISO 9001.	Pembetulan sertifikasi ISO 9001 yang diperoleh PTSP, puskesmas/rumahsakit, OPD/BLUD/BUMD lainnya.
		Pelaksanaan program standarisasi produk klaster.	Penyelenggaraan program standarisasi hasil produk dalam klaster industri.

Strategi	Arah Kebijakan	Fokus	Program Prioritas
		Positioning wahana jejaring inovasi dengan komunitas internasional.	Peningkatan keikutsertaan pengelola wahana jaringan inovasi (Technopark, Teknologi Transfer Office, dsb) dalam forum internasional khususnya terkait lingkungan.
		Peningkatan produk yang digunakan sesuai dengan standar.	Peningkatan penggunaan produk TIK sesuai dengan standar internasional.
	2) Menjamin kekayaan Intelektual	Aktivitas pelayanan HaKI yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah	Peningkatan fasilitas pelayanan HaKI.
		Pendaftaran kekayaan intelektual daerah (indikasi geografis)	Pelaksanaan pendaftaran 'indikasi geografis'.
		Kepemilikan kekayaan intelektual oleh para teknopreneur dan/atau UMKM inovatif daerah	Peningkatan partisipasi para teknopreneur dan/ atau UMKM inovatif dalam pendaftaran kekayaan intelektual ke Kemenkumham.
	3) Menumbuhkan inovasi berbasis lingkungan	Pelaksanaan program lingkungan bagi klaster industri daerah	Penyelenggaraan jenis-jenis program lingkungan oleh/untuk klaster industri.
		Penerapan label ramah lingkungan pada produk UMKM inovatif dalam 2018-2020	Penyelenggaraan penyuluhan/ pelatihan/ pendampingan bagi Teknopreneur/UMKM inovatif terkait standardisasi produk yang ramah lingkungan.

BAB VIII

RENCANA AKSI DAERAH

Rencana aksi daerah dalam rangka penguatan SIDA Provinsi Kepulauan Riau merupakan fokus dan program prioritas yang memperhatikan faktor-faktor strategis sebagai kebutuhan perangkat daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau melalui peningkatan produktivitas, investasi dan penyerapan tenaga kerja di sektor perikanan, pariwisata, perdagangan dan jasa. Tabel rencana aksi daerah pengembangan dan penguatan SIDA Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka penguatan SIDA Provinsi Kepulauan Riau merupakan program prioritas penguatan SIDA Provinsi Kepulauan Riau yang meruakan wujud implementasi strategi dan arah kebijakan penguatan SIDA Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan dimaksud akan memuat keenam kerangka kebijakan dalam penguatan SIDA. Sesuai dengan indikator yang disusun pada bagian sebelumnya, seluruh kegiatan-kegiatan dalam bagian ini merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026.

Kegiatan akan diimplementasikan dengan menekankan keterpaduan dan sinergitas antar pemangku kepentingan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau baik dari akademisi, bisnis (swasta), komunitas (masyarakat) dan pemerintah (government). Rencana Aksi Penguatan SIDA Provinsi Kepulauan Tahun 2016-2021 tercantum pada Tabel 6.1.

Tabel VIII. 1
Rencana Aksi Daerah Penguatan SIDA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Fokus	Program Prioritas	Target Pelaksanaan					Urusan Penanggungjawab
		2022	2023	2024	2025	2026	
1) Ketersediaan basis data inovasi dan bisnis.	Penyediaan data terkait gambaran potensi wilayah dalam pengembangan inovasi dalam mendukung investasi dan bisnis	●	●	●	●	●	Penanaman Modal
	Penyediaan data terkait pengembangan klaster.	●	●	●	●	●	1. Pertanian 2. Kelautan dan Perikanan 3. Pariwisata 4. Koperasi dan UKM 5. Perindustrian
	Penyediaan data terkait dengan keberadaan lembaga dan kegiatan Lembaga iptekin-litbangjirap.	●	●	●	●	●	Penelitian dan Pengembangan
	Penyediaan data terkait teknopreneur dan/atau UMKM inovatif.	●	●	●	●	●	Koperasi dan UKM
	Penyediaan data terkait pengembangan TIK.	●	●	●	●	●	Komunikasi dan Informatika
2) Penerapan Satu Data Daerah	Penyelenggaraan pengelolaan dan keaktifan sistem satu data daerah	●	●	●	●	●	1. Perencanaan 2. Komunikasi dan Informatika 3. Statistik
	Integrasi website daerah dengan website tiap OPD.	●	●	●			Komunikasi dan informatika
3) Ketersediaan website tentang fasilitas/wahana jaringan inovasi	Penyediaan website fasilitas/wahana jaringan.	●		●		●	Penelitian dan Pengembangan
4) Dokumen Sistem Inovasi Daerah	Penyusunan dan pelapora pelaksanaan penguatan SIDA.	●	●	●	●	●	Penelitian dan Pengembangan
5) Regulasi insentif bisnis (SK/perda/perwal/perbup insentif)	Pemberian kemudahan dan insentif fiskal maupun nonfiskal dalam pengajuan perijinan dan investasi.	●	●	●	●	●	Penanaman Modal
6) Pengembangan PUD (Produk Unggulan Daerah)	Pengembangan Produk Unggulan Daerah.	●	●	●	●	●	1. Koperasi dan UKM 2. Pariwisata

Fokus	Program Prioritas	Target Pelaksanaan					Urusan Penanggungjawab
		2022	2023	2024	2025	2026	
7) Dokumen perencanaan dan legalitas pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi	Penyusunan dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi.	●	●	●	●	●	Penelitian dan Pengembangan
	Pembentukan SK/Perbup/Perwal tentang legalitas kelembagaan fasilitas/wahana jaringan inovasi.	●	●				Penelitian dan Pengembangan
8) Regulasi dan legalitas Lembaga pengembangan teknopreneur/UMKM Inovatif	Pembentukan regulasi dan legalitas terkait pengembangan teknopreneur/UMKM Inovatif.	●	●				Koperasi dan UKM
9) Regulasi atau landasan legal bagi pengembangan TIK	Pembentukan Landasan hukum terkait pengembangan TIK seperti program smart city, SPBE, dan lainnya.	●	●				Komunikasi dan informatika
10) Masterplan pengembangan TIK	Penyusunan dan pelaporan pelaksanaan Masterplan pengembangan TIK (Masterplan smart city, SPBE, dan lainnya).	●	●	●	●	●	1. Perencanaan 2. Komunikasi dan Informatika
11) Keberadaan ruang kreatif	Penyediaan dan pengembangan ruang kreatif.	●	●	●	●	●	1. Koperasi dan UKM 2. Pariwisata
12) Kelembagaan penguatan SIDA (Tim Koordinasi PSIDa)	Pembentukan dan pelaporan kinerja Tim Koordinasi Penguatan SIDA	●	●	●	●	●	Penelitian dan Pengembangan
13) Anggaran Litbangjirap/Iptekin terhadap anggaran belanja daerah (APBD)	Penyediaan anggaran yang dikeluarkan untuk pembiayaan program penelitian dan pengembangan.	●	●	●	●	●	1. Perencanaan 2. Penelitian dan Pengembangan
14) Keberadaan sarana informasi daring unggulan daerah	Pelaksanaan penggunaan sistem IT dalam pembentukan kluster.	●	●	●	●	●	1. Perindustrian 2. Komunikasi dan Informatika
15) Keberadaan Pokja pelaku kluster	Pembentukan Pokja pelaku kluster terdiri dari 3 bentuk kelembagaan kluster yaitu SKPD, BUMN, Koperasi atau badan usaha atau perorangan yang mengatur pengelolaan kluster.	●	●	●			1. Perencanaan 2. Penelitian dan Pengembangan 3. Koperasi dan UKM
16) Kenaikan omset kluster tiap tahun	Peningkatan omset kluster telah berkembang/ terbentuk.	●	●	●	●	●	1. Pertanian 2. Kelautan dan Perikanan 3. Pariwisata

Fokus	Program Prioritas	Target Pelaksanaan					Urusan Penanggungjawab
		2022	2023	2024	2025	2026	
							4. Koperasi dan UKM 5. Perindustrian
17) Kualitas SDM pengelola fasilitas/wahana jaringan inovasi dengan tingkat pendidikan min S1	Penyediaan SDM pengelola wahana.	●	●	●			1. Perindustrian 2. Tenaga Kerja 3. Penelitian dan Pengembangan
	Pembentukan UPTD/lembaga technopark/pusat inovasi.	●	●	●			1. Perindustrian 2. Koperasi dan UKM 3. Tenaga Kerja 4. Penelitian dan Pengembangan
18) Anggaran pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi	Penyediaan anggaran pengembangan wahana jejaring/kawasan technoprak/pusat inovasi.	●	●	●	●	●	1. Perindustrian 2. Tenaga Kerja 3. Koperasi dan UKM 4. Penelitian dan Pengembangan 5. Perencanaan
19) Pembangunan sarana/prasarana	Pembangunan gedung dan sapras UPTD/lembaga technopark/pusat inovas.	●	●	●	●	●	1. Perindustrian 2. Koperasi dan UKM 3. Tenaga Kerja 4. Penelitian dan Pengembangan
20) Jenis Penyelenggaraan Layanan Fasilitas/Wahana jaringan inovasi	Penyelenggaraan layanan di wahana jejaring/kawasan technoprak/pusat inovasi.	●	●	●	●	●	1. Perindustrian 2. Koperasi dan UKM 3. Tenaga Kerja 4. Penelitian dan Pengembangan
21) Keberadaan SOP penggunaan fasilitas	Penyusunan standar operasional penggunaan fasilitas di wahana jejaring/kawasan technoprak/pusat inovasi.	●	●	●	●	●	1. Perindustrian 2. Koperasi dan UKM 3. Tenaga Kerja 4. Penelitian dan Pengembangan

Fokus	Program Prioritas	Target Pelaksanaan					Urusan Penanggungjawab
		2022	2023	2024	2025	2026	
22) Ketersediaan inkubator bisnis dan kepemilikannya	Penyediaan inkubator bisnis.	●	●	●	●	●	Perindustrian
23) Sarana dan prasarana inkubator	Penyediaan fasilitas-fasilitas dasar pada inkubator bisnis dalam menunjang layanan ke tenant inkubasi.	●	●	●	●	●	Perindustrian
24) Standar penyelenggaraan inkubator sebagai fasilitas penumbuhkembangkan teknopreneur	Penyusunan standar penyelenggaraan inkubasi bisnis yaitu pra inkubasi (menjaring calon wirausaha), inkubasi (kontrak pendampingan tenant), dan pasca inkubasi (jejaring alumni).	●	●	●	●	●	Perindustrian
25) Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk pengembangan teknopreneur	Penyediaan anggaran pengembangan teknopreneur atau kewirausahaan.	●	●	●	●	●	Koperasi dan UKM
26) Kelembagaan pengelola pengembangan TIK	Pembentukan dan pelaporan kinerja lembaga pengelola pengembangan TIK.	●	●	●	●	●	Komunikasi dan Informatika
27) Anggaran pengembangan TIK terhadap APBD	Penyediaan anggaran bidang TIK.	●	●	●	●	●	Komunikasi dan Informatika
28) Pembangunan fisik	Penyediaan dan pembangunan infrastruktur fisik smart city, SPBE, dan TIK lainnya.	●	●	●	●	●	1. Komunikasi dan Informatika 2. Penelitian dan Pengembangan
29) Waktu pelayanan perijinan	Penyusunan dan Pengembangan SP, SOP dan Maklumat Pelayanan dalam Pelayanan Perijinan.	●		●		●	Penanaman Modal
30) Proses/teknis dalam pelayanan terkait bisnis dan investasi	Penyediaan sarana kemudahan untuk berbisnis dan berinvestasi bagi masyarakat.	●	●	●	●	●	Penanaman Modal
31) Besarnya penyaluran insentif / kemudahan pengembangan teknopreneur dan atau UMKM inovatif	Pemberian insentif fisik (dana dan/atau alat) bagi UMKM inovatif.	●	●	●	●	●	1. Koperasi dan UKM 2. Biro Perekonomian
32) Keberadaan SOP penggunaan fasilitas	Penyusunan Standar operasional penggunaan fasilitas di wahana jejaring/kawasan technoprak/pusat inovasi.	●	●	●	●	●	Perindustrian

Fokus	Program Prioritas	Target Pelaksanaan					Urusan Penanggungjawab
		2022	2023	2024	2025	2026	
33) Keberadaan Perguruan tinggi	Koordinasi penyediaan perguruan tinggi di daerah	●	●	●	●	●	1. Pendidikan 2. Penelitian dan Pengembangan
34) Keberadaan lembaga litbangjirap diluar perguruan tinggi	Pembentukan dan pengembangan Lembaga Litbangjirap di daerah selain Perguruan tinggi	●	●				Penelitian dan Pengembangan
	Peningkatan partisipasi perguruan tinggi/lembaga litbangjirap baik pemerintah maupun swasta dalam pengembangan klaster industri.	●	●	●	●	●	Penelitian dan Pengembangan
35) Keberadaan komunitas/asosiasi bisnis/lembaga lain dalam pengembangan klaster industri daerah	Pengembangan komunitas/ asosiasi bisnis klaster industri yang dihitung mengikuti KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 5 digit.	●	●	●	●	●	1. Pertanian 2. Kelautan dan Perikanan 3. Pariwisata 4. Koperasi dan UKM 5. Perindustrian
	Peningkatan Kerjasama dan partisipasi komunitas dalam pengembangan kawasan technoprak/pusat inovasi.	●	●	●	●	●	1. Pertanian 2. Kelautan dan Perikanan 3. Pariwisata 4. Koperasi dan UKM 5. Perindustrian
36) Penyediaan SMK	Penyediaan SMK yang memiliki jurusan dalam pengembangan produk unggulan daerah.	●	●			●	1. Pendidikan 2. Penelitian dan Pengembangan
37) Keberadaan perguruan tinggi, lembaga litbangjirap dan Sekolah yang terlibat dalam pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi	Peningkatan Kerjasama dan partisipasi perguruan tinggi/lembaga litbangjirap dalam kegiatan technoprak/pusat inovasi/Kawasan lain.	●	●	●	●	●	1. Perindustrian 2. Koperasi dan UKM 3. Tenaga Kerja 4. Penelitian dan Pengembangan
38) Kelembagaan Iptekin-litbangjirap yg terlibat dlm pengembangan TIK	Peningkatan kerjasama dan partisipasi perguruan tinggi/ lembaga penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan (Litbangjirap) dalam kegiatan /program TIK (smart city, SPBE, dan lainnya).	●	●	●	●	●	1. Komunikasi dan Informatika 2. Penelitian dan Pengembangan

Fokus	Program Prioritas	Target Pelaksanaan					Urusan Penanggungjawab
		2022	2023	2024	2025	2026	
39) Lembaga/komunitas yang terlibat dalam pengembangan TIK	Peningkatan kerjasama dan partisipasi komunitas dalam pengembangan TIK.	●	●	●	●	●	1. Komunikasi dan Informatika 2. Penelitian dan Pengembangan
40) Penyediaan jabatan fungsional iptekin	Penyediaan jabatan fungsional iptekin	●	●	●	●	●	1. Kepegawaian 2. Penelitian dan Pengembangan
41) Meningkatkan kualitas perguruan tinggi di daerah	Peningkatan kualitas PT didasarkan dari klaster perguruan tinggi.	●	●	●	●	●	1. Pendidikan 2. Penelitian dan Pengembangan
42) Kualitas angkatan kerja yang berpendidikan tinggi	Peningkatan angkatan kerja yang berpendidikan tinggi	●	●	●	●	●	1. Pendidikan 2. Tenaga Kerja
43) Kualitas SDM pokja klaster dengan tingkat pendidikan minimal S1	Peningkatan kualitas SDM pokja klaster yang memiliki tingkat pendidikan minimal S1.	●	●	●			1. Perencanaan 2. Penelitian dan Pengembangan 3. Koperasi dan UKM
44) Meningkatkan rasio guru menengah atas (SMA/SMK) terhadap siswa	Peningkatan rasio guru menengah atas (SMA/SMK) terhadap siswa	●	●	●	●	●	Pendidikan
45) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Penyusunan Kajian Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).	●	●	●	●	●	1. Perencanaan 2. Penelitian dan Pengembangan
46) Pengembangan SDM Pengelola fasilitas/wahana jaringan inovasi	Pelaksanaan program pengembangan SDM pengelola technoprak/pusat inovasi/Kawasan lain.	●	●	●	●	●	1. Perindustrian 2. Koperasi dan UKM 3. Tenaga Kerja 4. Penelitian dan Pengembangan
47) Sebaran Lembaga Litbangjirap yg berkontribusi dalam pengembangan teknopreneur dan/atau UMKM Inovatif daerah	Peningkatan Kerjasama dan partisipasi lembaga litbangjirap/komunitas dalam pengembangan dan pembinaan teknopreneur dan/atau UMKM inovatif.	●	●	●	●	●	1. Koperasi dan UKM 2. Penelitian dan Pengembangan
48) Pemanfaatan hasil penelitian perguruan tinggi, lembaga libangjirap, dan komunitas dalam fasilitas/wahana jaringan inovasi dalam rangka	Peningkatan Kerjasama antara perguruan tinggi/lembaga litbangjirap/komunitas dengan technopark/pusat inovasi/Kawasan lain dalam pengembangan dan	●	●	●	●	●	1. Perindustrian 2. Koperasi dan UKM 3. Tenaga Kerja

Fokus	Program Prioritas	Target Pelaksanaan					Urusan Penanggungjawab
		2022	2023	2024	2025	2026	
pengembangan fasilitas/wahana tersebut	pendampingan mitra pengguna dan/atau Komunitas/wirausaha.						4. Penelitian dan Pengembangan
49) Tingkat absorpsi UMKM terhadap hasil litbangjirap pengembangan teknopreneur dan/ atau UMKM inovatif	Peningkatan UMKM inovatif dalam pemanfaatan teknologi dari perguruan tinggi dan/atau lembaga litbangjirap sebagai nilai tambah proses produksi atau hasil akhir produk yang dipasarkan.	●	●	●	●	●	1. Koperasi dan UKM 2. Penelitian dan Pengembangan
50) Meningkatkan kerjasama dalam peningkatan ekonomi daerah.	Peningkatan kerjasama daerah dalam pengembangan inovasi dan ekonomi daerah.	●	●	●	●	●	1. Perencanaan 2. Penelitian dan Pengembangan
51) Meningkatkan kerjasama antara klaster industri dengan lembaga lainnya (perguruan tinggi, perbankan, lembaga litbangjirap, dan lainnya)	Peningkatan kerjasama antara pengelola klaster dengan lembaga lainnya dalam upaya pengembangan klaster industri.	●	●	●	●	●	1. Pertanian 2. Kelautan dan Perikanan 3. Pariwisata 4. Koperasi dan UKM 5. Perindustrian
52) Kerjasama pengembangan fasilitas/ wahana jaringan inovasi	Peningkatan kerjasama antar aktor jejaring dalam pengembangan fasilitas/ wahana jaringan inovasi.	●	●	●	●	●	1. Perindustrian 2. Penelitian dan Pengembangan
53) Sebaran kemitraan strategis teknopreneur dan/ atau UMKM inovatif	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pengajar dari wilayah lain untuk kegiatan seperti: (1) peningkatan jumlah teknopreneur daerah, (2) kerjasama inkubasi bisnis dengan wilayah lain atau nasional, atau (3) pelatihan teknopreneur.	●	●	●	●	●	1. Perindustrian 2. Koperasi dan UKM 3. Tenaga Kerja 4. Penelitian dan Pengembangan
54) Interaksi komersialisasi teknologi antara penghasil teknologi/lembaga keuangan/lembaga lainnya dengan teknopreneur dan/atau UMKM inovatif	Peningkatan kerjasama antara para penghasil teknologi/lembaga keuangan/lembaga lainnya dengan teknopreneur dan/atau UMKM inovatif dalam kegiatan hilirisasi hasil teknologi hingga dijual di pasaran.	●	●	●	●	●	1. Perindustrian 2. Koperasi dan UKM 3. Tenaga Kerja 4. Penelitian dan Pengembangan
55) Kolaborasi TIK antara Pengelola dengan perguruan tinggi, lembaga litbangjirap, Kementerian dan lembaga swasta lainnya	Peningkatan kolaborasi pengembangan TIK antara pengelola TIK dengan perguruan tinggi,	●	●	●	●	●	1. Komunikasi dan Informatika 2. Penelitian dan Pengembangan

Fokus	Program Prioritas	Target Pelaksanaan					Urusan Penanggungjawab
		2022	2023	2024	2025	2026	
	lembaga litbangjirap, Kementerian dan lembaga swasta lainnya.						
56) Pelaksanaan kegiatan sarana interaksi antar para pelaku bisnis di klaster industri daerah dalam setahun	Penyelenggaraan kegiatan sarana interaksi antar para pelaku bisnis di klaster industri daerah (pameran dagang, arena apresiasi inovasi IKM).	●	●	●	●	●	1. Perdagangan 2. Perindustrian 3. Koperasi dan UKM 4. Tenaga Kerja 5. Penelitian dan Pengembangan
57) Sebaran difusi inovasi jaringan inovasi	Peningkatan penerapan inovasi (produk baru yang sudah dihasilkan).	●	●	●	●	●	Penelitian dan Pengembangan
58) Pelaksanaan muatan pelajaran kewirausahaan	Penyelenggaraan kurikulum wirausaha dalam jenjang sekolah menengah atas dan kejuruan	●	●	●	●	●	1. Pendidikan 2. Koperasi dan UKM 3. Penelitian dan Pengembangan
59) Pelaksanaan program pelatihan dan pendampingan (pengembangan kualitas SDM)	Penyelenggaraan program pelatihan dan pendampingan bagi aparat (OPD) dalam pengembangan inovasi.	●	●	●	●	●	Penelitian dan Pengembangan
	Penyelenggaraan program pelatihan dan pendampingan pengembangan kelompok usaha dalam rangka pengembangan kualitas SDM.	●	●	●	●	●	Koperasi dan UKM
60) Pelaksanaan pertemuan pokja klaster	Penyelenggaraan kegiatan atau pertemuan pokja klaster.	●	●	●	●	●	1. Perencanaan 2. Penelitian dan Pengembangan 3. Koperasi dan UKM
61) Budaya berjejaring antar aktor inovasi	Penyelenggaraan program pelatihan bagi komunitas/masyarakat oleh wahana jaringan inovasi.	●	●	●	●	●	1. Perindustrian 2. Penelitian dan Pengembangan
62) Wirausaha / UMKM inovatif	Peningkatan wirausaha / UMKM inovatif.	●	●	●	●	●	Koperasi dan UKM
63) Pelaksanaan program peningkatan iklim kewirausahaan	Penyelenggaraan program-program pendukung technopreneurship (techno camp, talent scouting, dan/atau kegiatan lain sejenis) dalam memotivasi dan menjaring calon wirausaha muda.	●	●	●	●	●	Perindustrian

Fokus	Program Prioritas	Target Pelaksanaan					Urusan Penanggungjawab
		2022	2023	2024	2025	2026	
64) Pengembangan SDM di bidang TIK	Penyelenggaraan program pengembangan SDM pengelola TIK, termasuk training SDM di bidang TIK pada OPD Kominfo dan lainnya.	●	●	●	●	●	Komunikasi dan Informatika
65) Pelaksanaan kampanye inovasi	Penyelenggaraan kampanye inovasi.	●	●	●	●	●	Penelitian dan Pengembangan
66) Pemberian apresiasi inovasi	Pemberian apresiasi inovasi dalam rangka peningkatan inovasi daerah seperti Anugerah Iptek dan Inovasi Nasional.	●	●	●	●	●	Penelitian dan Pengembangan
67) Keberadaan klaster industri	Pengembangan klaster industri dengan jenis klaster dilihat berdasarkan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 2 digit.	●	●	●	●	●	1. Pertanian 2. Kelautan dan Perikanan 3. Pariwisata 4. Koperasi dan UKM 5. Perindustrian
68) Jumlah wirausaha baru yang mendapat pembinaan di fasilitas/wahana jaringan inovasi	Peningkatan penyelenggaraan pembinaan dan kemudahan pelayanan teknis dan inkubasi dalam fasilitas kawasan technopark/pusat inovasi/kawasan dengan fungsi serupa bagi wirausaha baru/pengusaha/start up.	●	●	●	●	●	Perindustrian
69) Kesesuaian kebijakan antar pusat daerah tentang implementasi sistem inovasi daerah	Penguatan implementasi sistem inovasi daerah.	●	●	●	●	●	Penelitian dan Pengembangan
	Pelaksanaan pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi.	●	●	●	●	●	1. Perindustrian 2. Penelitian dan Pengembangan
	Pelaksanaan pengembangan teknopreneur.	●	●	●	●	●	1. Perindustrian 2. Penelitian dan Pengembangan
	Pelaksanaan pengembangan TIK (Smartcity, SPBE, dan lainnya).	●	●	●	●	●	1. Komunikasi dan Informatika 2. Penelitian dan Pengembangan
70) Koordinasi program klaster dengan pemerintah daerah dan pusat	Penyusunan dan pelaporan pelaksanaan rencana Pembangunan Industri provinsi dan rencana	●	●	●	●	●	Perindustrian

Fokus	Program Prioritas	Target Pelaksanaan					Urusan Penanggungjawab
		2022	2023	2024	2025	2026	
	Pembangunan Industri kabupaten/Kota.						
71) Keberadaan usaha inovatif potensial untuk mendukung kluster industri unggulan daerah	Peningkatan UMKM inovatif dalam mendukung keberadaan kluster unggulan daerah.	●	●	●	●	●	Koperasi dan UKM
72) Sertifikasi ISO 9001.	Pembetulan sertifikasi ISO 9001 yang diperoleh PTSP, puskesmas/rumahsakit, OPD/BLUD/BUMD lainnya.	●	●	●	●	●	Penelitian dan Pengembangan
73) Pelaksanaan program standarisasi produk kluster.	Penyelenggaraan program standarisasi hasil produk dalam kluster industri.	●	●	●	●	●	Perindustrian
74) Positioning wahana jejaring inovasi dengan komunitas internasional.	Peningkatan keikutsertaan pengelola wahana jaringan inovasi (Technopark, Teknologi Transfer Office, dsb) dalam forum internasional khususnya terkait lingkungan.	●	●	●	●	●	1. Perindustrian 2. Penelitian dan Pengembangan
75) Peningkatan produk yang digunakan sesuai dengan standar.	Peningkatan penggunaan produk TIK sesuai dengan standar internasional.	●	●	●	●	●	Komunikasi dan Informatika
76) Aktivitas pelayanan HaKI yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah	Peningkatan fasilitas pelayanan HaKI.	●	●	●	●	●	Penelitian dan Pengembangan
77) Pendaftaran kekayaan intelektual daerah (indikasi geografis)	Pelaksanaan pendaftaran 'indikasi geografis'.	●	●	●	●	●	Penelitian dan Pengembangan
78) Kepemilikan kekayaan intelektual oleh para teknopreneur dan/atau UMKM inovatif daerah	Peningkatan partisipasi para teknopreneur dan/atau UMKM inovatif dalam pendaftaran kekayaan intelektual ke Kemenkumham.	●	●	●	●	●	1. Koperasi dan UKM 2. Penelitian dan Pengembangan
79) Pelaksanaan program lingkungan bagi kluster industri daerah	Penyelenggaraan jenis-jenis program lingkungan oleh/untuk kluster industri.	●	●	●	●	●	Perindustrian
80) Penerapan label ramah lingkungan pada produk UMKM inovatif dalam 2018-2020	Penyelenggaraan penyuluhan/ pelatihan/ pendampingan bagi Teknopreneur/UMKM inovatif terkait standarisasi produk yang ramah lingkungan.	●	●	●	●	●	1. Koperasi dan UKM 2. Penelitian dan Pengembangan

BAB IX

SISTEM MONITORING DAN EVALUASI

9.1 Pengantar

Monitoring dan evaluasi merupakan satu kegiatan dalam rangka pengawasan dan penilaian terhadap proses dan hasil suatu program dan kegiatan. Monitoring dan evaluasi merupakan hal yang penting dalam menilai sebuah pencapaian untuk menjadi input terhadap proses berikutnya. Beberapa pengertian berkaitan dengan monitoring seperti yang disampaikan oleh Unesco adalah upaya yang dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi pelaksanaan dari berbagai komponen program sebagaimana telah direncanakan, waktu pelaksanaan program sebagaimana telah dijadwalkan, dan kemajuan dalam mencapai tujuan program. Monitoring adalah mekanisme yang sudah menyatu untuk memeriksa yang sudah untuk memeriksa bahwa semua berjalan untuk direncanakan dan memberi kesempatan agar penyesuaian dapat dilakukan secara metodologis (Oxfam 1995). Monitoring dilaksanakan dengan maksud agar program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan menyediakan umpan balik bagi pengelola proyek pada setiap tingkatan.

Evaluasi merupakan tindakan penilaian terhadap suatu untuk melihat satu pencapaian keberhasilan atas apa yang sudah dilakukan. Hasil penilaian ini dituangkan dalam sebuah catatan informasi untuk diketahui dan disampaikan sejauh mana kegiatan itu telah dicapai. Berdasarkan pengertian beberapa ahli, seperti yang disampaikan oleh Sudijono (1996) yang mengatakan bahwa pengertian evaluasi ialah penafsiran atau interpretasi bersumber pada data kuantitatif, sedangkan, data kuantitatif berasal dari hasil pengukuran. Suharsimi Arikunto (2004 : 1) evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Sistem monitoring dan evaluasi diperlukan dalam rangka mengetahui informasi kemajuan dan kualitas pelaksanaan program, mengidentifikasi masalah dan potensi masalah dalam pelaksanaannya, memberikan penilaian keberhasilan dari sisi keluaran, kegunaan, dan dampaknya. Monitoring dan evaluasi juga akan membantu dalam memutuskan apakah kebijakan dan program yang ada layak dilanjutkan, dikembangkan, atau dihentikan. Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi juga membantu mengidentifikasi masalah dan kesulitan dalam pelaksanaan program yang sudah direncanakan. Manfaat lain dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menunjukkan bukti bagaimana pemerintah mengelola sumber daya publik.

9.2 Fungsi Dan Tujuan

Monitoring memiliki fungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur dan perencanaan yang sudah ditetapkan. Monitoring akan memberikan informasi mengenai aktivitas penggunaan sumberdaya yang dilakukan sudah sesuai dengan besaran kegiatan. Dalam hal ini monitoring akan menunjukkan seberapa besar tingkat konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan namun masih dalam kondisi proses. Sementara itu evaluasi lebih pada penilaian yang jauh lebih besar dalam pengendalian tingkat ketercapaian tujuan. Hasil evaluasi berfungsi memberikan masukan terhadap kebijakan berikutnya berkaitan target pencapaian.

Secara umum tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi bertujuan untuk :

1. Mengkaji apakah program yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana
2. Mengidentifikasi berbagai permasalahan masalah yang timbul baik pada proses maupun setelah program dilakukan agar langsung dapat di atasi sebelum pelaksanaan program berikutnya.
3. Melakukan penilaian terhadap indikator perencanaan yang menjadi target dalam sebuah program, apakah sudah tepat dan sesuai untuk mencapai tujuan.
4. Mengetahui konsistensi kaitan antara program dengan tujuan yang sudah ditetapkan untuk memperoleh informasi seberapa besar ukuran kemajuan untuk pencapaian target.
5. Melakukan penyesuaian baik pada bentuk program maupun pada proses pencapaian target jika terjadi perubahan situasi maupun lingkungan tanpa menyimpang dari tujuan yang sudah ditetapkan.

9.3 Metode

Metode yang dapat digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi antara lain:

1. Survey, yaitu mengumpulkan informasi yang relevan dari responden yang diperoleh dari sampel yang representatif.
2. Metode Partisipatif, yaitu mendapatkan informasi dengan cara pelibatan secara intensif dan observasi langsung dalam kurun waktu tertentu.
3. Analisis Anggaran, yaitu menganalisis/membandingkan item-item pengeluaran program dengan rencana awal.
4. Kunjungan Lapangan (Spot Check/Rapid Appraisal), yaitu perolehan informasi secara cepat dari penerima program dan pemangku kepentingan lainnya.

9.4 Pelaksanaan

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan oleh Tim Koordinasi Penguatan SIDA Provinsi Kepulauan Riau sesuai tugasnya yang tertuang pada Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018, yaitu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.

Tim Koordinasi Penguatan SIDA dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi bekerjasama dengan Forum Inovasi Daerah dan Jejaring Inovasi Daerah yang menjadi pelaksana dari setiap program pengembangan dan penguatan SIDA. Tim Koordinasi Penguatan SIDA dapat memanfaatkan instrumen dan tools yang biasa digunakan dalam proses evaluasi program dan kegiatan reguler, mengingat Road Map Pengembangan dan Penguatan SIDA merupakan dokumen yang berisikan rencana program sesuai dengan masa kepemimpinan daerah. Unsur-unsur yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SIDA mengacu pada Peraturan bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, meliputi:

- 1) Kebijakan SIDA
- 2) Kelembagaan SIDA
- 3) Jaringan SIDA
- 4) Sumberdaya SIDA
- 5) Pengembangan SIDA

Sedangkan standar yang akan menjadi dasar evaluasi adalah sebagai berikut :

Tabel IX. 1
Keterkaitan Unsur Dalam Sida Dengan Standar yang Harus Dilakukan Dalam Pelaksanaan SIDA

Ruang Lingkup	Unsur	Penjelasan Atas Unsur	Jenis Unsur yang Ditetapkan	Standar yang Harus Dilakukan
Kebijakan penguatan SIDA	<ul style="list-style-type: none">Roadmap penguatan SIDARPJMDRKPD	Sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan SIDA	Kebijakan	Melakukan identifikasi dan inventarisasi kebijakan penguatan SIDA
				Melakukan analisis potensi sinergi kebijakan penguatan SIDA
				Memadukan kebijakan-kebijakan kota dengan provinsi dan pemerintah untuk penguatan SIDA

Ruang Lingkup	Unsur	Penjelasan Atas Unsur	Jenis Unsur yang Ditetapkan	Standar yang Harus Dilakukan
Penataan unsur SIDA	Kelembagaan SIDA	Lembaga/ Organisasi	Pemerintahan Daerah	Membentuk dinas/instansi yang menangani urusan penelitian dan pengembangan, serta meningkatkan kapasitas dan peran dinas/instansi yang menangani urusan penelitian dan pengembangan sebagai koordinator dalam penguatan SIDA
			Lembaga Kelitbangan	Meningkatkan kapasitas dan peran ilmu pengetahuan dan teknologi
			Lembaga Pendidikan	Meningkatkan kemampuan kelitbangan di lingkungan lembaga pendidikan sesuai kebutuhan daerah
			Lembaga penunjang inovasi	Mensinergikan program dan kegiatan semua lembaga yang dapat menunjang penguatan SIDA
			Dunia usaha	Memanfaatkan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis
				Meningkatkan kemitraan dengan lembaga/organisasi SIDA
			Organisasi kemasyarakatan di daerah	Memberdayakan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan dengan penguatan SIDA
		Peraturan	Ketentuan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA	Membuat peraturan baru merubah peraturan dan mencabut peraturan terkait SIDA
		Norma/etika/ budaya	Merupakan nilai-nilai profesionalisme dalam mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi	Mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai-nilai sosial bagi penguatan SIDA

Ruang Lingkup	Unsur	Penjelasan Atas Unsur	Jenis Unsur yang Ditetapkan	Standar yang Harus Dilakukan
	Jaringan SIDA	Jaringan SIDA merupakan interaksi antar lembaga/ organisasi dalam SIDA untuk mensinergikan kemampuan yang dimiliki masing-masing lembaga dalam satu rantai kegiatan	penguatan SIDA	
			Komunikasi intensif antara lembaga SIDA	Penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya
				Menjalin kerjasama kelitbangan antar lembaga/organisasi SIDA
				Forum komunikasi penelitian dan pengembangan daerah
			Mobilisasi sumber daya manusia	Kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antardaerah
				Kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antarkabupaten/kota dalam satu provinsi
				Kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antara lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan
			Optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi	Pemanfaatan HKI
				Pemanfaatan informasi SIDA
				Pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA
	Sumber daya SIDA.	<ul style="list-style-type: none"> • Kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan manusia dan pengorganisasiannya • Kekayaan intelektual dan informasi • Karana dan prasarana 	Meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA	Pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifik sumber daya SIDA
				Pengembangan kompetensi SDM dan pengorganisasiannya
				Pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir
				Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual
				Pemanfaatan data dan informasi

Ruang Lingkup	Unsur	Penjelasan Atas Unsur	Jenis Unsur yang Ditetapkan	Standar yang Harus Dilakukan
		ilmu pengetahuan dan teknologi		Pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi
Pengembangan SIDA	Pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah	Memperkuat komitmen	Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan alokasi sumberdaya	Sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya
	Pemetaan potensi dan analisis SIDA	Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran	Penyusunan Rencana aksi	Identifikasi dan pengumpulan data
				Pemetaan
				Analisis faktor kebijakan, unsur SIDA, program dan kegiatan
	Pemberlanjutan penguatan SIDA.	Konsolidasi Keberlanjutan	Hasil Evaluasi	Evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA

BAB X

P E N U T U P

Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi dalam penguatan sistem inovasi nasional yang diwadahi melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pada pasal 386 bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Dalam rangka mendukung penguatan SIDa di Provinsi Kepulauan Riau dibentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Forum Inovasi Daerah dan Jejaring Inovasi Daerah yang meliputi enam pilar pemangku kepentingan penguatan SIDa Provinsi Kepulauan Riau. Dimana kelembagaan SIDa ini berpengaruh terhadap keberhasilan tema dan sub tema dalam penguatan SIDa Provinsi Kepulauan Riau. Keberhasilan penguatan SIDa Provinsi Kepulauan Riau memerlukan dukungan penuh dan komitmen dari Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau.